



PEMERINTAH KABUPATEN
KONawe UTARA

LAPORAN KINERJA

*Kabupaten
Konawe Utara*
2025



Bagian Organisasi Setda Konut



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Utara – Wanggudu

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Wanggudu, 10 Februari 2026


INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA
AMRUN, SP., M.M
Pembina Tk.I, IV/b
Nip. 19690911 200804 1 002



KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan LAKIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 serta peraturan teknis terkait lainnya. Dokumen ini memuat gambaran capaian kinerja tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, termasuk analisis atas keberhasilan, kendala, serta langkah perbaikan yang diperlukan.

LAKIP disusun secara sistematis dan terukur sebagai instrumen evaluasi kinerja, peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Proses penyusunannya melibatkan koordinasi dan kontribusi aktif seluruh perangkat daerah.

Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada tahun-tahun mendatang.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan ini. Semoga upaya yang telah dilakukan memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dan kesejahteraan masyarakat.

Wanggudu, 3 Maret 2026

Bupati Konawe Utara



H. IKBAR, SH., MH



CAPAIAN INDIKATOR MAKRO TAHUN 2025

Laju pertumbuhan ekonomi



Target : 6,25
Capaian : 4,34
Realisasi : 69,44

PDRB per kapita



Target : 68.200
Capaian : 6.164,67
Realisasi : 90,39

Kontribusi PDRB Kabupaten/kota



Target : 3,72
Capaian : 4,34
Realisasi : 116,66

Tingkat Kemiskinan



Target : 13,72
Capaian : 11,89
Realisasi : 115,39

Tingkat Pengangguran Terbuka



Target : 2,21
Capaian : 3,99
Realisasi : 55,22

Rasio Gini



Target : 0,285
Capaian : 0,414
Realisasi : 68,84

Indeks Pembangunan Manusia



Target : 72,65
Capaian : 73,42
Realisasi : 101,05



Penurunan Intensitas Emisi GRK



Target : 32,88
Capaian : -
Realisasi : -

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup



Target : 62,72
Capaian : 63,09
Realisasi : 100,59

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,25	4,34	69,44
PDRP Per Kapita	68.200	6.164,67	90,39
Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota	3,72	4,34	116,66
Tingkat Kemiskinan	13,72	11,89	115,39
Tingkat Pengangguran Terbuka	2,21	3,99	55,22
Rasio Gini	0,285	0,414	68,84
Indeks Pembangunan Manusia	72,65	73,42	101,05
Penurunan Intensitas Emisi GRK	32,88	-	-
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	62,72	63,09	100,59

Sumber: Perda Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2025 (Halaman 6, 260)

<https://konutkab.bps.go.id/id/publication/2026/02/27/2163732a4c8d5af5400f8fb3/kabupaten-konawe-utara-dalam-angka-2026.html>

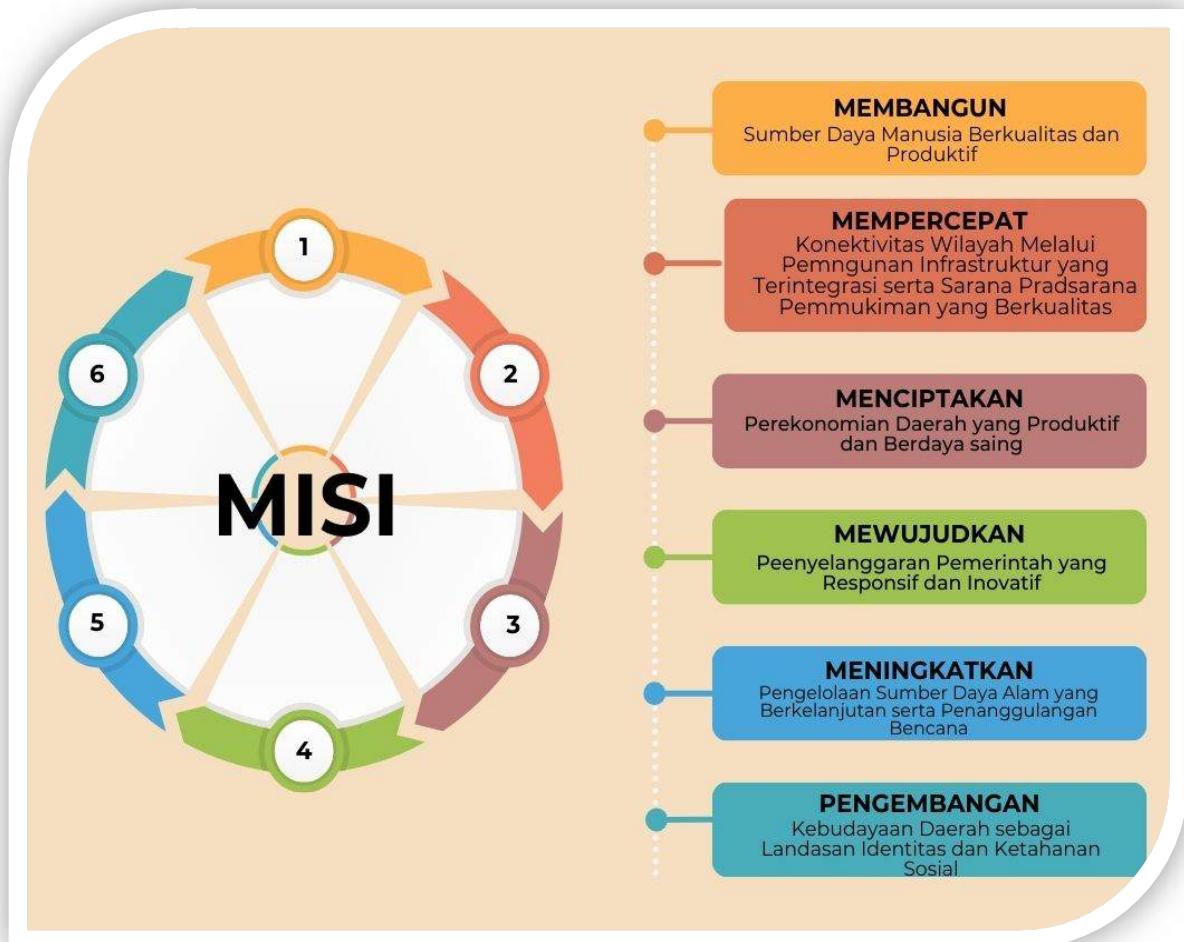


CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025

VISI

“KONAwE Utara sebagai rumah berSama yang semakin maju dan saJehateRA”

MISI





AGENDA

1. Focus Group Discussion [FGD] KONAWE UTARA DALAM ANGKA





2. EVENT HARMONI SULTRA 2025





3. WONUA OHEO CAMPING FESTIVAL 2025



4. Bupati Cup 1 Konawe Utara Road Race Championship 2025





5. Antam Fishing Tournament 2025



6. Proses Penyusunan RPJMD Konawe Utara Tahun 2025 - 2029





Kode	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja
Misi 1 : Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Produktif						
1.1	Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing		Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	3,23	3,28	101,55
			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,65	73,42	101,06
1.1.1		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	70,50	70,73	100,32
			Prevalensi Stunting	5	5,53	83,33
1.1.2		Menurunnya Angka Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	13,72	11,89	115,39
1.1.3		Meningkatnya Derajat Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,697	0,6	86,08
1.1.4		Meningkatnya Daya Saing dan Prestasi Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	56,98	56,23	98,68
1.1.5		Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,21	3,99	55,33
1.1.6		Terwujudnya Pembangunan Keluarga Berkualitas dan Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	61,75	61	98,79
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,51	0,515	99,02
Misi 2 Mempercepat Konektivitas Wilayah Melalui Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi Serta Sarana Prasarana Permukiman yang Berkualitas						
1.2	Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan		Indeks Konektivitas Wilayah	0,05	0,048	96
1.2.1		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Pembangunan	Indeks Infratruskstur Dasar	5,2	5,1	98,07
Misi 3 : Menciptakan Perekonomian Daerah yang Produktid dan Berdaya Saing						
1.3	Mewujudkan Transformasi Perekonomian Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatnya Daya Saing Produktivitas Ekonomi	Laju Perteumbuhan Ekonomi	6,25	4,34	69,44
			PDRP Perkapita	68.200	6.164,67	90,39
			Rasio Gini	0,285	0,414	68,84
			Rasio PDRB Industri Pengolahan	1,50	0,78	52,00
1.3.1		Terwujudnya Penerapan Ekonomi Biru Daerah	Indeks Ekonomi Biru Daerah	49,72	49,5	99,55
1.3.2		Terwujudnya Kemandirian Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	77	66,83	86,79
1.3.3		Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Perekonomuan Daerah	Rasio PDRB Pariwisata	8,75	8,6	98,28



Kode	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja
1.3.4		Terwujudnya Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Indeks Desa Membangun	0,6986	0,694	99,34
1.3.5		Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,05	0,04	80
			Inklusi Keuangan	2,13	2,09	98,12
1.3.6		Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Presentase Realisasi Investasi terhadap PDRB	23,14	22,92	99,04
Misi 4 : Mewujudkan Penyelenggaraaah Pemerintahan yang Responsif dan Inovatif						
4.1	Mempercepat Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegrasi dan Adaptif	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi yang Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi	68,95	68,5	99,35
			Indeks RB General	62,35	59,8	95,91
Misi 5 : Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan serta Penanggulangan Bencana						
5.1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup		Presentase Penurunan Emisi GRK (%)	32,88	-	-
5.1.1		Terwujudnya Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Resiko Bencana (IRB)	156,16	172,77	90,39
5.1.2		Terwujudnya Lingkunagn Hidup Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	62,72	63,09	100,59
Misi 6 : Pengembangan Kebudayaan Daerah sebagai Landasan Identitas dan Ketahanan Sosial						
6.1	Mewujudkan Masyarakat Berkebudayaan Maju	Terwujudnya Ketahanan Budaya Daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	53,37	52	97,43
			Indeks Ketahanan Budava Daerah	50	49	98,00

**REALISASI ANGGARAN DAN EFISIENSI****PAGU DAN REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN BELANJA 2025**

NO	TOTAL PAGU	TOTAL REALISASI	TINGKAT EFISIENSI ANGGARAN
1	1.440.958.578.600,00	1.315.030.185.065,00	91,26

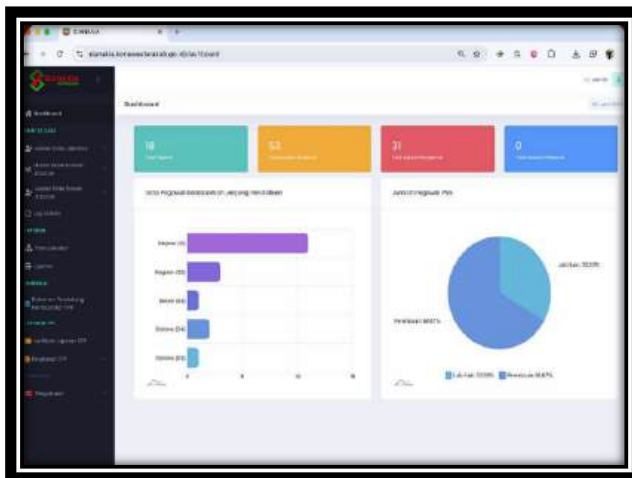
No	Belanja	Anggaran	Realisasi	
1	Belanja Operasional	941.949.800.321,16	854.974.833.063,00	90,76
2	Belanja Modal	270.512.082.102,84	250.750.903.884,00	92,69
3	Belanja Tak Terduga	20.000.000.000,00	4.301.764.472,00	21,50
4	Belanja Transfer	208.496.696.176,00	205.002.683.646,00	98,32



INOVASI UNGGULAN DAERAH TAHUN 2025

1. **SIANAKIA**

SIANAKIA KONASARA adalah inovasi digital Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel melalui analisis jabatan, beban kerja, dan evaluasi jabatan.

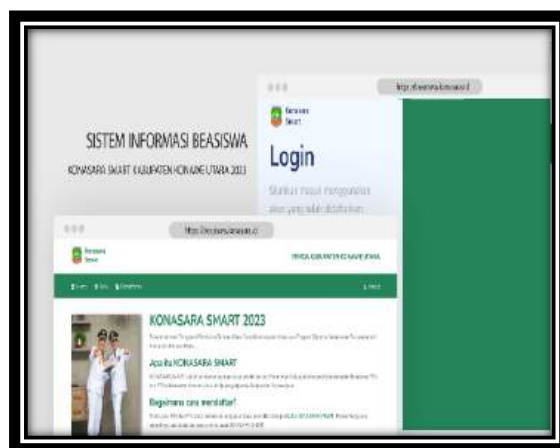


2. **LAIKANGGU**

LAIKANGGU merupakan inovasi digital RSUD yang digunakan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, seperti memperoleh informasi layanan, melihat jadwal dokter, serta melakukan pendaftaran secara lebih cepat dan efisien sehingga meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit kepada masyarakat.

3. **KONASARA SMART**

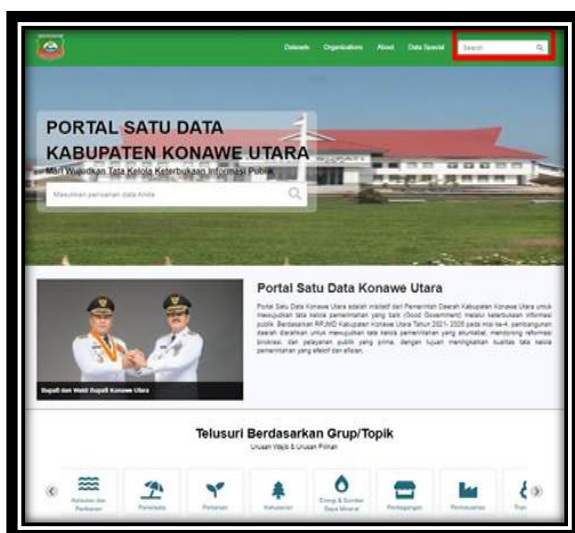
KONASARA SMART merupakan inovasi digital BAPERIDA yang digunakan untuk Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada Mahasiswa Program diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Kabupaten Konawe Utara.





4. **PAK TANI KONASARA**

PAK TANI KONASARA merupakan inovasi digital oleh BAPERIDA yang digunakan untuk mendukung pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Konawe Utara dengan menyediakan informasi pertanian, data petani, data lahan, serta membantu pemerintah dalam perencanaan program pertanian sehingga pembinaan petani dan peningkatan produksi pertanian dapat dilakukan secara lebih efektif dan tepat sasaran.



5. **SATU DATA**

SATU DATA KONAWE UTARA

SATU DATA KONAWE UTARA merupakan inovasi digital Baperida Kabupaten Konawe Utara yang mengintegrasikan data dan informasi secara akurat dan efisien sehingga mudah diakses kapan saja untuk mendukung pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Inovasi ini mencakup pengembangan Portal Satu Data, Geoportal Konawe Utara, serta pengelolaan akun Satu Data daerah.

6. **E-MONEV**

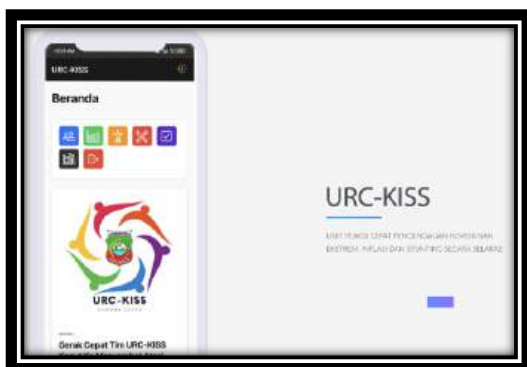
E-MONEV merupakan inovasi digital BAPERIDA Kabupaten Konawe Utara yang digunakan untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan daerah secara lebih efektif, terukur, dan terintegrasi.

No	Uraian Kegiatan	Target Fisik	Target Finansial	Target Waktu	Target Kualitas	Status
1	RUJUK SWASTA (RUMAH SAKIT) DAERAH	20.00	15.44	100%	100%	RUJUK SWASTA (RUMAH SAKIT) DAERAH
2	DIKAS TRANSUMBERAS DAN TENAGA KELOMPOK	20.47	12.75	100%	100%	DIKAS TRANSUMBERAS DAN TENAGA KELOMPOK
3	DIKAS PERUMAHAN MUDA, SWASTA, DAN	11.21	10.05	100%	100%	DIKAS PERUMAHAN MUDA, SWASTA, DAN
4	DIKAS KOLABORASI DAN INOVASI	10.39	12.40	100%	100%	DIKAS KOLABORASI DAN INOVASI



7. E-LITBANG

E-LITBANG merupakan inovasi digital BAPERIDA yang digunakan dalam Sistem Informasi Penelitian dan Pengembangan yang Efektif di Kabupaten Konawe Utara.

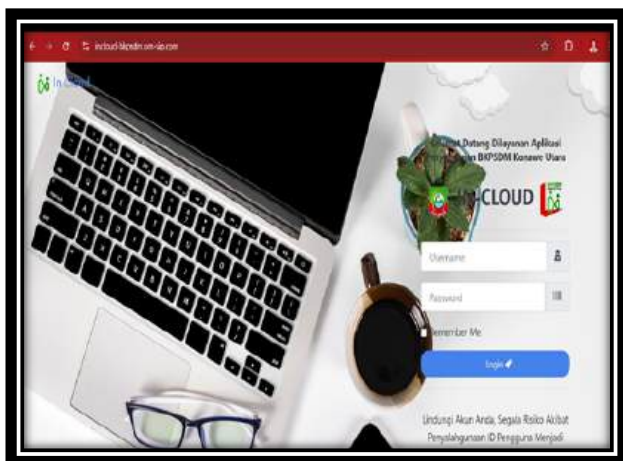


8. URC-KISS

URC-KISS adalah inovasi digital oleh BAPERIDA yang digunakan untuk [manajemen data/koordinasi tugas/emergency response] dalam Unit Reaksi Cepat (URC). Aplikasi ini mendukung monitoring, pelaporan, dan eksekusi kegiatan secara real-time

9. LUALE

LUALE merupakan inovasi layanan usaha berbasis digital dari DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara yang mempermudah pengelolaan data perizinan, mulai dari penyimpanan, pencarian, hingga pembuatan laporan secara lebih efektif dan efisien.



10. IN-CLOUD

IN-CLOUD merupakan program inovasi digital BPKSDM yang bertujuan untuk menyimpan data secara online (cloud storage). Dengan layanan ini, pengguna bisa mengunggah berbagai jenis file seperti dokumen, foto, video, atau database ke server cloud, kemudian mengakses atau membagikannya dengan mudah.

11. DESA WISATA LABENGKI

DESA WISATA LABENGKI

merupakan inovasi nondigital Dinas Pariwisata meningkatkan pengelolaan dan promosi desa wisata labengki. Ini mencakup berbagai aspek seperti website desa wisata, media sosial dan sistem informasi online. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pengalaman wisatawan, meningkatkan keberlanjutan, dan membantu perekonomian lokal.



12. DESA INOVASI

DESA INOVASI merupakan inovasi nondigital DPMD yang mengembangkan pembangunan secara partisipatif (prakarsa semua *stakeholders*), inovatif, transparan dan akuntabel berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi (iptekin) serta kearifan lokal yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sehingga pembangunan memiliki nilai tambah.

13. JULEHA

JULEHA (Juru Sembelih Halal)

merupakan inovasi nondigital Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Konawe Utara yang digunakan untuk mendata, membina, dan memastikan para penyembelih hewan melakukan penyembelihan sesuai syariat Islam dan standar halal. Program ini membantu meningkatkan keamanan, kebersihan, dan kehalalan daging yang dikonsumsi masyarakat, serta memudahkan pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap juru sembelih halal.





POTENSI STRATEGIS

Beberapa potensi strategis di Kabupaten Konawe Utara:

Pariwisata dan Budaya

potensi wisata alam, budaya, dan komunitas., Daya tarik pantai Taipa, pesisir laut, budaya lokal.

Olahraga dan Ekonomi

Dapat mendorong UMKM, event promoter, dan investasi fisik daerah.

Pembangunan Daerah (RPJMD 2025-2029)

Penyusunan RPJMD sebagai momentum penguatan tata kelola, arah pembangunan strategis, peningkatan PAD, digitalisasi pelayanan publik

Sumber Daya Alam (SDA)

Potensi tambang nikel & sumber daya laut., Lahan pertanian & perikanan.

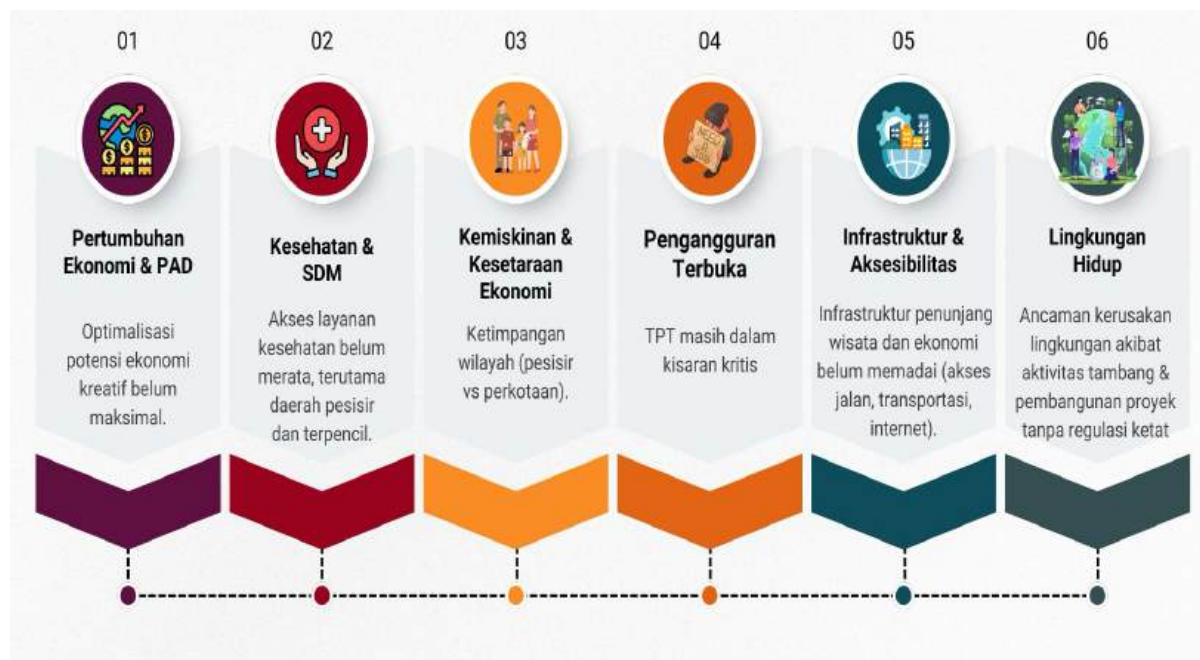
Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas

Banyak komunitas terlibat dalam event wisata, lingkungan, dan kreatif., Momentum peningkatan peran pemuda dan kolaborasi lintas sektor.

Tranformasi Digital dan Keuangan

Potensi digitalisasi event dan promosi wisata.

PERMASALAHAN STRATEGIS





PENGHARGAAN YANG DITERIMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025

1.

Meraih juara I Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahap III terbaik di Sulawesi Tenggara pada tanggal 9 Januari 2025 diserahkan oleh Kepala KPPN Kendari kepada Kepala BKAD Konawe Utara.



2.

Penghargaan Kabupaten Layak Anak Kategori Pratama pada Tanggal 18 Agustus 2025 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA).





3. Pemda Konut raih Penghargaan GFS Strategis Awards 2025 Kategori Mitra Kerja Terbaik 1 tingkat Provinsi yang diberikan oleh Kntor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan DJPb) Provinsi Sultra, Kementerian Keuangan RI, pada Hari Jumat 7 November 2025.



4. Penghargaan Tokoh/Kehadiran di Sultra Awards 2025 yang di gelar oleh Kendari Pos di Hotel Claro pada Rabu, 12 November 2025





DAFTAR ISI

PERNYATAAN REVIU INSPEKTORAT DAERAH.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
CAPAIAN INDIKATOR MAKRO.....	iii
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	v
AGENDA.....	vi
REALISASI ANGGARAN DAN EFISIENSI.....	xii
INOVASI UNGGULAN DAERAH TAHUN 2025.....	xiii
POTENSI STRATEGIS DAN PERMASALAHAN STRATEGIS.....	xvii
PENGHARGAAN YANG DITERIMA PEMDA KONUT TAHUN 2025.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	2
1.2.1 Organisasi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.....	2
1.2.2 Kekuatan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Utara.....	6
1.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Daerah.....	8
1.3 Aspek Strategis Serta Isu Strategis Daerah Kabupaten Konawe Utara.....	8
1.3.1 Aspek Strategis Daerah Kabupaten Konawe Utara.....	8
1.4 Dasar Hukum.....	19
1.5 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	20
1.5.1 Sistematika Penulisan LAKIP 2025.....	20
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis.....	21
2.2 Rencana Kerja Tahun 2025.....	35
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	40
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Akuntabilitas Kinerja.....	51
3.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja.....	51
3.2 Akuntabilitas Keuangan.....	152
BAB 4 PENUTUP	
4.1 Penutup.....	157
Lampiran.....	160



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Aparatur Sipil Negara menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Konawe Utara Per Desember Tahun 2025	7
Tabel 1.2 Jumlah Aparatur Sipil Negara menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Konawe Utara Per Desember Tahun 2025	7
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Jiwa di Kecamatan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025.....	9
Tabel 1.4 Indeks Pembangunan Manusia	10
Tabel 1.5 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2025.....	15
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran Strategis Dan Arah Kebijakan Pemangunan Daerah Tahun 2025	24
Tabel 2.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029	36
Tabel 3.1 Capaian Indikator Makro Tahun 2025	54



DAFTAR GAMBAR/BAGAN/GRAFIK

struktur Organisasi Dan Tata Kerja	2
Aspek Georagfis Dan Demografis Daerah.....	9
Grafik Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2025	10
Grafik Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2025	10
Grafik PDRB Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2025.....	11
Grafik Pendapatan Perkapita Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2025.....	12
Grafik Laju Inflasi Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2025.....	13
Grafik Indeks Gini Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2025	14
Grafik Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Kinerja Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2025.....	58
Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2025 Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tenggara Dan Nasional	59
Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2023-2025 Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tenggara Dan Nasional	61
Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Pemabangunan Manusia Tahun 2025 Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tenggara Dan Nasional	62
Grafik Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Kinerja Usia Harapan Hidup Tahun 2023-2025	63
Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Usia Harapan Hidup Tahun 2025 Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tenggara Dan Nasional	64
Grafik Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Kinerja Prevelensi Stunting Tahun 2025	66
Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Prevelensi Stunting Tahun 2025 Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tenggara Dan Nasional	66
Grafik Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Kinerja Tingkat Kemiskinan Tahun 2023-2025	68
Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Tingkst Kemiskinan Tahun 2025 Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tenggara Dan Nasional	69
Grafik Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Kinerja Indeks Pendidikan Tahun 2025	70



Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Pendidikan Tahun 2025 Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tenggara Dan Nasional	71
Grafik Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Pemuda Tahun 2025	73
Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Pemuda Tahun 2025 Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tenggara Dan Nasional	73
Grafik Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023-2025	75
Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2025 Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tenggara Dan Nasional	76
Grafik Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Tahun 2025.....	77
Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Tahun 2025 Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tenggara Dan Nasional	78
Grafik Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Indeks Ketimpangan Gender Tahun 2025	80
Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Ketimpangan Gender Tahun 2025 Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tenggara Dan Nasional	80
Grafik Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Indeks Konektivitas Wilayah Tahun 2025	82
Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Konektivitas Wilayah Tahun 2025 Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tenggara Dan Nasional	83
Grafik Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Indeks Infrastruktur Dasar Tahun 2023-2025	85
Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Infrastruktur Dasar Tahun 2025 Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tenggara Dan Nasional	86
Grafik Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023-2025	88
Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025 Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tenggara Dan Nasional	89
Grafik Perbandingan Capaian Dan Target Indikator PDRB Perkapita Tahun 2023- 2025.....	91
Grafik Perbandingan Capaian Kinerja PDRB Perkapita Tahun 2025 Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tenggara Dan Nasional	92
Grafik Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Rasio Gini Tahun 2023-2025	93
Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Rasio Gini Tahun 2025 Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tenggara Dan Nasional	94



Grafik Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Rasio PDRB Industri Pengelolaan Tahun 2023-2025	96
Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Rasio PDRB Industri Pengelolaan Tahun 2025 Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tenggara Dan Nasional	97
Grafik Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Indeks Ekonomi Biru Daerah Tahun 2025	99
Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Ekonomi Biru Daerah Tahun 2025 Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tenggara Dan Nasional	100
Grafik Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2025	101
Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2025 Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tenggara Dan Nasional	102
Grafik Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Rasio PDB Pariwisata Tahun 2023-2025	104
Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Rasio PDB Pariwisata Tahun 2025 Konawe Utara Dan Nasional	105
Grafik Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Indeks Desa Membangun Tahun 2023-2025	106
Grafik Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Rasio Pajak Daerah Terhadap Tahun 2025	108
Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Tahun 2025 Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tenggara Dan Nasional	109
Grafik Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Inklusi Keuangan Terhadap Tahun 2025	111
Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Inklusi Keuangan Terhadap PDRB Tahun 2025 Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara Dan Nasional	112
Grafik Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Presentase Realisasi Investasi Terhadap PDRB Terhadap Tahun 2025	114
Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Tahun 2025 Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tenggara Dan Nasional	115
Grafik Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2025	116
Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025 Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tenggara Dan Nasional	117
Grafik Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Indeks Reformasi Birokrasi General Terhadap PDRB Terhadap Tahun 2025	119



Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi General Tahun 2025 Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tenggara Dan Nasional	120
Grafik Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahun 2025.....	122
Grafik Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Indeks Resiko Bencana Terhadap Tahun 2023-2025	124
Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Resiko Bencana Tahun 2025 Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tenggara Dan Nasional	125
Grafik Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Indeks Lingkungan Hidup Terhadap Tahun 2023-2025	127
Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi General Tahun 2025 Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tenggara Dan Nasional	128
Grafik Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2025	130
Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2025 Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tenggara Dan Nasional	131
Grafik Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Indeks Ketahanan Budaya Terhadap Tahun 2025	132
Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Ketahanan Budaya Daerah Tahun 2025 Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tenggara Dan Nasional	133



Bab 01

Pendahuluan

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara terus memperkuat penerapan prinsip akuntabilitas kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Komitmen tersebut dilaksanakan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja secara sistematis serta berorientasi pada hasil.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025, disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025. Laporan ini memuat capaian sasaran strategis, realisasi indikator kinerja, serta analisis atas faktor pendukung dan kendala yang dihadapi dalam



pelaksanaannya, berdasarkan prinsip transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas.

LAKIP ini tidak hanya merupakan pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi dan dasar perumusan kebijakan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, kualitas pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Melalui laporan ini, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat budaya kinerja yang terukur, adaptif, dan berorientasi hasil.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

1.2.1 Organisasi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara

Organisasi perangkat daerah Kabupaten Konawe Utara dibentuk berdasarkan sejumlah regulasi yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Tujuan pengaturan organisasi ini adalah untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, serta mendukung capaian pembangunan daerah secara optimal. Adapun dasar hukum pembentukan organisasi Pemerintah Kabupaten Konawe Utara meliputi:

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara.**

Undang-undang ini menetapkan Konawe Utara sebagai daerah otonom terpisah dari Kabupaten Konawe, dengan kewenangan mengelola pemerintahan dan pembangunan sesuai kebutuhan lokal. Regulasi ini mengatur struktur pemerintahan, pembagian urusan, dan pengelolaan sumber daya daerah, serta tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Nomor 4689.

- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.**

Peraturan ini mengatur struktur organisasi perangkat daerah dengan menyesuaikan kebutuhan daerah dan dinamika pembangunan. Melalui regulasi ini, pemerintah menetapkan pembentukan dan pembagian tugas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih adaptif, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

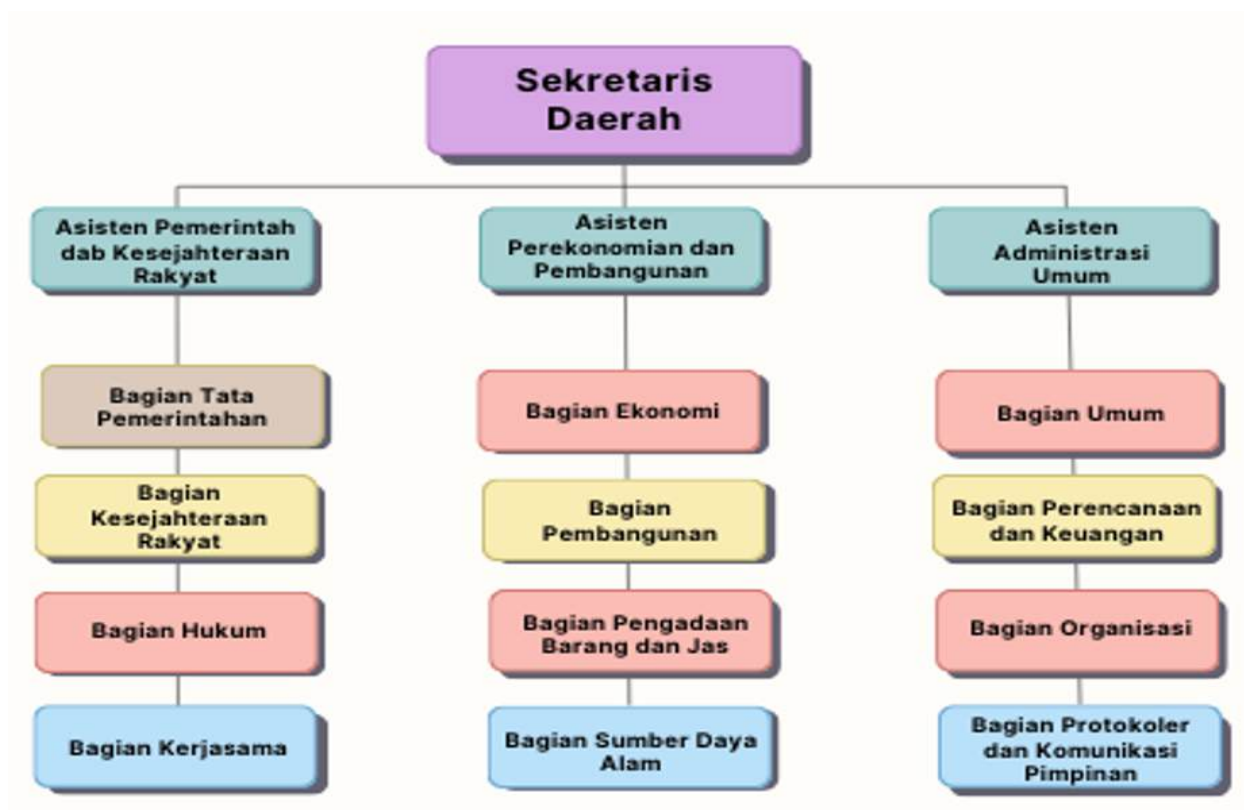


3. Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Perangkat daerah terdiri atas instansi-instansi yang menjalankan urusan pemerintahan di berbagai bidang, seperti administrasi umum, pembangunan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta sektor lainnya. Struktur perangkat daerah ditetapkan melalui peraturan daerah dan berfungsi sebagai motor penggerak penyelenggaraan pemerintahan untuk mendukung kelancaran tugas dan pencapaian tujuan pembangunan daerah

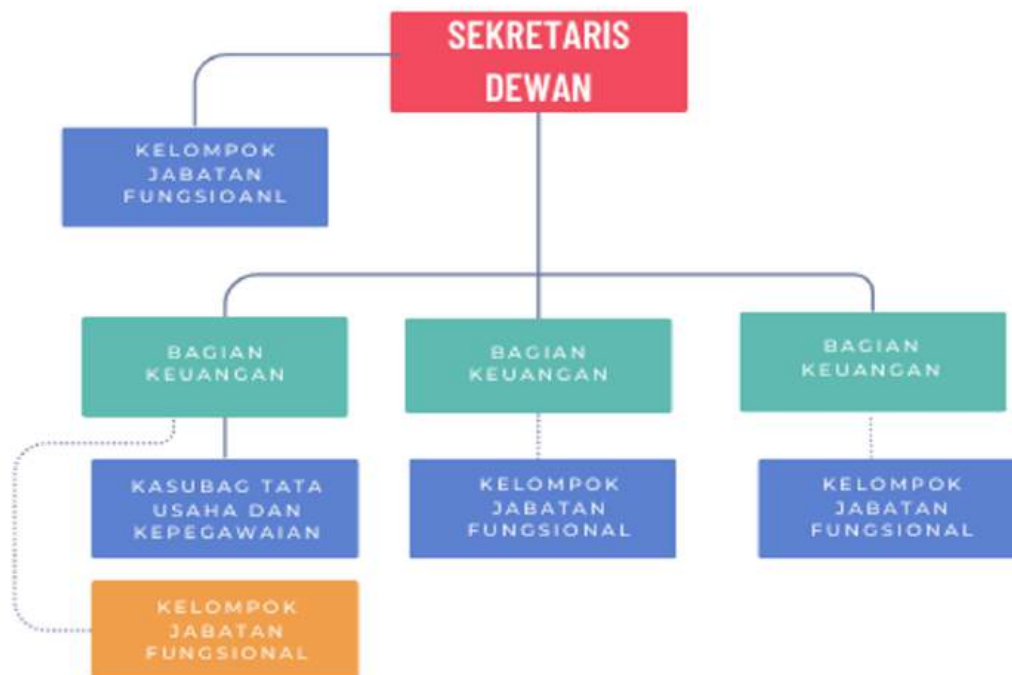
Beberapa perangkat daerah yang ada di Kabupaten Konawe Utara antara lain:

SEKRETARIAT DAERAH

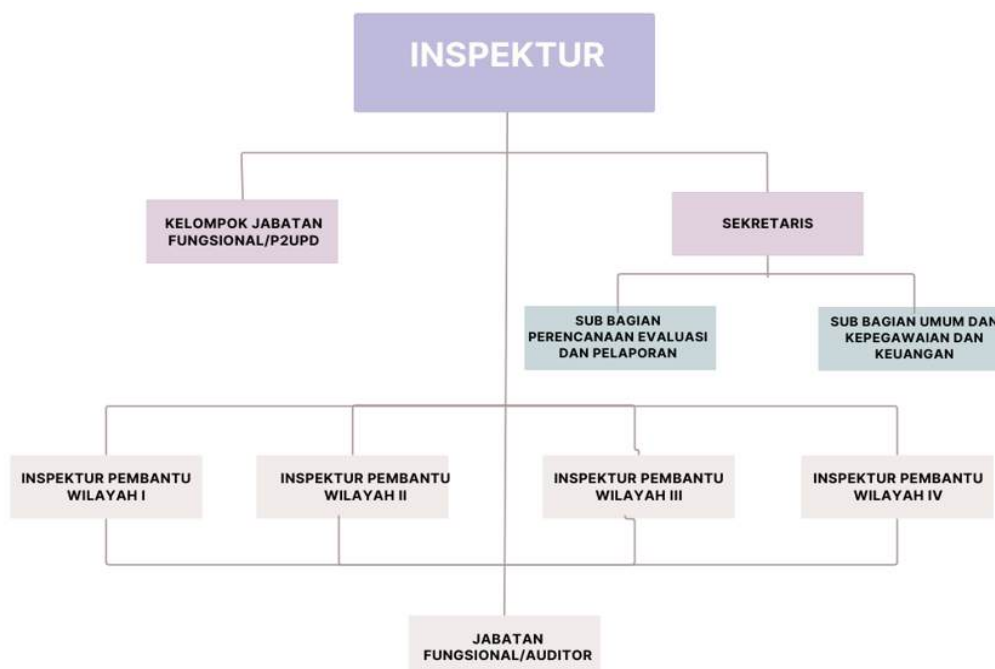




SEKRETARIAT DPRD



INSPEKTORAT DAERAH





DINAS

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas PU dan Penataan Ruang
4. Dinas Sosial
5. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
6. Dinas PP dan PA
7. Dinas PP dan KB
8. Dinas Ketahanan Pangan
9. Dinas Lingkungan Hidup
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12. Dinas Perhubungan
13. Dinas Komunikasi dan Informatika
14. Dinas Koperasi, UMKM
15. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
16. Dinas Kesehatan
17. Dinas PU dan Penataan Ruang
18. Dinas Sosial
19. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
20. Dinas PP dan PA
21. Dinas PP dan KB
22. Dinas Ketahanan Pangan
23. Dinas Lingkungan Hidup
24. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
25. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
26. Dinas Perhubungan
27. Dinas Komunikasi dan Informatika
28. Dinas Koperasi, UMKM
29. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
30. Dinas PM dan PTSP
31. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
32. Dinas Perpustakaan
33. Dinas Perikanan
34. Dinas Pariwisata
35. Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
36. Satuan Polisi dan Pamong Praja
37. Dinas Pemadam dan Kebakaran
38. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
39. Dinas Perkebunan



BADAN

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Badan Kepegawiaan dan Pengembangan SDM
3. Badan Keuangan dan Aset Daerah
4. Badan Pendapatan Daerah
5. Badan Penaguulangan Bencana Daerah
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KECAMATAN

1. Kecamatan Motui
2. Kecamatan Sawa
Kecamatan Lembo
4. Kecamatan Wawolesea
5. Kecamatan Lasolo
6. Kecamatan Molawe
7. Kecamatan Andowia
8. Kecamatan Asera
9. Kecamatan Oheo
10. Kecamatan Langgikima
11. Kecamatan Landawe
12. Kecamatan Wiwirano
13. Kecamatan Lasolo Kepulauan

1.2.2 Kekuatan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Utara

Pemerintah Kabupaten Konawe Utara didukung oleh aparatur yang kompeten, dengan jumlah 5016 ASN dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama hingga Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana pada Tahun 2025 yang memiliki latar belakang Pendidikan mulai dari jenjang SD hingga doctor (S3)



Tabel 1.1 Jumlah Aparatur Sipil Negara menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Konawe Utara Per Desember Tahun 2025

Jabatan	2025				Jumlah
	PNS		PPPK		
	Pria	Wanita	Pria	Wanita	
Jabatan Pimpinan Tinggi Utama	0	0	0	0	0
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	0	0	0	0	0
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	32	3	0	0	35
Administrator	132	42	0	0	174
Pengawas	191	82	0	0	273
Eselon V	0	0	0	0	0
Jabatan Fungsional Dosen	0	0	0	0	0
Jabatan Fungsional Guru	265	443	158	555	1421
Jabatan Fungsional Medis	104	417	119	651	1291
Jabatan Fungsional Teknis	143	119	196	172	630
Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana	401	246	314	231	1192
Jumlah	1268	1352	787	1609	5016

Tabel 1.2 Jumlah Aparatur Sipil Negara menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Konawe Utara Per Desember Tahun 2025

Jabatan	2025				Jumlah
	PNS		P3K		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
Sampai dengan SD	1	2	2	0	5
SMP/Sederajat	1	1	1	1	4
SMA/Sederajat	68	33	320	222	643
Diploma I/Akta I	0	0	0	0	0
Diploma II/Akta II	14	15	0	0	29
Diploma III/Akta III/Sarjana Muda	65	154	86	453	758
Diploma IV/ Akta IV	14	83	2	39	138
S1	875	915	349	801	2940
S2	226	148	27	93	494
S3	4	1	0	0	5
Jumlah	1268	1352	787	1609	5016

Sumber data : Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Utara



1.2.3. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Kabupaten Konawe Utara untuk menyelenggarakan urusan wajib, baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun urusan wajib lainnya di luar pelayanan dasar.



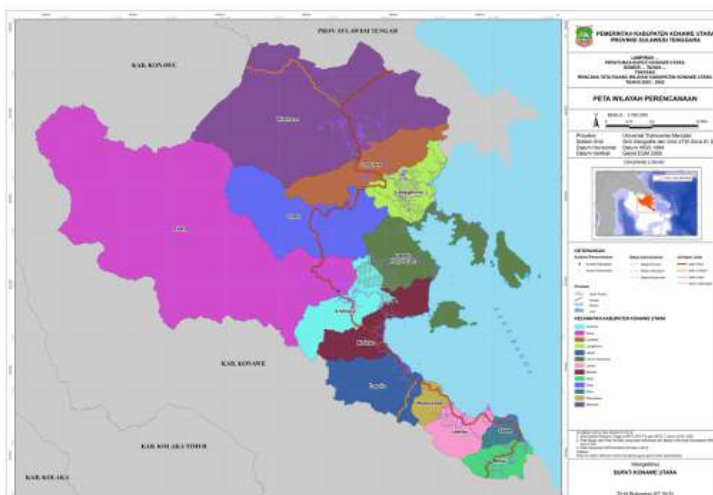
1.3 ASPEK STRATEGIS SERTA ISU STRATEGIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

1.3.1. Aspek Strategis Daerah Kabupaten Konawe Utara



1.3.1.1 Aspek Georagfis dan Demografis Daerah

Kabupaten Konawe Utara berada di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan ibu kota Wanggudu. Luas wilayahnya 16.179,81 km² (13,38% luas provinsi) serta wilayah perairan ±11.960 km². Pada 2025, jumlah penduduk tercatat 86.455 jiwa dengan komposisi 51,42% laki-laki, 48,58% perempuan dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 3,60%.



Secara administratif, Konawe Utara berbatasan dengan Kabupaten Morowali (Sulawesi Tengah), Kabupaten Konawe, Kabupaten Kolaka Utara, dan Laut Banda. Terdiri dari 13 kecamatan, dengan Wiwirano sebagai wilayah terluas (968,06 km²) dan Motui sebagai yang terkecil (61,30 km²).

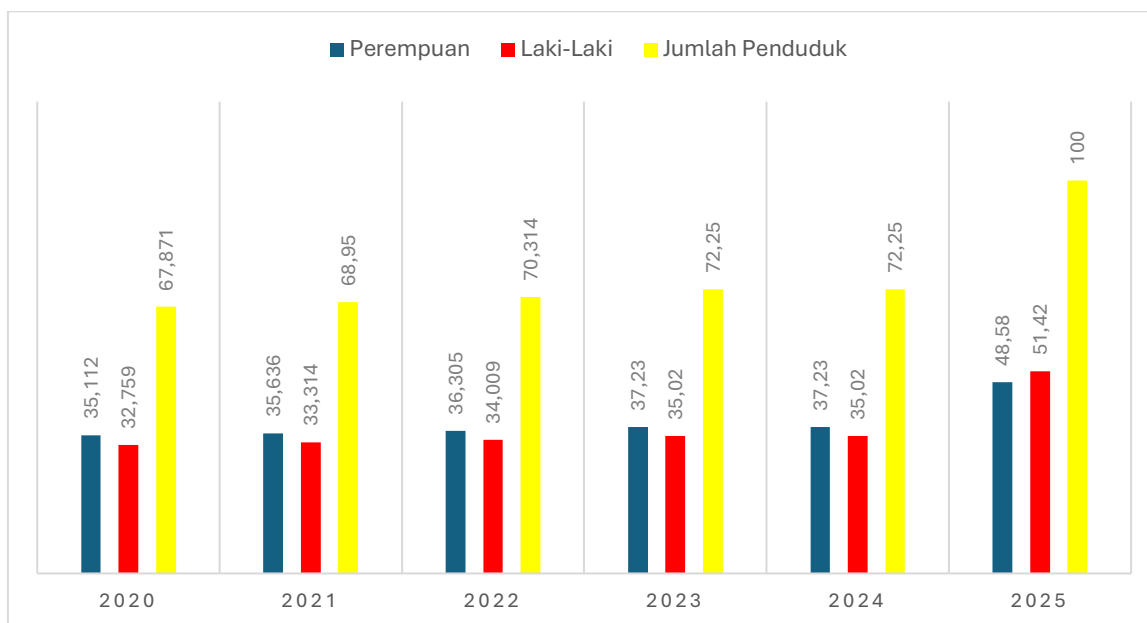
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Jiwa di Kecamatan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		
		JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH	KEPADATAN
		JIWA	(KM)	JIWA/KM
1	2	3	4	5
	KONawe UTARA	86.455	4.219.81 Km²	19,78
1	ASERA	9853	863,32 Km ²	11,41
2	WIWIRANO	6505	968,06 Km ²	6,72
3	LANGGIKIMA	7192	476,75 Km ²	15,09
4	MOLawe	8159	365,06 Km ²	22,35
5	LASOLO	10287	139,40 Km ²	73,79
6	LEMBO	6221	78,12 Km ²	79,63
7	SAWA	5342	93,76 Km ²	56,98
8	OHEO	5960	738,50 Km ²	8,07
9	ANDOWIA	10070	595,90 Km ²	16,90
10	MOTUI	6286	61,30 Km ²	102,54
11	WAWOLESEA	4017	149,40 Km ²	26,89
12	LASOLO KEPULAUAN	3017	62,42 Km ²	48,33
13	LANDawe	3546	603,53 Km ²	5,88

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) SEMESTER II 2025 dan <https://konaweutarakab.go.id/visi-dan-misi/>



Grafik Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2025



1.3.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2025 (Halaman 67) beberapa aspek kesejahteraan Masyarakat yaitu:

Tabel 1.4 Indeks Pembangunan Manusia

TAHUN	IPM KONAWE UTARA	IPM SULAWESI TENGGARA	IPM NASIONAL
2020	69,86	71,45	71,94
2021	70,23	71,66	72,29
2022	71,10	72,23	92,91
2023	72,11	72,94	74,39
2024	72,71	73,62	75,02
2025	73,42	73,62	75,02

Sumber:

<https://konutkab.bps.go.id/id/publication/2026/02/27/2163732a4c8d5af5400f8fb3/kabupat-en-konawe-utara-dalam-angka-2026.html>

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur kualitas hidup melalui tiga dimensi: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. IPM Kabupaten Konawe Utara meningkat dari 69,86 (2020) menjadi 72,32 (2025) dan masuk kategori “tinggi”, meskipun masih sedikit di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara (73,62 pada 2024). Ke depan, peningkatan IPM difokuskan pada penguatan layanan kesehatan, peningkatan mutu pendidikan, serta pengembangan

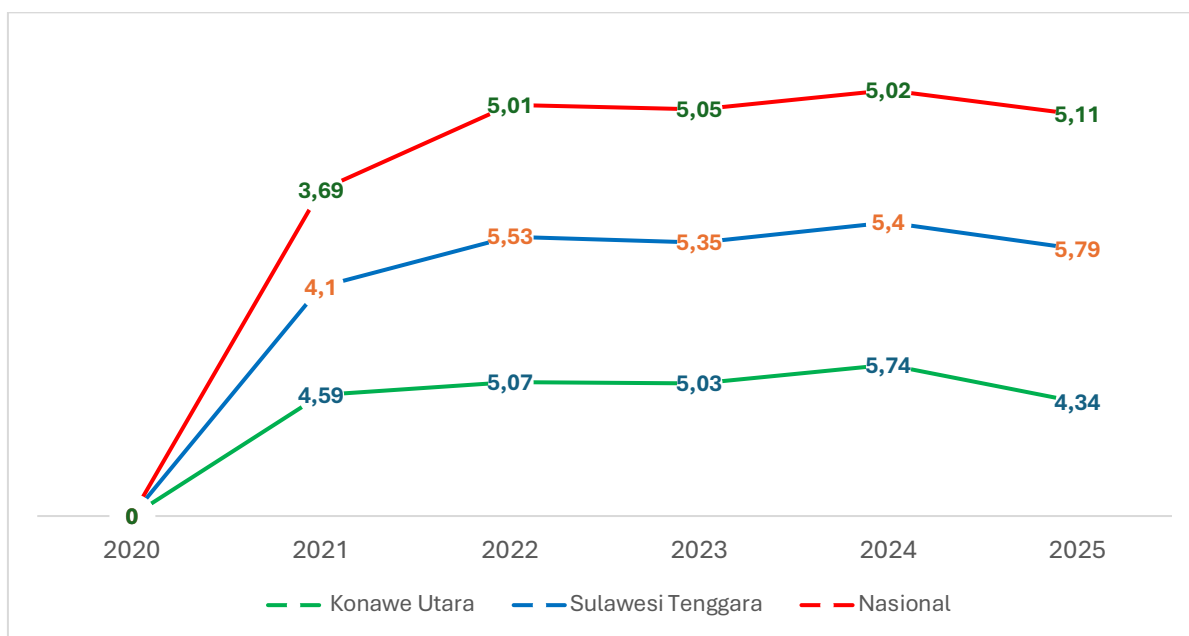


ekonomi lokal melalui dukungan UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan perlindungan sosial.

PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO [PDRB]

PDRB menunjukkan pertumbuhan dan struktur ekonomi daerah serta menjadi dasar evaluasi kebijakan, penyusunan APBD, dan penentuan sektor unggulan serta peluang investasi. Pada periode 2024–2025, PDRB Kabupaten Konawe Utara tumbuh 4,34%, mencerminkan perkembangan sektor unggulan dan kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Grafik PDRB Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2025



Sumber:

<https://konutkab.bps.go.id/id/publication/2026/02/27/2163732a4c8d5af5400f8fb3/kabupaten-konawe-utara-dalam-angka-2026.html>

Arah kebijakan pembangunan difokuskan pada peningkatan daya saing ekonomi melalui diversifikasi sektor di luar pertambangan, seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan jasa, serta pengembangan hilirisasi industri. Penguatan produktivitas tenaga kerja dan UMKM dilakukan melalui pendidikan vokasi, pelatihan, digitalisasi, dan akses permodalan, serta menjaga stabilitas harga melalui penguatan sektor pangan dan distribusi logistik. Pembangunan diarahkan agar inklusif, merata, berkelanjutan, dan mengoptimalkan PSN untuk mendorong lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan usaha lokal.

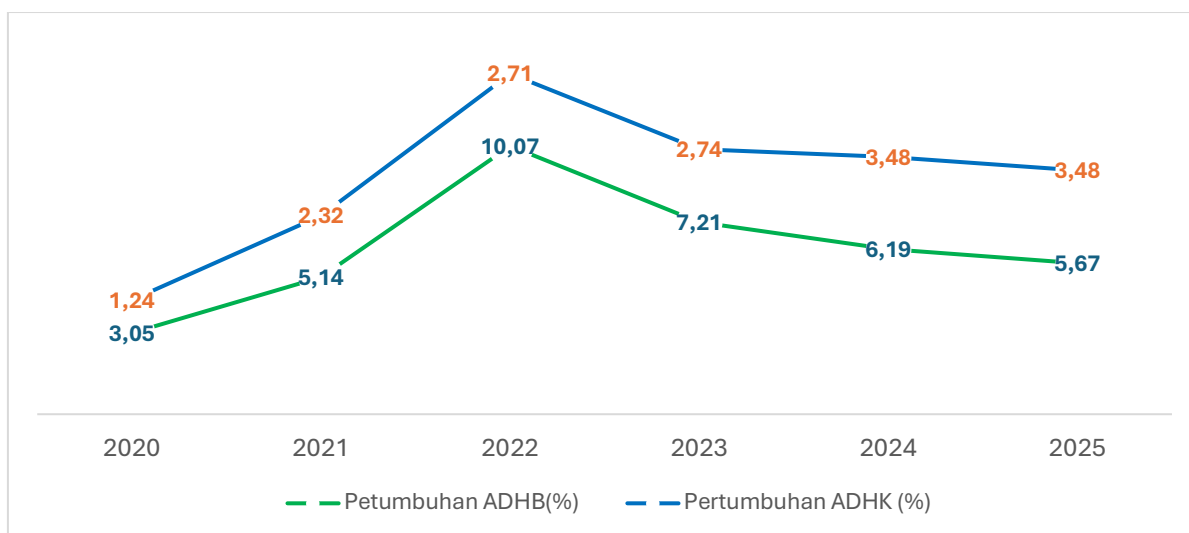
PENDAPATAN PERKAPITA

PDRB per kapita merupakan indikator kemakmuran yang diperoleh dari pembagian total nilai tambah ekonomi dengan jumlah penduduk. Pada periode



2023–2025, PDRB per kapita Kabupaten Konawe Utara meningkat; secara nominal (ADHB) menjadi Rp 6.164,67 miliar dan secara riil (ADHK) menjadi Rp 3.600,96 miliar. Perbedaan pertumbuhan ini menunjukkan pengaruh kenaikan harga sehingga peningkatan kesejahteraan riil dan daya beli masyarakat masih terbatas.

Grafik Pendapatan Perkapita Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2025



Sumber:

<https://konutkab.bps.go.id/id/publication/2026/02/27/2163732a4c8d5af5400f8fb3/kabupaten-konawe-utara-dalam-angka-2026.html>

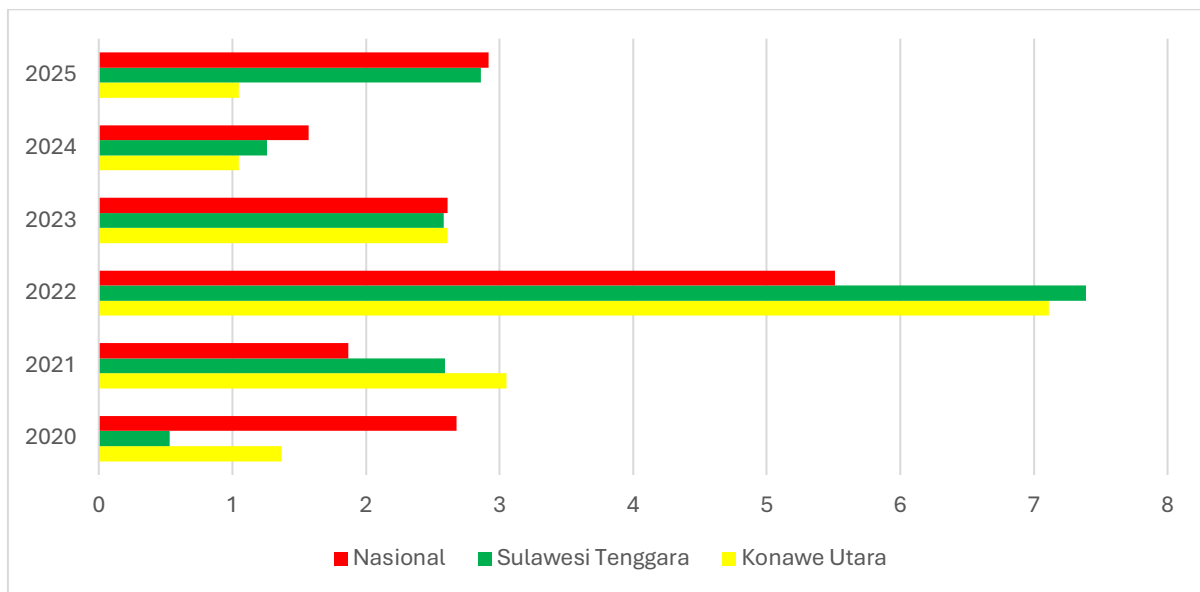
Kebijakan pembangunan difokuskan pada peningkatan daya saing melalui diversifikasi ekonomi di luar pertambangan dengan mengoptimalkan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan jasa serta pengembangan industri hilir. Produktivitas tenaga kerja dan UMKM ditingkatkan melalui vokasi, pelatihan, digitalisasi, dan akses permodalan. Stabilitas harga dijaga melalui penguatan sektor pangan dan distribusi logistik, serta mengoptimalkan PSN untuk mendorong lapangan kerja, peningkatan pendapatan riil, dan usaha lokal.

LAJU INFLASI

Laju inflasi menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa dalam suatu periode. Inflasi yang rendah dan stabil menandakan ekonomi sehat karena daya beli masyarakat terjaga, sedangkan inflasi tinggi dapat menurunkan kesejahteraan dan mengganggu stabilitas ekonomi. Inflasi juga memengaruhi suku bunga, investasi, serta kebijakan pemerintah. Karena itu, pengendalian inflasi penting untuk menjaga stabilitas harga, mendukung iklim usaha, dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.



Grafik Laju Inflasi Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2025



Sumber:

<https://konutkab.bps.go.id/id/publication/2026/02/27/2163732a4c8d5af5400f8fb3/kabupaten-konawe-utara-dalam-angka-2026.html>

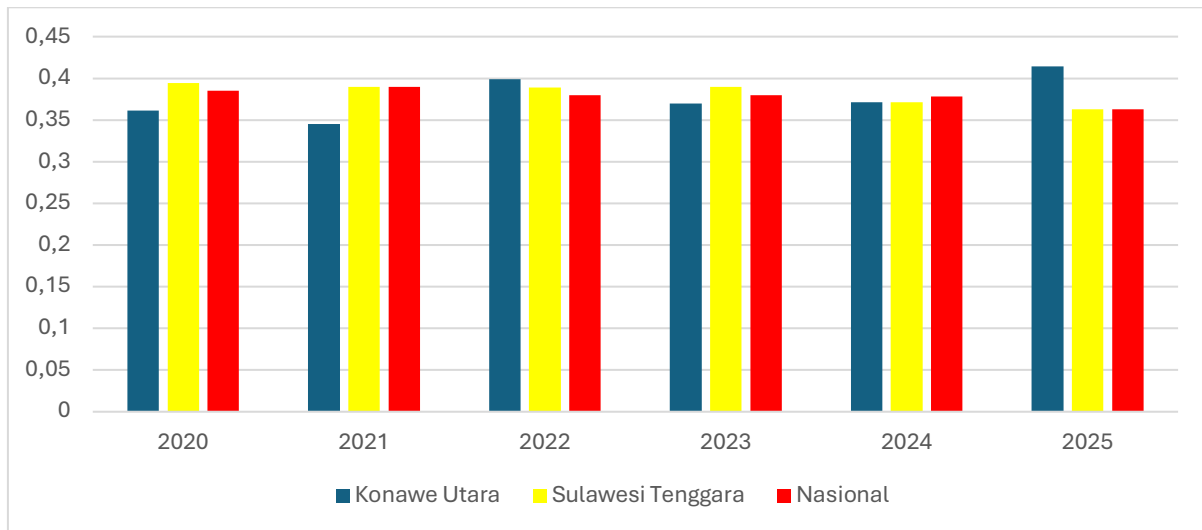
Berdasarkan data BPS, laju inflasi Kabupaten Konawe Utara tahun 2025 relatif stabil dengan fluktuasi tidak signifikan dan masih dalam kategori inflasi ringan (di bawah 10%). Kondisi ini didukung strategi efektif TPID melalui pengendalian harga, menjaga ketersediaan pasokan pangan, memperlancar distribusi antar daerah, serta memperkuat komunikasi berbasis data yang akurat. Inflasi yang terkendali turut mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah.

INDEKS GINI

Gini Ratio adalah indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan dengan skala 0–1; semakin mendekati 0 berarti semakin merata, dan mendekati 1 berarti semakin timpang. Indikator ini penting untuk menilai pemerataan hasil pembangunan dan menjadi dasar kebijakan peningkatan akses pendidikan, pekerjaan, serta pemberdayaan ekonomi.



Grafik Indeks Gini Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2025



Sumber:

<https://konutkab.bps.go.id/id/publication/2026/02/27/2163732a4c8d5af5400f8fb3/kabupaten-konawe-utara-dalam-angka-2026.html>

Berdasarkan data BPS, Gini Ratio Kabupaten Konawe Utara sebesar 0,414 lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan Sulawesi Tenggara (0,363). Angka ini menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang relatif rendah dan masih terkendali.

TINGKAT KEMISKINAN

Pada Maret 2025, tingkat kemiskinan Kabupaten Konawe Utara tercatat 11,89%, menunjukkan perbaikan pemerataan pendapatan dan hasil program pengentasan kemiskinan. Pemerintah daerah menjalankan strategi melalui peningkatan akses pendidikan, pelatihan keterampilan, bantuan sosial, pengembangan ekonomi produktif, serta pembangunan infrastruktur perdesaan. Namun, upaya tersebut belum optimal karena jangkauan program belum menyeluruh, sehingga meskipun realisasi kinerja dan anggaran mencapai 100%, target penurunan kemiskinan belum tercapai signifikan.

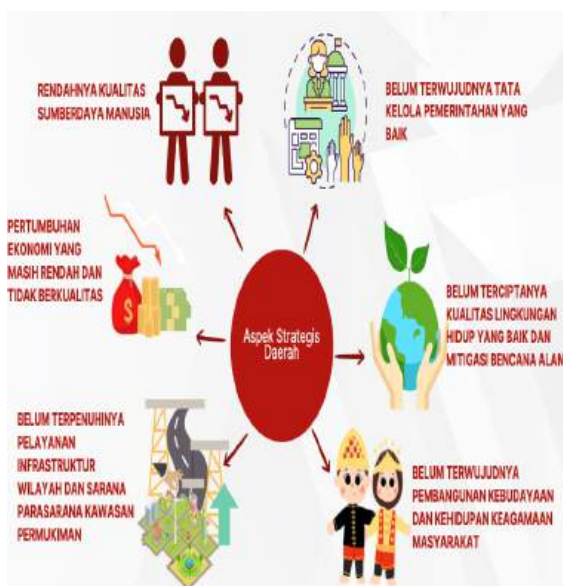
Tabel 1.5 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020-2025

TAHUN	KONAWE UTARA	SULAWESI TENGGERA	NASIONAL
2020	13,25	11,69	9,78
2021	13,57	11,66	9,71
2022	13,72	11,24	9,54
2023	13,48	11,02	9,22
2024	13,17	11,21	9,00
2025	11,89	10,54	8,47

Sumber:

<https://konutkab.bps.go.id/id/publication/2026/02/27/2163732a4c8d5af5400f8fb3/kabupaten-konawe-utara-dalam-angka-2026.html>

1.3.1.3. Aspek Strategis Pembangunan Kabupaten Konawe Utara



Permasalahan daerah menunjukkan adanya kesenjangan antara target pembangunan dan kondisi nyata, sehingga perlu diidentifikasi sebagai dasar penyusunan strategi dan kebijakan jangka menengah Kabupaten Konawe Utara. Analisis menyeluruh diperlukan agar kebijakan tepat sasaran dan mampu mendukung visi misi kepala daerah serta penentuan prioritas pembangunan lima tahun ke depan.

Berdasarkan RPJMD 2021–2026, terdapat enam permasalahan utama

yang masih menjadi tantangan dan menghambat optimalisasi kesejahteraan masyarakat serta daya saing daerah.

1.3.1.4. Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Utara

Berdasarkan tantangan global, nasional, dan regional serta amanat RPJPD, perumusan isu strategis Kabupaten Konawe Utara dilakukan secara komprehensif dan berbasis analisis mendalam. Isu yang ditetapkan harus selaras dengan prioritas pembangunan nasional, sesuai kewenangan dan kapasitas daerah, serta berdampak luas bagi masyarakat.



Penentuan isu juga mempertimbangkan daya ungkit terhadap sektor unggulan, penciptaan lapangan kerja, investasi, dan peningkatan daya saing. Dengan pendekatan tersebut, kebijakan pembangunan diarahkan agar lebih terencana, berkelanjutan, dan mampu mewujudkan Konawe Utara sebagai daerah yang maju dan kompetitif.

SUMBER DAYA MANUSIA

Kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2025 berfokus pada beberapa aspek strategis untuk mendorong pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fokus utama dalam peningkatan kualitas dan daya saing SDM di Konawe Utara mencakup:

1. Peningkatan kualitas sarana prasarana sekolah dan tenaga Pendidikan secara merata diseluruh wilayah Kabupaten Konawe Utara
2. Peningkatan kualitas sarana prasarana Kesehatan dan tenaga Kesehatan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Konawe Utara
3. Peningkatan Kesehatan ibu dan anak
4. Memperomosisikan budaya hidup sehat bagi semua segala usia
5. Mencapai kesetaraan gender dengan memberdayakan perempuan dan anak
6. Cakupan layanan jaminan kesejahteraan sosial secara menyeluruh dan terintegrasi secara system bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat rentan

INFRASTRUKTUR

Infrastruktur Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2025 berfokus pada beberapa aspek strategis yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memperkuat konektivitas antarwilayah. Fokus utama dalam pengembangan infrastruktur di daerah ini meliputi:

1. Percepatan pengembangan jaringan jalan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Utara dan RDTR Kawasan perkotaan Wanggudu;
2. Pemanfaatan Infrastruktur pendukung kualitas permukiman, jalan, kegiatan ekonomi, pariwisata, industry, perdagangan dan jasa.
3. Pengembangan sarana transportasi orang, barang
4. Peningkatan jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas sosial ekonomi
5. Pengembangan Sistem sanitasi yang terintegrasi untuk mewujudkan 100% terlayani system sanitasi



6. Penyediaan sarana dan prasarana umum (RTH, Landmark, Tmpat olahraga, Balai Pertemuan, Tempat Ibadah, Pemakaman dll) yang berkualitas dan merata
7. Pengembangan jaringan air bersih dan manajemn pengelolaan air yang baik;

EKONOMI

Daya saing ekonomi daerah Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2025 berfokus pada beberapa aspek penting yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah penjabaran mengenai fokus utama dalam meningkatkan daya saing ekonomi daerah tersebut:

1. Peningkatan iklim investasi Daerah;
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kewirausaahaan Usaha Mikro untuk menanggulangi kemiskinan dan penanggguran;
3. Peningkatan produktifitas pertanian, perkebunan dan perikanan melalui peningkatan kualitas benih akan menjadi prioritas, pemanfaatan teknologi dan penciptaan inovasi bidang pertanian, perkebunan dan perikanan;
4. Mengembangkan nila tambah (value added) melalui agroindustri komoditas unggulan yang mampu berdaya saing dan berkelanjutan;
5. Mengembangkan system distribusi dan pemasaran produk local berbasis online yang terintegrasi antara produsen, lembaga keuangan dan dan konsumen;
6. Penguatan ketahanan pangan melalui manajemen stok yang baik dan diversifikasi produk olahan sub sektor pertanian antara lain perikanan;
7. Peningkatan performa BUMD sebagai badan usaha profit yang juga dapat memeberikan support bagi ekonomi masyarakat;
8. Pengembangan pariwisata yang mampu menjadi pendorong dan penggerak bagi bertumbuh kembangnya ekonomi lokal dan UMKM;

TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Perbaikan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik Kabupaten Konawe Utara pada Tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan evektifitas, akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan Fokus utama pemerintah daerah dalam perbaikan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik daerah meliputi :



1. Pengelolaan pemerintahan yang transparan bersih dan efektif;
2. Menyederhanakan birokrasi meningkatkan kemudahan dan keceptan layanan public berbasis teknoogi informasi dan komunikasi menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
3. Pengembangan Kualitas ASN secara merit system
4. Pemanfaatan system informasi pemerintahan daerah yang transparan

LINGKUNGAN HIDUP

Fokus kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana alam di Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2024 berfokus pada beberapa strategi yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem, mengurangi dampak perubahan iklim, dan meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana alam. Upaya-upaya tersebut sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan aman bagi masyarakat serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Berikut adalah penjabaran fokus tersebut:

1. Menumbuhkan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Menjaga Lingkungan
2. Pengurangan Kerentanan Bencana
3. Pengembangan arana dan Prasarana Bencana
4. Pelatihan Tanggap Bencana

KEBUDAYAAN

Fokus pembangunan kebudayaan dan kehidupan keagamaan di Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2025 adalah memeperkuat identitas budaya melestarikan warisan budaya,ddan bertujuan meningktakan kualitas kehidupan beragama yang harmonis. Pembangunan ini bertujuan menjaga nilai budaya dan agama sekaligus memperkuat kebersamaan dan integrasi masyarakat

- Kemajuan kebudayaan dengan membangun kapasitas kelembagaan masyarakat adat yang berkelanjutan (Lembaga Adat Landawe, Lembaga Adat Culambatu, Lembaga Adat Muna Buton, Lemabaga Adat Bugis-Makassar, Lembaga Adat Toraja, Lemabaga Adat Jawa dan Sunda, Lembaga Adat Bali dan Lembaga Adat Fiobamora) agar siap dipromosikan melalui pengembangan event budaya.



1.4 DASAR HUKUM

Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain:

1. **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999** tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
2. **Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003** tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
3. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004** tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
4. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004** tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421).
5. **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007** tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689).
6. **Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2007** tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
7. **Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007** tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
8. **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008** tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).

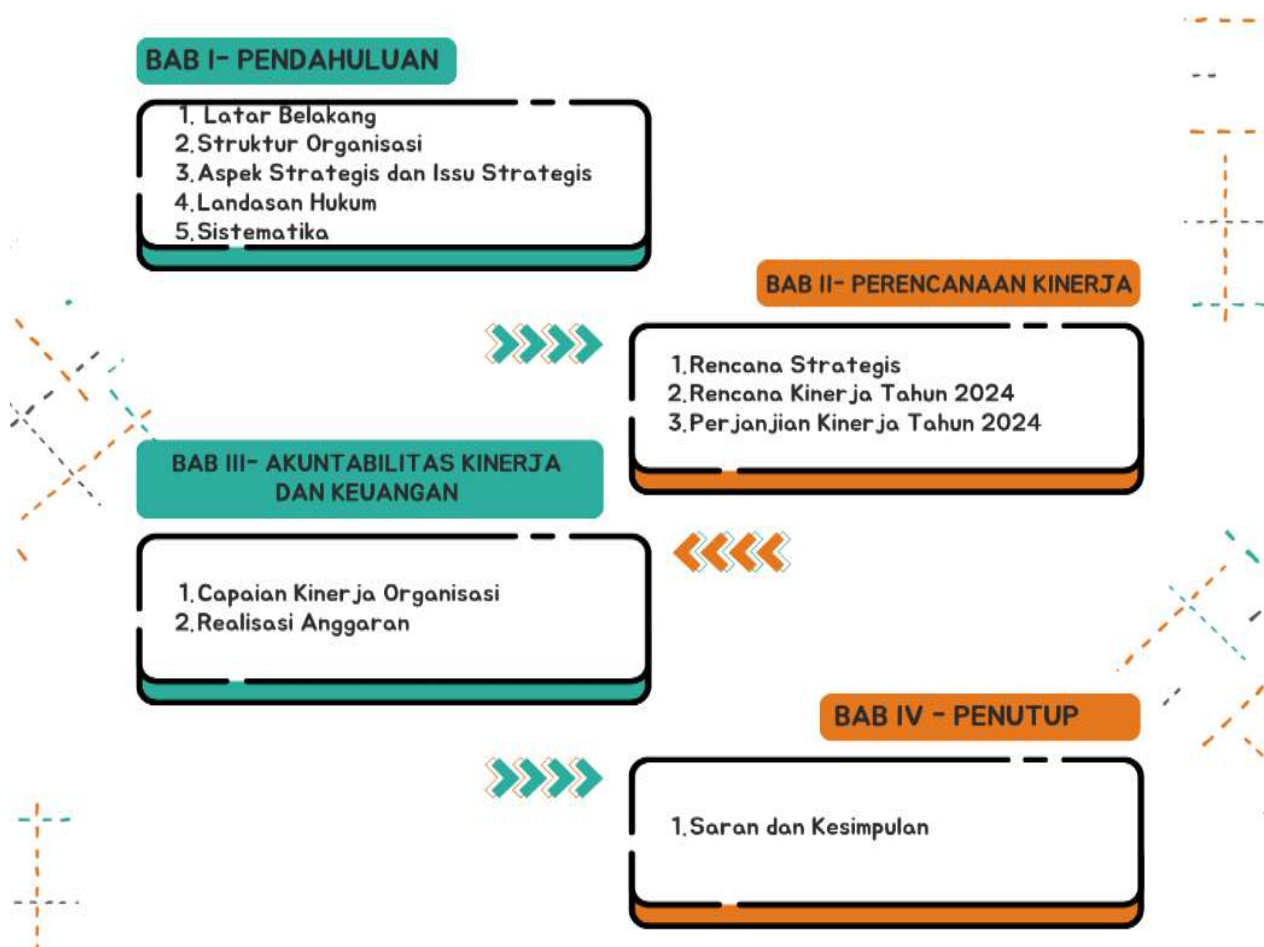


9. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009** tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
10. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009** tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Dasar hukum ini menjadi pedoman dalam penyusunan laporan untuk memastikan bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Konawe Utara berlangsung sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan.

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

1.5.1 Sistematika Penulisan LAKIP 2025





BAB

02

Perencanaan **Kinerja**

2.1

RENCANA STRATEGIS [RENSTRA]

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021–2026 merupakan dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang menjadi bagian dari perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Dokumen ini mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan Pembangunan Daerah. Penyusunannya dilakukan secara sistematis dengan berfokus pada isu-isu strategis yang kemudian diterjemahkan menjadi kebijakan serta rencana pembangunan yang terarah, efektif, dan berkelanjutan. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran.

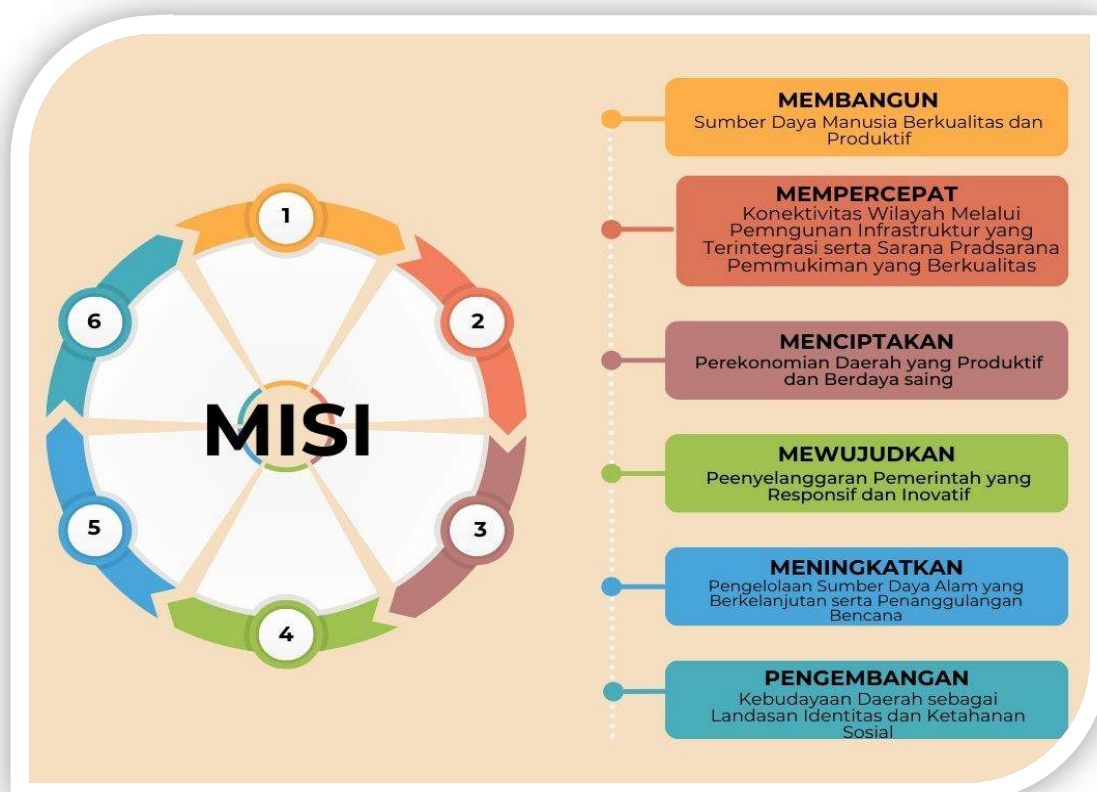


Visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Konawe Utara untuk periode 2025-2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2029, yang menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan pembangunan daerah selama periode tersebut. Adapun visi dan misi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

VISI

“KONAwE Utara sebagai rumah berSama yang semakin maju dan sejahteRA”

MISI



AGENDA :

1. FGD “Konawe Utara dalam Angka”
2. Even HARmonis Sultra 2025
3. Wonua Oheo Camping Festival 2025
4. Bupati Cup I Konawe Utara Race Championship 2025
5. Antan Fishing Tournament Konawe Utara 2025
6. Proses Penyusuna RPJMD Konawe Utara 2025-2029



RUMAH BERSAMA

Nilai tersebut menegaskan pentingnya kebersamaan, inklusivitas, dan harmonisasi sosial sebagai dasar kehidupan masyarakat. Kabupaten Konawe Utara diharapkan menjadi lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh warga tanpa memandang perbedaan suku, agama, maupun status sosial. Konsep “rumah bersama” mencerminkan semangat gotong royong serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, sehingga tumbuh rasa memiliki, tanggung jawab kolektif, dan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas hidup serta keberlanjutan pembangunan daerah.

SEMAKIN MAJU

Bagian ini menggambarkan peningkatan yang konsisten di berbagai sektor pembangunan daerah, seperti ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan tata kelola pemerintahan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Istilah “maju” menegaskan pembangunan yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga adaptif terhadap teknologi, inovasi, dan peningkatan daya saing secara berkelanjutan.

SEJAHTERA

Kesejahteraan merupakan tujuan utama pembangunan daerah, yang diwujudkan melalui peningkatan kualitas hidup, pengurangan kemiskinan, perluasan lapangan kerja, peningkatan akses layanan dasar, dan pemerataan manfaat pembangunan. Kesejahteraan tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, dan lingkungan, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang adil, aman, dan berkualitas.

**Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran Strategis Dan Arah Kebijakan Pemangunan Daerah Tahun 2025**

Tujuan 1	Sasaran	Prioritas	Arah kebijakan
Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 3. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 4. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 5. Akreditasi Pelayanan Kesehatan	1. Pembangunan tahap awal RSUD modern sebagai pusat layanan rujukan regional; 2. Pemetaan kebutuhan peningkatan fasilitas kesehatan paripurna di seluruh kecamatan, serta 3. Penyusunan rencana penguatan tenaga kesehatan dan sistem pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat.
	Meningkatnya kemandirian pemelu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	1. Pemberdayaan Sosial 2. Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindaklanjut Kekerasan 3. Rehabiltasi Sosial 4. Perlindungan dan Jaminan Sosial 5. Penanganan Bencana	1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, 2. Pengembangan keterampilan tenaga kerja, dan peningkatan akses terhadap pekerjaan yang layak; 3. Penyediaan layanan pengasuhan bagi anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lain



Tujuan 1	Sasaran	Prioritas	Arah kebijakan
	Meningkatnya Derajat Pendidikan	1. Pengelolaan Pendidikan 2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3. Pembinaan Perpustakaan	1. Perluasan program beasiswa Konasaradengan mencakup biaya SPP/UKT dan kebutuhan pendukung seperti biaya asrama dan uang saku; 2. Pemetaan kebutuhan Smart classroom dan infrastruktur sekolah 3. Pelatihan dasar bagi guru terkait penggunaan teknologi pembelajaran serta 4. Rehabilitasi ringan sarana Pendidikan di daerah prioritas
	Meningkatnya Daya Saing dan Prestasi Pemuda	1. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 2. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 3. Pengembangan kapasitas Kepramukaan	Penguatan karakter dan kepemimpinan pemuda melalui pelatihan dasar kepemudaan, wawasan kebangsaan dan bela negara
	Menurunnya Angka pengangguran	1. Perencanaan Tenaga Kerja 2. Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja 3. Penempatan Tenaga Kerja 4. Hubungan Industrial	1. Pemetaan kebutuhan tenaga kerja dan potensi wirausahaan lokal, serta penyusunan roadmap pelatihan vokasi dan pengembangan UMKM 2. Perencanaan pelatihan kerja berbasis permintaan pasar 3. Menyusun data dasar UMKM dan rencana inkubasi wirausaha pemula



Tujuan 1	Sasaran	Prioritas	Arah kebijakan
	Terwujudnya pembangunan keluarga berkualitas dan kesetaraan gender	1. Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 2. Peningkatan Kualitas Keluarga 3. Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak 4. Pemenuhan Hak Anak (Pha) 5. Perlindungan Khusus Anak 6. Pengendalian Penduduk 7. Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 8. Pendaftaran Penduduk 9. Pencatatan Sipil 10. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 11. Pengelolaan Profil Penduduk	1. Pemetaan dan identifikasi keluarga sasaran program Bina keluarga serta membentuk kelompok Bina keluarga balita, remaja dan lansia di tingkat desa/kelurahan 2. Pemetaan kondisi dan kebutuhan perempuan serta anak sebagai dasar perumusan kebijakan pemberdayaan dan perlindungan yang responsif gender 3. Pendataan dan pemetaan kelompok masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan secara lengkap di seluruh wilayah

Tujuan 2	Sasaran	Prioritas	Arah kebijakan
Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Pembangunan	1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 2. Pengembangan Permukiman 3. Penataan Bangunan Gedung 4. Penataan Bangunan dan Lingkungannya 5. Penyelenggaraan Jalan	1. Penyusunan rencana induk transportasi daerah, pemetaan infrastruktur strategis darat dan laut, serta identifikasi kebutuhan pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan dan sarana transportasi umum



Tujuan 2	Sasaran	Prioritas	Arah kebijakan
		6. Pengembangan Jasa Konstruksi 7. Penyelenggaraan Penataan Ruang 8. Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum 9. Penyelenggaraan Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan 10. Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 11. Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 12. Pengembangan Perumahan 13. Kawasan dan Permukiman 14. Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 15. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 16. Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 17. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 18. Pengelolaan Pelayaran 19. Pengelolaan Penerbangan	2. Penguatan kelembagaan dan regulasi pendukung terintegrasi 3. Melanjutkan pengembangan dan penataan Ibukota Wanggudu menjadi Kawasan perkotaan yang nyaman dan modern 4. Pemetaan kondisi eksisting sarana prasarana permukiman, termasuk akses air bersih, sanitasi, drainase, dan sistem persampahan. 5. Penyusunan rencana induk permukiman, kajian kebutuhan teknis, dan identifikasi kawasan prioritas dilakukan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan yang terarah dan tepat sasaran.



Tujuan 3	Sasaran	Prioritas	Arah kebijakan
Mewujudkan Transformasi Perekonomian Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi	Meningkatnya Daya Saing Produktivitas Ekonomi	1. Perencanaan dan Pembangunan Industri 2. Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota 3. Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 4. Perizinn dan Pendaftaran Perusahaan 5. Peningktan Sarana Distribusi Perdagangan 6. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 7. Pengembangan Ekspor 8. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen 9. Penggunaan dan Pemesanan Produk Dalam Negeri	1. Melakukan pemetaan potensi industri pengolahan unggulan berbasis sumber daya lokal dan 2. menyusun roadmap pengembangan industri kecil dan menengah (IKM); mengidentifikasi sentra IKM yang memiliki peluang hilirisasi.
	Terwujudnya Penerapan Ekonomi Biru Daerah	1. Pengelolaan Perikanan Tangkap 2. Pengelolaan Perikanan Budidaya 3. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 4. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1. Pemetaan potensi isumber daya laut dan pesisir 2. Pendataan nelayan dan pelaku usaha perikanan 3. Pengembangan kluster ikan nila salin untuk mendukung pengembangan Kawasan perikanan tangkap serta menyusun rencaana aksi ekonomi biru daerah yang selaras dengan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan



Tujuan 3	Sasaran	Prioritas	Arah kebijakan
	Terwujudnya Kemandirian Pangan	1. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan 2. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 3. Penanganan Kerawanan Pangan 4. Pengawasan Keamanan Pangan 5. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 6. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 7. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 8. Penyuluhan Pertanian 9. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 10. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 11. Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 12. Perizinan Usaha Pertanian	1. Pemetaan potensi lahan pangan, identifikasi komoditas strategis, dan penyusunan roadmap kemandirian pangan daerah. Program ini mencakup pendataan petani dan kelembagaan tani, serta perencanaan pengembangan infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi, lumbung pangan, dan distribusi benih lokal. 2. Penguatan data dukung Program Nasional “percetakan Sawah”
	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian Daerah	1. Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 2. Pemasaran Pariwisata 3. Pembangunan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	1. Menetapkan arah pembangunan pariwisata melalui pemetaan potensi wisata dan lokasi <i>sport tourism</i> 2. Penyusunan masterplan destinasi unggulan termasuk rencana



Tujuan 3	Sasaran	Prioritas	Arah kebijakan
		4. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	pembangunan sirkuit balap motor serta 3. Penguatan kapasitas kelembagaan dan Pokdarwis dalam pengelolaan destinasi berbasis alam dan event
	Terwujudnya Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	1. Penataan Desa 2. Peningkatan Kerjasama Desa 3. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 4. Administrasi Pemerintahan Desa 5. Perencanaan Kawasan Transmigrasi 6. Pembangunan Kawasan Transmigrasi 7. Pengembangan Kawasan Transmigrasi	1. Melakukan pemetaan potensi lokal dan infrastuktur dasar di seluruh desa dan dusun serta 2. Mengidentifikasi kebutuhan dan peluang inovasi berbasis desa 3. Disusun pedoman teknis pemanfaatan dana dusun Rp. 100 juta/dusun/tahun yang mendorong partisipasi warga serta 4. Pengutan tata Kelola pembangunan dusun secara transparan dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat
	Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	1. Pengelolaan Pendapatan Daerah 2. Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Pelayana Izin Usaha Simpan Pinjam 4. Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 5. Penilaian Kesehatan Kap/Uap Koperasi 6. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Menyusun kebijakan pondasi ekonomi makro daerah dan pemetaan potensi peningkatan pendapatan asli Daerah (PAD)



Tujuan 3	Sasaran	Prioritas	Arah kebijakan
		7. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 8. Penguatan Badan Hukum Koperasi 9. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) 10. Pengembangan UMKM	
	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	1. Pengembangan Iklim Penanaman Modal 2. Promosi Penanaman Modal 3. Pelayanan Penanaman Modal 4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 5. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1. Pengembangan dan Penyusunan peta potensi investasi daerah secara sektoral dan wilayah (spasial) yang terintegrasi dengan tata ruang dan rencana pengembangan kawasan industri pertambangan PSN. 2. Identifikasi hambatan investasi dan pembentukan tim percepatan investasi daerah.

Tujuan 4	Sasaran	Prioritas	Arah kebijakan
Mempercepat Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegrasi dan Adaptif	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi yang Profesional	1. Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Pengelolaan Barang Milik Daerah 3. Penyelenggaraan Pengawasan 4. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 5. Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 6. Perekonomian dan Pembangunan 7. Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1. Transformasi Publik difokuskan pada pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan peningkatan kualitas layanan digital. 2. Sistem SPBE diperluas cakupannya dengan



Tujuan 4	Sasaran	Prioritas	Arah kebijakan
		8. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 9. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 10. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 11. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 12. Penyelenggaraan Statistik Sektor 13. Penelitian dan Pengembangan Daerah 14. Riset dan Inovasi Daerah 15. Kepegawaian Daerah 16. Pengembangan Sumber Daya Manusia 17. Informasi dan Komunikasi Publik 18. Pengelolaan Aplikasi Informatika 19. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip 20. Pengelolaan Arsip	mengintegrasikan layanan antar OPD 3. Pengelolaan Aset, data dan arsip ditingkatkan melalui platform digital dan penguatan SDM teknis

Tujuan 5	Sasaran	Prioritas	Arah kebijakan
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Terwujudnya Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	1. Penanggulangan Bencana 2. Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 3. Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Pemetaan resiko bencana dan kerentanan perubahan iklim serta menyusun kebijakan dan rencana aksi pengurangan resiko bencana daerah 2. Identifikasi lokasi rawan banjir dan kekeringan serta studi kelayakan pembangunan bendungan dan kolam



Tujuan 5	Sasaran	Prioritas	Arah kebijakan
	Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas	1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(PPLH) 2. Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH 3. Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 4. Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 5. Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 6. Perencanaan Lingkungan Hidup 7. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 8. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 9. Pengendalian Bahan Berbahaya dan Bercun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dab Beracun (Limbah B3) 10. Pengeloaan Persampahan 11. Pengembanagn Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional 12. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3. Regulasi yang dapat dikembangkan menjadi Kawasan wisata air Pemetaan kondisi kualitas lingkungan hidup, lahan kritis dan resiko perubahan iklim serta menyusun kebijakan pembangunan rendah karbon dan ramah lingkungan



Tujuan 6	Sasaran	Prioritas	Arah kebijakan
Mewujudkan Masyarakat Berkebudayaan Maju	Terwujudnya Ketahanan Budaya Daerah	1. Pengembangan Kebudayaan 2. Pengembangan Kesenian Tradisional 3. Pembinaan Sejarah 4. Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 5. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 6. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 7. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 8. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 9. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan pengembangan Etika seta Budaya Politik	1. Pemetaan dan pendataan objek pemajuan kebudayaan daerah (OPKD) Identifikasi komunitas, pelaku budaya, dan Lembaga kebudayaan; 2. Penyusunan rencana induk pembangunan Kebudayaan daerah sebagai dasar arah kebijakan dan intervensi jangka Panjang. Pondasi ini memperjelas peran pelaku budaya lokal dalam ketahanan budaya; 3. Peningkatan peran Lembaga kebudayaan dan rumah ibadah 4. Apresiasi untuk pembinaan kebudayaan dan keagamaan



2.2 RENCANA KERJA TAHUN 2025

Rencana Kinerja tahunan disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029, dan memuat indikator kinerja sebagai acuan dalam mengukur keberhasilan pembangunan. Indikator kinerja daerah dirancang untuk menggambarkan tingkat pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang kemudian ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. IKU berfungsi sebagai instrumen untuk menilai sejauh mana visi dan misi dalam RPJMD Tahun 2025-2029 telah tercapai

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun berdasarkan aspek dan fokus urusan pemerintahan sesuai kewenangan masing-masing. Secara teknis, indikator kinerja daerah dirumuskan dengan memilih indikator Program Perangkat Daerah yang telah ditetapkan, baik pada tingkat *outcome* maupun *impact*. Penyusunan indikator tersebut dilakukan melalui analisis pengaruh satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap pencapaian indikator kinerja daerah setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.



Tabel 2.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD 2024	Target						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
MISI 1 MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS DAN PRODUKTIF										
TUJUAN 1 MENINGKATNYA SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING										
1	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Indeks		3,23	3,39	3,45	3,65	3,78	3,85	3,65
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,86	72,65	73	73,16	73,76	74,59	75,1	75,1
Sasaran 1 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat										
3	Usia Harapan Hidup (UHH)	Persen	69,51	70,5	71,09	71,21	71,47	71,73	71,95	71,95
4	Prevalensi Stunting	Persen		5	4,8	4,52	4,27	3,91	3,67	3,67
Sasaran 2 : Menurunnya Angka Kemiskinan										
5	Tingkat Kemiskinan	Persen	13,01	13,72	12,5	11,35	10,18	9,44	8,69	8,69
Sasaran 3 : Meningkatnya Derajat Pendidikan										
6	Indeks Pendidikan	Indeks		0,697	0,705	0,711	0,718	0,723	0,798	0,798
Sasaran 4 : Meningkatnya Daya Saing dan Prestasi Pemuda										
7	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka		56,98	57,63	58,28	58,93	59,58	60,23	60,23
Sasaran 5:Menurunnya Angka Pengangguran										
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3,62	2,21	2,1	1,9	1,7	1,58	1,4	1,4
Sasaran 6: Terwujudnya Pembangunan Keluarga Berkualitas dan Kesetaraan Gender										



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD 2024	Target						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
9	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks		61,75	61,9	62,35	63,12	63,98	64,31	64,31
10	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks		0,51	0,49	0,45	0,42	0,39	0,37	0,37
MISI 2 MEMPERCEPAT KONEKTIVITAS WILAYAH MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG TERINTEGRASI SERTA SARANA RASARANA PERMUKIMAN YANG BERKUALITAS										
TUJUAN 2 MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN WILAYAH YANG MERATA DAN BERKEADILAN										
11	Indeks Konektivitas Wilayah	Indeks		0,05	0,18	0,25	0,35	0,42	0,55	0,55
Sasaran 7 : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Pembangunan										
12	Indeks Infrastruktur Dasar	Indeks		5,2	10,25	14,35	19,55	25,19	30,45	30,45
MISI 3 MENCIPTAKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING										
TUJUAN 3 MEWUJUDKAN TRANSFORMASI PEREKONOMIAN BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING TINGGI										
13	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Persen	5,74	6,25	6,6	6,72	6,79	6,85	6,98	6,98
14	PDRB Perkapita	Rp. Juta	60,847	68.299	87.183	92.124	97.064	102.005	106.945	106.945
15	Rasio Gini	Indeks	0,388	0,285	0,28	0,276	0,273	0,268	0,265	0,265
Sasaran 8 : Meningkatkan Daya Saing Produktivitas Ekonomi										
16	Rasio PDRB Industri Pengelolaan	Indeks	1,16	1,5	1,7	1,93	2,37	2,41	2,97	2,97
Sasaran 9 : Terwujudnya Penerapan Ekonomi Biru Daerah										
17	Indeks Ekonomi Biru Daerah	Indeks		49,72	51,66	53,6	55,54	57,48	59,42	59,42
Sasaran 10 : Terwujudnya Kemandirian Pangan										
18	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks		77	77,21	77,98	78,35	78,98	79,61	79,61



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD 2024	Target						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Sasaran 11 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian Daerah										
	Rasio PDB Pariwisata	Rasio		8,75	8,9	8,95	9,1	9,15	9,35	9,35
Sasaran 12 : Terwujudnya Perdesaan sebagai Alat Pertumbuhan Ekonomoi										
20	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6128	0,6986	0,7032	0,7078	0,7124	0,717	0,7216	0,7216
Sasaran 13 : Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah										
21	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen		0,05	0,0727	0,074	0,0745	0,079	0,082	0,082
22	Inklusi Keuangan	Persen		2,13	2,2	2,28	2,35	2,42	2,46	2,46
Sasaran 14 : Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah										
23	Presentase Realisasi Investasi terhadap PDRB	Persen		23,14	25,89	28,64	31,39	34,14	36,89	36,89
MISI 4 MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEEMRINTAHAN YANG RESPONSIF DAN INOVATIF										
TUJUAN 4 MEMPERCEPAT TRANSAKSI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERINTEGRASI DAN ADAPTIF										
24	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	50,73	68,95	69,5	70,98	71,55	72,13	72,98	72,98
Sasaran 15 : Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi yang Profesional										
25	Indeks RB General	Indeks		62,35	63,5	66,19	68,2	70,23	72,19	72,19
MISI 5 MENINGKATKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN SERTA PENANGGULANGAN BENCANA										
TUJUAN 5 MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP										
26	Presentase Penurunan Emisi GRK (%)	Persen		62,35	69,5	70,98	71,55	72,13	72,98	72,98
Sasaran 16 : Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim										
27	Indeks Resiko Bencana (IRB)	Indeks	165,64	156,16	156,1	156,03	155,97	155,63	155,17	155,17
Sasaran 17 : Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas										



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD 2024	Target						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
28	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	62,16	62,72	79,99	80,79	81,24	81,62	82,35	82,35
MISI 6 PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAERAH SEBAGAI LANDASAN IDENTITAS DAN KETAHANAN SOSIAL										
TUJUAN 6 MEWUJUDKAN MASYARAKAT BERKEBUDAYAAN MAJU										
29	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks		53,37	53,49	53,54	54,92	55,02	55,45	55,45
Sasaran 18 : Terwujudnya Ketahanan Budaya Daerah										
30	Indeks Ketahanan Budaya Daerah	Indeks		50	55,39	59,17	64,33	69,31	75	75



Pada tahun 2025, Kabupaten Konawe Utara memasuki tahun ke lima pelaksanaan RPJMD 2025-2029, dengan fokus pada pencapaian target kinerja tahun ke Empat Indikator Kinerja Utama. Capaian kinerja tahun 2025 dievaluasi dengan mempertimbangkan keberhasilan pencapaian target tahun sebelumnya. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar penetapan target kinerja untuk tahun berikutnya

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Konawe untuk mewujudkan target dalam satu tahun anggaran, yang diruuskan berdasarkan rencana strategis, kemampuan APBD dan sumber daya yang tersedia. Dokumen ini menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan agar sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah

Adapun tujuan penetapan kinerja mencakup beberapa aspek sebagai berikut :

TUJUAN UMUM

Penetapan kinerja ini secara umum bertujuan mendorong berbagai langkah strategis, antara lain:

1. Memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui peningkatan sistem pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran serta pelaksanaan program, sehingga potensi terjadinya praktik koruptif dapat ditekan.
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik dengan menyediakan layanan yang optimal, mudah dijangkau, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.
3. Mempercepat pembentukan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, guna mewujudkan pemerintahan yang efisien, terbuka, dan bertanggung jawab.

Dengan penetapan kinerja ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat berkolaborasi secara maksimal untuk mencapai target yang ditetapkan, sehingga pembangunan daerah berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.



TUJUAN KHUSUS

Tujuan khusus penetapan kinerja adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur dengan menyediakan tolok ukur yang jelas untuk menilai pencapaian tujuan organisasi, sekaligus menjadi dasar pemberian penghargaan atau sanksi demi terciptanya budaya kerja profesional, efektif, dan bertanggung jawab.

Isi Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 yang tercantum dalam lampiran laporan ini adalah sebagai berikut :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam Rangka Mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. IKBAR, SH.,MH.
Jabatan : BUPATI KONAWE UTARA

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Wanggudu, 10 September 2025


BUPATI KONAWE UTARA
H. IKBAR, SH.,MH.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KABUPATEN KONAWE UTARA

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi 1 : Membangun sumber daya manusia berkualitas dan produktif	Tujuan 1 : Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing		Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	3.23
			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72.65
		Sasaran 1.1 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	70.50
			Prevalensi Stunting	5
		Sasaran 1.2 : Menurunnya Angka Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	13.72
		Sasaran 1.3 : Meningkatnya derajat pendidikan	Indeks Pendidikan	0.697
		Sasaran 1.4 : Meningkatnya Daya Saing dan Prestasi Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	56.98
		Sasaran 1.5 : Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2.21
Misi 2: Mempercepat konektivitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang terintegrasi serta sarana prasarana permukiman yang berkualitas	Tujuan 2: Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan	Sasaran 1.6 : Terwujudnya pembangunan Keluarga Berkualitas dan Kesenjangan Gender	Indeks Pembangunan Keluarga	61.75
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.51
			Indeks Konektivitas Wilayah	0.05
Misi 3: Menciptakan perekonomian daerah yang	Tujuan 3: Mewujudkan Transformasi Perekonomian Berkualitas dan	Sasaran 2.1 : Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar pembangunan	Indeks Infrastruktur Dasar	5.2
			Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6.25
			PDRB Perkapita	68.200

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
produktif dan berdaya saing	Berdaya Saing Tinggi		Rasio Gini (indeks)	0.285
		Sasaran 3.1 : Meningkatnya daya saing Produktivitas Ekonomi	Rasio PDRB Industri Pengolahan	1.50
		Sasaran 3.2 : Terwujudnya Penerapan Ekonomi Biru Daerah	Indeks Ekonomi Biru Daerah	49,72
		Sasaran 3.3 : Terwujudnya Kemandirian Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	77
		Sasaran 3.4 : Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah	Rasio PDB Pariwisata	8.75
		Sasaran 3.5 : Terwujudnya Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Indeks Desa Membangun	0.6986
		Sasaran 3.6 : Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0.05
			Inklusi Keuangan	2.13
		Sasaran 3.7 : Meningkatnya Realisasi investasi Daerah	Persentase Realisasi Investasi terhadap PDRB	23.14
Misi 4: Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang responsif dan inovatif	Tujuan 4 : Mempercepat Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif		Indeks Reformasi Birokrasi	68.95
		Sasaran 5 : Meningkatnya tata kelola birokrasi yang profesional	Indeks RB General	62.35
Misi 5: Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta	Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		Persentase Penurunan Emisi GRK (%)	32.88
		Sasaran 5.1 : Terwujudnya Resiliensi Terhadap Bencana dan	Indeks Risiko Bencana (IRB)	156.16



Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
penanggulangan bencana		Perubahan Iklim		
		Sasaran 5.2 : Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	62.72
Misi 6: Pengembangan Kebudayaan Daerah sebagai Landasan Identitas dan Ketahanan Sosial	Tujuan 6 : Mewujudkan Masyarakat Berkebudayaan Maju		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	53.37
		Sasaran 6.1 : Terwujudnya Ketahanan Budaya Daerah	Indeks Ketahanan Budaya Daerah	50


BUPATI KONAWE UTARA
H. IKBAR, SH.,MH.



NO.	NAMA PROGRAM	PAGU
1	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1,727,237,182
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	9,382,712,500
3	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1,472,069,200
4	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	53,736,800
5	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3,696,778,655
6	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5,209,315,100
7	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	101,508,000
8	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	135,795,500
9	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	6,818,569,100
10	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	350,000,000
11	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-
12	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2,464,141,600
13	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	344,971,000
14	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1,802,430,560
15	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	737,211,977
16	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2,369,678,133
17	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2,904,629,000
18	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	324,331,200
19	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-
20	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	27,460,700
21	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	193,502,000
22	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3,786,177,370



NO.	NAMA PROGRAM	PAGU
23	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	725,769,200
24	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	241,470,000
25	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	97,284,473,566
26	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	31,313,133,250
27	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	989,250,000
28	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	227,700,700
29	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	25,929,800
30	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	36,033,920,318
31	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	32,148,397,700
32	PROGRAM PENATAAN DESA	598,288,680
33	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	126,847,000
34	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	710,985,450
35	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	209,769,800
36	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	1,914,141,300
37	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1,739,822,200
38	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	559,664,000
39	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	10,368,700
40	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	748,090,100
41	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	299,200,000
42	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	15,957,700
43	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	99,090,000
44	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1,877,666,100
45	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	100,950,116
46	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	4,626,716,500



NO.	NAMA PROGRAM	PAGU
47	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4,586,692,000
48	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	2,339,020,000
49	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	400,000,000
50	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	82,799,600
51	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	160,836,200
52	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2,465,497,600
53	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	9,448,233,858
54	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	243,785,480,826
55	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	4,249,234,547
56	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	383,737,000
57	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	71,919,416,574
58	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	9,089,169,208
59	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2,898,056,150
60	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	771,128,100
61	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	50,392,800
62	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	-
63	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1,100,000,000
64	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	398,940,000
65	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	327,641,586
66	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	15,136,750
67	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	20,524,409,268
68	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1,911,859,226
69	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	7,061,901,191
70	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	4,348,935,600



NO.	NAMA PROGRAM	PAGU
71	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	7,151,000
72	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	18,000,000
73	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	195,873,200
74	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-
75	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	29,526,500
76	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	14,756,521,188
77	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	24,510,000
78	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	40,500,000
79	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	84,942,400
80	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	888,467,400
81	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	478,072,250
82	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	71,387,000
83	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	376,653,800
84	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	961,083,700
85	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	88,890,000
86	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1,078,652,593
87	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1,761,915,400
88	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	4,456,748,470
89	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	-
90	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1,179,745,490
91	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	777,701,500
92	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	65,905,500



NO.	NAMA PROGRAM	PAGU
93	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	10,702,400
94	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	656,871,922
95	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	7,619,345,152
96	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	26,199,800
97	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	652,030,450,352
98	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	47,997,908,685
99	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	16,521,442,760
100	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	14,482,855,560
101	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	112,604,975
102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-
103	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-
104	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2,052,378,200
105	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	620,052,700
106	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-
107	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	15,294,925,800
108	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1,342,513,201
109	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1,667,177,200
110	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	26,755,200
111	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	1,567,418,000
112	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	13,206,700
113	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	-
114	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2,750,793,780



NO.	NAMA PROGRAM	PAGU
115	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	9,515,000
116	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2,838,700
117	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	-
118	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	533,614,000
119	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	866,724,100
120	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	349,567,420
121	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	858,214,000
122	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	86,917,060
123	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	886,387,500
124	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	114,390,000
125	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	205,151,600
126	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	61,033,600
	JUMLAH	1,440,958,578,600


BUPATI KONAWE UTARA
H. IRBAR, SH.,MH.

ANGGARAN DALAM PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Jumlah Anggaran dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Rp. 1.440.958.578.600 terdiri dari 126 Program, 670 Kegiatan dan 2458 Sub Kegiatan



Bab

Akuntabilitas Kinerja



3.1 AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dimaksudkan untuk menilai, menganalisis, dan menyajikan informasi secara sistematis terkait pencapaian tujuan dan sasaran. Melalui proses ini, dapat terlihat sejauh mana keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah daerah dalam menjalankan visi dan misi yang ditetapkan, sekaligus memastikan adanya perbaikan dan peningkatan yang berkelanjutan

3.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Pengukuran kinerja pada tingkat sasaran berfokus pada evaluasi hasil (outcome) melalui analisis faktor yang memengaruhi capaian dan pemantauan tren kinerja. Sementara itu, pada tingkat kegiatan berfokus pada keluaran (output) dengan menilai efektivitas program atau aktivitas dalam mencapai target kinerja.

> 95%-100%	Sangat Berhasil
> 80%-95%	Berhasil
> 50%-80%	Cukup Berhasil
<50%	Kurang Berhasil



Dari 30 indikator kinerja yang mendukung 18 sasaran strategis, sebagian telah melampaui target dan tergolong berhasil, namun masih ada beberapa yang belum mencapai target.

Pengukuran kinerja menjadi instrumen evaluasi untuk menilai keberhasilan program dan kegiatan dalam mendukung visi misi serta sasaran RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2025–2029. Capaian tersebut diukur melalui indikator dalam Penetapan Kinerja 2025, di mana setiap program Perangkat Daerah menjadi upaya nyata dalam mewujudkan sasaran pembangunan daerah.

RINGKASAN CAPAIAN TUJUAN

Tujuan 1 : Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Terdiri dari 6 (enam) sasaran strategis dan 10 (sepuluh) indikator kinerja. Adapun Indikator Kinerja yang sangat berhasil atau melebihi target diantaranya: Indeks Daya saing Daerah (3,28), Indeks Pembangunan Manusia tercatat dengan realisasi kinerja 73,42% (capaian 101,06%), Usia Harapan Hidup 70,73% (capaian 100,33%), Tingkat Kemiskinan 11,89% (capaian 115,39%), dan Indeks Ketimpangan Gender 0,51% (capaian 101,96%). Indikator yang belum mencapai target adalah Prevalensi Stunting dengan realisasi 5% (capaian 83,33%), Indeks Pendidikan dengan capaian 0,6 (realisasi 86,08) serta Tingkat Pengangguran Terbuka 3,99% (capaian 55,33%), sementara nilai untuk Indeks Pendidikan, Indeks Pembangunan Pemuda, dan Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga belum tersedia.

Tujuan 2 : Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan

Terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja. Ada pun indikator kinerja tersebut keduanya belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu indikator Indeks Konektivitas Wilayah realisasi 0,048 (capaian 96%) dan Indeks Infrastruktur dengan realisasi 5,1 (capaian 98,07%)



Tujuan 3 : Mewujudkan Transformasi Perekonomian Berkualitas dan Berdaya Saing

Terdiri dari 7 (tujuh) sasaran strategis dan 11 (sebelas) indikator kinerja dimana Dua indikator yang berhasil melebihi target adalah PDRB Perkapita dengan capaian kinerja 90,39%. Sementara itu, beberapa indikator masih belum mencapai target yang diharapkan, antara lain Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,34%, Rasio Gini 0,414%, Rasio PDRB Industri Pengolahan 0,78%, Indeks Ekonomi Biru Daerah 49,50%, Indeks Ketahanan Pangan 66,83%, Rasio PDRB Pariwisata 8,6% dan Indeks Desa Membangun 0,694%.

Tujuan 4 : Mempercepat Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegrasi dan Adaptif

Terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja di mana keduanya belum mencapai target. Indikator Indeks Reformasi Birokrasi tercatat dengan capaian kinerja 68,50 (capaian 99,35%) dan nilai Indeks RB General dengan capaian kinerja 59,80 (capaian 95,91%).

Tujuan 5 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja dimana indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berhasil melebihi target dengan capaian kinerja 63,09% (100,59%), sedangkan Indeks Risiko Bencana masih belum memenuhi target, tercatat sebesar 172,77 (90,39%). Satu indikator lainnya, yaitu Persentase Penurunan Emisi GRK, hingga saat ini nilainya belum tersedia.

Tujuan 6 : Mewujudkan Masyarakat Berkebudayaan Maju

Terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja yaitu Indeks Pembangunan Kebudayaan dengan realisasi 52 (capaian 97,43%) dan Indeks Ketahanan Budaya Daerah dengan realisasi 49 (capaian 98,00%) yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan.



Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025 Dibandingkan dengan Target Perjanjian kinerja Tahun 2025

CAPAIAN INDIKATOR MAKRO 2025

Tabel 3.1 Capaian Indikator Makro Tahun 2025

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,25	4,34	69,44
PDRP Per Kapita	68.200	6.164,67	90,39
Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota	3,72	4,34	116,66
Tingkat Kemiskinan	13,72	11,89	115,39
Tingkat Pengangguran Terbuka	2,21	3,99	55,22
Rasio Gini	0,285	0,414	68,84
Indeks Pembangunan Manusia	72,65	73,42	101,05
Penurunan Intensitas Emisi GRK	32,88	-	-
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	62,72	63,09	100,59

Sumber Data: Perda Kab. Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2025 (Halaman 6, 260)

<https://konutkab.bps.go.id/id/publication/2026/02/27/2163732a4c8d5af5400f8fb3/kabupaten-konawe-utara-dalam-angka-2026.html>

**CAPAIAN IKU TAHUN 2025****Tabel 3.2 Capaian IKU Tahun 2025**

Kode	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja
Misi 1 : Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Produktif						
1.1	Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing		Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	3,23	3,28	101,55
			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,65	73,42	101,06
1.1.1		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	70,50	70,73	100,32
			Prevalensi Stunting	5	5,53	83,33
1.1.2		Menurunnya Angka Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	13,72	11,89	115,39
1.1.3		Meningkatnya Derajat Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,697	0,6	86,08
1.1.4		Meningkatnya Daya Saing dan Prestasi Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	56,98	56,23	98,68
1.1.5		Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,21	3,99	55,33
1.1.6		Terwujudnya Pembangunan Keluarga Berkualitas dan Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	61,75	61	98,79
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,51	0,515	99,02



Kode	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja
Misi 2 Mempercepat Konektivitas Wilayah Melalui Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi Serta Sarana Prasarana Permukiman yang Berkualitas						
1.2	Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan		Indeks Konektivitas Wilayah	0,05	0,048	96
1.2.1		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Pembangunan	Indeks Infratruskstur Dasar	5,2	5,1	98,07
Misi 3 : Menciptakan Perekonomian Daerah yang Produktid dan Berdaya Saing						
1.3	Mewujudkan Transformasi Perekonomian Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatnya Daya Saing Produktivitas Ekonomi	Laju Perteumbuhan Ekonomi	6,25	4,34	69,44
			PDRP Perkapita	68.200	6.164,67	90,39
			Rasio Gini	0,285	0,414	68,84
			Rasio PDRB Industri Pengolahan	1,50	0,78	52,00
1.3.1		Terwujudnya Penerapan Ekonomi Biru Daerah	Indeks Ekonomi Biru Daerah	49,72	49,5	99,55
1.3.2		Terwujudnya Kemandirian Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	77	66,83	86,79
1.3.3		Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Perekonomuan Daerah	Rasio PDRB Pariwisata	8,75	8,6	98,28
1.3.4		Terwujudnya Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Indeks Desa Membangun	0,6986	0,694	99,34
1.3.5		Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,05	0,04	80
			Inklusi Keuangan	2,13	2,09	98,12



Kode	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja
1.3.6		Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Presentase Realisasi Investasi terhadap PDRB	23,14	22,92	99,04
Misi 4 : Mewujudkan Penyelenggaraab Pemerintahan yang Responsif dan Inovatif						
4.1	Mempercepat Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegrasi dan Adaptif	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi yang Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi	68,95	68,5	99,35
			Indeks RB General	62,35	59,8	95,91
Misi 5 : Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan serta Penanggulangan Bencana						
5.1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup		Presentase Penurunan Emisi GRK (%)	32,88	-	-
5.1.1		Terwujudnya Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Resiko Bencana (IRB)	156,16	172,77	90,39
5.1.2		Terwujudnya Lingkunagn Hidup Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	62,72	63,09	100,59
Misi 6 : Pengembangan Kebudayaan Daerah sebagai Landasan Identitas dan Ketahanan Sosial						
6.1	Mewujudkan Masyarakat Berkebudayaan Maju	Terwujudnya Ketahanan Budaya Daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	53,37	52	97,43
			Indeks Ketahanan Budaya Daerah	50	49	98,00



3.1.2 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025

PENGUKURAN KINERJA DIBANDINGAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA DAN TARGET AKHIR RPJMD

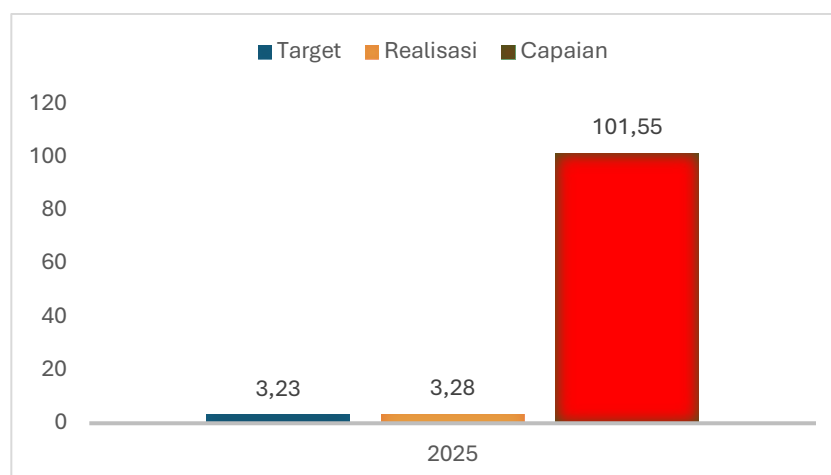
MISI 1 : Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Produktif

Tujuan 1 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

IKU 1 : Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) menunjukkan kemampuan daerah memanfaatkan potensi untuk mendorong pertumbuhan, kesejahteraan, dan investasi. Konawe Utara cukup kuat pada sektor sumber daya alam seperti pertambangan dan pertanian, namun infrastruktur, SDM, inovasi, dan tata kelola masih perlu ditingkatkan. Ke depan, penguatan difokuskan pada diversifikasi ekonomi, peningkatan layanan publik, pembangunan infrastruktur, serta pengembangan UMKM dan digitalisasi ekonomi.

Grafik Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Kinerja Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2025



Sumber Data : Hal. 81

[https://www.researchgate.net/publication/393924274 Indeks Daya Saing Daerah 2024?utm_source=chatgpt.com](https://www.researchgate.net/publication/393924274_Indeks_Daya_Saing_Daerah_2024?utm_source=chatgpt.com)



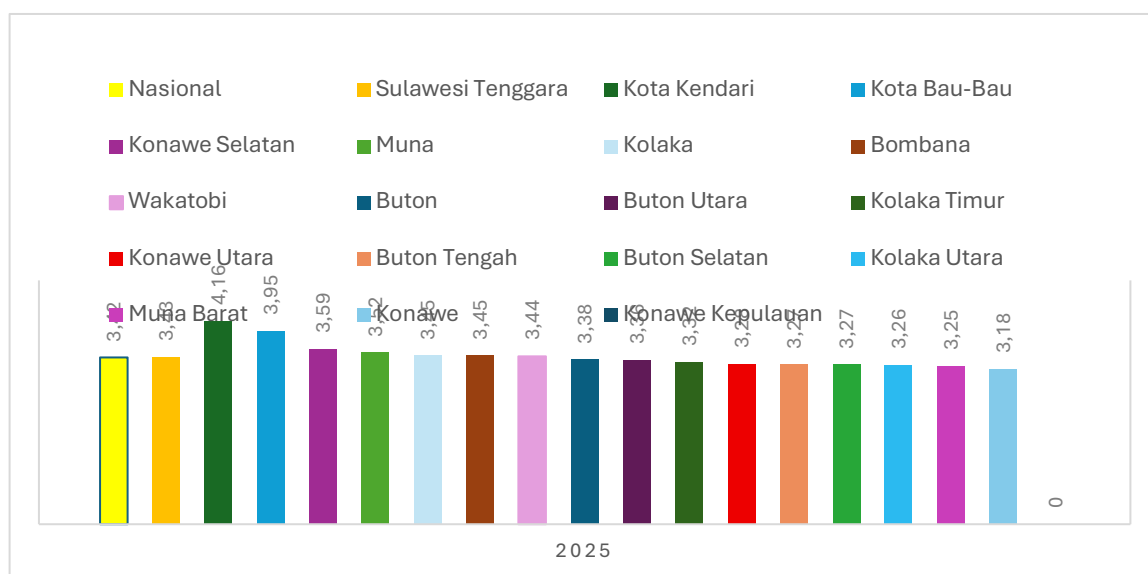
Pada tahun 2025, Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Konawe Utara dengan capaian 101,55% dan kategori tinggi. Nilai ini melampaui target 3,23 dengan realisasi 3,28, sehingga tergolong sangat berhasil dan menunjukkan awal yang positif dalam memperkuat daya saing daerah.

Capaian Tahun 2025	Target Akhir RPJMD (2029)	Selisih Target Terhadap Capaian Akhir RPJMD
3,28	3,65	89,86

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara untuk tahun 2025-2029, Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) pada tahun 2025 menunjukkan konsistensi yang baik, walaupun belum mencapai target tahunan yang telah ditentukan.

Capaian tahun 2025 terhadap target tahun 2029 sebesar 89,86%.

Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2025 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional



Sumber Data : Hal. 81

https://www.researchgate.net/publication/393924274_Indeks_Daya_Saing_Daerah_2024?utm_source=chatgpt.com



Konawe Utara memiliki nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) sebesar 3,28 yang menunjukkan kategori sedang dan masih di bawah beberapa daerah di Sulawesi Tenggara. Nilai ini menandakan perlunya penguatan pada kualitas SDM, infrastruktur, inovasi, dan efisiensi pasar untuk meningkatkan daya saing daerah.

Faktor Penghambat:

1. Daya saing daerah masih berada pada kategori sedang (nilai 3,28).
2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) belum optimal.
3. Infrastruktur masih terbatas dan perlu peningkatan.
4. Inovasi dan adopsi teknologi belum maksimal.
5. Efisiensi pasar dan iklim investasi perlu diperkuat.

Upaya yang Dilakukan:

1. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi.
2. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar dan transportasi.
3. Penguatan inovasi dan kreativitas melalui program riset, teknologi, dan digitalisasi.
4. Peningkatan efisiensi pasar dan iklim usaha melalui regulasi yang mendukung investasi.

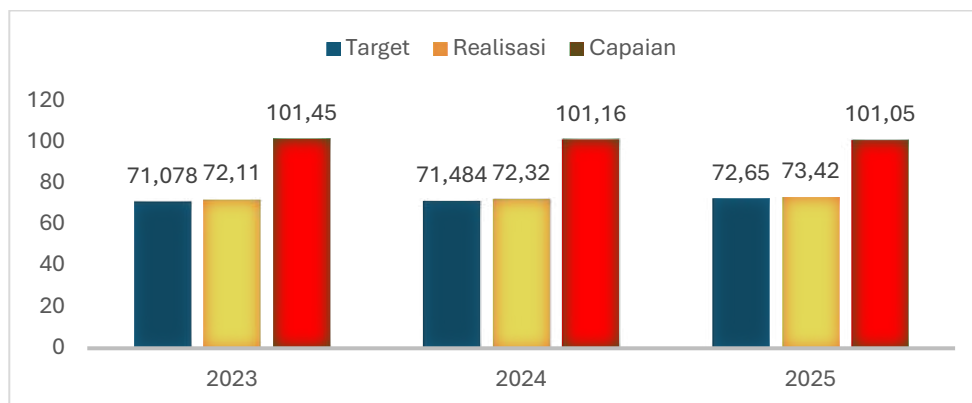
Solusi:

1. Diversifikasi ekonomi dan pengembangan sektor unggulan lokal untuk meningkatkan daya saing.
2. Investasi pada SDM melalui pendidikan vokasi dan peningkatan keterampilan kerja.
3. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar untuk mendukung mobilitas dan konektivitas.
4. Dukungan inovasi dan digitalisasi UMKM untuk memperluas pasar dan daya saing.
5. Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan regulasi untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.

**IKU 2 : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui tiga dimensi: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. IPM membantu pemerintah melihat capaian pembangunan serta menentukan prioritas kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2023-2025 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional



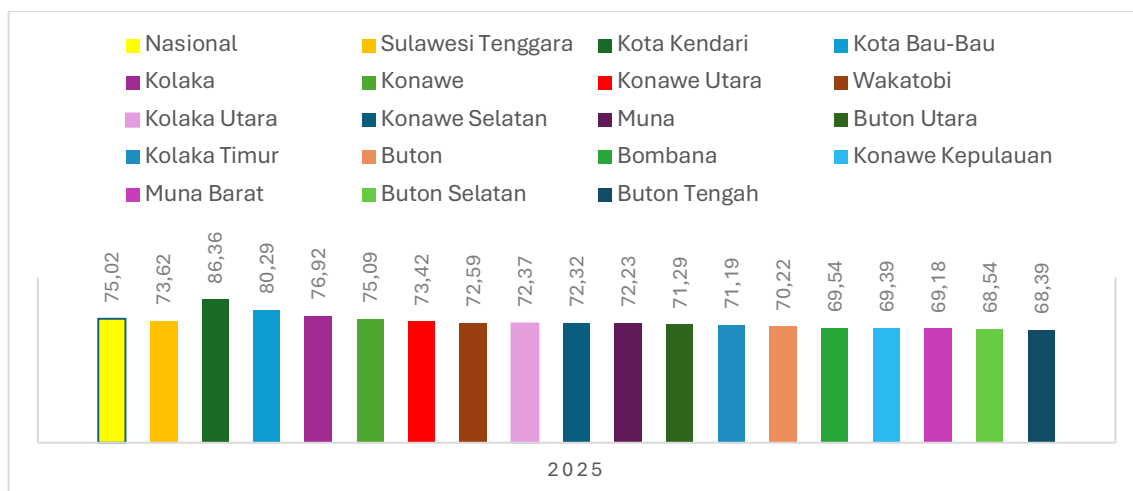
Dalam beberapa tahun terakhir, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Konawe Utara menunjukkan peningkatan yang stabil, mencerminkan kemajuan dalam kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan data resmi, IPM tercatat 72,11 pada tahun 2023, meningkat menjadi 72,32 pada tahun 2024, dan pada 2025 kembali tercatat 73,42. Seluruh capaian ini termasuk dalam kategori tinggi ($70 < \text{IPM} < 80$).

Capaian Tahun 2025	Target Akhir RPJMD (2029)	Selisih Target Terhadap Capaian Akhir RPJMD
73,42	75,10	97,76

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara periode 2025–2029, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah mendekati sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2029. Capaian IPM tahun 2025 menunjukkan konsistensi yang baik, dengan realisasi hingga 2025 mencapai 97,76% dari target akhir 2029.



Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Pemabangunan Manusia Tahun 2025 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional



Sumber :

<https://konutkab.bps.go.id/id/publication/2026/02/27/2163732a4c8d5af5400f8fb3/kabupaten-konawe-utara-dalam-angka-2026.html>



Dalam tiga tahun terakhir, IPM Kabupaten Konawe Utara meningkat menjadi 73,42 (2025), sehingga untuk pertama kalinya masuk kategori tinggi ($70 < \text{IPM} < 80$), meski masih di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Peningkatan IPM ke depannya diharapkan mencapai kategori sangat tinggi pada akhir periode RPJMD 2025-2029 melalui pembangunan yang berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

Faktor Penghambat:

1. IPM masih di bawah rata-rata provinsi dan nasional, menunjukkan kesenjangan kualitas hidup.
2. Akses layanan kesehatan dan fasilitas dasar (air bersih, MCK) belum merata.
3. Partisipasi pendidikan anak SD–SLTP belum optimal, masih ada risiko putus sekolah.
4. Daya beli masyarakat terbatas, lapangan kerja masih kurang merata.



Upaya yang Dilakukan:

1. Perbaikan layanan kesehatan dan fasilitas dasar.
2. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.
3. Peningkatan partisipasi pendidikan untuk anak usia sekolah.
4. Peningkatan daya beli masyarakat melalui lapangan kerja, pengeluaran per kapita, dan program sosial seperti BPNT dan PKH.

Solusi dan Rekomendasi:

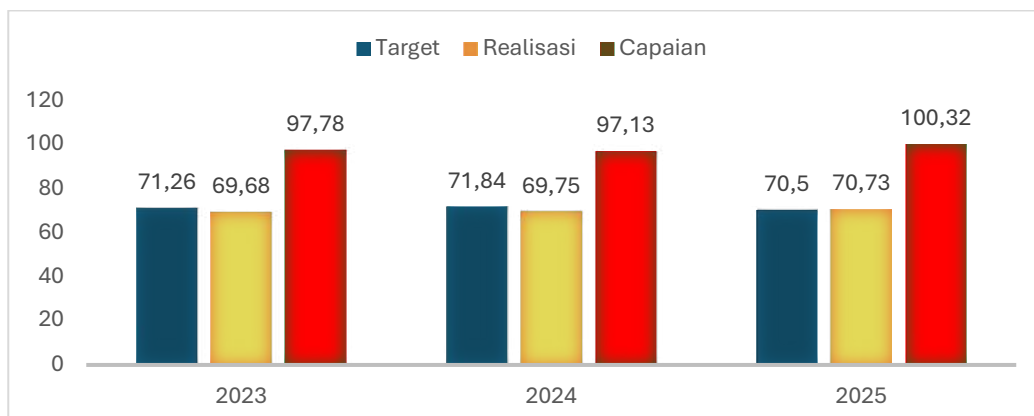
1. Memperluas jangkauan layanan kesehatan dan pembangunan fasilitas MCK di wilayah terpencil.
2. Menyediakan program pendidikan inklusif untuk mencegah putus sekolah.
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui UMKM, pelatihan keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja baru.
4. Mengoptimalkan program sosial untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Sasaran 1 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

IKU 3 : Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah perkiraan rata-rata usia seseorang sejak lahir, mencerminkan kualitas kesehatan masyarakat. Semakin tinggi UHH, semakin baik akses layanan kesehatan, gizi, sanitasi, dan kondisi lingkungan. UHH juga dipengaruhi ekonomi, pendidikan, dan gaya hidup sehat, serta menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan kesehatan dan komponen utama IPM.

Grafik Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Kinerja Usia Harapan Hidup Tahun 2023-2025



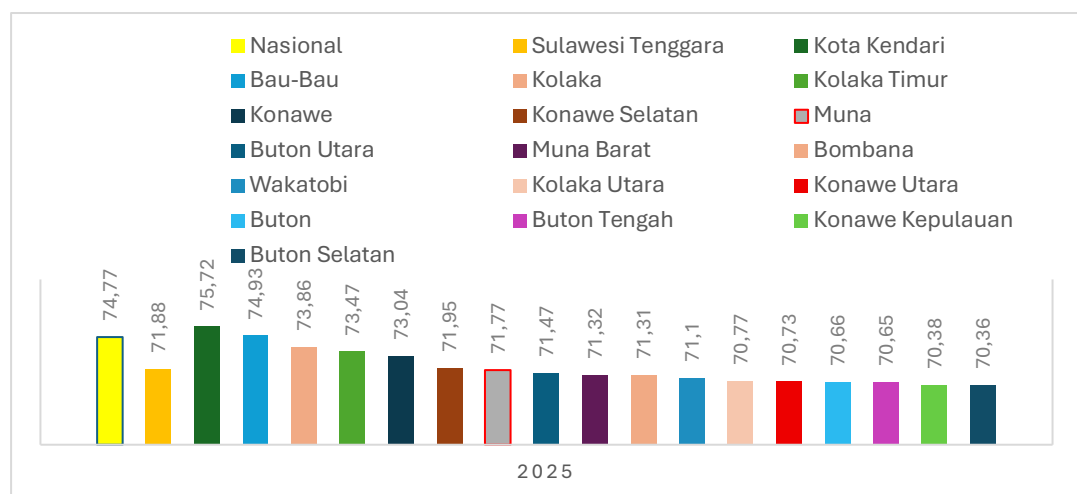


Cakupan sasaran peningkatan derajat kesehatan masyarakat menunjukkan tren positif, dengan usia harapan hidup meningkat dari 69,68 tahun pada 2023 menjadi 69,75 tahun pada 2024, dan 70,73 tahun pada 2025. Angka ini telah melampaui target sebesar 70,50%, dengan capaian mencapai 100,32% dari sasaran, sehingga meskipun belum sepenuhnya memenuhi target jangka panjang, pencapaian ini tetap masuk dalam kategori “Sangat Berhasil”/

Capaian Tahun 2025	Target Akhir RPJMD (2029)	Selisih Target Terhadap Capaian Akhir RPJMD
70,73	71,95	98,30

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2025–2029, angka Usia Harapan Hidup menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, capaian terhadap target 2029 mencapai 98,30%.

Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Usia Harapan Hidup Tahun 2025 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional



Sumber:

<https://konutkab.bps.go.id/id/publication/2026/02/27/2163732a4c8d5af5400f8fb3/kabupaten-konawe-utara-dalam-angka-2026.html>



Pada tahun 2025, usia harapan hidup Konawe Utara sebesar 70,73 tahun, sedikit di bawah rata-rata Sulawesi Tenggara (71,89 tahun) dan nasional (74,77 tahun). Kota Kendari memiliki angka tertinggi (79,61 tahun), sedangkan Buton Tengah terendah (67,58 tahun), menunjukkan adanya kesenjangan akses kesehatan dan kualitas hidup antar wilayah.

Faktor Penghambat:

Perubahan gaya hidup kurang sehat meningkatkan kasus penyakit degeneratif pada usia produktif. Selain itu, luasnya wilayah, faktor sosial ekonomi, dan rendahnya literasi kesehatan menghambat akses layanan dan deteksi dini.

Upaya yang Dilakukan:

Pemerintah daerah di Kabupaten Konawe Utara meningkatkan akses layanan dasar melalui program Universal Health Coverage (UHC), skrining rutin PTM di Posyandu Siklus Hidup, perbaikan gizi, serta penyediaan air bersih dan sanitasi.

Solusi:

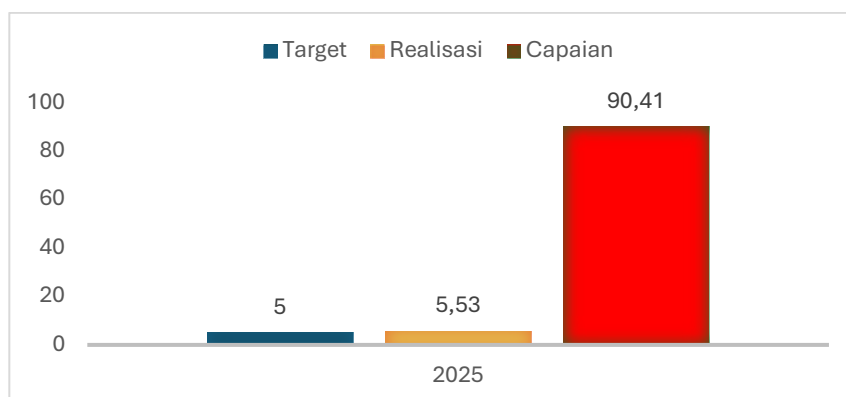
Memperkuat promotif-preventif melalui GERMAS, kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan, penguatan Posyandu Siklus Hidup dan CKG, serta memastikan ketersediaan obat di Puskesmas guna menjaga produktivitas dan angka harapan hidup masyarakat.

IKU 4 : Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting adalah persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar akibat kekurangan gizi kronis sejak kehamilan hingga usia dua tahun. Stunting dipengaruhi gizi, infeksi, sanitasi, dan layanan kesehatan, serta berdampak pada pertumbuhan, perkembangan otak, dan produktivitas masa depan. Penurunan stunting dilakukan melalui perbaikan gizi, sanitasi, edukasi pola makan, dan penguatan layanan kesehatan dasar.



Grafik Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Kinerja Prevelensi Stunting Tahun 2025

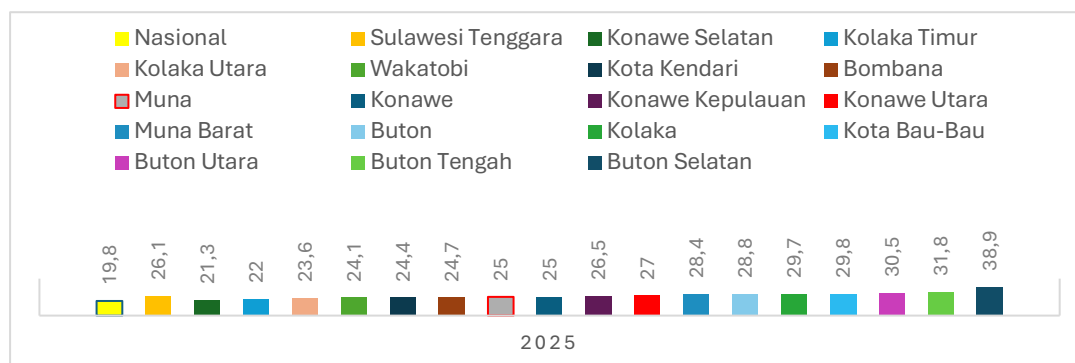


Prevalensi stunting di Kabupaten Konawe Utara mulai diukur pada 2025 sebagai baseline evaluasi, dengan capaian 5,53%. Angka ini mendekati target 5% dengan realisasi 90,41%, sehingga kinerjanya dikategorikan “sangat berhasil”. Indikator ini juga merupakan program baru dalam RPJMD 2025–2029 sebagai prioritas peningkatan kesehatan dan kualitas SDM.

Capaian Tahun 2025	Target Akhir RPJMD (2029)	Selisih Target Terhadap Capaian Akhir RPJMD
5,53	3,67	66,36

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2025–2029, Prevalensi Stunting di Kabupaten Konawe Utara cenderung meningkat dari tahun sebelumnya mencapai 66,36% dari target 2029, sehingga kinerja sudah sangat mendekati sasaran akhir periode RPJMD.

Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Prevelensi Stunting Tahun 2025 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional



Sumber :Hal 36 <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/survei-status-gizi-indonesia-ssgi-2024/>



Pada tahun 2025, prevalensi stunting di Konawe Utara mencapai 29,7%, termasuk yang tertinggi di Sulawesi Tenggara dan masih di atas rata-rata nasional (19,8%). Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan intervensi gizi, layanan kesehatan, sanitasi, dan edukasi pola makan..

Faktor Penghambat:

Lambatnya penurunan stunting disebabkan kurangnya asupan gizi (terutama protein hewani), rendahnya pola asuh dan edukasi gizi, sanitasi serta air bersih yang buruk, serta faktor sosial seperti kemiskinan dan pernikahan dini. Intervensi belum merata, penemuan kasus masih pasif, PKMK belum tersedia, dan dukungan lintas sektor masih rendah.

Upaya:

Pertemuan peningkatan SDM terpadu dan pelaksanaan Gerakan Cegah Stunting.

Solusi:

Pendekatan komprehensif melalui intervensi gizi pada 1.000 HPK (ASI eksklusif, MPASI tinggi protein, pemantauan posyandu), pemanfaatan pangan lokal, penguatan data rujukan, perbaikan sanitasi, pengadaan PKMK, serta peningkatan edukasi gizi bagi orang tua dan ibu hamil di Kabupaten Konawe Utara

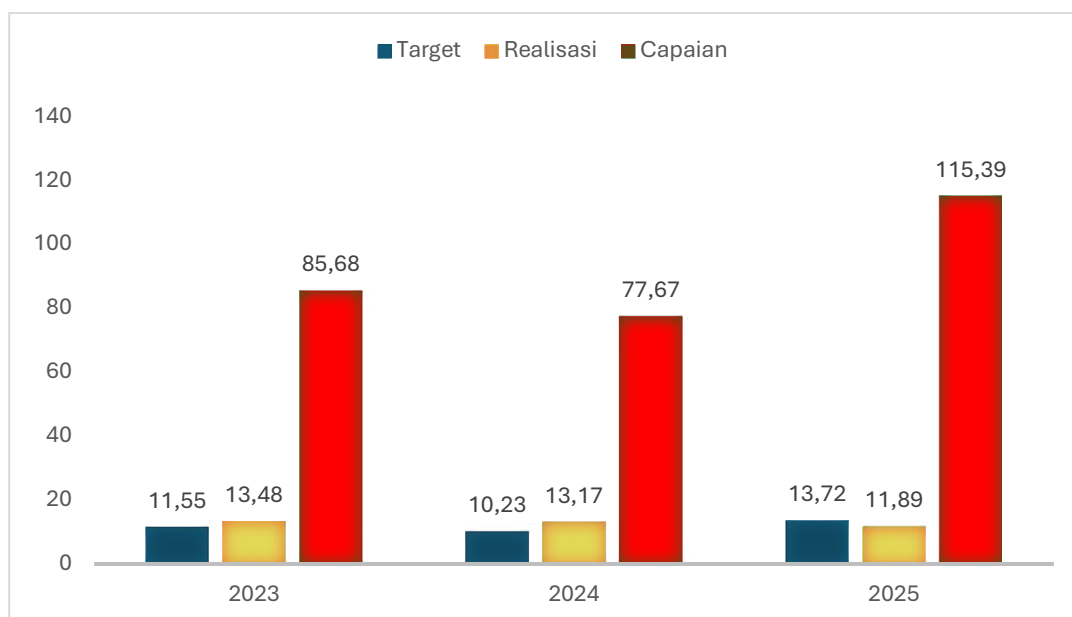
Sasaran 2: Menurunkan Angka Kemiskinan

IKU 5 : Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan adalah persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, yaitu batas minimum pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan, sekaligus menjadi indikator kesejahteraan dan acuan kebijakan pembangunan.



Grafik Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Kinerja Tingkat Kemiskinan Tahun 2023-2025



Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Tingkat Kemiskinan (%) menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan program ini. Di Kabupaten Konawe Utara, tingkat kemiskinan terus menunjukkan tren penurunan yang positif. Pada 2023, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 13,48%, menurun menjadi 13,17% pada 2024. Pencapaian tahun 2025 bahkan lebih signifikan, dengan realisasi mencapai 115,39% dari target yang ditetapkan sebesar 11,89%, menegaskan efektivitas program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

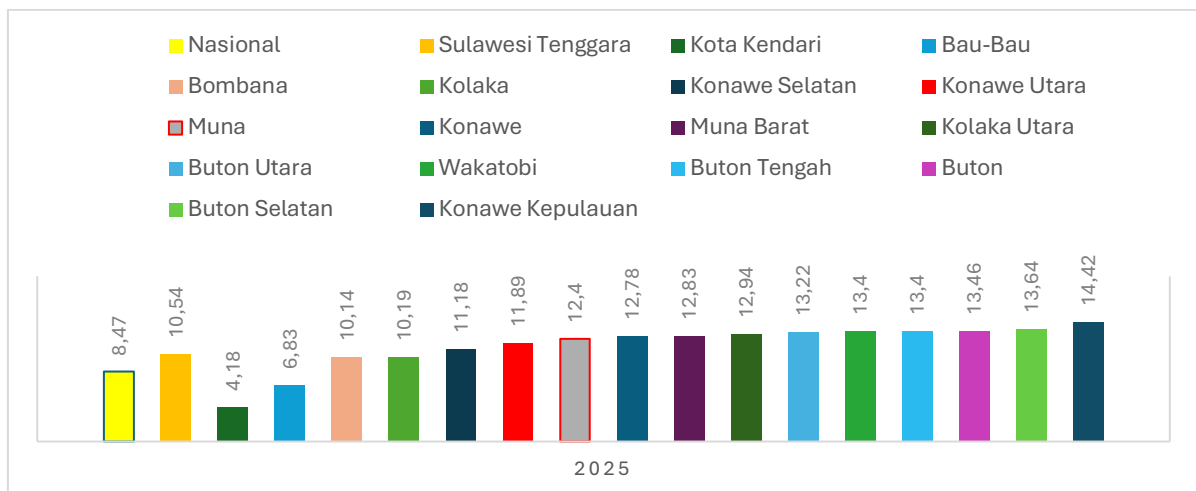
Capaian Tahun 2025	Target Akhir RPJMD (2029)	Selisih Target Terhadap Capaian Akhir RPJMD
11,89	8,69	73,08

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara periode 2025–2029, Tingkat Kemiskinan masih berada di bawah target yang ditetapkan, namun diharapkan dapat tercapai pada akhir periode RPJMD tahun 2029. Sampai tahun 2025, capaian

terhadap target tahun 2026 tercatat sebesar 73,08%.



Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Tingkat Kemiskinan Tahun 2025 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional



Sumber :

<https://konutkab.bps.go.id/id/publication/2026/02/27/2163732a4c8d5af5400f8fb3/kabupaten-konawe-utara-dalam-angka-2026.html>



Pada tahun 2025, Konawe Utara mencatat angka 11,89, berada pada posisi moderat di Sulawesi Tenggara. Nilai ini lebih tinggi dari rata-rata nasional (8,47) dan provinsi (10,54), namun lebih baik dibandingkan daerah seperti Buton Tengah dan Konawe Kepulauan yang di atas 14–15. Secara umum, posisinya berada di tengah dibandingkan wilayah lain.

Faktor Penghambat:

1. Fluktuasi kondisi ekonomi dan sosial Masyarakat
2. Ketergantungan sebagian masyarakat terhadap bantuan sosial
3. Ketersediaan lapangan pekerjaan dengan SDM yang tersedia tidak sesuai

Upaya:

1. Pelaksanaan program bantuan sosial yang tepat sasaran
2. Penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat
3. Pendampingan keluarga miskin secara berkelanjutan



Solusi:

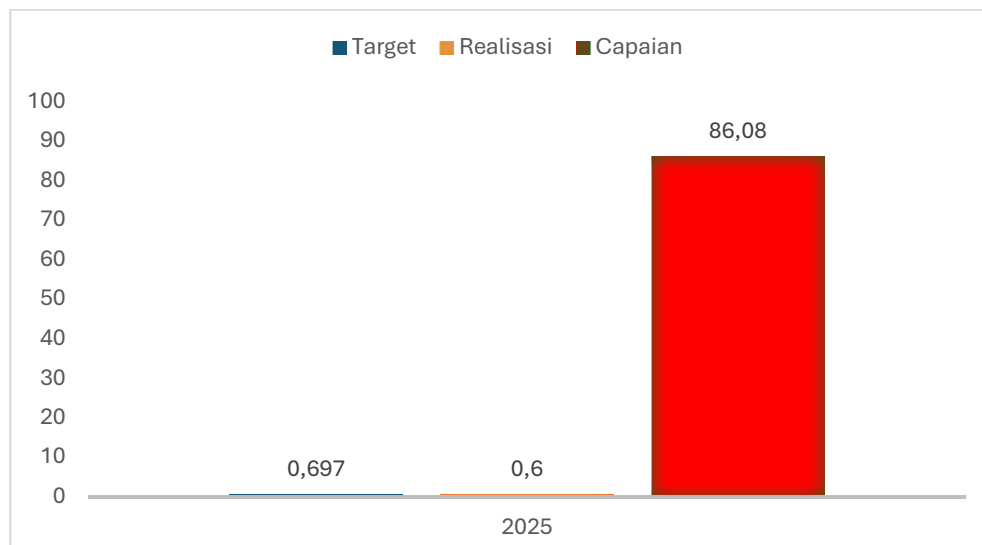
1. Integrasi program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi
2. Peningkatan akses lapangan kerja dan usaha produktif

Sasaran 3: Meningkatnya Derajat Pendidikan

IKU 6 : Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan mengukur kualitas dan pencapaian pendidikan suatu daerah, berdasarkan dua komponen: Harapan Lama Sekolah (HLS), yaitu perkiraan lama anak bersekolah, dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), yaitu tahun pendidikan yang telah ditempuh penduduk ≥ 25 tahun. Nilai indeks yang tinggi menunjukkan akses, partisipasi, dan keberhasilan pendidikan yang baik serta kualitas sumber daya manusia yang lebih tinggi.

Grafik Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Kinerja Indeks Pendidikan Tahun 2025



Pada tahun 2025, Indeks Pendidikan Kabupaten Konawe Utara tercatat sebesar 0,600 dengan capaian kinerja 86,08% dari target RPJMD. Hasil ini menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan telah berjalan cukup baik, meskipun masih perlu penguatan akses, mutu, dan pemerataan layanan pendidikan.

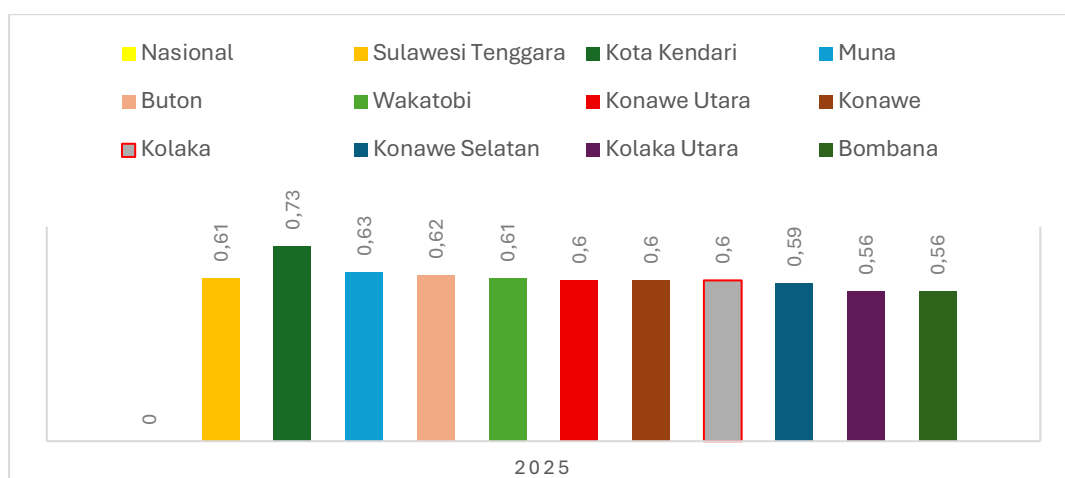


Capaian Tahun 2025	Target Akhir RPJMD (2029)	Selisih Target Terhadap Capaian Akhir RPJMD
0,600	0,798	75,18

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2029, capaian Indeks Pendidikan pada tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Nilai Indeks Pendidikan yang terealisasi pada tahun 2025 tercatat sebesar 75,18 % dari target

akhir RPJMD.

Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Pendidikan Tahun 2025 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional



Sumber : https://web-api.bps.go.id/download.php?f=1STGDOuDjftT2h69+OBE4rW91N2NqU1JQcGdCeEhlT0NLenhDVExicDMzcGZqbGdteFZDeXB2ZzlXZjA1R1FONGN0eERTOXpUd3lxVmM2MDd6Qjd2NnJKNgh2N3gvT0lVT3dtUGd2bkRFTmh4VHYzVkJVU0hGRFkrSWcvNINPTm9KVUwyNVBnb0lpaytSKzZ2VXBmY3l5a05Xd1Jub3VveUNPaVpUWXVUaGc4TVhTQ29ablNwWGVOMlJNVnV5czZsZ2FTcU5Cd0FWYzdIbGxjNDJBRW5iZDFsZjZ6TnYwUUhHeHNWN1dEc29pWVNENmFHSnRIV0tsQ1J0ODVmOTRobyt5am5WQVBBbmXwRnJzWTlVVWhqZjNlL3ZxZVVNWVWJlNFJTblpBPT0%3D&utm_source=chatgpt.com



Pada tahun 2025, Konawe Utara memiliki nilai 0,6, sedikit di bawah rata-rata Sulawesi Tenggara (0,61) dan setara dengan Konawe serta Kolaka. Nilai ini masih di bawah Kota Kendari (0,73), namun lebih tinggi dibandingkan Konawe Selatan (0,59), Kolaka Utara, dan Bombana (0,56).



Faktor Penyebab:

1. Kesiapan data dan sistem informasi pendidikan rendah.
2. Kurangnya SDM khusus program
3. Minimnya pemahaman terhadap indikator baru
4. Keterbatasan anggaran dan fasilitas pendukung
5. Prioritas program lain

Upaya yang Bisa Dilakukan

1. Persiapan sistem data dan informasi pendidikan
2. Pembentukan tim program Indeks Pendidikan
3. Sosialisasi program ke sekolah dan Masyarakat
4. Pengalokasian anggaran dan fasilitas
5. Integrasi dengan program pendidikan rutin

Solusi Strategis

1. Menyusun roadmap pelaksanaan Indeks Pendidikan
2. Penguatan kapasitas SDM
3. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data
4. Kolaborasi lintas sektor
5. Evaluasi awal dan perbaikan berkelanjutan

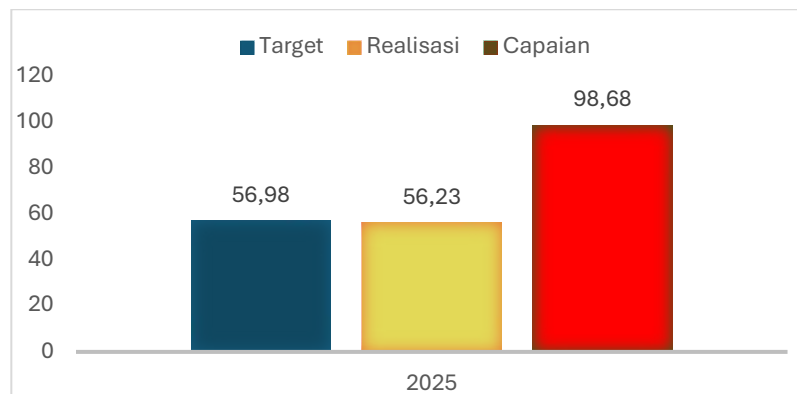
Sasaran 4: Meningkatnya Daya Saing dan Prestasi Pemuda

IKU 7 : Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) mengukur kualitas hidup dan perkembangan pemuda dalam aspek pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, peluang ekonomi, serta partisipasi sosial dan kepemimpinan. IPP menunjukkan sejauh mana pemuda memiliki kesempatan untuk tumbuh sehat, produktif, dan berdaya saing. Semakin tinggi nilai IPP, semakin baik kondisi pemuda, serta dukungan yang mereka terima untuk belajar, bekerja, berpartisipasi dalam masyarakat, dan berkontribusi pada pembangunan. IPP menjadi alat penting bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran bagi pemuda.



Grafik Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Pemuda Tahun 2025



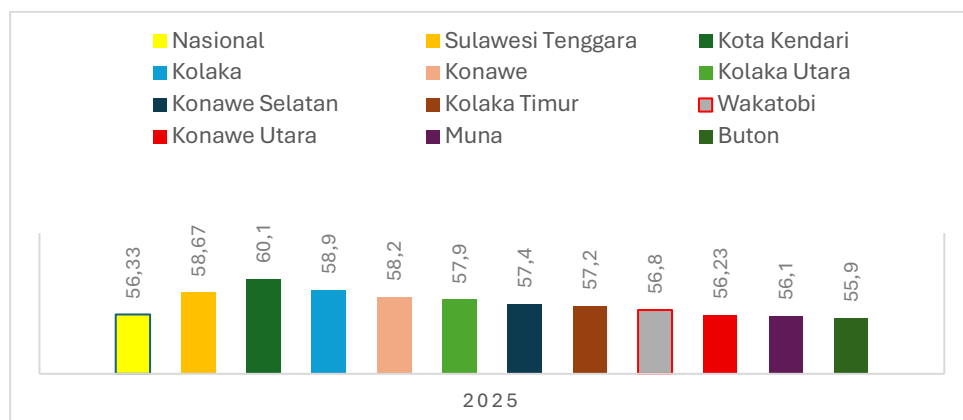
Pada tahun 2025, Indeks Pembangunan Pemuda di Konawe Utara tercatat 56,23 dengan capaian kinerja 98,68% dari target RPJMD. Hasil ini menunjukkan program pembangunan kepemudaan telah berjalan baik dan mendekati target.

Capaian Tahun 2025	Target Akhir RPJMD (2029)	Selisih Target Terhadap Capaian Akhir RPJMD
56,23	60,23	93,35

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2029, capaian Indeks Pembangunan Pemuda pada tahun 2025 tercatat sebesar 93,35% dari target akhir yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan

program pembangunan kepemudaan di Kabupaten Konawe Utara telah berjalan dengan baik dan mendekati target yang direncanakan dalam periode RPJMD.

Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Pemuda Tahun 2025 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional



Sumber : https://image.kemenpora.go.id/2026/02/04/ipp-NfnaO.pdf?utm_source=chatgpt.com



Pada tahun 2025, Konawe Utara mencatat nilai 56,23, di bawah rata-rata Sulawesi Tenggara (58,67) dan nasional (56,33). Nilai ini masih tertinggal dari Kota Kendari (60,1), Kolaka (58,9), dan Konawe (58,2), namun sedikit lebih tinggi dibandingkan Muna (56,1) dan Buton (55,9).

Faktor Penghambat:

1. Keterbatasan data indikator IPP yang terintegrasi sehingga pengukuran pembangunan pemuda belum optimal.
2. Koordinasi lintas perangkat daerah belum maksimal.
3. Sarana dan prasarana pengembangan potensi pemuda masih terbatas.
4. Partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah masih rendah.
5. Akses pendidikan, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja belum merata, terutama di wilayah pedesaan.

Upaya:

1. Meningkatkan koordinasi dan sinergi lintas perangkat daerah dalam pembangunan pemuda.
2. Memperkuat kerja sama dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pemuda dan Olahraga.
3. Meningkatkan kapasitas pemuda melalui pelatihan keterampilan, kewirausahaan, dan kepemimpinan.
4. Mendorong peran lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, dan komunitas masyarakat.
5. Menyediakan ruang partisipasi dan fasilitas pengembangan potensi pemuda.

Solusi:

1. Penguatan sistem data kepemudaan yang terintegrasi untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.
2. Pengembangan pemberdayaan ekonomi pemuda melalui wirausaha muda dan ekonomi kreatif.
3. Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai kebutuhan kerja.
4. Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah melalui forum dan komunitas.



5. Penguatan kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat.

Sasaran 5: Menurunnya Angka Pengangguran

IKU 8 : Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengukur persentase angkatan kerja yang aktif mencari pekerjaan namun belum terserap pasar kerja. TPT tinggi menunjukkan tantangan dalam penyerapan tenaga kerja, sedangkan TPT rendah mencerminkan ketersediaan pekerjaan yang lebih sesuai dengan jumlah dan keterampilan pencari kerja.

Grafik Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023-2025



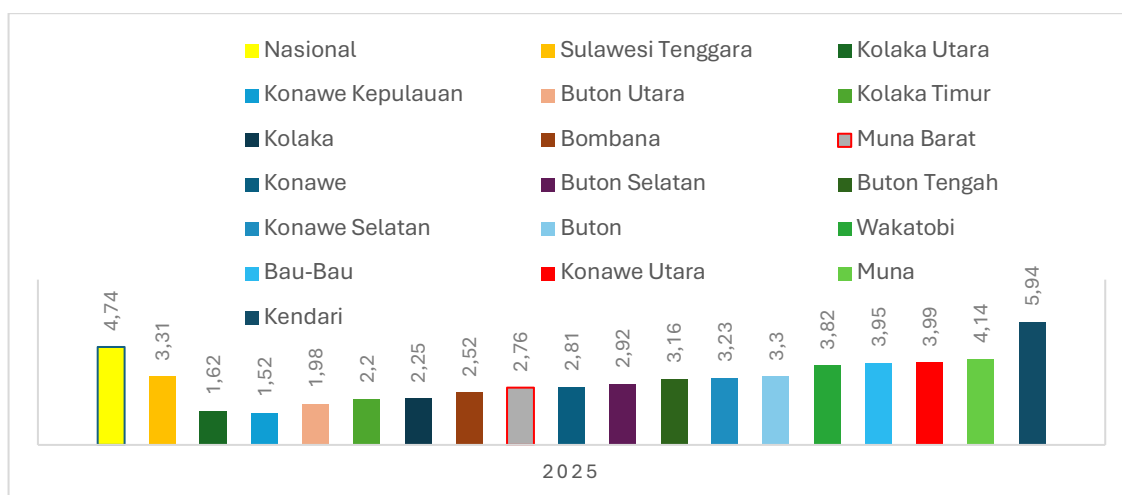
Berdasarkan evaluasi tiga tahun terakhir, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Konawe Utara mengalami fluktuasi, yaitu 2,76% pada 2023, menurun menjadi 2,40% pada 2024, namun meningkat lagi menjadi 3,99% pada 2025. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai program pelatihan dan perluasan kesempatan kerja telah dilaksanakan, upaya tersebut belum sepenuhnya mampu menekan kenaikan pengangguran.



Capaian Tahun 2025	Target Akhir RPJMD (2029)	Selisih Target Terhadap Capaian Akhir RPJMD
3,99	1,4	35,08

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2025–2029, capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap target tahun 2026 tercatat sebesar 35,08%.

Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2025 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional



Sumber

<https://konutkab.bps.go.id/id/publication/2026/02/27/2163732a4c8d5af5400f8fb3/kabupaten-konawe-utara-dalam-angka-2026.html>



Pada tahun 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Konawe Utara sebesar 3,99%, lebih tinggi dari rata-rata Sulawesi Tenggara (3,31%) namun lebih rendah dari nasional (4,74%). Posisi ini relatif menengah dibandingkan wilayah lain di provinsi tersebut.



Faktor Penghambat

Kesenjangan kualitas sumber daya manusia serta belum meratanya pertumbuhan ekonomi menjadi faktor utama yang menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih terbatasnya kompetensi tenaga kerja, rendahnya produktivitas, serta belum optimalnya akses kelompok rentan terhadap peluang ekonomi dan lapangan kerja.

Upaya yang Dilakukan

Pemerintah daerah melakukan perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan kelompok rentan melalui penyelenggaraan pelatihan keterampilan, pembinaan, serta penguatan kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

Solusi

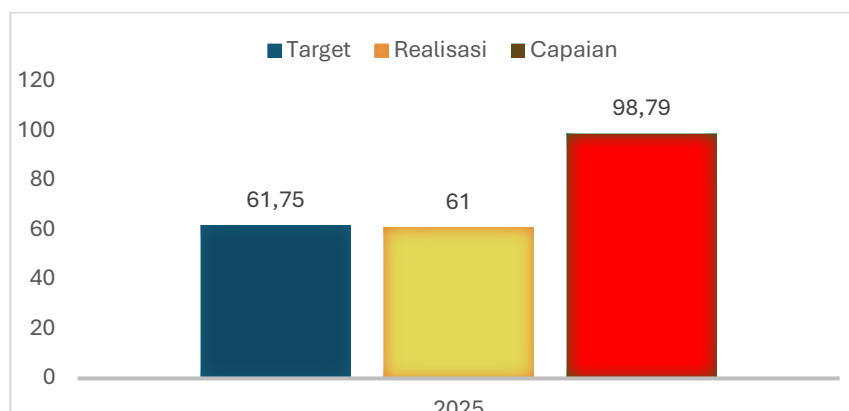
Pelaksanaan pelatihan kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik dunia usaha yang berkembang di kabupaten, sehingga kompetensi yang dihasilkan relevan dengan permintaan pasar kerja serta mampu mendorong penyerapan tenaga kerja secara lebih optimal.

Sasaran 6: Terwujudnya Pembangunan Keluarga Berkualitas dan Kesenjaraan Gender

IKU 9: Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) mengukur kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar, mengelola aspek sosial dan ekonomi, serta membangun lingkungan yang sehat, aman, dan harmonis. IPKK mencakup ketahanan fisik, ekonomi, sosial-psikologis, dan kualitas hubungan antaranggota keluarga, menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan penguatan keluarga dan menghadapi tantangan sosial modern.

Grafik Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Tahun 2025



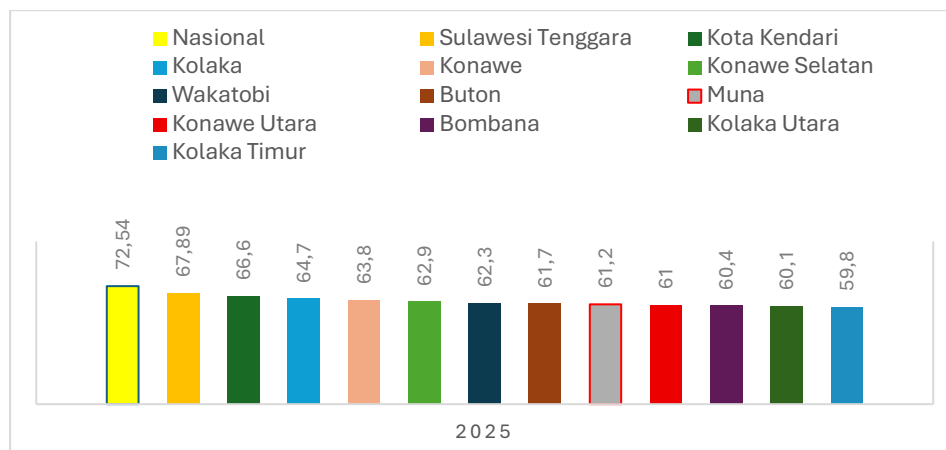


Pada tahun 2025, Indeks Konektivitas Wilayah di Konawe Utara tercatat 61,00 dengan capaian 98,79% dari target. Hasil ini menunjukkan upaya peningkatan konektivitas wilayah telah berjalan cukup optimal.

Capaian Tahun 2025	Target Akhir RPJMD (2029)	Selisih Target Terhadap Capaian Akhir RPJMD
61,00	64,31	94,85

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2029, capaian Indeks Pembangunan Pemuda tercatat sebesar 94,85% sebagai gambaran awal kondisi pembangunan pemuda di daerah.

Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Tahun 2025 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional



Sumber :

https://sultradata.com/project/SISERA_2/backend/files/publikasi/kover_dda.pdf?utm_source=chatgpt.com



Pada tahun 2025, Konawe Utara (61) berada di posisi menengah bawah, tertinggal cukup jauh dari rata-rata Nasional (72,54) dan Sulawesi Tenggara (67,89). Meski kinerjanya masih di bawah wilayah unggulan seperti Kota Kendari dan Kolaka, Konawe Utara unggul tipis dibandingkan Bombana, Kolaka Utara, dan Kolaka Timur yang berada di posisi tiga terbawah.



Faktor Penghambat:

Beberapa kendala yang mempengaruhi peningkatan Indeks Kendala peningkatan Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) di Konawe Utara antara lain rendahnya pemahaman keluarga tentang pengasuhan dan perencanaan keluarga, partisipasi remaja dalam program Genre yang belum optimal, ketimpangan akses layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan keluarga, serta masih adanya keluarga tanpa dokumen administrasi kependudukan lengkap

Upaya:

Pemerintah Kabupaten Konawe Utara meningkatkan kualitas keluarga melalui penguatan program ketahanan keluarga, pembinaan pengasuhan positif, dan edukasi perencanaan keluarga. Upaya ini dilakukan melalui program Bina Keluarga, Generasi Berencana (Genre), sosialisasi di desa/kelurahan, serta peran aktif kader dan pendamping keluarga.

Solusi:

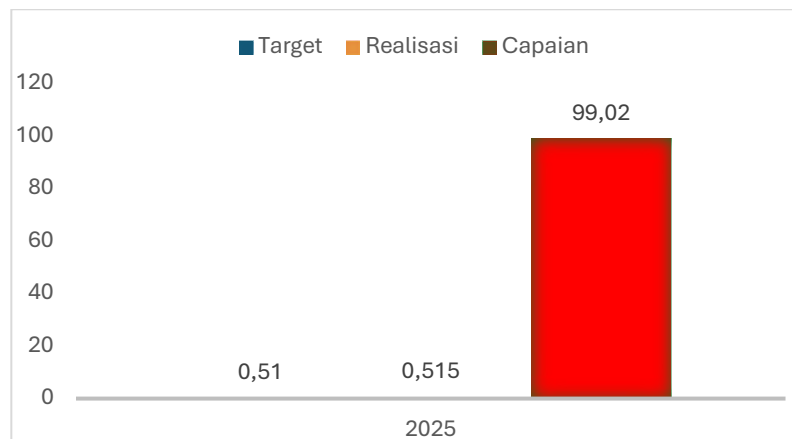
Pemerintah daerah memperkuat edukasi dan pembinaan keluarga di tingkat desa melalui kader Bina Keluarga dan lembaga masyarakat, meningkatkan koordinasi lintas sektor layanan perempuan, anak, dan keluarga, serta mempercepat pemenuhan dokumen administrasi kependudukan melalui layanan digital dan jemput bola. Upaya ini diharapkan meningkatkan kualitas keluarga dan nilai IPKK di masa mendatang.

IKU 10: Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan indikator untuk mengukur kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan, mencakup tiga dimensi utama: kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan akses terhadap pekerjaan layak. Nilai IKG yang tinggi menunjukkan ketimpangan gender yang besar, sedangkan nilai yang rendah mencerminkan kesetaraan yang lebih baik serta pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan.



Grafik Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Indeks Ketimpangan Gender Tahun 2025



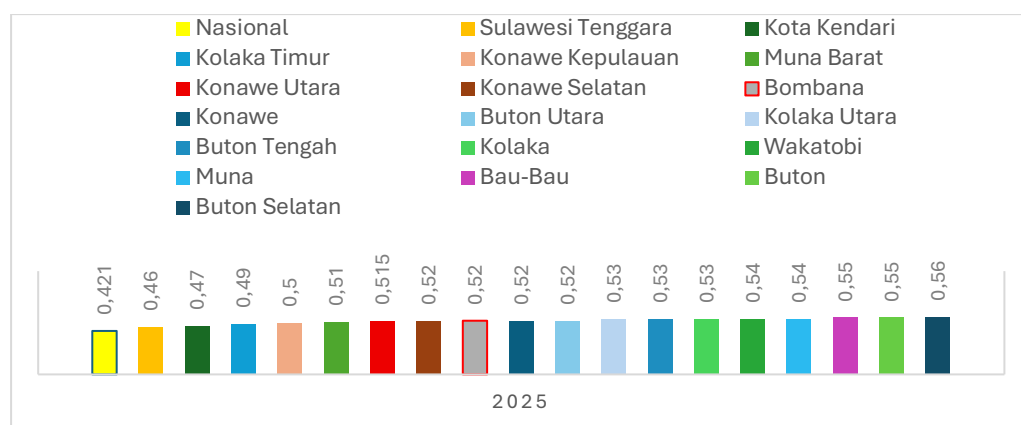
Pada tahun 2025, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Konawe Utara tercatat 0,515 dengan capaian 99,02% dari target. Hasil ini menunjukkan upaya pemberdayaan perempuan, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi berjalan positif dan mendukung pembangunan inklusif.

Capaian Tahun 2025	Target Akhir RPJMD (2029)	Selisih Target Terhadap Capaian Akhir RPJMD
0,515	0,37	71,84

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2025–2029, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) belum mencapai sasaran yang ditetapkan, namun diharapkan tercapai pada akhir periode RPJMD tahun 2029.

Hingga 2025, capaian terhadap target tahun 2026 tercatat sebesar 71,84%.

Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Ketimpangan Gender Tahun 2025 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional



Sumber : <https://wakatobikab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTU1IzI=/indeks-ketimpangan-gender.html>



Pada tahun 2025, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Konawe Utara sebesar 0,51, lebih tinggi dari rata-rata nasional (0,421) dan Sulawesi Tenggara (0,46). Nilai ini setara dengan Muna Barat, namun masih lebih tinggi dibandingkan Kota Kendari (0,47) dan Kolaka Timur (0,49).

Faktor Penyebab:

Pelaksanaan tugas dan fungsi masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia baik dari sisi kualitas maupun kuantitas yang belum sebanding dengan beban kerja, belum optimalnya penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, keterbatasan ketersediaan data yang akurat untuk mendukung proses perencanaan dan pengambilan kebijakan, serta alokasi anggaran yang tidak sepenuhnya sesuai dengan perencanaan awal sehingga berdampak pada pencapaian target kinerja.

Upaya yang dilakukan:

Keberhasilan pelaksanaan program didukung oleh tingginya komitmen para penanggung jawab kegiatan dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan, serta perencanaan program yang lebih terarah dan berorientasi pada capaian hasil. Selain itu, penerapan penganggaran yang mendekati basis kinerja sesuai output dan outcome, dukungan anggaran dari pemerintah, serta sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam pembinaan dan pengawasan turut memperkuat efektivitas pelaksanaan program di Kabupaten Konawe Utara.

Solusi :

Pemerintah melalui Dinas PPA melaksanakan program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, Peningkatan Kualitas Keluarga, Pemenuhan Hak Anak melalui penguatan Forum Anak, serta Perlindungan Khusus Anak melalui pencegahan, pendampingan, dan penanganan kasus perempuan dan anak.



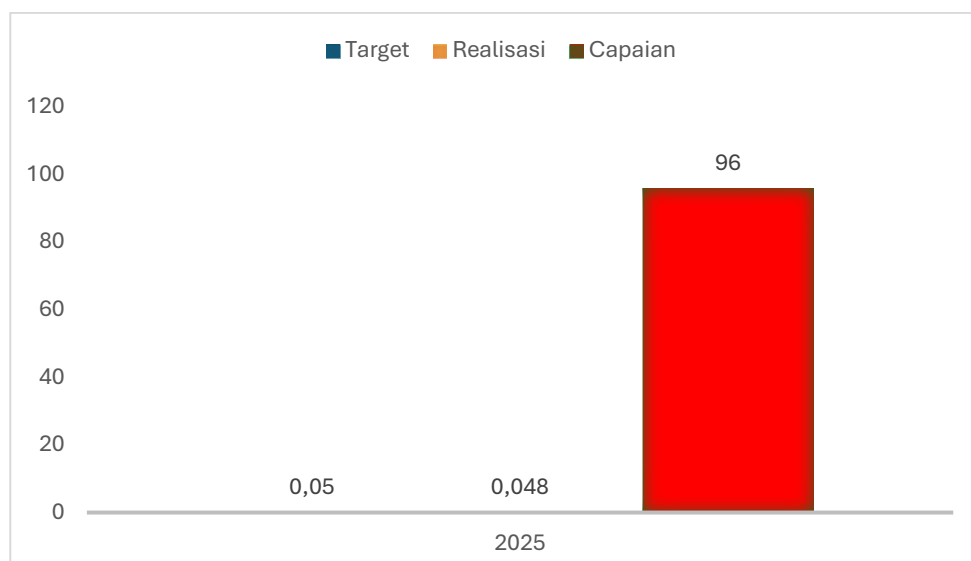
MISI 2 : Mempercepat Konektivitas Wilayah Melalui Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi serta Sarana Prasarana Pemukiman yang Berkualitas

Tujuan 2 : Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan

IKU 11 : Indeks Konektivitas Wilayah

Indeks Konektivitas Wilayah adalah ukuran untuk menilai tingkat keterhubungan suatu daerah, baik secara fisik maupun digital. Indeks ini mencakup kualitas dan ketersediaan infrastruktur transportasi (jalan, jembatan, pelabuhan, bandara) serta akses telekomunikasi dan internet. Nilai yang tinggi menunjukkan mobilitas barang, jasa, dan manusia yang lancar sehingga mendukung aktivitas ekonomi dan menekan biaya logistik, sedangkan nilai rendah menandakan keterbatasan infrastruktur dan akses antarwilayah. Indeks ini penting untuk menilai pemerataan pembangunan dan daya saing daerah.

Grafik Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Indeks Konektivitas Wilayah Tahun 2025





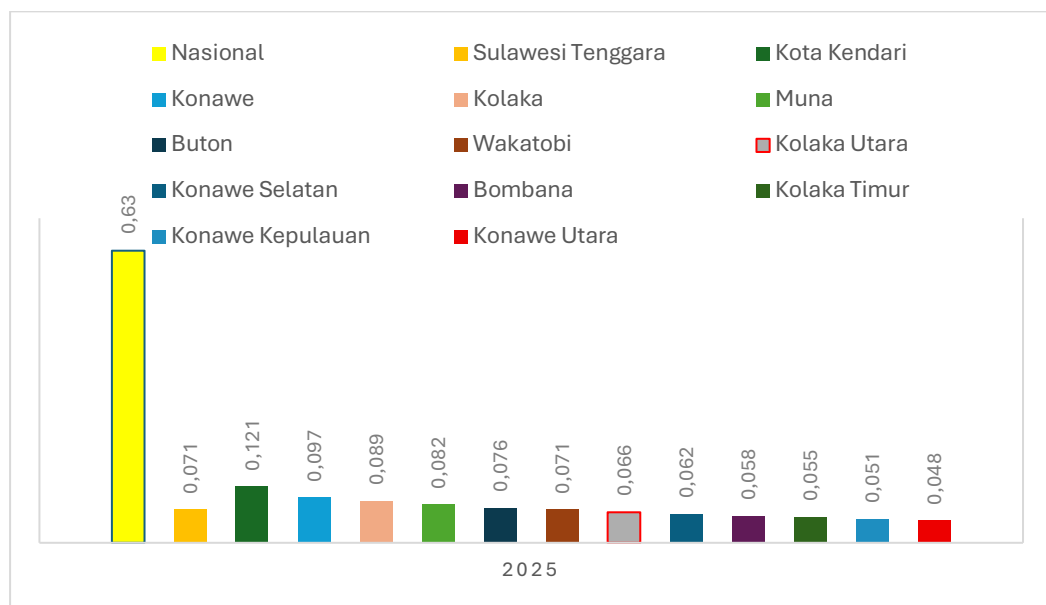
Pada tahun 2025, Indeks Konektivitas Wilayah Konawe Utara tercatat 0,048 dengan capaian 96% dari target. Hasil ini menunjukkan peningkatan konektivitas wilayah berjalan baik, meskipun masih perlu penguatan pembangunan infrastruktur ke depan.

Capaian Tahun 2025	Target Akhir RPJMD (2029)	Selisih Target Terhadap Capaian Akhir RPJMD
0,048	0,55	8,72

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2029, nilai Indeks Konektivitas Wilayah pada tahun 2025 tercatat sebesar 8,75%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pembangunan dan peningkatan konektivitas antarwilayah di

Kabupaten Konawe Utara mulai menunjukkan perkembangan melalui berbagai program pembangunan infrastruktur transportasi dan aksesibilitas wilayah yang terus ditingkatkan.

Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Konektivitas Wilayah Tahun 2025 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional



Sumber : https://fe-staging.data.go.id/dataset/dataset/indeks-konektivitas?utm_source=chatgpt.com



Pada tahun 2025, Konawe Utara memiliki nilai 0,048, terendah di Sulawesi Tenggara dan di bawah rata-rata provinsi (0,071) serta nasional (0,63). Nilai ini juga lebih rendah dibandingkan Konawe Kepulauan (0,051), Kolaka Timur (0,055), dan jauh dari Kota Kendari (0,121).

Faktor Penyebab:

1. Kondisi geografis kompleks (berbukit, pesisir, sungai) sehingga pembangunan infrastruktur mahal.
2. Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan masih terbatas.
3. Sebaran permukiman tidak merata sehingga biaya distribusi dan mobilitas tinggi.
4. Keterbatasan SDM teknis infrastruktur.
5. Akses internet di beberapa desa masih belum merata.

Upaya yang Dilakukan:

1. Peningkatan kualitas jalan, jembatan, pelabuhan, dan akses ke pusat produksi.
2. Penataan Ibukota Wanggudu sebagai pusat pelayanan, perdagangan, dan jasa.
3. Pembangunan prioritas pada koridor penghubung kecamatan dan sentra ekonomi.
4. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan kerja sama dengan pemerintah serta swasta.
5. Perluasan jaringan telekomunikasi melalui pembangunan BTS dan peningkatan kualitas internet.

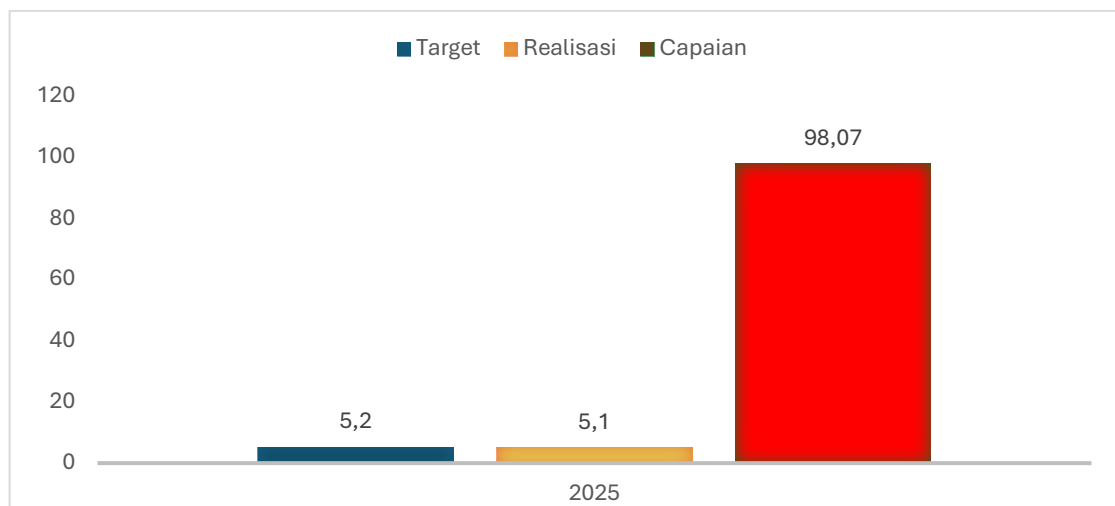
Solusi:

1. Pembangunan berbasis wilayah dengan integrasi darat, laut, dan digital.
2. Pembiayaan alternatif melalui dana pusat/provinsi, KPBU, dan CSR perusahaan.
3. Digitalisasi layanan dan sistem transportasi serta e-government.
4. Penguatan infrastruktur yang adaptif terhadap kondisi geografis dan iklim.
5. Pengembangan ekonomi berbasis konektivitas untuk mendorong UMKM, logistik, dan perdagangan antarwilayah.

**Sasaran 7 : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Pembangunan****IKU 12 : Indeks Infrastruktur Dasar**

Indeks Infrastruktur Dasar mengukur ketersediaan dan kualitas infrastruktur utama seperti jalan, air bersih, sanitasi, listrik, transportasi, serta fasilitas publik. Nilai tinggi menunjukkan infrastruktur yang memadai untuk mendukung mobilitas, pelayanan publik, dan kesejahteraan, sedangkan nilai rendah menandakan keterbatasan yang dapat menghambat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan.

Grafik Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Indeks Infrastruktur Dasar Tahun 2023-2025



Pada tahun 2025, Indeks Infrastruktur Dasar di Konawe Utara tercatat 5,10 dengan capaian 98,07% dari target. Hasil ini menunjukkan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, listrik, dan fasilitas publik telah berjalan baik dan mendekati target.

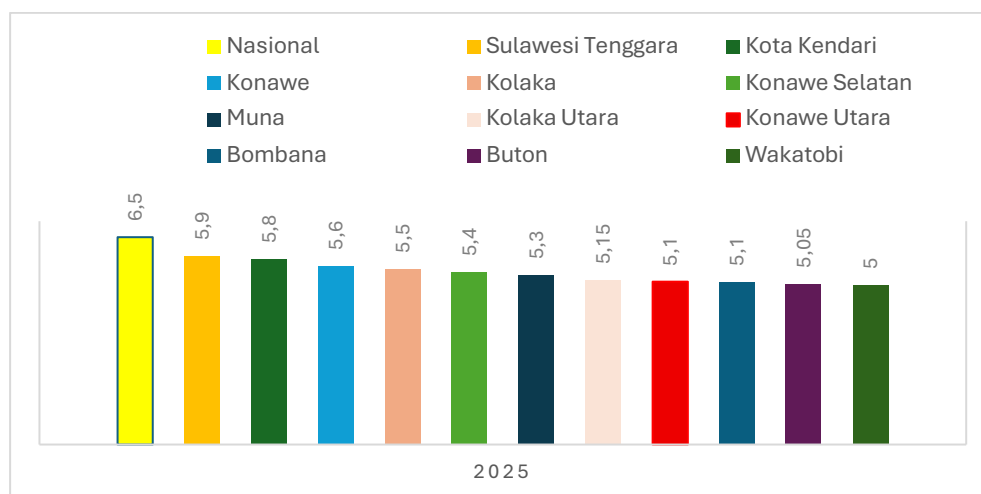
Capaian Tahun 2025	Target Akhir RPJMD (2029)	Selisih Target Terhadap Capaian Akhir RPJMD
5,10	30,45	16,74

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2029, nilai Indeks Infrastruktur Dasar tercatat sebesar 16,74%. Nilai tersebut menunjukkan adanya perkembangan dalam upaya peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar di

Kabupaten Konawe Utara melalui berbagai program pembangunan yang terus dilakukan.



Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Infrastruktur Dasar Tahun 2025 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional



Sumber :

https://konutkab.bps.go.id/id/publication/2025/11/24/99eff8e7ba0284e7d0650095/indeks-kemahalan-konstruksi-kabupaten-konawe-utara-tahun-2025.html?utm_source=chatgpt.com



Pada tahun 2025, nilai Indeks Infrastruktur Dasar Konawe Utara 5,1, menempati posisi menengah di Sulawesi Tenggara, di bawah rata-rata provinsi (5,9) dan nasional (6,5), sedikit di bawah Muna (5,3) dan Konawe Selatan (5,4), namun lebih tinggi dari Buton (5,05) dan Wakatobi (5).

Faktor Penyebab:

Peningkatan Indeks Infrastruktur Dasar Konawe Utara menghadapi tantangan berupa kondisi geografis luas dan terpencil, keterbatasan anggaran, kapasitas SDM yang perlu ditingkatkan, serta akses layanan infrastruktur yang belum merata.

Upaya:

Pemerintah Kabupaten Konawe Utara terus melakukan berbagai langkah Upaya strategis peningkatan Indeks Infrastruktur Dasar meliputi pemerataan listrik, energi terbarukan, mitigasi bencana, pembangunan jembatan permanen



di Desa Sambandete, serta penguatan infrastruktur digital melalui Smart Classroom dan layanan perizinan online.

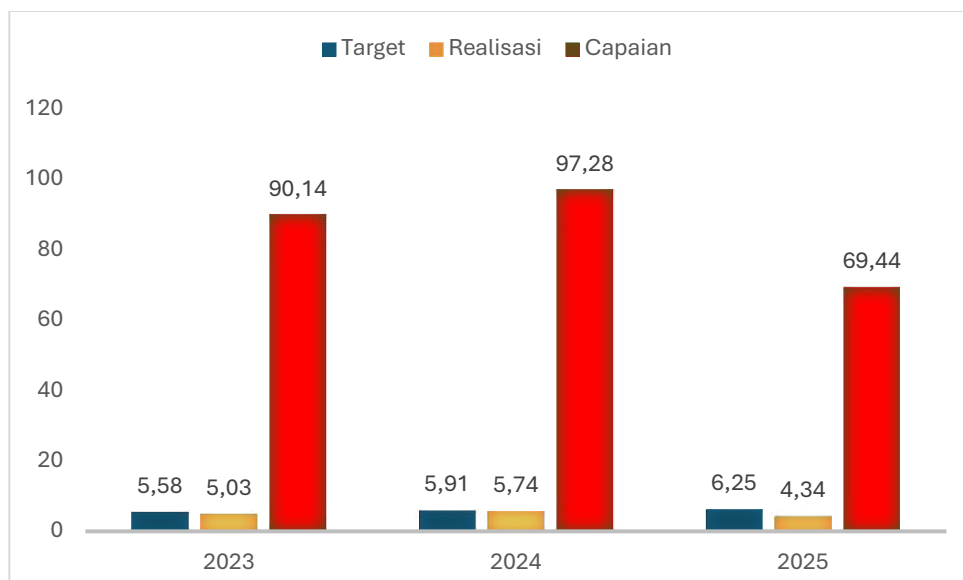
Solusi:

Pemerintah Konawe Utara memprioritaskan pembangunan infrastruktur di wilayah strategis dan terpencil, memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kapasitas SDM, serta memanfaatkan teknologi dan transformasi digital untuk mendukung pemerataan pembangunan dan kualitas hidup masyarakat.

**MISI 3 : Menciptakan Perekonomian Daerah yang Produktif dan Berdaya Saing****Tujuan 3 : Mewujudkan Transformasi Perekonomian Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi****Sasaran 8 : Meningkatkan Daya Saing Produktivitas Ekonomi****IKU 13 : Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan nilai barang dan jasa dalam suatu periode dan menjadi indikator utama kesehatan ekonomi. Pertumbuhan yang stabil mencerminkan kenaikan produksi, investasi, dan lapangan kerja, sedangkan fluktuasi menandakan adanya tantangan. Dalam laporan akuntabilitas, indikator ini menjadi tolok ukur efektivitas kebijakan dan keberhasilan program pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Grafik Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023-2025



Perekonomian Kabupaten Konawe Utara mengalami perlambatan pada periode 2023–2025. Setelah tumbuh sebesar 5,03% pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 5,74% pada tahun 2024, laju pertumbuhan ekonomi menurun menjadi 4,34% pada tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan adanya pelemahan dibandingkan capaian tahun sebelumnya meskipun aktivitas ekonomi tetap berlangsung.

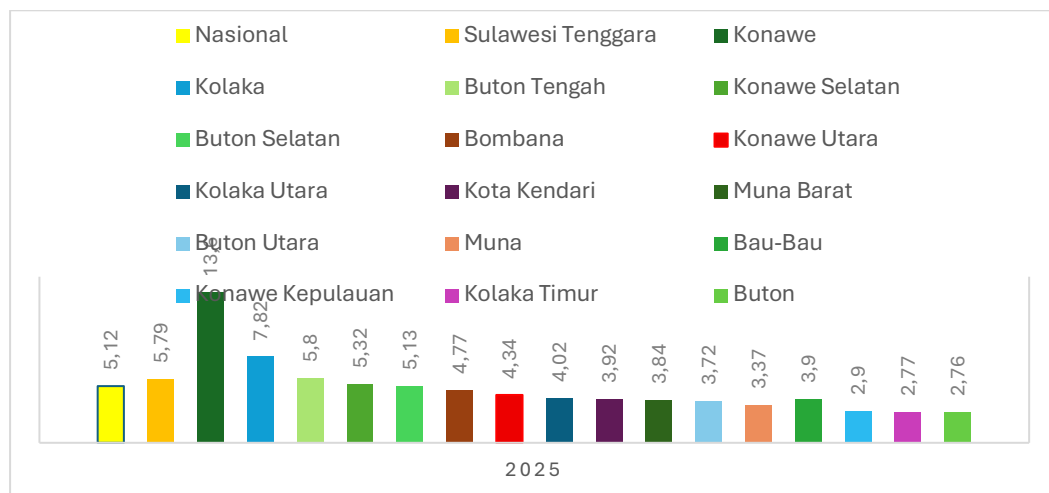


Capaian Tahun 2025	Target Akhir RPJMD (2029)	Selisih Target Terhadap Capaian Akhir RPJMD
4,34	6,98	62,17

Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2029, capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan perkembangan yang masih perlu dioptimalkan agar dapat mencapai sasaran pada akhir periode tahun 2029. Hingga tahun

2025, realisasi terhadap target tahun 2026 baru mencapai 62,17%, sehingga diperlukan upaya percepatan untuk memenuhi target yang telah ditetapkan.

Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional



Sumber : <https://sultra.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjI4IzI=/-seri-2010--laju-pertumbuhan--c-to-c--pdrb-menurut-kabupaten-kota--persen-.html>



Pada 2025, nilai Kabupaten Konawe Utara sekitar 4,34, menempati posisi menengah di Sulawesi Tenggara, di bawah rata-rata nasional (5,12) dan beberapa daerah seperti Konawe dan Kolaka, namun lebih tinggi dari Muna Barat, Buton Utara, dan Konawe Kepulauan.



Faktor Penyebab:

1. Basis industri lokal yang masih terbatas sehingga potensi pendapatan daerah dari pajak dan investasi belum optimal.
2. Rendahnya kapasitas SDM dan teknologi di sektor IKM, membatasi daya saing produk.
3. Akses pasar yang belum merata, khususnya untuk produk unggulan desa/daerah terpencil.
4. Keterbatasan infrastruktur pendukung industri dan logistik.

Upaya yang Dilakukan:

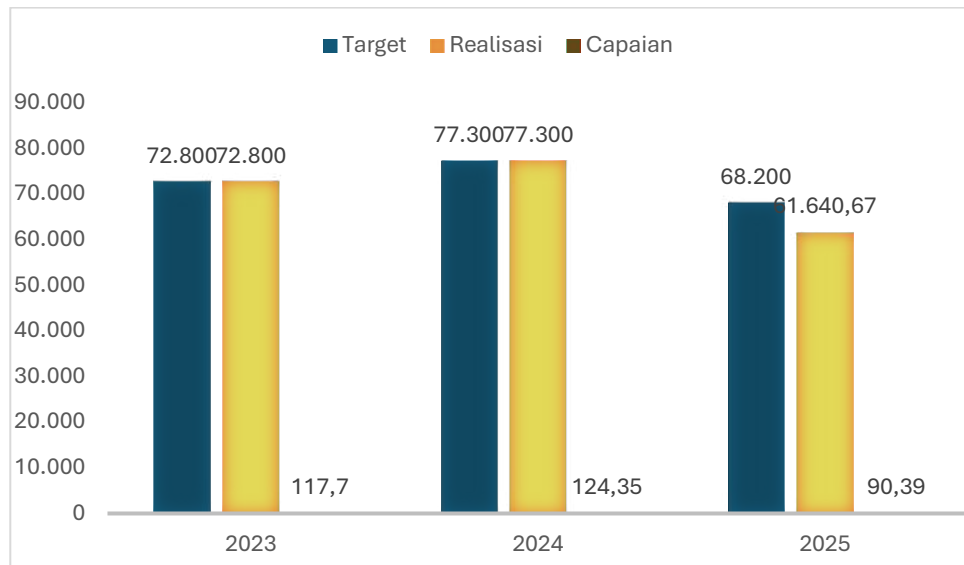
1. Penguatan IKM melalui pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi akses permodalan.
2. Pembangunan dan pengembangan kawasan industri strategis untuk meningkatkan kapasitas produksi.
3. Digitalisasi proses produksi dan pemasaran untuk memperluas akses pasar, termasuk melalui e-commerce.
4. Promosi dan branding produk unggulan daerah agar lebih dikenal di tingkat nasional maupun internasional.

Solusi:

1. Memperluas kemitraan lintas sektor antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mendukung industrialisasi lokal.
2. Meningkatkan investasi dalam teknologi produksi dan manajemen kualitas untuk IKM.
3. Memperbaiki infrastruktur transportasi dan logistik agar distribusi produk lebih efisien.
4. Mengembangkan program insentif fiskal dan nonfiskal untuk mendorong kepatuhan pajak dan peningkatan penerimaan daerah.

IKU 14 : PDRB Perkapita

PDRB per kapita adalah ukuran nilai total barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah dalam periode tertentu dibagi dengan jumlah penduduknya. Indikator ini menunjukkan rata-rata kontribusi ekonomi setiap individu dan sering digunakan untuk menilai kesejahteraan ekonomi masyarakat. Semakin tinggi PDRB per kapita, umumnya mencerminkan tingkat pendapatan dan standar hidup yang lebih baik, meski perlu diperhatikan distribusi pendapatan agar pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

**Grafik Perbandingan Capaian Dan Target Indikator PDRB Perkapita Tahun 2023-2025**

Periode 2023–2025, PDRB per kapita Konawe Utara meningkat, nominal ADHB 6.164,67 miliar (pertumbuhan 4,34%/tahun) dan riil ADHK 3.600,96 miliar (90,39% capaian). Kenaikan ini meningkatkan daya beli, meski pemerataan kesejahteraan antar kecamatan masih perlu diperkuat.

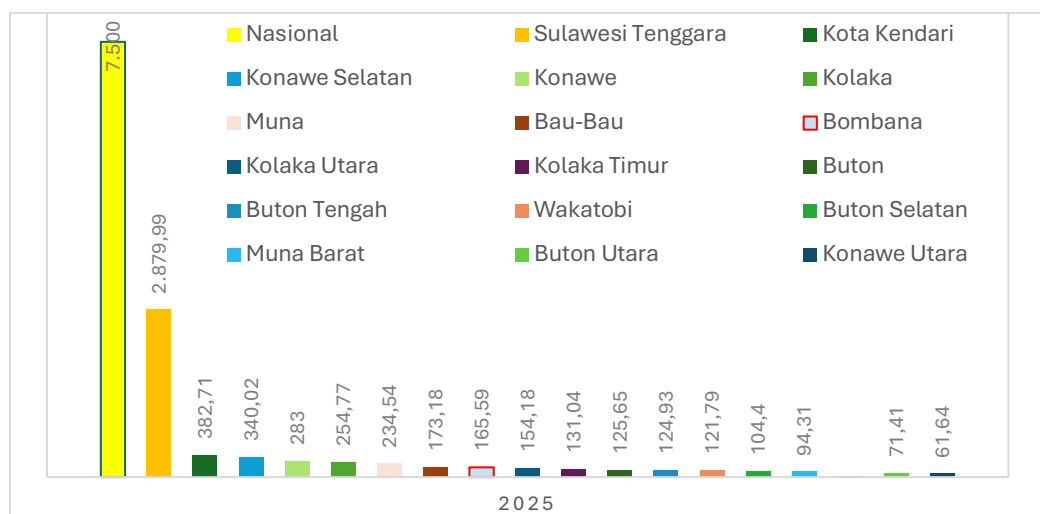
Capaian Tahun 2025	Target Akhir RPJMD (2029)	Selisih Target Terhadap Capaian Akhir RPJMD
6.1640,67	106.945	57,63

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2029, PDRB Per kapita menunjukkan tren peningkatan menuju target yang telah ditetapkan dan diharapkan dapat tercapai pada akhir periode RPJMD Tahun 2029. Hingga Tahun

2025, capaian terhadap target Tahun 2026 telah mencapai sebesar 57,63%.



Grafik Perbandingan Capaian Kinerja PDRB Perkapita Tahun 2025 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional



Sumber :

<https://konutkab.bps.go.id/id/publication/2026/02/27/2163732a4c8d5af5400f8fb3/kabupaten-konawe-utara-dalam-angka-2026.html>



Pada 2025, PDRB per kapita Konawe Utara sekitar 6.164,67 miliar, berada di kelompok bawah Sulawesi Tenggara, lebih rendah dari Kota Kendari dan Konawe, namun lebih tinggi dari Buton Selatan, Muna Barat, dan Wakatobi, dengan kinerja cukup stabil namun masih bisa ditingkatkan.

Faktor Penyebab:

1. Ketergantungan ekonomi daerah pada sektor primer dan pertambangan sehingga risiko fluktuasi harga tinggi.
2. Kapasitas SDM dan teknologi di sektor non-pertambangan masih terbatas, menghambat produktivitas dan diversifikasi ekonomi.
3. Infrastruktur distribusi pangan dan logistik yang belum merata memengaruhi stabilitas harga.
4. Keterbatasan investasi dan akses permodalan bagi UMKM dan sektor produktif lokal.



Upaya yang Dilakukan:

1. Diversifikasi sektor ekonomi dengan mendorong pertanian modern, perikanan berkelanjutan, pariwisata, dan jasa.
2. Peningkatan kapasitas UMKM melalui pelatihan teknis, digitalisasi, dan akses modal.
3. Pengembangan hilirisasi industri untuk menambah nilai produk lokal dan memperkuat daya saing ekonomi.
4. Pemantauan harga dan pengendalian inflasi melalui kebijakan stabilisasi pasar dan dukungan logistik.

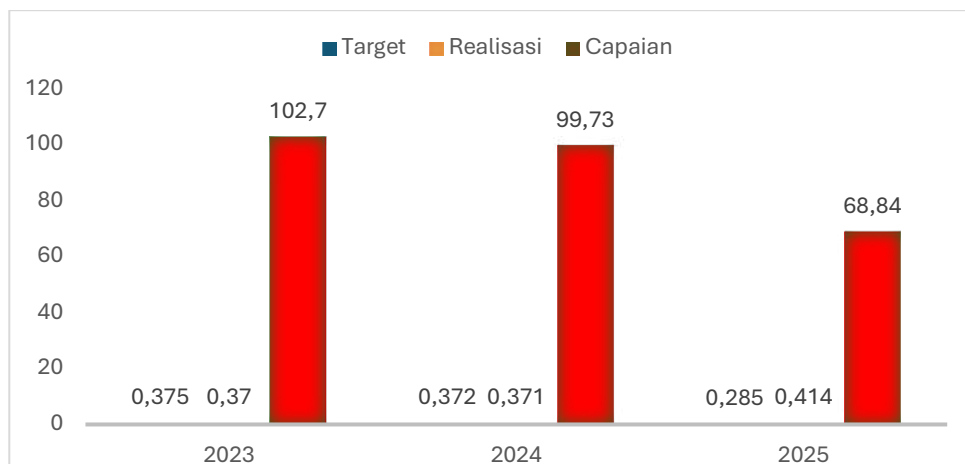
Solusi:

1. Memperluas investasi di sektor produktif non-pertambangan melalui insentif fiskal dan kemitraan dengan swasta.
2. Mendorong inovasi dan adopsi teknologi dalam produksi dan distribusi agar produktivitas meningkat.
3. Memperkuat jaringan pasar dan infrastruktur logistik untuk pemerataan distribusi barang.
4. Integrasi program PSN dan pembangunan inklusif untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan PDRB per kapita riil.

IKU 15 : Rasio Gini

Rasio Gini adalah alat untuk menilai sejauh mana pendapatan atau kekayaan tersebar merata di masyarakat. Angkanya berkisar antara 0 sampai 1, di mana 0 berarti semua orang memiliki pendapatan yang sama, sedangkan 1 menunjukkan ketimpangan total, di mana satu orang menguasai seluruh pendapatan. Indikator ini membantu pemerintah melihat ketidaksetaraan ekonomi, merancang kebijakan pengentasan kemiskinan, dan memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dirasakan secara lebih adil oleh seluruh warga.

Grafik Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Rasio Gini Tahun 2023-2025





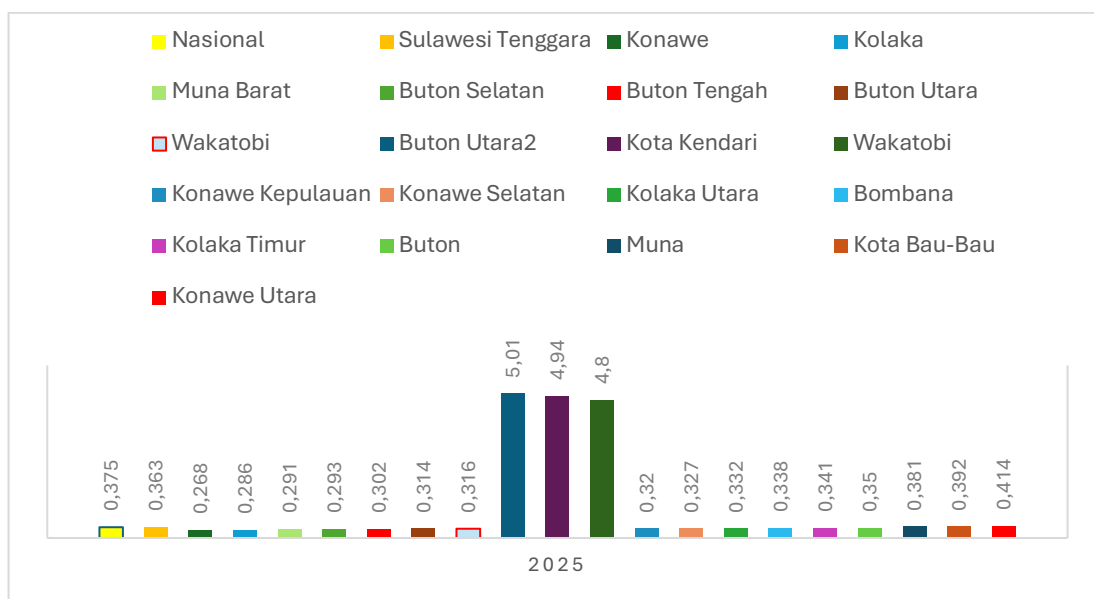
Rasio Gini Konawe Utara meningkat dari 0,37 (2023) menjadi 0,414 (2025), menunjukkan ketimpangan pendapatan melebar. Perbedaan kesejahteraan antar kecamatan masih terlihat, sehingga diperlukan penguatan program pemerataan ekonomi, peningkatan UMKM, dan dukungan bagi masyarakat berpendapatan rendah.

Capaian Tahun 2025	Target Akhir RPJMD (2029)	Selisih Target Terhadap Capaian Akhir RPJMD
0,414	0,265	64,01

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2025–2029, Rasio Gini masih berada di atas target yang ditetapkan sehingga menunjukkan capaian yang belum optimal dan perlu percepatan pengendalian ketimpangan hingga akhir periode

tahun 2029. Hingga tahun 2025, realisasi terhadap target tahun 2026 baru mencapai 64,01%.

Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Rasio Gini Tahun 2025 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional



Sumber :

<https://konutkab.bps.go.id/id/publication/2026/02/27/2163732a4c8d5af5400f8fb3/kabupaten-konawe-utara-dalam-angka-2026.html>



Pada 2025, rasio Gini Konawe Utara tercatat 0,414, tertinggi di Sulawesi Tenggara dan di atas rata-rata nasional (0,375) serta provinsi (0,363), menunjukkan ketimpangan ekonomi paling lebar dibanding wilayah lain, termasuk Kota Bau-Bau (0,392) dan Kota Kendari (0,35).



Faktor Penghambat:

1. Ketergantungan pada sektor tertentu sehingga pendapatan terkonsentrasi pada kelompok usaha atau wilayah tertentu.
2. Produktivitas pertanian dan perikanan yang belum merata, terutama di desa terpencil.
3. Akses transportasi dan distribusi yang belum optimal, menyebabkan disparitas harga dan peluang usaha antar kecamatan.
4. Kesenjangan literasi digital dan akses informasi, sehingga UMKM belum maksimal memanfaatkan teknologi.
5. Keterbatasan akses modal dan kualitas SDM, terutama bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat berpendapatan rendah.

Upaya:

1. Penguatan sektor Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib melalui perluasan lapangan kerja formal, bantuan sosial tepat sasaran, dan kebijakan fiskal daerah yang pro-rakyat.
2. Pengembangan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan melalui peningkatan produktivitas, hilirisasi komoditas, dan pendampingan petani/nelayan.
3. Peningkatan sektor Transportasi dan Pergudangan dengan pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan, dan sistem distribusi logistik.
4. Penguatan sektor Informasi dan Komunikasi melalui digitalisasi UMKM, pelatihan pemasaran online, dan perluasan jaringan internet.

Solusi:

1. Diversifikasi ekonomi berbasis potensi lokal agar sumber pendapatan tidak terpusat pada sektor tertentu.
2. Pemerataan pembangunan antar kecamatan melalui program afirmatif di wilayah tertinggal.
3. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan vokasi, pelatihan teknis, dan literasi digital.

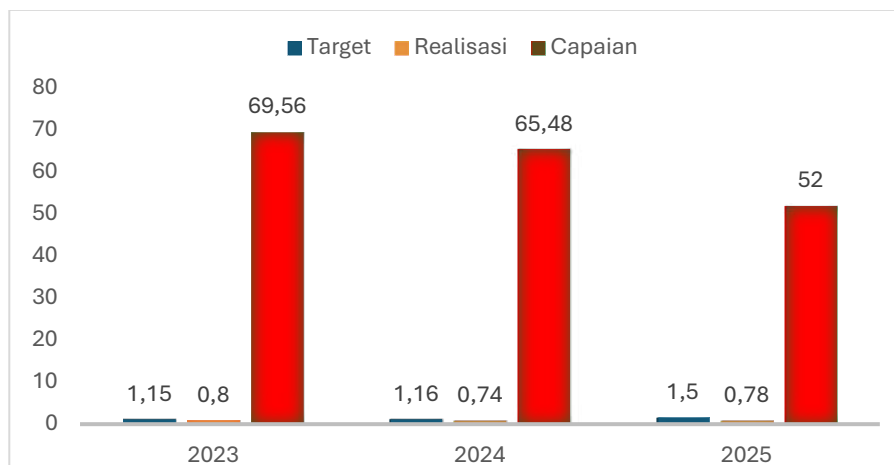


4. Perluasan akses pembiayaan UMKM melalui kredit lunak dan kemitraan dengan perbankan.
5. Penguatan kolaborasi lintas sektor agar keempat sektor unggulan saling mendukung dalam menciptakan pertumbuhan yang inklusif.

IKU 16 : Rasio PDRB Industri Pengelolaan

Rasio PDRB Industri Pengolahan menunjukkan besarnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total PDRB daerah. Rasio ini mencerminkan tingkat industrialisasi, kemampuan menciptakan nilai tambah, serta peran industri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Semakin tinggi rasionya, semakin kuat struktur ekonomi berbasis industri; sebaliknya, rasio rendah menunjukkan ketergantungan pada sektor primer. Indikator ini penting untuk mengevaluasi kinerja industri dan menyusun strategi pengembangan berbasis potensi lokal.

Grafik Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Rasio PDRB Industri Pengelolaan Tahun 2023-2025



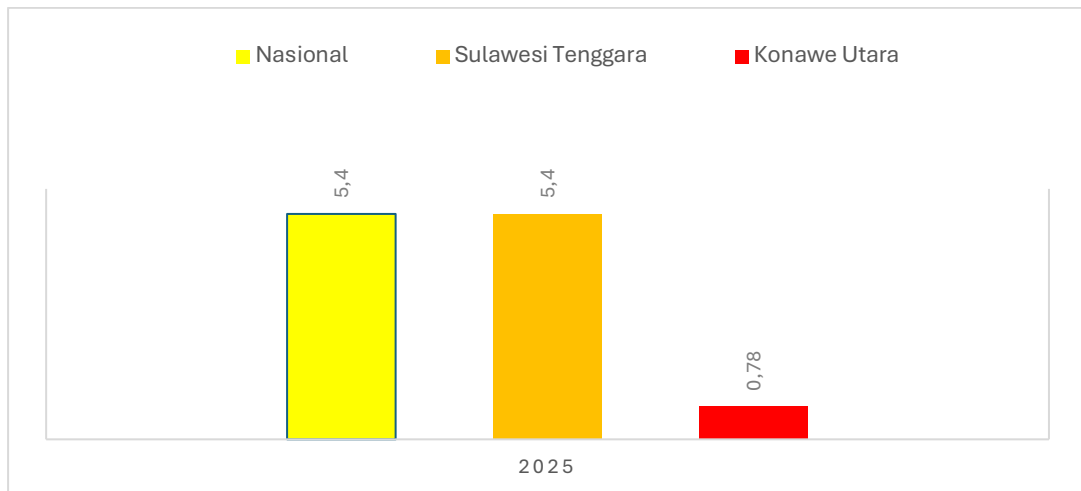
Rasio PDRB Industri Pengolahan Konawe Utara 2023–2025 fluktuatif: 0,80% (2023), 0,74% (2024), dan 0,78% (2025), mencapai 52% dari target 1,5% dan termasuk kategori “Cukup Berhasil” meski belum memenuhi target RPJMD.

Capaian Tahun 2025	Target Akhir RPJMD (2029)	Selisih Target Terhadap Capaian Akhir RPJMD
0,78	2,97	26,26

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2025–2029, Rasio PDRB Industri Pengolahan tercatat 26,26% dari target 2026, masih di bawah sasaran dan memerlukan percepatan serta penguatan strategi pengembangan.



Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Rasio PDRB Industri Pengelolaan Tahun 2025 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional



Sumber :

<https://konutkab.bps.go.id/id/publication/2026/02/27/2163732a4c8d5af5400f8fb3/kabupaten-konawe-utara-dalam-angka-2026.html>



Pada tahun 2025, rasio PDRB sektor industri pengolahan di Kabupaten Konawe Utara tercatat sebesar 0,78 dan menunjukkan tren yang positif, mencerminkan meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian daerah. Capaian ini menempatkan Konawe Utara pada posisi yang cukup kompetitif dibandingkan beberapa kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya dalam memperkuat struktur

ekonomi berbasis nilai tambah.

Faktor Penyebab:

1. Investasi belum optimal, sehingga kapasitas produksi dan ekspansi industri masih terbatas.
2. Infrastruktur pendukung belum memadai, seperti akses jalan, pelabuhan, energi, dan kawasan industri.
3. Hilirisasi belum berjalan maksimal, termasuk pada komoditas nikel, kelapa sawit, dan industri tenun lokal.



4. Keterbatasan kualitas SDM dan teknologi, sehingga produktivitas dan daya saing industri masih rendah.
5. Keterkaitan hulu-hilir belum terintegrasi, sehingga potensi bahan baku lokal belum sepenuhnya memberikan nilai tambah di daerah.

Upaya yang Dilakukan:

1. Mendorong hilirisasi nikel dan SDA lainnya sebagai sektor unggulan daerah.
2. Pengembangan industri berbasis potensi lokal seperti pengolahan kelapa sawit dan industri kreatif (tenun).
3. Penyusunan rencana kawasan industri terintegrasi untuk menarik investor.
4. Peningkatan kapasitas UMKM melalui pelatihan, pendampingan, dan akses pembiayaan.
5. Penguatan regulasi dan kemudahan perizinan investasi guna meningkatkan minat dunia usaha.

Solusi Strategis:

1. Membangun kawasan industri yang terencana dan berkelanjutan, dilengkapi infrastruktur logistik dan energi yang memadai.
2. Meningkatkan insentif investasi dan kemitraan industri besar-UMKM agar manfaat ekonomi menyebar.
3. Memperkuat kualitas SDM melalui pelatihan vokasi dan teknologi industri.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan bahan baku lokal agar proses produksi lebih banyak dilakukan di dalam daerah.
5. Mendorong kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk memastikan industri pengolahan menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

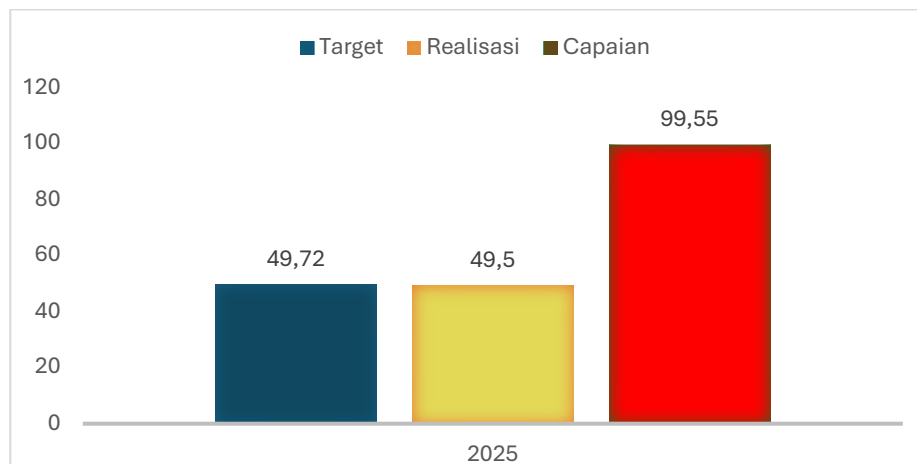
Sasaran 9 : Terwujudnya Penerapan Ekonomi Biru Daerah

IKU 17: Indeks Ekonomi Biru Daerah

Indeks Ekonomi Biru Daerah mengukur kemampuan suatu wilayah dalam memanfaatkan potensi kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian ekosistem laut. Indeks ini mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, menilai kontribusi sektor berbasis laut terhadap PDRB, kualitas lingkungan perairan, dan tata kelola daerah, sehingga menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi biru yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.



Grafik Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Indeks Ekonomi Biru Daerah Tahun 2025



Berdasarkan hasil evaluasi program, Indeks Ekonomi Biru Daerah menjadi indikator dalam menilai pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan secara berkelanjutan di Kabupaten Konawe Utara. Pada tahun 2025, pengukuran indeks ini mulai dilakukan secara lebih sistematis. Nilai realisasi Indeks Ekonomi Biru Daerah pada tahun 2025 tercatat sebesar 49,5 dengan tingkat capaian sebesar 99,55% dari target yang telah ditetapkan, yang menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi berbasis kelautan telah berjalan dengan baik.

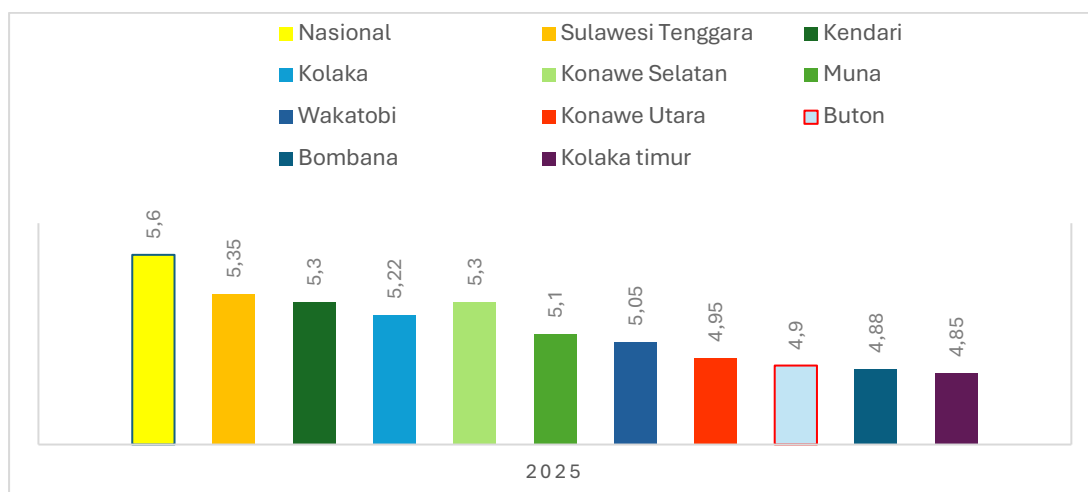
Capaian Tahun 2025	Target Akhir RPJMD (2029)	Selisih Target Terhadap Capaian Akhir RPJMD
49,50	59,42	83,30

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025–2029, nilai Indeks Ekonomi Biru Daerah pada tahun 2025 tercatat sebesar 83,30%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan di

Kabupaten Konawe Utara telah menunjukkan kemajuan yang cukup baik.



Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Ekonomi Biru Daerah Tahun 2025 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional



Sumber :

https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/dokumenbappenas/konten/Dokumen%202026/Report%20IBEI%20REVISI%20%28DESEMBER%202025%29.pdf?utm_source=chatgpt.com



Berdasarkan tabel Indeks Infrastruktur Dasar tahun 2025, Kabupaten Konawe Utara memiliki nilai 4,95, masih berada di bawah target daerah yaitu 5,2 serta lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara (5,35) dan nasional (5,60). Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar di Konawe Utara masih perlu ditingkatkan.

Faktor Penghambat:

Peningkatan Indeks Ekonomi Biru Konawe Utara terkendala data terintegrasi, praktik pemanfaatan sumber daya laut yang belum berkelanjutan, tekanan industri di pesisir, dan terbatasnya pengembangan ekowisata bahari.



Upaya:

Pengembangan ekonomi biru Konawe Utara difokuskan pada hilirisasi dan pengolahan hasil laut, pengelolaan pesisir berkelanjutan, serta koordinasi dengan masyarakat, pelaku usaha, dan lembaga terkait.

Solusi:

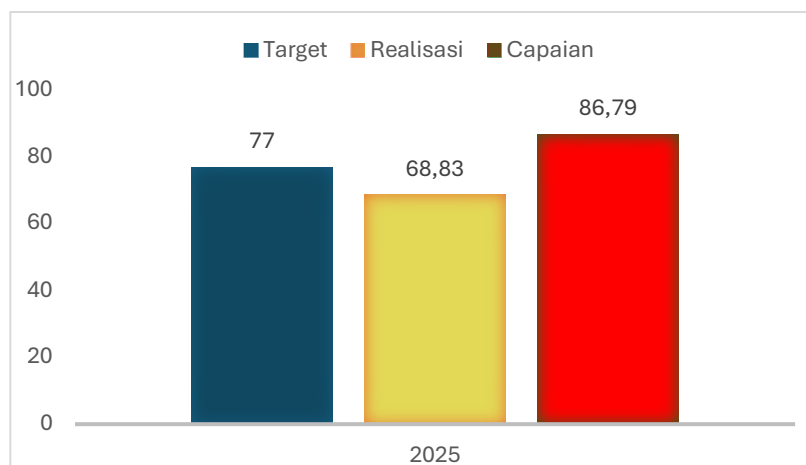
Pemerintah Konawe Utara fokus pada data terintegrasi kelautan, pelatihan nelayan dan pelaku usaha, rehabilitasi pesisir, serta pengembangan ekonomi bahari berkelanjutan untuk meningkatkan Indeks Ekonomi Biru dan mendukung pembangunan inklusif.

Sasaran 10 : Terwujudnya Kemandirian Pangan

IKU 18: Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan mengukur kemampuan suatu daerah dalam menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang cukup, aman, dan bergizi bagi seluruh masyarakat. Indeks ini meliputi aspek produksi pangan lokal, stabilitas pasokan, akses masyarakat terhadap pangan terjangkau, kualitas konsumsi dan gizi, serta ketangguhan daerah terhadap ancaman seperti bencana, kemiskinan, dan perubahan iklim. Nilai indeks yang tinggi menunjukkan kemampuan daerah dalam memastikan ketahanan pangan secara berkelanjutan dan efektivitas kebijakan pemerintah dari tingkat rumah tangga hingga wilayah.

Grafik Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2025



Berdasarkan evaluasi 2025, Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Utara mencapai realisasi 73,80 dengan capaian 95,58%, mencerminkan peningkatan ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan bergizi. Perbaikan ini terlihat dari pengelolaan produksi pangan berbasis pertanian dan perikanan,



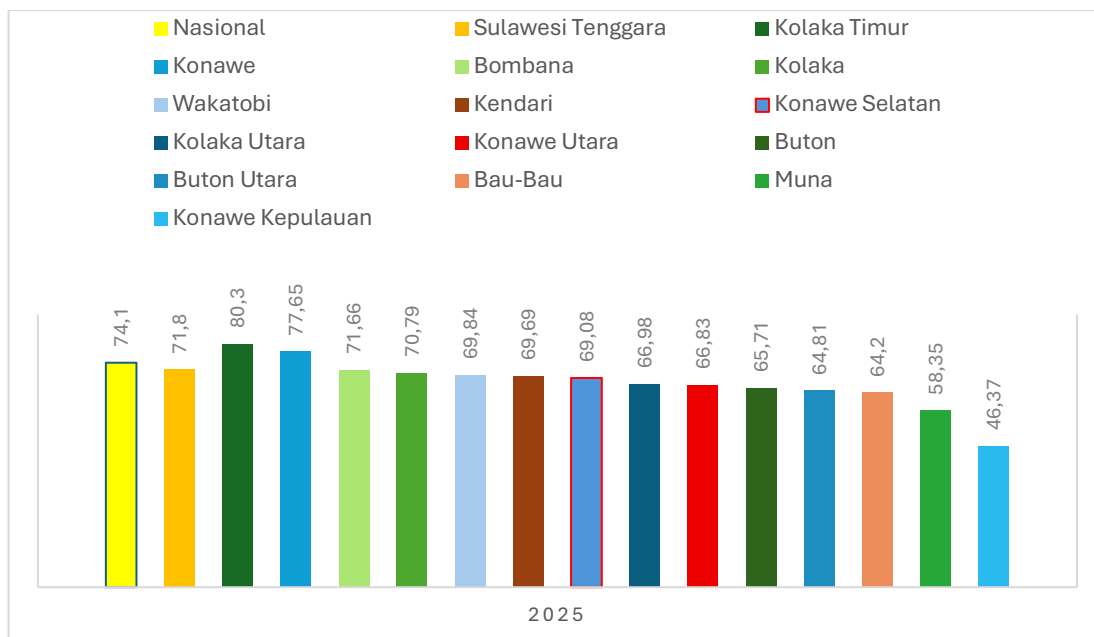
berkembangnya sentra hortikultura dan perikanan, serta penguatan cadangan pangan melalui diversifikasi dan pemberdayaan kelompok tani dan nelayan.

Capaian Tahun 2025	Target Akhir RPJMD (2029)	Selisih Target Terhadap Capaian Akhir RPJMD
73,60	79,61	92,45

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2025–2029, Indeks Ketahanan Pangan 2025 mencapai 92,45%, menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan, meski penilaian menyeluruh

sebagai indikator RPJMD masih dalam tahap awal.

Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2025 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional



Sumber :

https://data.badanpangan.go.id/datasetpublications/uny/ikp-kabupaten-kota-2025?utm_source=chatgpt.com



Pada 2025, Indeks Ketahanan Pangan Konawe Utara 68,83, berada di peringkat menengah Sulawesi Tenggara, lebih tinggi dari Muna dan Konawe Kepulauan, namun di bawah Kota Kendari, Wakatobi, dan Kolaka.

Faktor Penyebab:

1. Fluktuasi produksi pangan akibat faktor musim dan keterbatasan sarana produksi.
2. Distribusi dan pasokan pangan belum merata karena infrastruktur logistik yang belum memadai.
3. Cadangan pangan daerah terbatas, belum mampu menutupi kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan sepanjang tahun.
4. Pemanfaatan keragaman pangan lokal terbatas dan mutu pangan belum konsisten akibat kurangnya fasilitas pascapanen dan pengolahan modern.

Upaya yang Dilakukan:

1. Meningkatkan produksi komoditas lokal pertanian dan perikanan dengan penerapan teknologi budidaya modern.
2. Penguatan cadangan pangan masyarakat melalui program diversifikasi pangan berbasis komoditas unggulan daerah.
3. Peningkatan infrastruktur distribusi pangan agar pasokan lebih merata.
4. Pengembangan industri pengolahan pangan modern untuk menjamin mutu dan keberlanjutan pasokan.

Solusi:

1. Mendorong kolaborasi multipihak antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat.
2. Optimalisasi cadangan pangan lokal dan diversifikasi pangan untuk meningkatkan ketersediaan sepanjang tahun.
3. Integrasi prinsip keberlanjutan dalam produksi, distribusi, dan pengolahan pangan.

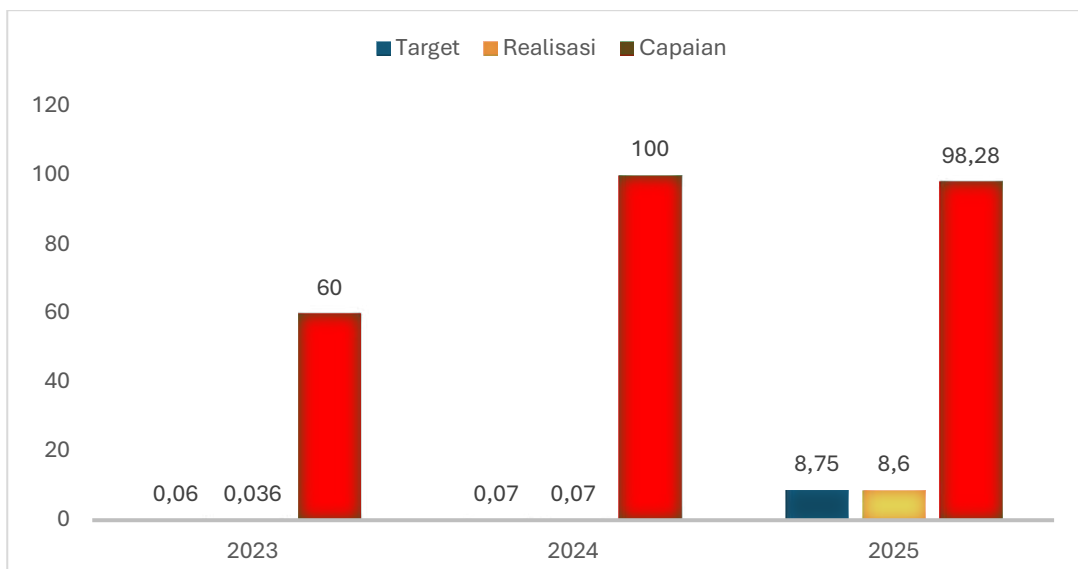


Sasaran 11 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian Daerah

IKU 19: Rasio PDB Pariwisata

Rasio PDB Pariwisata menunjukkan besarnya kontribusi sektor pariwisata terhadap total PDB daerah. Rasio ini mencerminkan peran pariwisata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Rasio yang tinggi menandakan sektor pariwisata menjadi penggerak ekonomi, sedangkan rasio rendah menunjukkan potensi yang belum optimal. Indikator ini penting sebagai dasar evaluasi dan perumusan kebijakan pengembangan pariwisata berkelanjutan

Grafik Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Rasio PDB Pariwisata Tahun 2023-2025



Rasio PDB sektor pariwisata Kabupaten Konawe Utara tahun 2025 mencapai 10,95% dan menunjukkan tren meningkat, menandakan kontribusi yang semakin besar terhadap perekonomian daerah. Peningkatan ini didukung berkembangnya destinasi wisata dan usaha pendukung seperti kuliner, transportasi, dan ekonomi kreatif, serta keterlibatan masyarakat. Capaian ini menunjukkan strategi pengembangan pariwisata berjalan tepat dan berdampak pada peningkatan pendapatan serta lapangan kerja secara berkelanjutan.

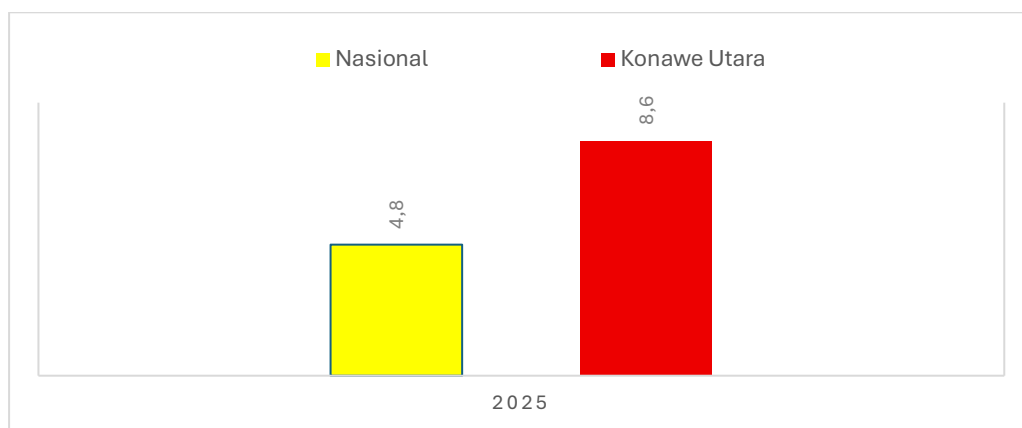


Capaian Tahun 2025	Target Akhir RPJMD (2029)	Selisih Target Terhadap Capaian Akhir RPJMD
10,95	9,35	117,11

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2025-2029 Rasio PDB Pariwisata mengalami peningkatan dari target yang telah ditetapkan dan diharapkan mampu dicapai pada akhir periode RPJMD pada Tahun 2029. Capaian hingga tahun

2025 terhadap target Tahun 2026 sebesar 117,11%.

Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Rasio PDB Pariwisata Tahun 2025 Konawe Utara dan Nasional



Sumber :

https://timesindonesia.co.id/pemerintahan/577975/sektor-pariwisata-serap-2591-juta-tenaga-kerja-sepanjang-2025?utm_source=chatgpt.com#google_vignette



Pada 2025, sektor pariwisata Konawe Utara meningkat signifikan, didorong oleh potensi wisata, infrastruktur, dan partisipasi masyarakat, mendukung ekonomi kreatif. Jumlah wisatawan tercatat 129 mancanegara dan 39.743 nusantara, dengan fasilitas 124 restoran, 161 penginapan, 37 hotel (524 kamar, 703 tempat tidur).



Faktor Penghambat:

Keterbatasan Infrastruktur dan Aksesibilitas, keterbatasan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Hambatan Kepemilikan Lahan, Minimnya Promosi, Rendahnya Pengeluaran Wisatawan

Upaya yang dilakukan :

Peningkatan kualitas destinasi, infrastruktur, dan kuantitas wisatawan, peningkatan lama tinggal wisatawan, diversifikasi produk wisata, transformasi digital, serta pembangunan desa wisata yang berkelanjutan

Solusi:

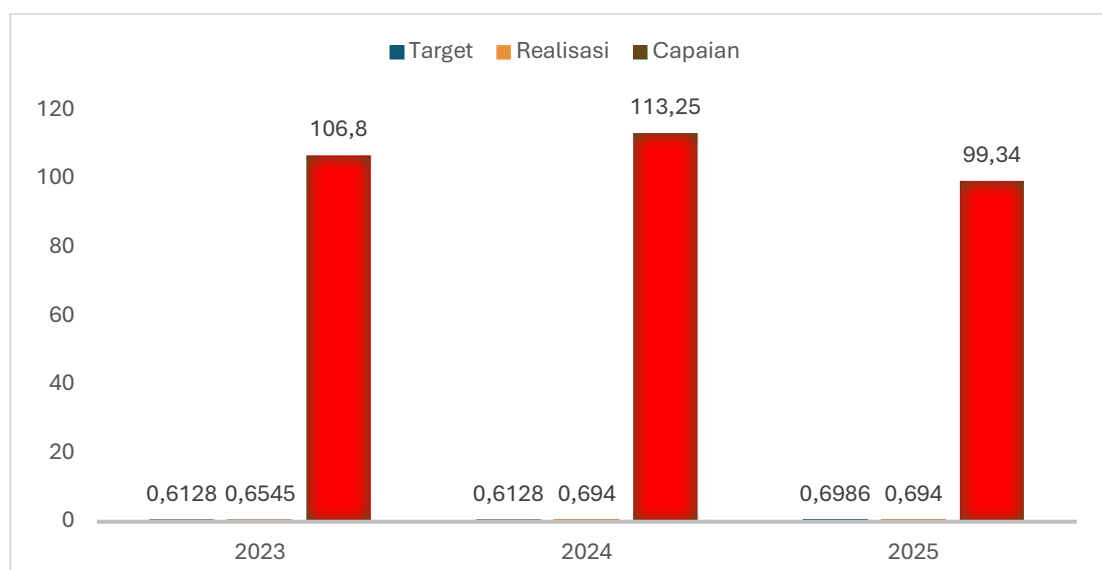
Meningkatkan kualitas destinasi, memperlama durasi kunjungan, serta mendorong belanja wisatawan, pengembangan infrastruktur, konektivitas udara, pelatihan SDM, serta optimalisasi teknologi dan pembiayaan KUR

Sasaran 12 : Terwujudnya Perdesaan sebagai Alat Pertumbuhan Ekonomi

IKU 20: Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun (IDM) mengukur kemajuan dan kemandirian desa melalui ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. IDM menilai kapasitas desa dalam layanan dasar, ekonomi lokal, pengelolaan sumber daya, dan kualitas hidup masyarakat, serta mengklasifikasikan desa dari sangat tertinggal hingga mandiri untuk mendukung kebijakan pembangunan tepat sasaran.

Grafik Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Indeks Desa Membangun Tahun 2023-2025





Capaian Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Konawe Utara meningkat signifikan dari 0,6545 (2023) menjadi 0,694 (2025), melampaui target RPJMD. Dengan 131 desa berkembang, kinerja pembangunan desa dikategorikan “Sangat Berhasil”, menandakan penguatan kapasitas desa, layanan dasar, dan ekonomi lokal berjalan efektif.

Capaian Tahun 2025	Target Akhir RPJMD (2029)	Selisih Target Terhadap Capaian Akhir RPJMD
0,694	0,7216	96,17

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2025–2029, Indeks Desa Membangun (IDM) mencapai 0,694 pada 2025, dengan capaian 96,17% terhadap target 2026, menunjukkan peningkatan dari target RPJMD dan

diharapkan terus berkembang hingga 2029.



Pada 2025, Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Konawe Utara meningkat signifikan, terutama pada layanan dasar dan kemandirian ekonomi, dengan banyak desa menuju status “maju” dan “mandiri”, selaras dengan target pembangunan desa mandiri nasional.

Faktor Penyebab:

1. Infrastruktur desa terpencil yang masih terbatas, menghambat akses layanan dasar dan distribusi ekonomi.
2. Kualitas SDM aparat desa belum merata, memengaruhi perencanaan dan pengelolaan anggaran.
3. Ketergantungan ekonomi pada sektor tradisional dan terbatasnya diversifikasi usaha lokal.
4. Kerentanan terhadap bencana alam, seperti banjir dan longsor, memengaruhi ketahanan lingkungan.



Upaya yang Dilakukan:

1. Penguatan layanan dasar melalui pembangunan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum.
2. Peningkatan kapasitas aparat desa melalui pelatihan manajemen dan pengelolaan keuangan.
3. Pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan ekonomi, pengembangan UMKM, pertanian modern, dan ekowisata.
4. Peningkatan kesiapsiagaan bencana dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

Solusi:

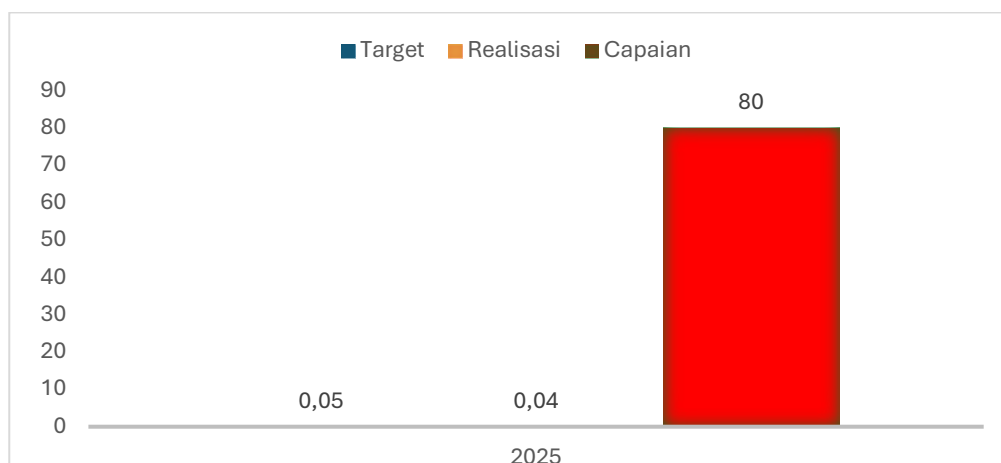
1. Memperkuat infrastruktur yang menghubungkan desa terpencil untuk pemerataan pembangunan.
2. Mendorong diversifikasi ekonomi desa dan inovasi lokal agar ketahanan ekonomi meningkat.
3. Mengoptimalkan teknologi informasi untuk layanan administrasi dan monitoring pembangunan desa.
4. Memperluas program mitigasi bencana dan konservasi lingkungan untuk meningkatkan ketahanan sosial dan ekologis.

Sasaran 13 : Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

IKU 21: Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB mengukur kemampuan daerah menghimpun pendapatan pajak dibanding total PDRB, mencerminkan kemandirian fiskal, efektivitas pemungutan, dan kontribusi ekonomi. Semakin tinggi rasio, semakin kuat kapasitas pembiayaan pembangunan; rasio rendah menandakan basis pajak atau kepatuhan wajib pajak yang terbatas.

Grafik Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Rasio Pajak Daerah Terhadap Tahun 2025





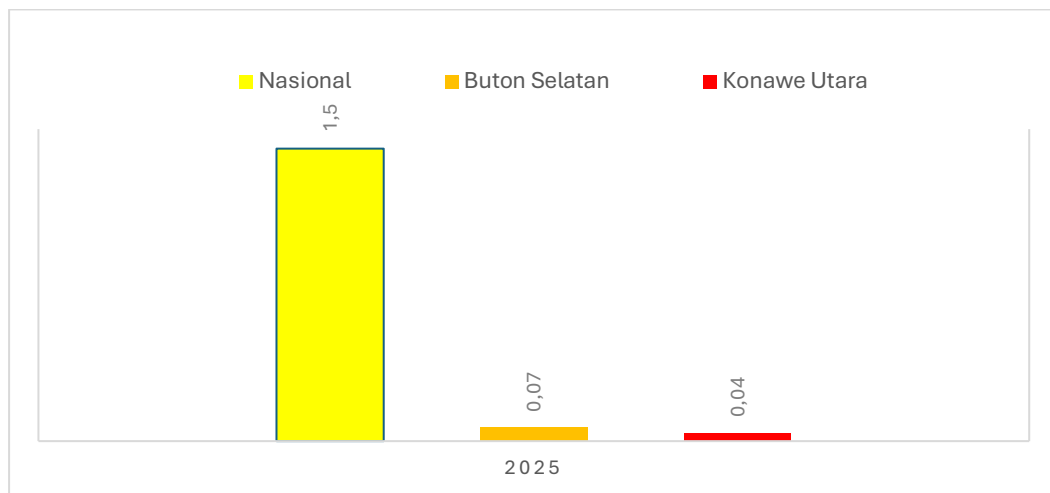
Berdasarkan evaluasi 2025, Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Konawe Utara mencapai 0,04 dengan capaian 80%, menunjukkan kemajuan dalam kemampuan daerah menghimpun pendapatan pajak. Peningkatan ini didukung oleh digitalisasi administrasi perpajakan, penguatan basis pajak, serta sistem pemungutan yang lebih terstruktur, meski penilaian menyeluruh sebagai indikator RPJMD baru mulai dilakukan pada tahun yang sama.

Capaian Tahun 2025	Target Akhir RPJMD (2029)	Selisih Target Terhadap Capaian Akhir RPJMD
0,04	0,082	48,78

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2025–2029, Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB pada 2025 mencapai 48,78%, menunjukkan kemajuan awal dalam penghimpunan pajak daerah, meski penilaian menyeluruh sebagai indikator

RPJMD masih dalam tahap awal.

Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Tahun 2025 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional



Sumber :

https://peraturan.bpk.go.id/Download/384829/PERDA%20NO%2012%20TAHUN%202024.pdf?utm_source=chatgpt.com



- ### Upaya yang Dilakukan:

- Solusi:**

- ## IKU 22: Inklusi Keuangan

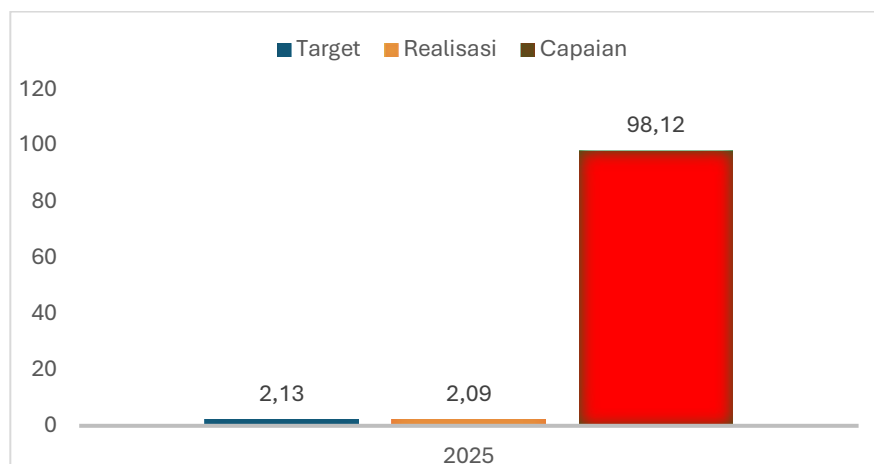
Inklusi keuangan adalah kondisi di mana seluruh masyarakat memiliki akses mudah, aman, dan terjangkau ke layanan keuangan formal seperti tabungan, kredit, asuransi, pembayaran, dan investasi. Tingkat inklusi keuangan yang tinggi memungkinkan masyarakat mengelola risiko, meningkatkan kesejahteraan, membangun usaha, dan berpartisipasi produktif

Rasio pajak daerah terhadap PDRB Kabupaten Konawe Utara tahun 2025 tercatat 0,04%, jauh di bawah rata-rata nasional 1,5% dan Buton Selatan 0,07%. Hal ini menunjukkan efektivitas pemungutan pajak masih rendah, sehingga sebagian besar pendapatan daerah bergantung pada transfer pusat atau provinsi.



dalam ekonomi, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Grafik Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Inklusi Keuangan Terhadap Tahun 2025



Berdasarkan evaluasi 2025, Inklusi Keuangan Kabupaten Konawe Utara mencapai realisasi 2,09 dengan capaian 98,12%, mencerminkan meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Kemajuan ini didorong oleh literasi keuangan yang lebih baik, digitalisasi layanan, dan tersedianya fasilitas keuangan di wilayah terpencil, meski penilaian menyeluruh sebagai indikator RPJMD baru mulai dilakukan pada tahun yang sama.

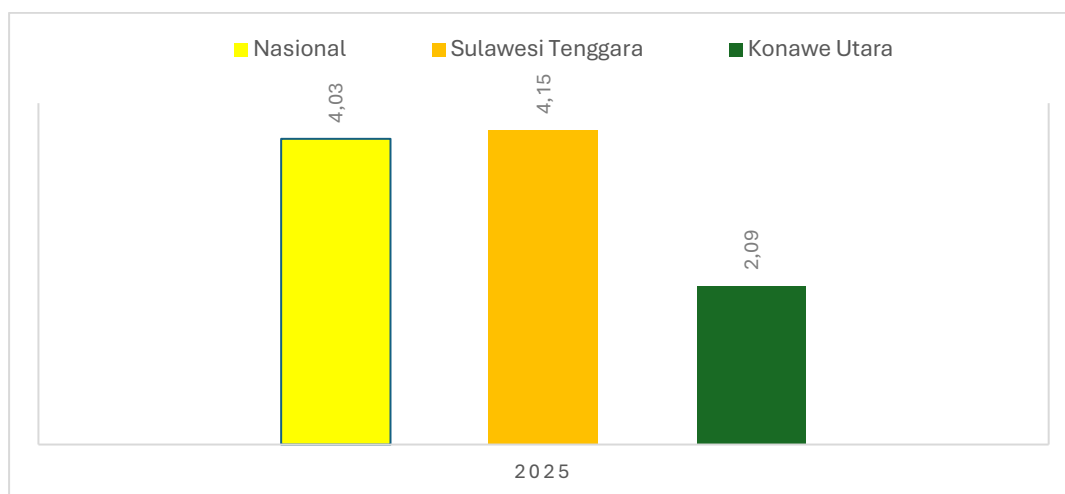
Capaian Tahun 2025	Target Akhir RPJMD (2029)	Selisih Target Terhadap Capaian Akhir RPJMD
2,09	2,45	85,30

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2025–2029, Inklusi Keuangan pada 2025 mencapai 85,30, menunjukkan kemajuan signifikan dalam akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, meski penilaian menyeluruh sebagai

indikator RPJMD masih dalam tahap awal.



Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Inklusi Keuangan Terhadap PDRB Tahun 2025 Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional



Sumber :

https://money.kompas.com/read/2025/05/02/190519426/snlik-2025-literasi-keuangan-indonesia-naik-jadi-6646-persen-dan-inklusi?utm_source=chatgpt.com



Pada 2025, inklusi keuangan di Indonesia mencapai 4,03 dan Sulawesi Tenggara 4,15, menunjukkan akses layanan keuangan yang relatif tinggi. Kabupaten Konawe Utara hanya 2,09, menandakan akses dan pemanfaatan layanan keuangan formal masih rendah, sehingga perlu peningkatan literasi dan akses keuangan.

Faktor Penyebab:

1. Akses layanan keuangan belum merata, terutama di wilayah terpencil.
2. Tingkat literasi dan pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan formal masih rendah.
3. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan formal belum optimal.
4. Ketergantungan pada praktik keuangan informal yang kurang aman dan efisien.



Upaya yang Dilakukan:

1. Memperluas jaringan layanan keuangan formal hingga ke desa-desa terpencil.
2. Menyelenggarakan program edukasi dan literasi keuangan secara berkelanjutan.
3. Mendorong digitalisasi layanan keuangan untuk memudahkan akses dan transaksi.
4. Membentuk kemitraan antara pemerintah, perbankan, fintech, dan komunitas lokal.

Solusi:

1. Peningkatan akses dan ketersediaan agen layanan keuangan di seluruh wilayah.
2. Program literasi dan pelatihan keuangan yang terintegrasi dengan kegiatan komunitas.
3. Pemanfaatan teknologi digital untuk transaksi, pembayaran, dan kredit mikro.
4. Kolaborasi multipihak untuk mendorong penggunaan layanan keuangan formal secara inklusif.

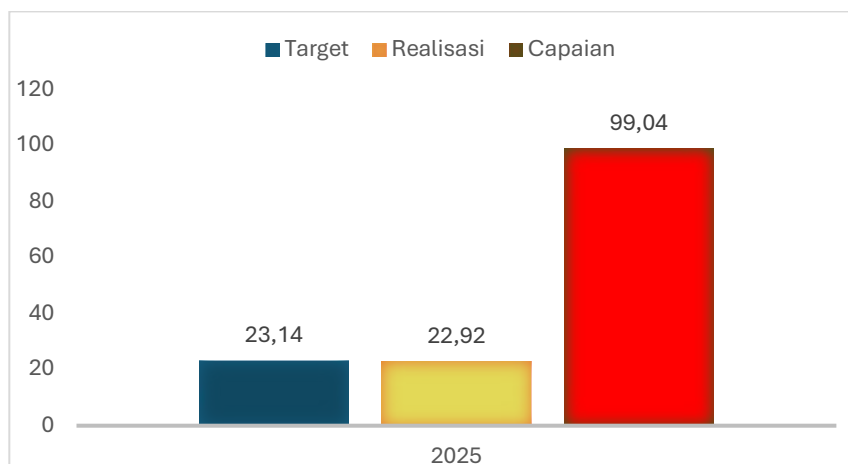
Sasaran 14 : Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah

IKU 23: Presentase Realisasi Investasi Terhadap PDRB

Persentase Realisasi Investasi terhadap PDRB mengukur sejauh mana investasi pemerintah dan swasta terealisasi dibanding total Produk Domestik Regional Bruto suatu daerah. Semakin tinggi persentasenya, semakin besar kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, sektor industri, dan pembangunan infrastruktur. Sebaliknya, nilai rendah menunjukkan potensi investasi belum dimanfaatkan optimal. Indikator ini penting untuk memantau kinerja investasi dan merumuskan kebijakan peningkatan daya saing daerah.



Grafik Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Presentase Realisasi Investasi Terhadap PDRB Terhadap Tahun 2025



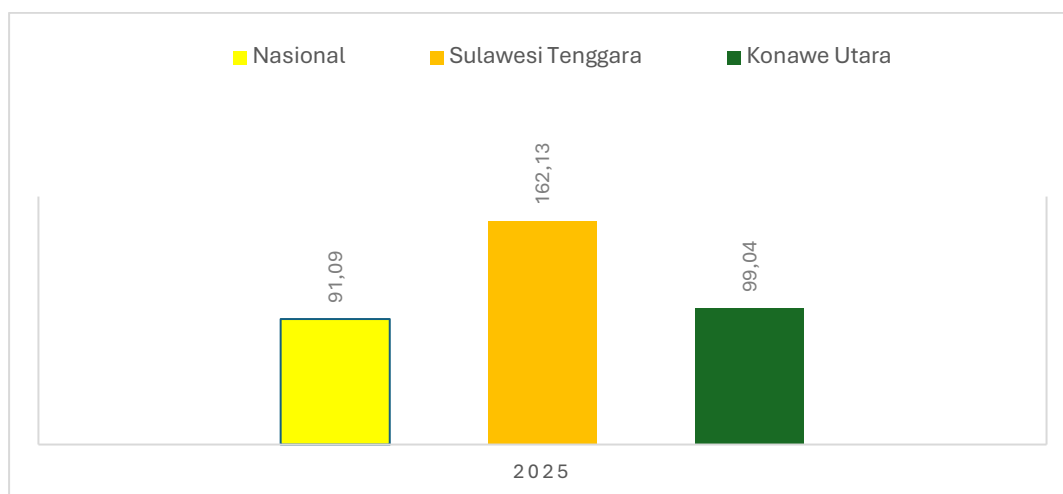
Pada 2025, Persentase Realisasi Investasi terhadap PDRB di Konawe Utara mencapai 22,92% dengan capaian 99,04% dari target, menunjukkan investasi di sektor infrastruktur, industri, dan usaha lokal mulai terealisasi secara signifikan. Indikator ini baru dinilai secara sistematis dalam RPJMD 2025.

Capaian Tahun 2025	Target Akhir RPJMD (2029)	Selisih Target Terhadap Capaian Akhir RPJMD
22,92	36,89	62,13

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2025–2029, Presentase Investasi terhadap PDRB di Kabupaten Konawe Utara tercatat sebesar 62,13% capaian ini menunjukkan bahwa realisasi investasi telah berjalan cukup signifikan



Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Tahun 2025 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional



Sumber :

https://data.bkpm.go.id/visualisasi-detail/data-realisis-investasi-tahun-2025-berdasarkan-provinsi?utm_source=chatgpt.com



Capaian Konawe Utara sebesar 99,04 menunjukkan performa yang solid karena berhasil melampaui angka Nasional (91,09), meskipun masih terdapat gap yang cukup lebar sebesar 63,09 poin untuk mengejar standar tinggi yang dicapai oleh Provinsi Sulawesi Tenggara (162,13).

Faktor penyebab:

Persentase realisasi investasi Konawe Utara meningkat berkat perbaikan iklim usaha, fasilitasi sektor strategis, dan koordinasi dengan dunia usaha. Kendala masih meliputi infrastruktur terbatas, perizinan panjang, SDM rendah, persepsi risiko tinggi, promosi investasi kurang merata, dan akses modal terbatas.

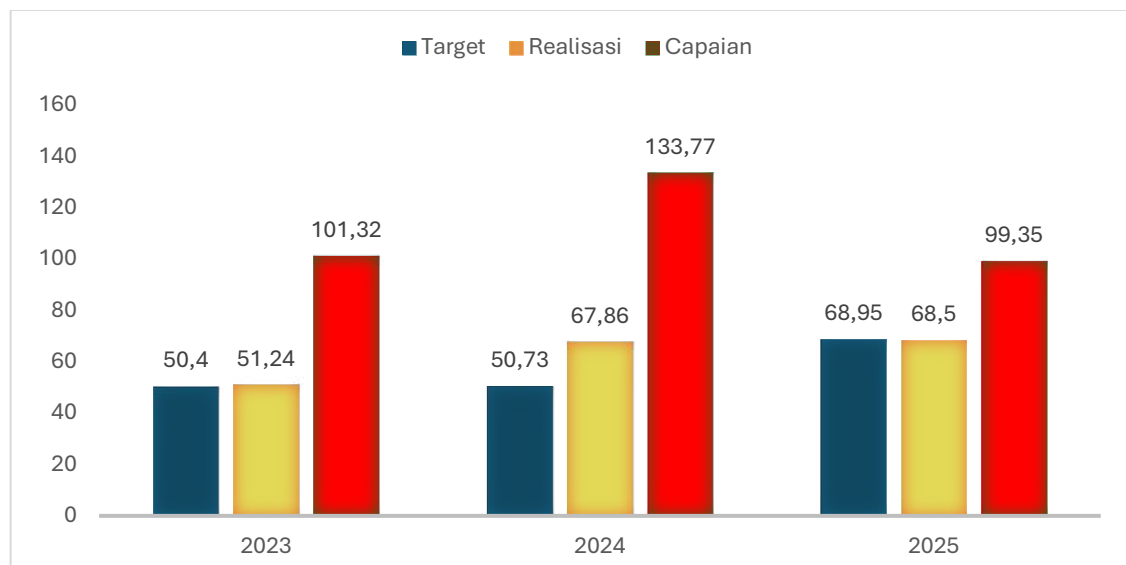
Upaya dan solusi:

Pemerintah perlu memperkuat infrastruktur, digitalisasi perizinan, meningkatkan SDM, dan memperluas promosi investasi untuk mendorong realisasi investasi, memperkuat ekonomi, mengembangkan sektor strategis, dan membuka lapangan kerja.

**MISI 4 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah yang Responsif dan Inovatif****Tujuan 4 : Mempercepat Transaksi Tata Kelola Pemerintah yang Berintegrasi dan Adaptif****IKU 24 : Indeks Reformasi Birokrasi**

Indeks Reformasi Birokrasi mengukur keberhasilan instansi pemerintah dalam melaksanakan reformasi pada aspek organisasi, pelayanan, SDM, dan budaya kerja. Indeks ini mencerminkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas birokrasi dalam memberikan layanan publik. Semakin tinggi nilainya, semakin baik kualitas tata kelola pemerintahan dan dukungannya terhadap pembangunan berkelanjutan.

Grafik Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2025



Capaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Konawe Utara tahun 2025 sebesar 68,50% meskipun belum memenuhi target RPJMD sebesar 68,95 namun tetap dikategorikan “Sangat Berhasil”. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan kualitas layanan publik. Hingga tahun 2025, capaian terhadap target Tahun 2026 mencapai 92,98%.

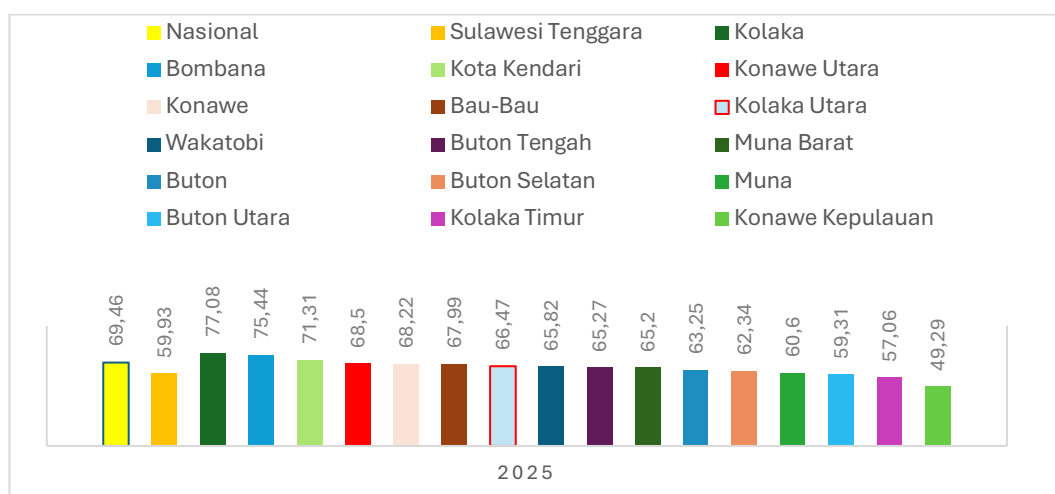


Capaian Tahun 2025	Target Akhir RPJMD (2029)	Selisih Target Terhadap Capaian Akhir RPJMD
68,50	72,98	93,86

Jika dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2025–2029, Indeks Reformasi Birokrasi menunjukkan peningkatan dari target yang ditetapkan dan diperkirakan akan tercapai pada akhir periode RPJMD 2029. Hingga 2025, capaian terhadap target Tahun

2026 telah mencapai 93,86%.

Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional



Sumber :

https://simdata.sultraprov.go.id/detailtabel/tabel_74_147/2024?utm_source=chatgpt.com



Pada 2025, Kabupaten Konawe Utara mencatat nilai 68,50, menempati peringkat keempat di Sulawesi Tenggara, di atas rata-rata provinsi (59,93) namun sedikit di bawah rata-rata nasional (69,46), berada di bawah Kota Kendari (71,31) dan di atas Bau-Bau (67,99) serta Konawe (68,22).



Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Konawe Utara menunjukkan kinerja kompetitif, mencerminkan efektivitas layanan publik, tata kelola transparan, digitalisasi layanan, pengembangan SDM, integritas, dan sistem merit ASN, dengan fokus pada profesionalisme, inovasi, dan responsivitas birokrasi.

Faktor Penyebab:

Beberapa kendala utama yang menghambat jalannya reformasi birokrasi antara lain:

1. Resistensi internal: Adanya penolakan terhadap perubahan dari ASN yang sudah merasa nyaman dengan sistem lama.
2. Lemahnya Sinergi: Koordinasi antar Perangkat Daerah (PD) seringkali kurang efektif.
3. Kendala Regulasi: Adanya regulasi yang tumpang tindih dan sering berubah sehingga menyulitkan implementasi di lapangan.
4. Keterbatasan Sumber Daya: Kurangnya dukungan pendanaan yang memadai serta digitalisasi pelayanan publik yang belum merata.
5. Sistem Insentif & Pengawasan: Tidak adanya insentif atau sanksi yang jelas bagi pelaksana RB di daerah, serta pemantauan implementasi yang kurang efektif.

Upaya:

Langkah-langkah strategis yang perlu diambil oleh pimpinan dan jajaran struktural meliputi:

1. Komitmen Pimpinan: Kepala daerah dan pejabat struktural harus memiliki komitmen kuat dalam melaksanakan dan mengimplementasikan RB serta SAKIP dengan baik.
2. Pengembangan SDM & Layanan: Meningkatkan kualitas SDM ASN dan mengembangkan layanan berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi serta kemudahan akses.
3. Penguatan Integritas: Melakukan evaluasi berkala, penerapan sanksi dan penghargaan yang sesuai, serta peningkatan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM.



Solusi:

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang diusulkan adalah:

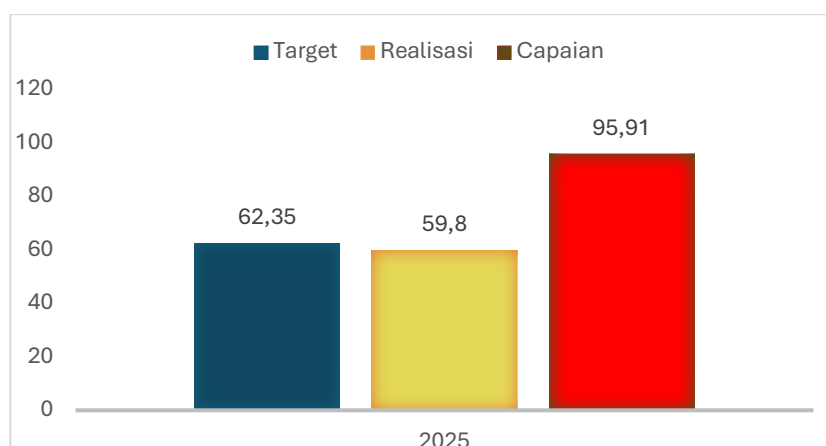
1. Prioritas Perencanaan: Menjadikan RB sebagai agenda prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah.
2. Pengembangan Kompetensi: Melaksanakan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi ASN secara berkelanjutan.
3. Transformasi Tata Kelola: Menggunakan mekanisme tim kerja lintas OPD, menerapkan *E-Government*, serta menyederhanakan regulasi dan proses birokrasi.
4. Optimasi Manajemen: Melakukan optimalisasi anggaran khusus RB, menerapkan sistem *reward and punishment* bagi OPD, serta memperkuat pengawasan dan evaluasi.

Sasaran 15 : Meningkatnya Tata Kelola Birorkasi yang Profesional

IKU 25: Indeks RB General

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) General mengukur kemajuan reformasi birokrasi suatu instansi atau pemerintah daerah, mencakup efisiensi, akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme. Penilaian meliputi penyederhanaan struktur organisasi, penguatan manajemen kinerja, peningkatan kompetensi aparatur, penggunaan teknologi informasi, dan pengembangan budaya kerja inovatif. Nilai tinggi menunjukkan birokrasi yang efektif, profesional, dan mampu mendukung pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan kepercayaan publik.

Grafik Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Indeks Reformasi Birokrasi General Terhadap PDRB Terhadap Tahun 2025





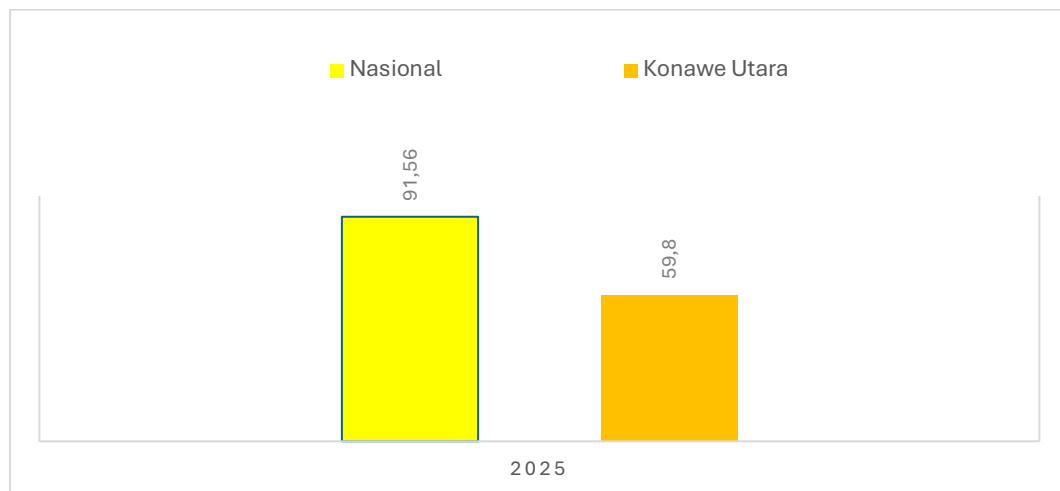
Pada 2025, Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) General Kabupaten Konawe Utara tercatat 59,80 dengan capaian 95,91% terhadap target, menunjukkan upaya reformasi birokrasi yang efektif dalam meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan layanan publik meski belum sepenuhnya tercapai.

Capaian Tahun 2025	Target Akhir RPJMD (2029)	Selisih Target Terhadap Capaian Akhir RPJMD
59,80	72,19	82,83

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2025-2029, Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) General di Kabupaten Konawe Utara tercatat sebesar 82,83. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara periode

2025–2029, pencapaian ini menunjukkan kemajuan yang signifikan.

Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi General Tahun 2025 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional



Sumber :

https://kemendikdasmen.go.id/siaran-pers/14737-lampaui-rata-rata-nasional-kemendikdasmen-raih-nilai-indeks-?utm_source=chatgpt.com



Hingga 2025, IRB General Kabupaten Konawe Utara mencapai 59,80, mencerminkan peningkatan efektivitas, efisiensi, dan kualitas layanan publik serta penguatan integritas dan kompetensi aparatur.

Faktor Penyebab:

1. Prosedur birokrasi tumpang tindih dan kompleks.
2. Kapasitas dan kompetensi aparatur yang belum merata.
3. Pemanfaatan teknologi informasi untuk layanan publik belum optimal.
4. Perbedaan penerapan standar operasional prosedur antarunit kerja.
5. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi layanan publik masih rendah, sehingga persepsi transparansi dan akuntabilitas belum maksimal.

Upaya:

1. Program pelatihan dan peningkatan kompetensi aparatur.
2. Penyederhanaan prosedur administrasi melalui integrasi layanan dan digitalisasi.
3. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi kinerja birokrasi.
4. Mendorong partisipasi masyarakat melalui pengaduan, survei kepuasan publik, dan mekanisme feedback.

Solusi:

1. Memperluas digitalisasi layanan publik agar lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
2. Standarisasi SOP antarunit kerja untuk konsistensi pelayanan.
3. Meningkatkan literasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan layanan.
4. Integrasi program inovasi birokrasi untuk memperkuat profesionalisme, efisiensi, dan kualitas layanan publik.



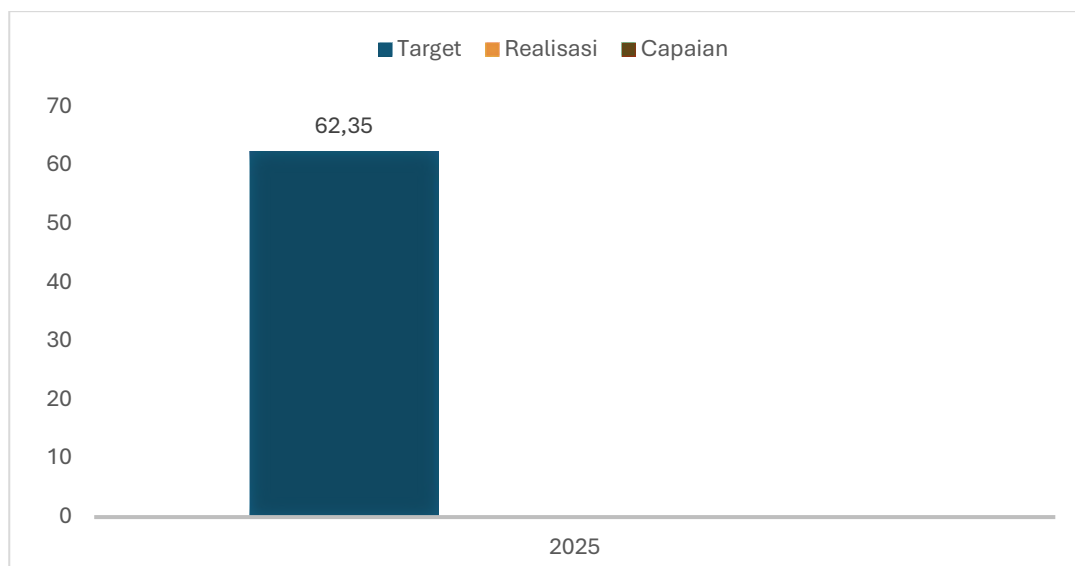
MISI 5 : Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan Serta Penanggulangan Bencana

Tujuan 5 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

IKU 26 : Presentase Penurunan Emisi GRK

Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mengukur efektivitas suatu daerah atau negara dalam menurunkan emisi GRK dibanding periode sebelumnya atau target tertentu. Semakin tinggi persentasenya, semakin efektif langkah mitigasi—seperti efisiensi energi, energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan reboisasi—dalam mengurangi dampak perubahan iklim, melindungi lingkungan, dan mendukung komitmen nasional maupun internasional terhadap pemanasan global.

Grafik Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahun 2025



Berdasarkan hasil evaluasi program, Presentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menjadi indikator utama dalam menilai efektivitas upaya Kabupaten Konawe Utara mengurangi emisi. Pada tahun 2025, pengukuran indikator ini mulai dilaksanakan secara lebih sistematis seiring dengan penerapan efisiensi energi, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, dan strategi mitigasi perubahan iklim. Meskipun nilai resmi belum tersedia, capaian ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah berjalan efektif dan sejalan dengan tujuan pembangunan ramah iklim, adaptif terhadap perubahan iklim, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.



Capaian Tahun 2025	Target Akhir RPJMD (2029)	Selisih Target Terhadap Capaian Akhir RPJMD
	72,98	

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2025–2029, Presentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) belum dapat dihitung karena nilai untuk penilaian indikator ini hingga saat ini belum tersedia.



Hingga saat ini, belum tersedia perbandingan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kabupaten Konawe Utara dengan daerah lain maupun target RPJMD, karena data resmi untuk indikator ini belum ada. Hal ini disebabkan pengukuran penurunan emisi merupakan program dan indikator baru yang penilaiannya baru mulai dilakukan secara komprehensif pada 2025. Meskipun begitu,

upaya pengelolaan emisi dan penerapan praktik ramah lingkungan di Kabupaten Konawe Utara terus berjalan, sehingga data penurunan emisi diharapkan dapat dihitung dan dibandingkan di masa mendatang.

Faktor Penyebab:

- Terbatasnya pemanfaatan teknologi ramah lingkungan di sektor industri dan rumah tangga.
- Rendahnya kesadaran masyarakat terkait praktik ramah lingkungan dan pengurangan emisi.
- Keterbatasan sistem monitoring emisi yang terintegrasi dan akurat.
- Minimnya insentif bagi pelaku usaha untuk menerapkan praktik produksi rendah karbon.

Upaya:

- Penerapan strategi mitigasi perubahan iklim melalui efisiensi energi, pengelolaan limbah, konservasi hutan dan lahan, serta pengembangan energi terbarukan.
- Sosialisasi dan edukasi terkait pengelolaan lingkungan dan pengurangan emisi.



- Penyusunan kebijakan dan program berbasis mitigasi iklim untuk sektor publik dan swasta.

Solusi:

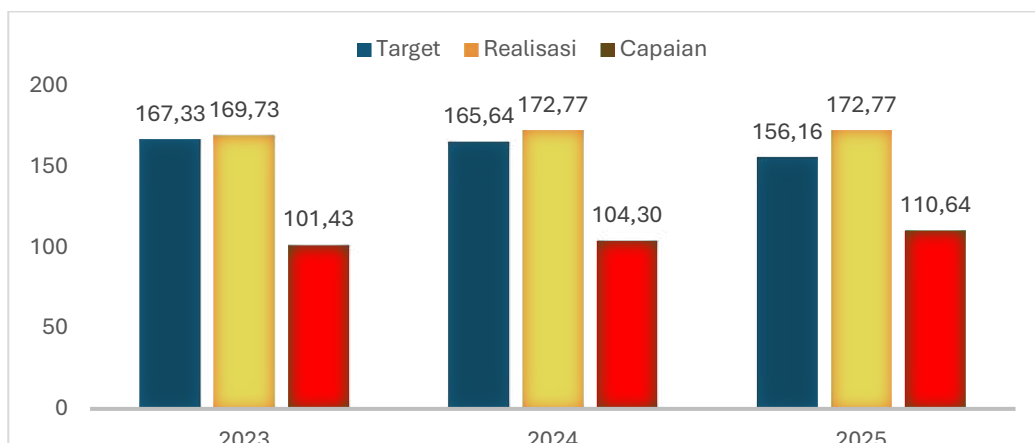
- Memperluas penggunaan teknologi hijau dan energi terbarukan di sektor industri dan rumah tangga.
- Meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat mengenai dampak GRK dan praktik ramah lingkungan.
- Mengembangkan sistem pemantauan emisi yang terintegrasi dan berbasis data digital.
- Mendorong insentif dan kemudahan bagi pelaku usaha untuk mengadopsi produksi rendah karbon.
- Memperkuat kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan dunia usaha untuk pencapaian target penurunan emisi GRK.

Sasaran 16 : Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

IKU 27: Indeks Resiko Bencana (IRB)

Indeks Risiko Bencana (IRB) mengukur kerentanan suatu wilayah terhadap bencana sekaligus kemampuan daerah menghadapi dan menanggulangnya. Indeks ini mencakup bahaya (gempa, banjir, tanah longsor), kerentanan masyarakat/infrastruktur, dan kapasitas mitigasi daerah. Nilai tinggi berarti risiko besar akibat bahaya atau kerentanan tinggi dan kapasitas mitigasi rendah, sedangkan nilai rendah menunjukkan daerah lebih siap menghadapi bencana. IRB penting untuk perencanaan pembangunan, alokasi sumber daya, dan kebijakan ketahanan wilayah.

Grafik Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Indeks Resiko Bencana Terhadap Tahun 2023-2025





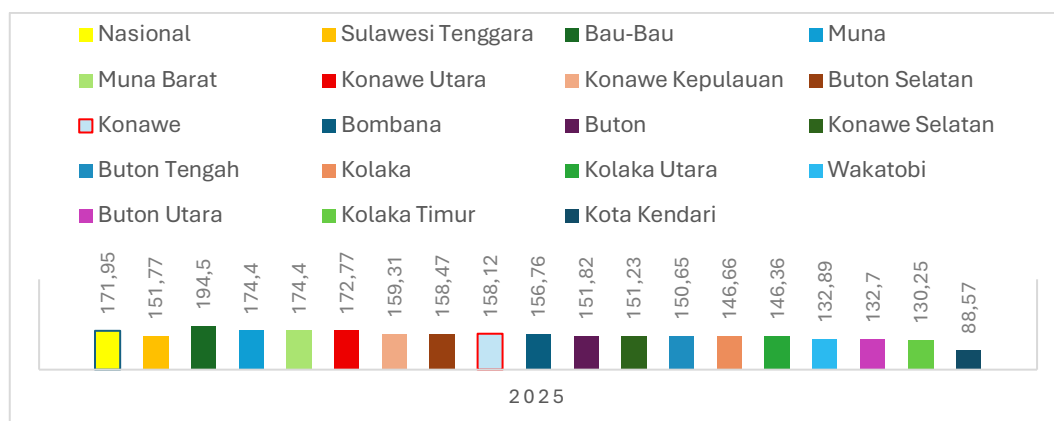
Hingga 2025, Indeks Resiko Bencana Kabupaten Konawe Utara tercatat 172,7%, melebihi target 156,16% dan menunjukkan risiko bencana masih tinggi, sehingga perlu upaya mitigasi lebih lanjut.

Capaian Tahun 2025	Target Akhir RPJMD (2029)	Selisih Target Terhadap Capaian Akhir RPJMD
172,77	155,17	111,34

2026 telah mencapai 111,34%.

Jika dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2025–2029, Indeks Resiko Bencana menunjukkan peningkatan dari target yang ditetapkan dan diperkirakan akan tercapai pada akhir periode RPJMD 2029. Hingga 2025, capaian terhadap target Tahun

**Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Resiko Bencana Tahun 2025
Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional**



Sumber :

<https://inarisk.bnpb.go.id/IRBI-2024/mobile/index.html>



Pada 2025, IRBI Konawe Utara tercatat 172,77, di atas rata-rata nasional (171,95) dan Sultra (151,77). Tantangan meliputi resistensi ASN, koordinasi antar OPD, dan digitalisasi belum merata. Strategi ke depan fokus pada penguatan SAKIP, optimalisasi anggaran reformasi, serta penerapan e-government dan sistem reward-punishment OPD.



Faktor Penyebab:

1. Tingginya kerentanan wilayah terhadap banjir, tanah longsor, dan abrasi pantai.
2. Keterbatasan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah dalam merespons bencana.
3. Lemahnya sistem peringatan dini dan integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan.
4. Infrastruktur mitigasi bencana (bendungan, kolam regulasi, pengendalian air) yang masih terbatas.
5. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap praktik adaptasi perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

Upaya:

1. Peningkatan kapasitas individu, komunitas, dan aparat pemerintah melalui pelatihan, simulasi evakuasi, dan edukasi perubahan iklim.
2. Penguatan sistem peringatan dini menggunakan teknologi digital dan sirine peringatan.
3. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur mitigasi bencana seperti bendungan, kolam regulasi, dan pengelolaan DAS.
4. Rehabilitasi hutan, penanaman kembali, pengelolaan sampah, dan konservasi sumber daya alam.
5. Integrasi pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

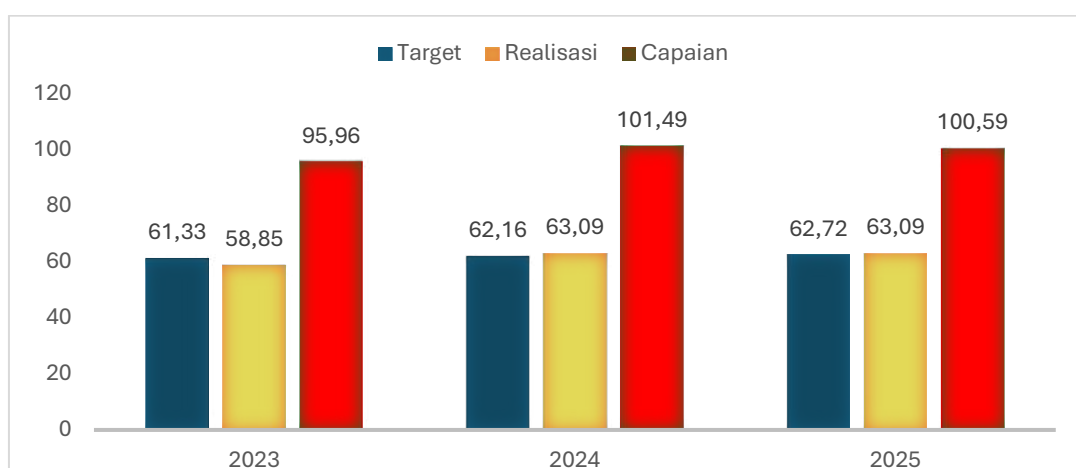
Solusi:

1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan dan mitigasi bencana.
2. Pemanfaatan teknologi untuk monitoring risiko bencana dan koordinasi tanggap darurat.
3. Diversifikasi pendekatan pembangunan yang mempertimbangkan ekonomi lokal, pariwisata, dan lingkungan.
4. Kebijakan berkelanjutan untuk meningkatkan ketahanan wilayah dan masyarakat menghadapi risiko bencana secara adaptif.

**Sasaran 17 : Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas****IKU 28: Indeks Lingkungan Hidup**

Indeks Lingkungan Hidup (ILH) mengukur kualitas dan keberlanjutan lingkungan suatu wilayah, mencakup udara, air, sampah, kehutanan, keanekaragaman hayati, serta kemampuan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Nilai tinggi menunjukkan pengelolaan lingkungan yang baik dan berkelanjutan, sedangkan nilai rendah mencerminkan tekanan lingkungan dan risiko kesehatan. ILH menjadi dasar perencanaan pembangunan dan kebijakan lingkungan berkelanjutan.

Grafik Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Indeks Lingkungan Hidup Terhadap Tahun 2023-2025

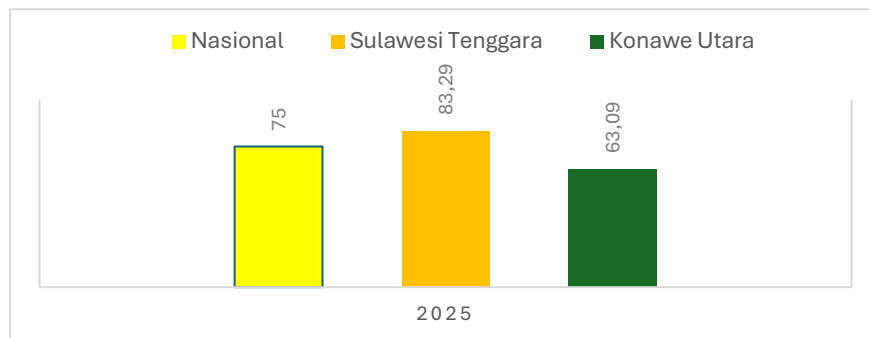


Berdasarkan data IRBI, capaian Indeks Lingkungan Hidup (ILH) dalam tiga tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif. Dari target sebesar 62,72%, realisasi tercatat 58,85% pada 2023, meningkat menjadi 63,09% pada 2024, dan tetap 63,09% pada 2025, sehingga capaian 2025 mencapai sekitar 104,31% dari target yang ditetapkan.

Capaian Tahun 2025	Target Akhir RPJMD (2029)	Selisih Target Terhadap Capaian Akhir RPJMD
63,09	82,35	76,61

Jika dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2025–2029, capaian Lingkungan Hidup terhadap target Tahun 2026 telah mencapai 76,61%.

Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi General Tahun 2025 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional



Sumber :

https://simdata.sultraprov.go.id/uploads/1754236061_LAKIP%202024%20DLH%20Prov%20Sultra%20Selesai.pdf?utm_source=chatgpt.com



Pada 2025, Indeks Lingkungan Hidup Konawe Utara tercatat 63,09, menunjukkan tren positif dan kontribusi sektor lingkungan terhadap ekonomi. Capaian ini menempatkan daerah cukup kompetitif di Sulawesi Tenggara dalam penguatan ekonomi berbasis nilai tambah.

Faktor Penyebab:

- Tekanan dari aktivitas ekonomi.
- Degradasi dan kerusakan lahan.
- Dampak perubahan iklim.
- Risiko bencana ekologis yang meningkat.

Upaya yang Dilakukan:

- Pengendalian pencemaran dan pencegahan kerusakan lingkungan.
- Rehabilitasi lahan kritis.
- Konservasi sumber daya alam secara berkelanjutan.
- Penguatan kapasitas mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.



Solusi:

- Integrasi kebijakan pembangunan rendah karbon dan ramah lingkungan di seluruh sektor.
- Penciptaan lingkungan hidup yang sehat, lestari, dan tangguh terhadap risiko bencana dan perubahan iklim.
- Mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

**MISI 6 : Pengembangan Kebudayaan Daerah Sebagai Landasan Identitas dan Ketahanan Sosial****Tujuan 6 : Mewujudkan Masyarakat Berkebudayaan Maju****IKU 29 : Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)**

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) menilai kemampuan daerah melestarikan dan mengembangkan budaya, termasuk kesenian, tradisi, pendidikan, partisipasi masyarakat, dan regulasi. Nilai tinggi mencerminkan kelestarian budaya, identitas lokal kuat, dan dukungan ekonomi berbasis budaya, sedangkan nilai rendah menunjukkan perlunya perhatian lebih.

Grafik Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2025



Pada 2025, Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Konawe Utara tercatat 52% dengan capaian 97,43% dari target, menunjukkan upaya pelestarian budaya, pendidikan budaya, partisipasi masyarakat, dan dukungan regulasi berjalan efektif, memperkuat identitas lokal dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

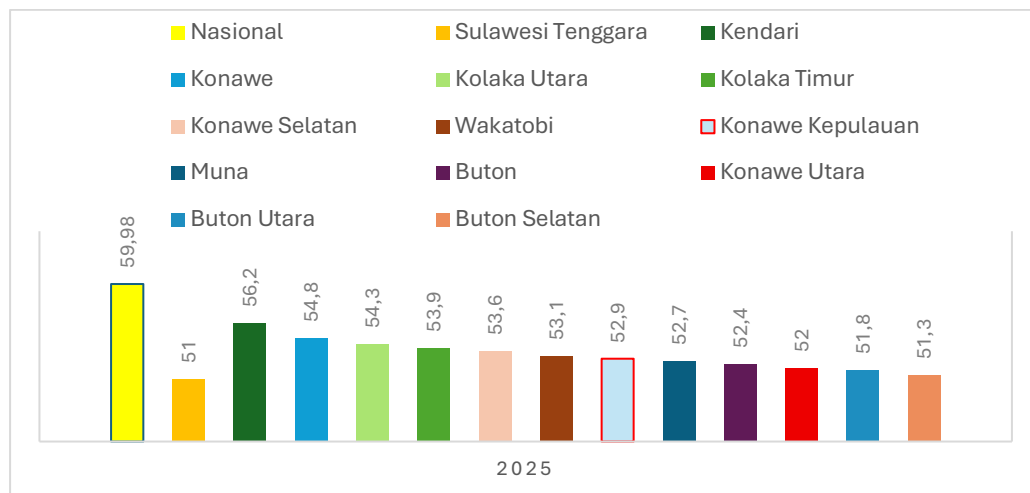
Capaian Tahun 2025	Target Akhir RPJMD (2029)	Selisih Target Terhadap Capaian Akhir RPJMD
52	55,45	93,77

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2025–2029, Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kabupaten Konawe Utara tercatat sebesar 93,77%. Capaian ini menunjukkan perkembangan yang

cukup baik dalam pembangunan kebudayaan daerah



Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2025 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional



Sumber :

<https://ipk.kemenbud.go.id/#provinsi>



Pada 2025, IPK Kabupaten Konawe Utara sebesar 52, di bawah rata-rata nasional (59,98) dan Kota Kendari (56,20), namun mendekati Buton (52,40) dan Muna (52,70), menandakan pembangunan kebudayaan berjalan tetapi perlu diperkuat.

Faktor Penyebab:

1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian budaya.
2. Terbatasnya fasilitas dan sarana pendukung kegiatan budaya.
3. Kurangnya dokumentasi dan pengarsipan warisan budaya secara optimal.
4. Minimnya integrasi nilai-nilai budaya ke dalam pendidikan formal dan program pembangunan daerah.

Upaya:

1. Fokus pengembangan identitas daerah melalui promosi UMKM lokal dan penyelenggaraan acara budaya.
2. Program pembangunan SDM, seperti Konasara Jilid III, termasuk pembangunan fasilitas pendidikan dan asrama mahasiswa di Kendari.



3. Penyelenggaraan acara budaya berskala regional, misalnya Event Harmoni Sultra 2025, untuk meningkatkan visibilitas budaya daerah.

Solusi:

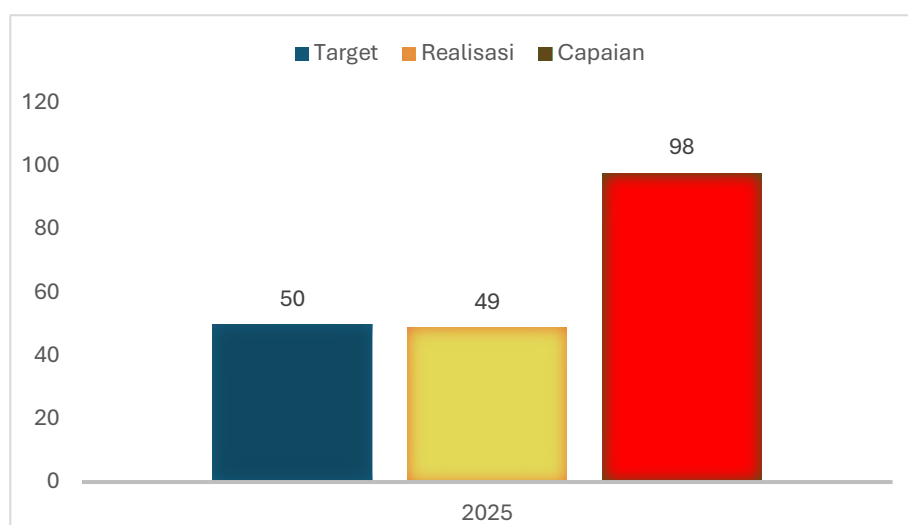
1. Peningkatan kapasitas aparaturnya dan komunitas dalam pengelolaan kebudayaan.
2. Pengembangan fasilitas kesenian dan pusat budaya.
3. Pelestarian dan dokumentasi warisan budaya, serta integrasi nilai budaya ke dalam kurikulum pendidikan dan kegiatan ekonomi kreatif.
4. Promosi budaya melalui festival, media digital, dan pariwisata budaya untuk mendorong partisipasi masyarakat dan memperkuat daya tarik budaya secara berkelanjutan.
5. Tujuan utama adalah memperkuat identitas lokal, melestarikan warisan budaya, serta mendukung pembangunan masyarakat yang kreatif, tangguh, dan berdaya saing.

Sasaran 18 : Terwujudnya Ketahanan Budaya Daerah

IKU 30: Indeks Ketahanan Budaya Daerah

Indeks Ketahanan Budaya Daerah mengukur kemampuan daerah melestarikan dan mengembangkan budaya lokal melalui pelestarian warisan, penguatan kesenian, partisipasi masyarakat, dan dukungan kebijakan; nilai tinggi mencerminkan keberhasilan dan penguatan identitas lokal, sedangkan nilai rendah menunjukkan perlunya perhatian lebih.

Grafik Perbandingan Capaian Dan Target Indikator Indeks Ketahanan Budaya Terhadap Tahun 2025





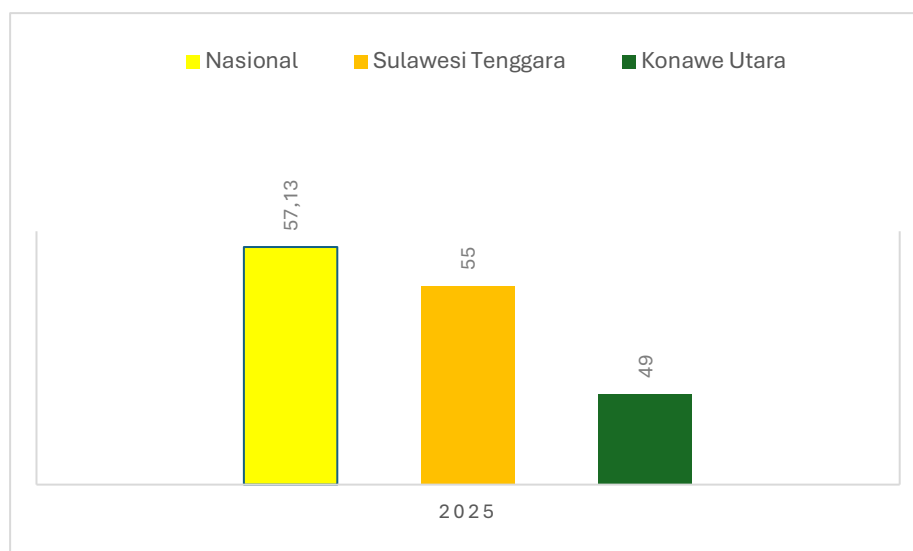
Berdasarkan hasil evaluasi program, Indeks Ketahanan Budaya menjadi indikator untuk menilai upaya pelestarian dan pengembangan budaya di Kabupaten Konawe Utara. Pada tahun 2025, indikator ini mencatat realisasi sebesar 49 dengan capaian 98% terhadap target, yang menunjukkan bahwa upaya pelestarian budaya dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya telah berjalan cukup efektif.

Capaian Tahun 2025	Target Akhir RPJMD (2029)	Selisih Target Terhadap Capaian Akhir RPJMD
49	155,17	31,57

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara tahun 2025–2029, Indeks Ketahanan Budaya Kabupaten Konawe Utara tercatat sebesar 31,57. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Konawe Utara periode 2025–2029,

capaian ini menunjukkan adanya upaya awal dalam penguatan ketahanan budaya daerah

Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Ketahanan Budaya Daerah Tahun 2025 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional



Sumber :

<https://lumbungdata.bantenprov.go.id/data-indeks-pembangunan-kebudayaan-nilai/>



Capaian Konawe Utara sebesar 49 pada tahun 2025 tercatat berada di bawah rata-rata regional maupun pusat, dengan selisih 6 poin dari angka Sulawesi Tenggara (55) dan terpaut 8,13 poin dari angka Nasional (57,13), yang menunjukkan perlunya akselerasi untuk mengejar standar capaian di atasnya.

Faktor Penyebab

1. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian budaya.
2. Terbatasnya kelembagaan dan komunitas yang mendukung pengembangan budaya.
3. Minimnya integrasi nilai budaya ke dalam pendidikan dan program pembangunan karakter.
4. Rendahnya pemanfaatan ekonomi kreatif berbasis budaya sebagai sumber kesejahteraan masyarakat.

Upaya:

1. Pelestarian warisan budaya, termasuk kesenian, tradisi, dan bahasa lokal.
2. Penguatan kelembagaan dan komunitas budaya untuk meningkatkan peran masyarakat.
3. Integrasi nilai-nilai budaya ke dalam sistem pendidikan dan program pembangunan karakter generasi muda.
4. Pemberdayaan ekonomi berbasis budaya melalui sektor kreatif, ekonomi kreatif, dan pariwisata budaya.
5. Revitalisasi bahasa, adat, dan tradisi lokal dengan dukungan regulasi dan kelembagaan daerah.
6. Penyediaan sistem informasi kebudayaan yang terintegrasi untuk memudahkan perencanaan, monitoring, dan pengambilan kebijakan.

Solusi:

1. Menjaga kelestarian budaya sekaligus memperkuat identitas lokal.
2. Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan budaya.
3. Mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang berakar pada kekayaan budaya daerah.
4. Mendorong pembangunan berkelanjutan yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.



3.1.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil Kinerja Yang Telah Dicapai

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri atas efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia serta dukungan sarana dan prasarana. Berikut uraian analisis mengenai efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian setia tujuan misi Kabupaten Konawe Utara

Tujuan 1 Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Terdiri dari 6 Sasaran Strategis yaitu :

Sasaran 1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja yaitu Indeks Daya Saing Daerah, Indeks Pembangunan Manusia, Usia Harapan Hidup dan Prevelensi Stunting. Jumlah Anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp.92.217.676.782,- dengan realisasi Rp. 83.367.773.062,- atau efisiensi serapan anggaran sebesar 90,40%. Berbagai upaya solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan diantaranya Refocussing Program Kegiatan yang kurang mendukung kegiatan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan diperbaiki data agar tepat sasaran

Sasaran 2 Menurunnya Angka Kemiskinan

Terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Tingka Kemiskinan. Anggaran yang dialokasikan pada sasan tersebut yaitu sebesar 4.780.266.500,- dengan realisasi 4.768.884.003,- atau efisiensi serapan anggaran sebesar 99,76%. Berbagai upaya solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan diantaranya Refocussing Program dan kegiatan yang mendukung kegiatan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan perbaikan agar tepat sasaran.

Sasaran 3 Meningkatnya Derajat Pendidikan

Terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Pendidikan. Jumlah Anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp. 76.268.352.166,- dengan realisasi Rp. 75.225.546.993,- atau efisiensi anggaran sebesar 98,63%. Berbagai upaya solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi. Permasalahan diantaranya refocusing Program dan Kegiatan yang kurang mendukung kegiatan dan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan perbaikan data agar tepat sasaran.



Saran 4 Meningkatkan Daya Saing dan Prestasi Pemuda

Terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Pembangunan Pemuda. Jumlah anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp. 22.436.268.494,- dengan realisasi Rp. 21.223.104.000,- atau efisiensi serapan anggaran sebesar 94,59%. Berbagai upaya solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan diantaranya refocusing Program dan kegiatan yang kurang mendukung tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan perbaikan data agar tepat sasaran.

Sasaran 5 Menurunnya Angka Pengangguran

Terdiri dari 1(satu) indikator kinerja yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka. Jumlah Anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp. 2.133.241.200,- dengan realisasi Rp. 2.132.623.900,- atau efisiensi serapan anggaran sebesar 99,97%. Berbagai upaya solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan diantaranya refocusing program dan kegiatan yang kurang mendukung kegiatan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan perbaikan data agar tepat sasaran.

Sasaran 6 Terwujudnya Pembangunan Keluarga Berkualitas dan Kesenjangan Gender

Terdiri dari 2 (dua) indikator Kinerja yaitu Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga dan Indeks Ketimpangan Gender. Jumlah anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp. 9.853.055.199,- dengan realisasi Rp. 10.144.660.119,- atau efisiensi serapan anggaran sebesar 97,13%. Berbagai upaya solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan diantaranya Refocussing program dan kegiatan yang kurang mendukung kegiatan, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan perbaikan data agar tepat sasaran



Tujuan 2 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Permukiman.

Terdiri atas 1 sasaran yaitu:

Sasaran 1 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Pembangunan

Terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu Indeks Konektivitas Wilayah dan Indeks Infrastruktur Dasar. Jumlah anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp. 78.082.248.062,- dengan realisasi Rp. 68.110.510.467,- atau efisiensi serapan anggaran sebesar 87,23%. Berbagai upaya solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan diantaranya refocusing Program dan kegiatan yang kurang mendukung kegiatan, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan perbaikan data agar tepat sasaran.

Tujuan 3 Mewujudkan Transformasi Perekonomian Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi

Terdiri atas 7 sasaran strategis yaitu :

Sasaran 1 Meningkatnya Daya Saing Produktivitas Ekonomi

Terdiri dari 4 (empat) indikator Kinerja yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Perkapita, Rasio Gini dan Rasio PDRB Industri Pengelolaan. Jumlah Anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp. 408.177.000,- dengan realisasi Rp. 407.001.000,- atau efisiensi serapan anggaran sebesar 99,71%. Berbagai upaya solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan diantaranya Refocussing Program dan kegiatan yang kurang mendukung kegiatan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan perbaikan data agar tepat sasaran.

Sasaran 2 Terwujudnya Penerapan Ekonomi Biru Daerah

Terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Indeks Ekonomi Biru Daerah. Jumlah Anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut sebesar Rp. 12.462.969.158,- dengan realisasi Rp. 12.330.579.488,- atau efisiensi serapan anggaran sebesar 98,94%. Berbagai upaya solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan diantaranya Refocussing Program dan kegiatan yang kurang mendukung kegiatan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan perbaikan data agar tepat sasaran.



Sasaran 3 Terwujudnya Kemandirian Pangan

Terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Indeks Ketahanan Pangan. Jumlah Anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut sebesar Rp. 79.328.226.394,- dengan realisasi Rp. 78.076.214.088,- atau efisiensi serapan anggaran sebesar 98,42%. Berbagai upaya solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan diantaranya Refocussing Program dan kegiatan yang kurang mendukung kegiatan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan perbaikan data agar tepat sasaran

Sasaran 4 Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah

Terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Rasio PDB Pariwisata. Jumlah Anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut sebesar Rp. 8.427.783.698,- dengan realisasi Rp. 8.404.428.495,- atau efisiensi serapan anggaran sebesar 99,72%. Berbagai upaya solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan diantaranya Refocussing Program dan kegiatan yang kurang mendukung kegiatan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan perbaikan data agar tepat sasaran

Sasaran 5 Terwujudnya Perdesaan sebagai Alat Pertumbuhan Ekonomi

Terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Indeks Desa Membangun. Jumlah Anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut sebesar Rp. 14.573.387.363,- dengan realisasi Rp. 14.469.758.882,- atau efisiensi serapan anggaran sebesar 99,29%. Berbagai upaya solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan diantaranya Refocussing Program dan kegiatan yang kurang mendukung kegiatan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan perbaikan data agar tepat sasaran

Sasaran 6 Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

Terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB dan Inklusi Keuangan. Jumlah Anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut sebesar Rp. 3.355.270.500,- dengan realisasi Rp. 3.350.432.940,- atau efisiensi serapan anggaran sebesar 99,86%. Berbagai upaya solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan diantaranya Refocussing Program dan kegiatan yang kurang mendukung kegiatan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan perbaikan data agar tepat sasaran



Sasaran 7 Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah

Terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Presentasi Realisasi Investasi terhadap PDRB. Jumlah Anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut sebesar Rp. 269.795.810,- dengan realisasi Rp. 251.242.010,- atau efisiensi serapan anggaran sebesar 93,12%. Berbagai upaya solusi yang telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan diantaranya Refocussing Program dan kegiatan yang kurang mendukung kegiatan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan perbaikan data agar tepat sasaran

Tujuan 4 Mempercepat Transaksi Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegrasi dan Adaptif

Terdiri atas 1 sasaran strategis yaitu:

Sasaran 1 Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi yang Profesional

Terdiri dari 2 (dua) indikator Kinerja yaitu Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Reformasi Birokrasi General. Jumlah Anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp. 316.706.011.562,- dengan realisasi Rp. 156.423.525.501,- atau efisiensi serapan anggaran sebesar 49,39%. Berbagai upaya solusi yang dilakukan dalam menghadapi permasalahan diantaranya Refocussing Program dan Kegiatan yang kurang mendukung kegiatan dan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan perbaikan data agar tepat sasaran.

Tujuan 5 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Terdiri atas 2 sasaran strategis yaitu:

Sasaran 1 Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Terdiri dari 2 (dua) indikator Kinerja yaitu Presentase Penurunan Emisi GRK dan Indeks Resiko Bencana. Jumlah Anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp. 37.908.397.458,- dengan realisasi Rp. 36.586.718.668,- atau efisiensi serapan anggaran sebesar 96,51%. Berbagai upaya solusi yang dilakukan dalam menghadapi permasalahan diantaranya Refocussing Program dan Kegiatan yang kurang mendukung kegiatan dan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan perbaikan data agar tepat sasaran.



Sasaran 2 Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas

Terdiri dari 1 (satu) indikator Kinerja yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Jumlah Anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp. 15.818.651.158,- dengan realisasi Rp. 15.253.254.400,- atau efisiensi serapan anggaran sebesar 96,43%. Berbagai upaya solusi yang dilakukan dalam menghadapi permasalahan diantaranya Refocussing Program dan Kegiatan yang kurang mendukung kegiatan dan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan perbaikan data agar tepat sasaran.

Tujuan 6 Mewujudkan Masyarakat Berkebudayaan Maju

Terdiri atas 1 sasaran strategis yaitu:

Sasaran 1 Terwujudnya Ketahanan Budaya Daerah

Terdiri dari 2 (dua) indikator Kinerja yaitu Indeks Pembangunan Kebudayaan dan Indeks Ketahanan Budaya Daerah. Jumlah Anggaran yang dialokasikan pada sasaran tersebut yaitu sebesar Rp. 6.971.076.522,- dengan realisasi Rp. 6.960.837.322,- atau efisiensi serapan anggaran sebesar 99,85%. Berbagai upaya solusi yang dilakukan dalam menghadapi permasalahan diantaranya Refocussing Program dan Kegiatan yang kurang mendukung kegiatan dan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan perbaikan data agar tepat sasaran.

3.1.4 Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Untuk mengoptimalkan pencapaian implementasi visi dan misi, maka dirumuskan sejumlah tujuan, sasaran dan indikator. Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 sampai 5 tahun kedepan berdasarkan pada isu-isu strategis. Terdapat beberapa Program dan kegiatan dalam mendorong pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian semua sasaran strategis sebanyak 126 Program dan 222 kegiatan dan 601 sub kegiatan. Adapun analisis dari program dan kegiatan tersebut diuraikan dibawah ini :



Tujuan 1 Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Memiliki 6 (enam) sasaran strategis dan 10 (sepuluh) indikator Kinerja. Dan didukung sebanyak 85 (delapan puluh lima) Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan dengan sejumlah anggaran yang dialokasikan untuk menjamin pencapaian target kinerja sasaran. Program dan kegiatan dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dilaksanakan melalui 5 (lima) program dan 12 (dua belas) kegiatan. Dari jumlah tersebut, 1 (satu) program tidak dilaksanakan pada tahun berjalan. Program yang telah dilaksanakan meliputi Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman, Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, serta Program Akreditasi Layanan Kesehatan, dengan realisasi anggaran mencapai 90,40% sedangkan program yang tidak terlaksana Adalah Program Agriditasi Pelayanan Kesehatan. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan akses layanan kesehatan di wilayah terpencil, belum optimalnya distribusi tenaga kesehatan, sistem pencatatan dan pelaporan yang belum terintegrasi, pengawasan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang perlu diperkuat, serta partisipasi masyarakat yang belum maksimal. Program Akreditasi Layanan Kesehatan sebagai program baru juga belum berjalan optimal karena keterbatasan kesiapan fasilitas, manajemen mutu, SDM, dan dukungan anggaran.

Sasaran 2 Menurunnya Angka Kemiskinan dilaksanakan melalui 5 (lima) program, dengan 2 (dua) program tidak terlaksana dan 3 (tiga) kegiatan berjalan sesuai rencana, yaitu Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, dan Program Penanganan Bencana, dengan realisasi anggaran mencapai 99,76% sedangkan program yang tidak terlaksana yaitu Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial. Kendala yang dihadapi meliputi belum optimalnya cakupan intervensi, keterbatasan validitas data penerima manfaat, akses layanan di wilayah terpencil, serta koordinasi lintas sektor



yang belum maksimal. Upaya jangka pendek dilakukan melalui percepatan pelaksanaan program, pemutakhiran data secara berkala, peningkatan jangkauan layanan, penguatan sinergi antarperangkat daerah dan pemerintah desa, serta optimalisasi monitoring dan evaluasi untuk memastikan ketepatan sasaran.

Sasaran 3 Meningkatnya Derajat Pendidikan telah melaksanakan 2 (dua) program dan 5 (lima) kegiatan dari total 9 (sembilan) program yang direncanakan, yaitu Program Pengelolaan Pendidikan dan Program Pengembangan Kebudayaan, dengan realisasi anggaran mencapai 98,63%. Program yang belum terlaksana meliputi Pengembangan Kesenian Tradisional, Program Pembinaan Sejarah, Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, Program Pembinaan Perpustakaan, Program Pelestarian dan Koleksi Nasional dan Naskah Kuno, Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, serta Program Pengelolaan Arsip. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan anggaran, SDM, dan sarana pendukung sehingga pengembangan kebudayaan dan kearsipan belum optimal. Upaya yang dilakukan meliputi penyesuaian prioritas program, optimalisasi pemanfaatan anggaran dan sumber daya, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta perencanaan kembali program yang belum terlaksana agar dapat direalisasikan pada tahun berikutnya.

Sasaran 4 Meningkatnya Daya Saing dan Prestasi Pemuda telah melaksanakan 2 (dua) program, 1 (satu) program tidak terlaksana dan 6 (enam) kegiatan dengan realisasi anggaran mencapai 94,59%. Adapun program yang terlaksana yaitu Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan sedangkan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan belum dilaksanakan. Kendala jangka pendek meliputi keterbatasan sarana prasarana, belum meratanya pembinaan hingga wilayah terpencil, serta keterbatasan SDM pelatih. Upaya yang dilakukan antara lain optimalisasi anggaran, penguatan koordinasi dengan sekolah dan organisasi kepemudaan, perluasan pembinaan, serta peningkatan kapasitas pelatih dan pembina.



Sasaran 5 Menurunnya Angka Pengangguran telah melaksanakan 3 (tiga) program dan 6 (enam) kegiatan, dengan 1 (satu) program tidak terlaksana. Program yang terlaksana meliputi Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, dan Program Hubungan Industrial, dengan realisasi anggaran mencapai 99,97%, sedangkan kegiatan yang belum terlaksana adalah Program Perencanaan Tenaga Kerja. Kendala jangka pendek meliputi belum optimalnya perencanaan kebutuhan tenaga kerja berbasis data, keterbatasan informasi pasar kerja, serta ketidaksesuaian kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan industri. Upaya yang dilakukan antara lain penguatan sistem informasi ketenagakerjaan, peningkatan koordinasi dengan dunia usaha dan industri, optimalisasi pelatihan berbasis kompetensi, serta percepatan pelaksanaan Program Perencanaan Tenaga Kerja.

Sasaran 6 Terwujudnya Pembangunan Keluarga Berkualitas dan Kesetaraan Gender telah melaksanakan 12 program dan 26 kegiatan dengan 2 program tidak terlaksana, yaitu Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dan Program Pembinaan Keluarga Bencana, sementara program yang terlaksana meliputi Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), Program Perlindungan Khusus Anak, Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan dengan realisasi anggaran mencapai 97,13%. Kendala jangka pendek meliputi belum optimalnya integrasi data gender dan anak, keterbatasan SDM dan sarana pendukung, serta koordinasi lintas sektor yang perlu diperkuat. Upaya yang dilakukan antara lain penguatan sistem data dan pelaporan, peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi anggaran, serta penajaman koordinasi antarperangkat daerah guna mendukung



pembangunan keluarga berkualitas dan kesetaraan gender secara berkelanjutan.

Tujuan 2 Meningkatkan Kualitas Infrastruktru Wilayah dan Kawasan Permukiman.

Memiliki 1 (satu) Sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja. dan didukung sebanyak 31 (tiga puluh satu) Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan dengan sejumlah anggaran yang dialokasikan untuk menjamin pencapaian target kinerja sasaran. Program dan kegiatan dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Pembangunan telah melaksanakan 12 (dua belas) program dan 19 (Sembilan belas) kegiatan, dengan 7 (tujuh) program tidak terlaksana, serta realisasi anggaran mencapai 87,23%. Program yang terlaksana meliputi Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Penataan Bangunan Gedung, Program Penyelenggaraan Jalan, Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengembangan Perumahan, Program Kawasan Permukiman, Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, Program Peningkatan Prasarana dan Utilitas Umum (PSU), Program Penyelenggaraan Lalu Lintas (LLAJ), dan Program Pengelolaan Pelayaran, sedangkan yang belum terlaksana antara lain Program Pengembangan Permukiman, Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Program Pengembangan Jasa Konstruksi, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Program Pengelolaan Penerbangan. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran, proses administrasi dan pembebasan lahan yang memerlukan waktu, serta keterbatasan SDM dan koordinasi lintas sektor. Upaya yang dilakukan yaitu penajaman prioritas pembangunan, percepatan proses perencanaan dan pengadaan, penguatan koordinasi antarinstansi, serta optimalisasi pemanfaatan



anggaran guna meningkatkan kualitas infrastruktur dasar secara bertahap.

Tujuan 3 Mewujudkan Transformasi Perekonomian Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi

Memiliki 7 (tujuh) sasaran strategis dan 11 (sebelas) indikator kinerja. dan didukung sebanyak 94 (sembilan puluh empat) program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan sejumlah anggaran yang dialokasikan untuk menjamin pencapaian target kinerja sasaran. program dan kegiatan dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1 Meningkatnya Daya Saing Produktivitas Ekonomi telah melaksanakan sebanyak 7 (tujuh) yang terlaksana, 2 (dua) program yang tidak terlaksana dan 9 (sembilan) kegiatan dengan realisasi anggrannya mencapai 99,71%. Adapun program kegiatan yang terlaksana adalah Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Program Pengendalian izin Usaha Industri, Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Stabilitas Harga Barang Kenbutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri sedangkan program yang tidak terlaksana yaitu Program Pengembangan Ekspor dan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional. Adapun kendala yang dihadapi berupa keterbatasan SDM teknis, belum optimalnya sistem digitalisasi dan data industri, koordinasi lintas sektor yang masih lemah, serta keterbatasan akses pasar luar daerah. Upaya yang dapat dilakukan antara lain penguatan koordinasi lintas OPD, peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan dan pendampingan, optimalisasi sistem perizinan berbasis elektronik, serta penyusunan roadmap pengembangan ekspor dan penyiapan integrasi data industri secara bertahap.

Sasaran 2 Terwujudnya Penerapan Ekonomi Biru Daerah telah melaksanakan 4 (empat) program dan 7 (tujuh) kegiatan dengan realisasi anggaran mencapai 98,94%, yaitu Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan sarana prasarana tangkap dan budidaya, masih



rendahnya kapasitas teknologi dan manajemen usaha nelayan, pengawasan wilayah perairan yang belum optimal, serta akses pemasaran dan rantai distribusi hasil perikanan yang masih terbatas. Upaya yang dilakukan dalam jangka pendek meliputi peningkatan pendampingan dan pelatihan bagi nelayan dan pembudidaya, penguatan pengawasan berbasis kolaborasi, perbaikan sarana produksi secara bertahap, serta perluasan jejaring pemasaran dan promosi produk perikanan lokal guna meningkatkan nilai tambah dan keberlanjutan ekonomi biru daerah.

Sasaran 3 Terwujudnya Kemandirian Pangan telah melaksanakan 9 (sembilan) program terlaksana, 1 (satu) program belum terlaksana dan 17 (tujuh belas) kegiatan dengan realisasi anggaran mencapai 98,42%, yaitu Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan, Program Pengawasan Keamanan Pangan, Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Program Penyuluhan Pertanian, serta Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat, sementara Program Perizinan Usaha Pertanian belum terlaksana. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan sarana dan prasarana produksi, dampak perubahan iklim terhadap hasil pertanian, keterbatasan SDM penyuluh, akses permodalan dan pasar yang belum optimal, serta sistem perizinan usaha pertanian yang belum terintegrasi. Upaya jangka pendek yang dilakukan meliputi penguatan pendampingan dan penyuluhan kepada petani, percepatan perbaikan sarana-prasarana prioritas, peningkatan koordinasi penanganan bencana pertanian, penguatan pengawasan keamanan pangan dan kesehatan hewan, serta penyiapan regulasi dan sistem layanan untuk mendukung pelaksanaan Program Perizinan Usaha Pertanian secara bertahap.

Sasaran 4 Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah telah melaksanakan 4 (empat) program dan 5 (lima) kegiatan dengan realisasi anggaran mencapai 99,72%, yaitu Program Peningkatan Daya Tarik



Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan, serta Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan infrastruktur pendukung destinasi, aksesibilitas ke lokasi wisata yang belum optimal, promosi digital yang masih terbatas, kapasitas SDM pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif yang perlu ditingkatkan, serta belum maksimalnya perlindungan dan pemanfaatan hak kekayaan intelektual. Upaya jangka pendek yang dilakukan meliputi penguatan promosi berbasis digital dan event daerah, peningkatan pelatihan dan pendampingan pelaku wisata dan ekonomi kreatif, perbaikan sarana prasarana prioritas destinasi unggulan, serta mendorong pendaftaran dan perlindungan hak kekayaan intelektual guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing pariwisata daerah.

Sasaran 5 Terwujudnya Perdesaan sebagai Alat Pertumbuhan Ekonomi telah melaksanakan 6 (enam) program terlaksana, 1 (satu) program tidak terlaksana dan 7 (tujuh) kegiatan dengan realisasi anggaran mencapai 99,29%, yaitu Program Penataan Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa, Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, Program Administrasi Pemerintahan Desa, Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi, Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, serta Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi, sementara Program Peningkatan Kerjasama Desa belum terlaksana. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan administrasi dan perencanaan pembangunan, belum optimalnya sinergi antar desa dan kawasan transmigrasi, keterbatasan pendampingan kelembagaan masyarakat adat, serta minimnya kerja sama antar desa dalam pengembangan potensi ekonomi bersama. Upaya jangka pendek yang dilakukan meliputi peningkatan pembinaan dan pelatihan aparatur desa, penguatan koordinasi antar desa dan kawasan transmigrasi, optimalisasi peran lembaga masyarakat dan adat dalam pembangunan ekonomi lokal, serta penyusunan regulasi dan fasilitasi awal untuk mendukung pelaksanaan Program Peningkatan Kerjasama Desa secara bertahap.



Sasaran 6 Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah telah melaksanakan 7 (tujuh) program, 3 (tiga) program belum terlaksana dan 7 (tujuh) kegiatan dengan realisasi anggaran 99,86%, yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, serta Program Pemberdayaan UMKM, sementara 3 (tiga) program belum terlaksana yaitu Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, Program Penguatan Badan Hukum Koperasi, dan Program Pengembangan UMKM. Kendala utamanya meliputi keterbatasan kapasitas koperasi dan UMKM, rendahnya literasi dan kepatuhan administrasi, serta belum optimalnya sistem perizinan dan penguatan badan hukum. Upaya jangka pendek dilakukan melalui peningkatan pembinaan dan pelatihan, penguatan pengawasan koperasi, optimalisasi pengelolaan keuangan daerah, serta penyiapan sistem layanan dan regulasi untuk mendukung pelaksanaan ketiga program yang belum terlaksana.

Sasaran 7 Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah telah melaksanakan sebanyak 4 (lima) Program terlaksana dan 1 (satu) program tidak terlaksana dan 4 (empat) kegiatan dengan realisasi anggaran mencapai 93,12%. Adapun program kegiatan yang terlaksana adalah Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal sedangkan Program Pelayanan Penanaman Modal belum terlaksana, Kendala yang dihadapi meliputi belum optimalnya sistem pelayanan terpadu dan digitalisasi perizinan, keterbatasan SDM teknis, koordinasi lintas sektor yang masih perlu diperkuat, serta daya tarik investasi yang masih dipengaruhi kesiapan infrastruktur dan kepastian regulasi. Upaya jangka pendek dilakukan melalui penguatan koordinasi dan penyederhanaan prosedur perizinan, peningkatan kapasitas SDM pelayanan investasi, optimalisasi promosi berbasis potensi unggulan daerah, serta penyiapan sistem layanan terpadu untuk mendukung pelaksanaan Program Pelayanan Penanaman Modal secara efektif.



Tujuan 4 Mempercepat Transaksi Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegrasi dan Adaptif

Memiliki 1 (satu) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja dan didukung sebanyak 67 (enam puluh tujuh) program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan sejumlah anggaran yang dialokasikan untuk menjamin pencapaian target kinerja sasaran. Program dan kegiatan dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi yang Profesional telah melaksanakan sebanyak 21 (dua puluh satu) program terlaksana, 3 (tiga) program tidak terlaksana dan 46 (empat puluh enam) kegiatan dengan realisasi anggran mencapai 49,28%. Adapun program yang terlaksana adalah Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, Program Penyelenggaraan Pengawasan, Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi, Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, Program Perekonomian dan Pembangunan, Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, Program Kepegawaian Daerah, Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, Program Informasi dan Komunikasi Publik, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Program Pembinaan Perpustakaan dan Program Pengelolaan Arsip sedangkan yang tidak terlaksana yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Riset dan Inovasi Daerah dan Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan kapasitas SDM aparatur, belum optimalnya integrasi sistem digital dan tata kelola data, koordinasi lintas perangkat daerah yang belum efektif, serta keterbatasan anggaran yang berdampak pada rendahnya serapan. Upaya jangka pendek dilakukan melalui penguatan pembinaan dan pelatihan aparatur, percepatan digitalisasi layanan dan integrasi sistem informasi, peningkatan pengawasan dan evaluasi kinerja, serta penyiapan regulasi dan dukungan teknis untuk mendukung pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik secara bertahap.



Tujuan 5 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Memiliki 2 (dua) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja dan didukung sebanyak 40 (empat puluh) program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan sejumlah anggaran yang dialokasikan untuk menjamin pencapaian target kinerja sasaran. Program dan kegiatan dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim telah melaksanakan sebanyak 3 (tiga) program dan 13 (tiga belas) kegiatan dengan realisasi anggaran mencapai 96,51%. Adapun program kegiatan tersebut adalah Program Penanggulangan Bencana, Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dan Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan sarana prasarana dan peralatan tanggap darurat, kapasitas SDM dan relawan yang masih perlu ditingkatkan, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana dan perubahan iklim, serta koordinasi lintas sektor yang belum optimal. Upaya jangka pendek dilakukan melalui peningkatan pelatihan dan simulasi kebencanaan, penguatan koordinasi antarinstansi dan desa, pengadaan serta pemeliharaan peralatan darurat secara bertahap, serta intensifikasi sosialisasi mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim kepada masyarakat.

Sasaran 2 Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas telah melaksanakan sebanyak 11 (sebelas) program, 2 (dua) program yang belum terlaksana dan 13 (tiga belas) kegiatan dengan realisasi anggaran mencapai 96,43%. Adapun Program kegiatan yang terlaksana adalah Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terikat, Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penuihuan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Keanekaragaman hayati (Kehati), Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Program Pengelolaan



Persampahan dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah sedangkan program yang belum terlaksana yaitu Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat dan Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan sarana prasarana pengelolaan sampah dan limbah, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, keterbatasan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan, serta belum optimalnya sistem pengelolaan sampah terpadu regional. Upaya jangka pendek dilakukan melalui peningkatan edukasi dan sosialisasi lingkungan hidup, penguatan pengawasan dan penegakan aturan, perbaikan bertahap sarana persampahan dan air limbah, serta penyiapan regulasi dan koordinasi lintas daerah untuk mendukung pelaksanaan kedua program yang belum terlaksana.

Tujuan 6 Mewujudkan Masyarakat Berkebudayaan Maju

Memiliki 1 (satu) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja. Dan disukung sebanyak 10 (sepuluh) Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan sejumlah anggaran yang dialokasikan untuk menjamin pencapaian target kinerja sasaran. Program dan kegiatan dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1 Terwujudnya Ketahanan Budaya Daerah telah melaksanakan sebanyak 5 (lima) Program, 5 (lima) program yang tidak terlaksana dan 5 (lima) kegiatan dengan realisasi anggaran mencapai 99,85%. Adapun program yang terlaksana adalah Program Pengembangan Kebudayaan, Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas, Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik Melalui Kemasyarakatan sedangkan yang tidak terlaksana yaitu Program Pengembangan Kesenian Tradisional, Program Pembinaan Sejarah, Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial dan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran dan SDM kebudayaan, rendahnya partisipasi generasi muda dalam



pelestarian budaya, belum optimalnya pendataan dan pengelolaan cagar budaya, serta keterbatasan fasilitasi organisasi kemasyarakatan. Upaya jangka pendek dilakukan melalui penguatan sosialisasi nilai budaya dan ideologi kebangsaan, peningkatan pembinaan komunitas seni dan sejarah secara bertahap, pendataan aset budaya daerah, serta penyiapan regulasi dan koordinasi lintas sektor guna mendukung pelaksanaan program yang belum terlaksana.

- Tabel Sasaran Strategis/Program/Kegiatan, anggaran dan Kinerja secara rinci akan disajikan dalam lampiran

3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pemerintah Kabupaten Konawe Utara telah mengalokasikan anggaran pada APBD Tahun 2025 dengan total Belanja Daerah sebesar Rp.1.440.958.578.600,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.315.030.185.065,00 atau 91,26%. Untuk lebih jelasnya secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2.1 Alokasi Dan Realisasi Anggaran Kab. Konawe Utara Tahun 2025

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025				
NO.	URAIAN	APBD PERUBAHAN (RP)	REALISASI BELANJA DAN TRANSFER (RP)	CAPAIAN (RP)
5	BELANJA			
5.1	BELANJA OPERASI	941.949.800.321,16	854.974.833.063,00	90,76
5.1.01	Belanja Pegawai	449.259.078.172,16	388.589.673.938,00	86,49
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	460.910.711.227,00	441.338.343.414,00	95,75
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	0
5.1.034	Belanja Subsidi	150.000.000,00	149.999.320,00	99,99
5.1.05	Belanja Hibah	31.630.010.922,00	24.896.816.391,00	78,71
5.2	BELANJA MODAL	270.512.082.102,84	250.750.903.884,00	92,69
5.2.01	Belanja Tanah	14.400.000.000,00	14.259.754.044,00	99,02
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	49.647.025.856,20	48.539.222.776,00	97,76
5.2.03	Belanja Gedung dan Bangunan	98.568.227.989,23	89.272.578.424,00	90,56
5.2.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	94.927.693.457,41	86.019.962.940,00	90,61



ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025				
NO.	URAIAN	APBD PERUBAHAN (RP)	REALISASI BELANJA DAN TRANSFER (RP)	CAPAIAN (RP)
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.997.134.800,00	1.990.779.200,00	99,68
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	10.972.000.000,00	10.668.606.500,00	97,23
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	20.000.000.000,00	4.301.764.472,00	21,5
5.3.01	Belanja Tak Terduga	20.000.000.000,00	4.301.764.472,00	21,5
5.4	BELANJA TRANSFER	208.496.696.176,00	205.002.683.646,00	98,32
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.252.628.776,00	1.252.628.776,00	100
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	207.244.067.400,00	203.750.054.870,00	98,31
TOTAL (BELANJA+TRANSFER)		1.440.958.578.600,00	1.315.030.185.065,00	91,26

Rasio penggunaan anggaran tahun 2025 dengan realisasi sebesar 94,39% dibandingkan dengan realisasi kinerja sebesar 91,24% menunjukkan efektifnya penggunaan anggaran Tahun 2025, namun demikian pencapaian tersebut termasuk dalam kategori **“Sangat Baik”** dikarenakan beberapa realiasi capaian indikator belum tersedia. Adapun Realisasi anggaran dibandingkan dengan Realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel 3.2.2.

Tabel 3.2.2 Pencapaian Sasaran Dan Realisasi Anggaran

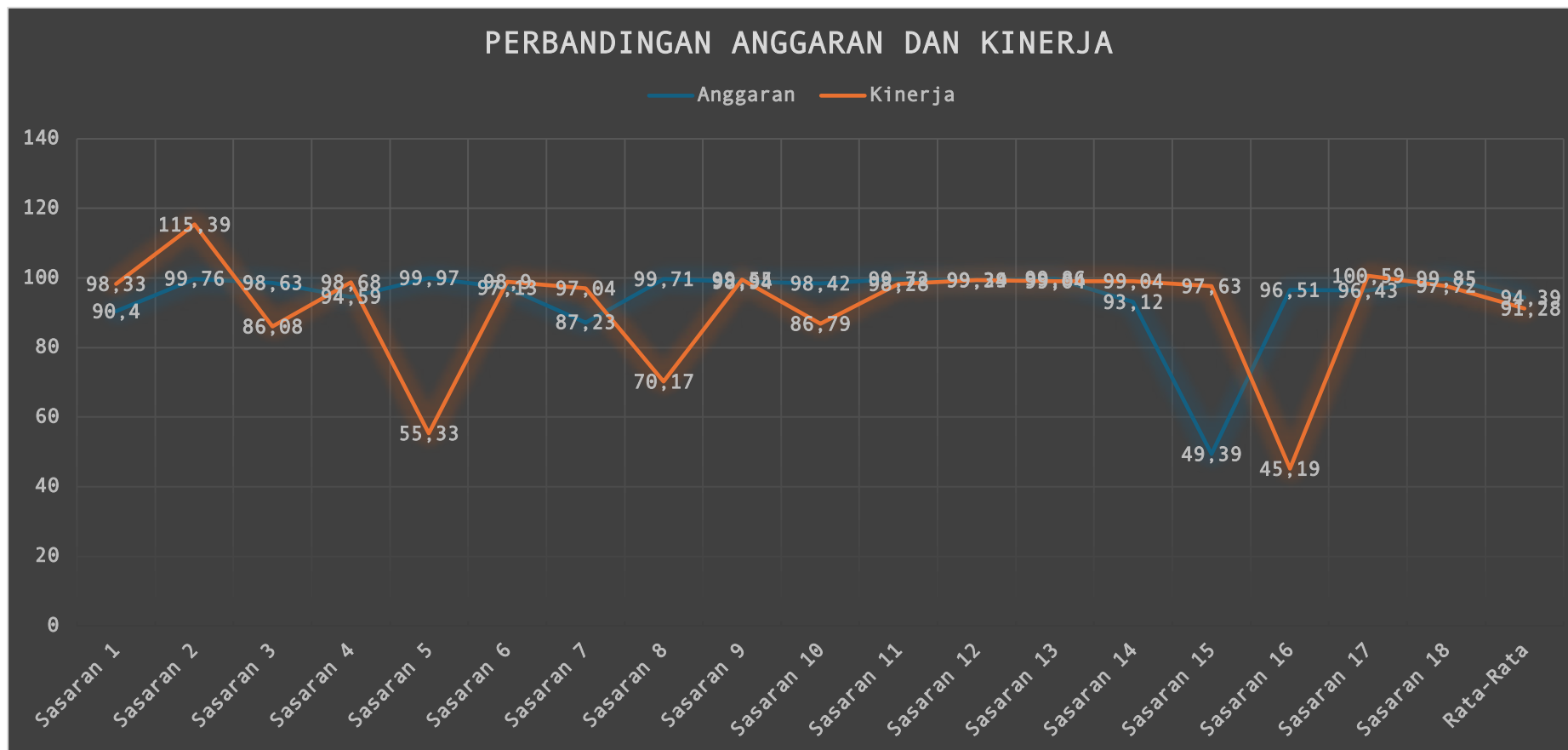
Sasaran Strategis		Tingkat Efisiensi		
		Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja	Efisien/Inefisien
		(%)	(%)	
Sasaran 1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	90,4	98,33	Efisien
Sasaran 2	Menurunnya Angka Kemiskinan	99,76	115,39	Efisien
Sasaran 3	Meningkatnya Derajat Pendidikan	98,63	86,08	Inefisien



Sasaran Strategis		Tingkat Efisiensi		
		Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja	Efisien/Inefisien
		(%)	(%)	
Sasaran 4	Meningkatnya Daya Saing dan Prestasi Pemuda	94,59	98,68	Efisien
Sasaran 5	Menurunnya Angka Pengangguran	99,97	55,33	Inefisien
Sasaran 6	Terwujudnya Pembangunan Keluarga Berkualitas dan Kesenjangan Gender	97,13	98,9	Efisien
Sasaran 7	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar Pembangunan	87,23	97,04	Efisien
Sasaran 8	Meningkatnya Daya Saing Produktivitas Ekonomi	99,71	70,17	Inefisien
Sasaran 9	Terwujudnya Penerapan Ekonomi Biru Daerah	98,94	99,55	Efisien
Sasaran 10	Terwujudnya Kemandirian Pangan	98,42	86,79	Inefisien
Sasaran 11	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian Daerah	99,72	98,28	Inefisien
Sasaran 12	Terwujudnya Perdesaan sebagai Alat Pertumbuhan Ekonomi	99,29	99,34	Efisien
Sasaran 13	Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	99,86	99,04	Efisien
Sasaran 14	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	93,12	99,04	Efisien
Sasaran 15	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi yang Profesional	49,39	97,63	Efisien



Sasaran Strategis		Tingkat Efisiensi		
		Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja	Efisien/Inefisiensi
		(%)	(%)	
Sasaran 16	Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	96,51	45,19	Inefisien
Sasaran 17	Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas	96,43	100,59	Efisien
Sasaran 18	Terwujudnya Ketahanan Budaya Daerah	99,85	97,72	Inefisien
Rata - Rata		94,39	91,28	Inefisien



Bab 04



Penutup

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2025, sebagaimana telah diuraikan pada BAB II mengenai pencapaian sasaran RPJMD 2025-2029 tahun pertama, disajikan sebagai bentuk evaluasi dan pertanggungjawaban kepada publik. Laporan ini mencerminkan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan RPJMD 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Kabupaten Konawe Utara tahun 2025.

Hasil evaluasi memberikan gambaran tentang keberhasilan serta tantangan yang dihadapi dalam pencapaian seluruh sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Secara umum, rata-rata capaian anggaran mencapai **94,39%**, tergolong **“Sangat Baik”**, sementara analisis menyeluruh menunjukkan rata-rata pencapaian realisasi sebesar **91,28%**, menandakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah berjalan dengan **“Sangat Baik”** meskipun antara penggunaan anggaran dan realisasi kinerja **“Inefisien”**:



Meski demikian, beberapa indikator masih memerlukan perhatian dan pengoptimalan di tahun-tahun berikutnya, terutama yang terdampak kendala geografis, kondisi alam, dan kapasitas sumber daya.

Sebagai penutup, Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2025 diharapkan menjadi bahan evaluasi strategis untuk perbaikan kinerja ke depan sekaligus memenuhi prinsip akuntabilitas kepada seluruh pemangku kepentingan, sehingga visi jangka menengah Kabupaten Konawe Utara, yaitu **“KONAwE Utara sebagai rumah berSAma yang semakin maju dan saJehateRA”**.

Wanggudu, 3 Maret 2026

BUPATI KONAWE UTARA,



H. IKBAR, SH.,MH



LAMPIRAN

DOKUMENTASI PERJANJIAN KINERJA

2025





LAMPIRAN 1 : DOKUMENTASI PENANDATANGANAN PERJANJIAN KINERJA









LAMPIRAN 2 : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam Rangka Mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. IKBAR, SH.,MH.

Jabatan : BUPATI KONAWE UTARA

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Wanggudu, 10 September 2025


BUPATI KONAWE UTARA
H. IKBAR, SH.,MH.

**LAMPIRAN 3 : LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025****LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KABUPATEN KONAWE UTARA**

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi 1 : Membangun sumber daya manusia berkualitas dan produktif	Tujuan 1 : Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing		Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	3.23
			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72.65
		Sasaran 1.1 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	70.50
			Prevalensi Stunting	5
		Sasaran 1.2 : Menurunnya Angka Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	13.72
		Sasaran 1.3 : Meningkatnya derajat pendidikan	Indeks Pendidikan	0.697
		Sasaran 1.4 : Meningkatnya Daya Saing dan Prestasi Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	56.98
		Sasaran 1.5 : Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2.21
Misi 2: Mempercepat konektivitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang terintegrasi serta sarana prasarana permukiman yang berkualitas	Tujuan 2: Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan		Indeks Konektivitas Wilayah	0.05
		Sasaran 2.1 : Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar pembangunan	Indeks Infrastruktur Dasar	5.2
Misi 3: Menciptakan perekonomian daerah yang	Tujuan 3: Mewujudkan Transformasi Perekonomian Berkualitas dan		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6.25
			PDRB Perkapita	68.200

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
produktif dan berdaya saing	Berdaya Saing Tinggi		Rasio Gini (indeks)	0.285
		Sasaran 3.1 : Meningkatnya daya saing Produktivitas Ekonomi	Rasio PDRB Industri Pengolahan	1.50
		Sasaran 3.2 : Terwujudnya Penerapan Ekonomi Biru Daerah	Indeks Ekonomi Biru Daerah	49,72
		Sasaran 3.3 : Terwujudnya Kemandirian Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	77
		Sasaran 3.4 : Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah	Rasio PDB Pariwisata	8.75
		Sasaran 3.5 : Terwujudnya Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Indeks Desa Membangun	0.6986
		Sasaran 3.6 : Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0.05
			Inklusi Keuangan	2.13
		Sasaran 3.7 : Meningkatnya Realisasi investasi Daerah	Persentase Realisasi Investasi terhadap PDRB	23.14
Misi 4: Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang responsif dan inovatif	Tujuan 4 : Mempercepat Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif		Indeks Reformasi Birokrasi	68.95
		Sasaran 5 : Meningkatnya tata kelola birokrasi yang profesional	Indeks RB General	62.35
Misi 5: Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta	Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		Persentase Penurunan Emisi GRK (%)	32.88
		Sasaran 5.1 : Terwujudnya Resiliensi Terhadap Bencana dan	Indeks Risiko Bencana (IRB)	156.16



Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
penanggulangan bencana		Perubahan Iklim		
		Sasaran 5.2 : Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	62.72
Misi 6: Pengembangan Kebudayaan Daerah sebagai landasan Identitas dan Ketahanan Sosial	Tujuan 6 : Mewujudkan Masyarakat Berkebudayaan Maju		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	53.37
		Sasaran 6.1 : Terwujudnya Ketahanan Budaya Daerah	Indeks Ketahanan Budaya Daerah	50



H. IKBAR, SH.,MH.



NO.	NAMA PROGRAM	PAGU
1	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1,727,237,182
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	9,382,712,500
3	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1,472,069,200
4	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	53,736,800
5	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3,696,778,655
6	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5,209,315,100
7	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	101,508,000
8	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	135,795,500
9	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	6,818,569,100
10	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	350,000,000
11	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-
12	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2,464,141,600
13	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	344,971,000
14	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1,802,430,560
15	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	737,211,977
16	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2,369,678,133
17	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2,904,629,000
18	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	324,331,200
19	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-
20	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	27,460,700
21	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	193,502,000
22	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3,786,177,370



NO.	NAMA PROGRAM	PAGU
23	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	725,769,200
24	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	241,470,000
25	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	97,284,473,566
26	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KIESEJAHTERAAN RAKYAT	31,313,133,250
27	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	989,250,000
28	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	227,700,700
29	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	25,929,800
30	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	36,033,920,318
31	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	32,148,397,700
32	PROGRAM PENATAAN DESA	598,288,680
33	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	126,847,000
34	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	710,985,450
35	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	209,769,800
36	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	1,914,141,300
37	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1,739,822,200
38	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	559,664,000
39	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	10,368,700
40	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	748,090,100
41	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	299,200,000
42	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	15,957,700
43	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	99,090,000
44	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1,877,666,100
45	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	100,950,116
46	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	4,626,716,500



NO.	NAMA PROGRAM	PAGU
47	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4,586,692,000
48	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	2,339,020,000
49	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	400,000,000
50	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	82,799,600
51	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	160,836,200
52	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2,465,497,600
53	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	9,448,233,858
54	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	243,785,480,826
55	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	4,249,234,547
56	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	383,737,000
57	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	71,919,416,574
58	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	9,089,169,208
59	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2,898,056,150
60	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	771,128,100
61	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	50,392,800
62	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	-
63	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1,100,000,000
64	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	398,940,000
65	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	327,641,586
66	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	15,136,750
67	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	20,524,409,268
68	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1,911,859,226
69	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	7,061,901,191
70	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	4,348,935,600



NO.	NAMA PROGRAM	PAGU
71	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	7,151,000
72	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	18,000,000
73	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	195,873,200
74	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-
75	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	29,526,500
76	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	14,756,521,188
77	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	24,510,000
78	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	40,500,000
79	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	84,942,400
80	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	888,467,400
81	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	478,072,250
82	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	71,387,000
83	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	376,653,800
84	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	961,083,700
85	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	88,890,000
86	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1,078,652,593
87	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1,761,915,400
88	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	4,456,748,470
89	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	-
90	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1,179,745,490
91	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	777,701,500
92	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	65,905,500



NO.	NAMA PROGRAM	PAGU
93	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	10,702,400
94	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	656,871,922
95	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	7,619,345,152
96	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	26,199,800
97	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	652,030,450,352
98	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	47,997,908,685
99	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	16,521,442,760
100	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	14,482,855,560
101	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	112,604,975
102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-
103	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-
104	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2,052,378,200
105	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	620,052,700
106	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-
107	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	15,294,925,800
108	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1,342,513,201
109	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1,667,177,200
110	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	26,755,200
111	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	1,567,418,000
112	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	13,206,700
113	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	-
114	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2,750,793,780



NO.	NAMA PROGRAM	PAGU
115	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	9,515,000
116	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2,838,700
117	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	-
118	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	533,614,000
119	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	866,724,100
120	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	349,567,420
121	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	858,214,000
122	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	86,917,060
123	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	886,387,500
124	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	114,390,000
125	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	205,151,600
126	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	61,033,600
	JUMLAH	1,440,958,578,600


BUPATI KONAWE UTARA
H. IKBAR, SH.,MH.

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	SASARAN 1 MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	92.217.676.782	83.367.773.062	90,40	Persen	37,845	38,24	98,33
	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)				Indeks	3,23	3,28	101,55
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				Indeks	72,65	73,42	101,06
	Usia Harapan Hidup (UHH)				Persen	70,5	70,73	100,32
	Prevalensi Stunting (%)				Persen	5	5,53	83,33
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	89.937.326.336	81.183.963.896	90,27				
	Terpenuhinya Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat							
	Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup (Rasio)				Rasio	5	4,5	90
	Persentase Persalinan di Fasyankes (%)				Persen	80	99,92	124,9
	Persentase ANC (Kunjungan Ibu Hamil) 6 Kali (%)				Persen	71	80,7	113,66
	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap (%)				Persen	82	98,6	120,24
	Prevalensi Gizi Kurang pada Balita (%)				Persen	4	4,77	119,25
	Persentase Ibu Hamil Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD 180 Tablet) (%)				Persen	72	70	97,22
	Persentase Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) (%)				Persen	36	36,55	101,53
	Persentase Lansia Mendapat Skrining Kesehatan Sesuai Standar (%)				Persen	96	98,18	102,27
	Insidensi HIV per 100.000 Penduduk (Rasio)				Rasio	0	74,12	0,00
	Jumlah Desa/Kelurahan dengan 5 pilar STBM (Desa/Kelurahan)				Desa/Kel	2	142	7100,00
	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)				Persen	30	61	0,28
	Persentase Kelengkapan Data Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) di RS Pemerintah Daerah yang Memenuhi Standar Kesehatan (%)				Persen	60	73,65	122,75
	Persentase Kelengkapan Data Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) di Puskesmas yang Memenuhi Standar Kesehatan (%)				Persen	44	44,53	101,20

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp)	CAPAAN		TARGET	KINERJA	CAPAAN
	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan Obat Esensial (%)				Persen	92	100	108,70
	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan Vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap) (%)				Persen	100	100	100
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	36.272.825.617	33.110.950.973	91,28				
	Meningkatnya Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				Persen	100	100	100
	Persentase Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP				Persen	80	80	100
	<i>Pembangunan Puskesmas</i>	3.000.006.162	2.910.130.160	97,00	Unit	2	2	100
	<i>Penmbangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya</i>	16.800.012.802	13.932.481.100	82,93	Unit	1	1	100
	<i>Pambangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan</i>	400.010.318	321.715.200	80,43	UNit	2	2	100
	<i>Pengembangan Puskesmas</i>	2.299.439.678	2.295.470.401	99,83	Unit	10	11	110
	<i>Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas</i>	3.457.035.807	3.436.170.000	99,40	Unit	1	1	100
	<i>Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>	2.254.968.000	2.240.423.992	99,36	Unit	22	22	100
	<i>Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan</i>	7.453.628.000	7.384.501.270	99,07	Unit	2	3	150
	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga</i>	311.501.250	311.216.250	99,91	Keluarga	2000	2000	100
	<i>Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK /Pelayanan Kesehatan Bergerak, Guass, Pulau, Pelayanan</i>	17.300.000	0	0,00	Layanan	2	0	0
	<i>Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas</i>	278.923.600	278.842.600	99,97	Paket	22	22	100
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	53.655.500.719	48.064.012.923	89,58				
	Meningkatnya Ketersediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
	Persentase Ibu Hamil mendapatkan Pelayanan kesehatan ibu hamil				Persen	100,00	81,24	81,24
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan				Persen	100,00	78,69	78,69
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan				Persen	100,00	86,57	86,57
	Cakupan layanan kesehatan balita sesuai standar				Persen	100,00	96,13	96,13
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan kesehatan sesuai standar				Persen	100,00	97,49	97,49

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar				Persen	100,00	71,59	71,59
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar				Persen	100,00	98,19	98,19
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				Persen	100,00	58,45	58,45
	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				Persen	100,00	162,14	162,14
	Persentase Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar				Persen	100,00	62,24	62,24
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar				Persen	100,00	125,93	125,93
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar				Persen	100,00	80,19	80,19
	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)					0	152,2	0
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)					97	99	102,06
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)					100	99	99
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	182.041.000	163.753.000	89,95	Orang	1500	1364	90,93
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	38.492.800	38.456.000	99,90	Orang	1500	1318	78,69
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	87.001.000	65.022.846	74,74	Orang	1500	1315	86,57
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	31.540.500	31.531.000	99,97	Orang	1500	6010	96,13
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	87.711.600	87.709.000	100,00	Orang	4500	4620	102,67
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	19.278.000	19.278.000	100,00	Orang	44000	34312	77,98
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	35.973.000	26.593.000	73,92	Orang	3500	4386	98,19
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	38.556.000	38.556.000	100,00	Orang	5784	9064	58,45
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	19.278.000	19.278.000	100,00	Orang	5784	1289	162,14
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	38.556.000	38.556.000	100,00	Orang	84	61	62,24
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	334.772.200,00	325.179.200,00	97,13	Orang	1100	1632	125,93
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	100.776.500	91.314.000	90,61	Orang	1700	1352	80,19

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAAN		TARGET	KINERJA	CAPAAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Keadaan Luar Biasa (KLB)	17.300.000	17.300.000	100,00	Dokumen	1	1	100
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	9.000.000	4.775.000	53,06	Dokumen	1	1	100
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	862.486.700	724.413.000	83,99	Dokumen	1	1	100
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	9.000.000	9.000.000	100,00	Dokumen	1	1	100
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	934.242.000	816.408.440	87,39	Dokumen	1	1	100
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	176.668.900	176.668.900	100,00	Dokumen	1	1	100
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	9.000.000	9.000.000	100,00	Dokumen	1	1	100
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	19.278.000	19.278.000	100,00	Dokumen	1	1	100
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	9.000.000	9.000.000	100,00	Orang	80	61	76,00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	9.000.000	9.000.000	100,00	Orang	2000	2000	100
	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	9.000.000	0	0,00	Dokumen	1	0	0
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	471.768.000	409.327.302	86,76	Dokumen	1	1	100
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	20.989.028.440	18.420.153.438	87,76	Dokumen	1	1	100
	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	18.000.000	18.000.000	100,00	Orang	1400	120	1
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	9.000.000	0	0,00	Paket	1	0	0
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	9.000.000	9.000.000	100,00	Dokumen	1	1	100
	Operasional Pelayanan Puskesmas	28.451.226.679	25.889.835.997	91,00	Dokumen	1	1	100
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	208.390.000	207.753.600	99,69	Unit	10	22	220
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	92.164.000	92.164.000	100,00	Laporan	1	1	100
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	79.812.000	79.812.000	100,00	Dokumen	1	1	100
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	9.000.000	8.976.000	99,73	Unit	22	22	100
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	25.704.000	12.852.000	50,00	Orang	124	6	5

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi</i>	19.278.000	19.278.000	100,00	Dokumen	22	22	100
	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota</i>	25.924.200	25.924.200	100,00	Dokumen	1	1	100
	<i>Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak</i>	142.253.200	106.817.000	75,09	Dokumen	1	1	100
	<i>Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan</i>	9.000.000	6.750.000	75,00	Dokumen	1	1	100
	<i>Pengelolaan Layanan Imunisasi</i>	9.000.000	8.300.000	92,22	Dokumen	1	1	100
	<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji</i>	9.000.000	9.000.000	100,00	Dokumen	1	1	100
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	9.000.000	9.000.000	100,00				
	Semua Fasilitas Kesehatan yang Ada di Kabupaten Konawe Utara Terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional							
	Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional				Persen	100	72	72
	<i>Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</i>	9.000.000	9.000.000	100	Dokumen	1	1	100
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.428.748.470	1.400.879.600	98,05				
	Jumlah Puskesmas dengan SDM Kesehatan Sesuai Standar (9 Nakes)				Unit	6	11	183
	Rasio Dokter Spesialis per 1.000 penduduk				Persen	64,05	64	99,92
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	18.000.000	17.996.000	99,98	Laporan	1	1	1
	Diterbitkannya Surat Izin Praktik (SIP) baru atau perpanjangan SIP bagi tenaga kesehatan							
	Jumlah Laporan				Laporan	1	1	100
	<i>Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan</i>	9.000.000	8.998.000	99,98	Dokumen	1	1	100
	<i>Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan</i>	9.000.000	8.998.000	99,98	Dokumen	1	1	100
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	477.661.700	451.055.250	94,43				
	Meningkatnya ketersediaan, pemerataan, dan kualitas SDM kesehatan yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pelayanan UKP dan UKM							
	Persentase SDM di Puskesmas				Persen	100	100	100
	<i>Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>	9.000.000	9.000.000	100	Dokumen	1	1	100

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	275.289.000	275.289.000	100	Orang	300	300	100
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	193.372.700	166.766.250	86,24	Dokumen	1	1	100
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	933.086.770	931.828.350	99,87				
	Meningkatnya Jumlah SDM kesehatan yang mengikuti kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis. Persentase SDM Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya				Persen	80	80	100
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah	933.086.770	931.828.350		Orang	250	250	100
3	PROGRAM SEDIAN FARMASI, ALAT KESEHATAN MAKANAN DAN MINUMAN	114.390.000	105.390.000	92,13		59,5	4,52	7,60
	Tersedianya Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman							
	Jumlah Sertifikat Laik Higiene				Dokumen	13	4,52	34,77
	Jumlah Rekomendasi Izin Apotik /Toko Obat				Dokumen	17	17	100
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optika Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	9.000.000	9.000.000	100				
	Diterbitkannya izin baru atau perpanjangan izin untuk Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Optikal, dan UMOT							
	Persentase Usaha yang mendapatkan Rekomendasi Izin				Persen	95	95	100
	Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	9.000.000	9.000.000	100	Dokumen	1	1	100
	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu	9.000.000	0	0				
	Diterbitkannya sertifikat baru atau perpanjangan sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan				Dokumen	1	1	100
	Jumlah Dokumen Yang dihasilkan				Dokumen	1	1	100
	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	9.000.000	0	0	Dokumen	1	1	100
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman	96.390.000	96.390.000	100				
	Diterbitkannya sertifikat baru atau perpanjangan sertifikat dan Nomor PIRT sebagai izin Produksi bagi produk makanan dan minuman Industri							

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	Jumlah Dokumen yang dihasilkan				Dokumen	1	1	100
	<i>Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</i>	96.390.000	96.390.000	100	Dokumen	1	1	100
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	737.211.976	677.539.566	91,91				
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan							
	Jumlah Posyandu Aktif				Jumlah	165	165	100
	Persentase Rumah Tangga Ber PHBS				Persen	95	95	100
	Jumlah Desa Siaga Aktif				Jumlah	122	122	100
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	441.641.800	439.769.410	99,58				
	Meningkatnya dukungan kebijakan dan sumber daya dari lintas sektor dan kemitraan terhadap program kesehatan, serta peran aktif							
	Persentase Kegiatan Pemberdayaan & Peningkatan Peran Masyarakat Kesehatan				Persen	94	94	100
	<i>Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat</i>	441.641.800	439.769.410	99,58	Dokumen	1	1	100
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	243.547.051	185.747.156	76,27				
	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang perilaku hidup sehat serta terlibat dalam kegiatan promotif dan preventif							
	Persentase Upaya Promotif dan Preventif				Persen	95	95	100
	<i>Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat</i>	234.547.051	176.753.156	75,36	Dokumen	1	1	100
	<i>Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan...</i>	9.000.000	8.994.000	99,93	Keluarga	1400	1400	0
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	52.023.125	52.023.000	100,00	Dokumen	1	1	100
	Meningkatnya jumlah Posyandu, Posbindu PTM, atau UKBM lainnya yang telah didirikan dan berfungsi secara aktif							
	Persentase pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat				Persen	85	85	100
	<i>Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat</i>	52.023.125	52.023.000	100,000	Dokumen	1	1	100

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	PROGRAM AGREDITAS PELAYANAN KESEHATAN	0	0	0				
	Rumah Sakit Pemerintah Terkreditasi paripurna (kategori)					Paripurna		
	Jumlah RSUD Tipe D yang ditingkatkan jadi Tipe C (unit)					7		
	Jumlah Puskesmas Terakreditasi Paripurna (Unit)							
	SASARAN I.2 MENURUNNYA ANGKA KEMISKINAN							
	Tingkat Kemiskinan	4.780.266.500	4.768.884.003	99,76	Persen	13,72	11,89	115,39
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2.904.629.000	2.897.968.673	99,77				
	Meningkatkan cakupan Pemberdayaan Sosial							
	Persentase Usaha Ekonom keluarga Yang mendapatkan Pembinaan				Persen	57	57,64	101
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	2.904.629.000	2.897.968.673	99,77				
	Pelatihan dan pemberdayaan masyarakat				Orang	15	15	100
	Jumlah kelompok usaha yang mendapatkan bantuan				Kelompok	39	39	100
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	55.202.100	55.201.000	100,00	Orang	15	15	100
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial/ Kembangkan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2.849.426.900	2.842.767.673	99,77	Orang	13	13	100
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	0	0	0				
	Meningkanya Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan							
	Persentase WNI migran korban kekerasan yang memperoleh layanan sesuai prosedur							
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	886.387.500	883.687.330	99,70				
	Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial							
	Persentase DTKS yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi				Persen	50	50	100
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar	886.387.500	883.687.330	99,70				
	Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar PMKS							

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, dan gepeng yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial				Persen	8,69%	10,87	125,08
	Penyediaan Permakanan	497.805.100	497.300.640	99,90	Orang	1000	980	98
	Penyediaan Sandang				Orang	2	0	0
	Penyediaan Alat Bantu	388.582.400	386.386.690	99,43	Orang	20	75	187,5
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar				Orang	1	0	0
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-	-			7,35	5,68	77,29
	Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial							
	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial				Persen	42	0	0
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	989.250.000	987.228.000	99,80				
	Meningkatnya cakupan penanganan korban bencana							
	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat				Persen	100	98	98
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	989.250.000	987.228.000	99,80				
	Meningkatnya respons cepat bencana sosial							
	Persentase Kebutuhan Dasar yang disediakan				Persen	100	100	100
	Penyediaan Makanan	989.250.000	987.228.000	99,80	Orang	1913	1900	1
	SASARAN I.3 MENINGKATNYA DERAJAT PENDIDIKAN	76.268.352.166	75.225.546.993	98,63	Indeks	0,697	0,6	86,08
	Indeks Pendidikan							
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	71.919.416.566	70.909.431.393	98,60				
	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan							
	Persentase Capaian SPM				Persen	90	70,43	78,25
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	22.696.395.062	21.877.852.130	96,39		100	96,35	96,35
	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	Persentase Anak Mendapatkan Hak Pengembangan Potensi di Sekolah Dasar				Persen	100	86,75	86,75
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah	997.849.857	990.269.750	99,24	Unit	10	10	100
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	377.225.086	374.380.100	99,25	Ruang	5	5	100
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	95.217.486	94.295.850	99,03	Ruang	5	5	100
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	199.569.971	197.918.000	99,17	Ruang	5	5	100
	Pengadaan Mebel Sekolah	194.025.000	192.000.000	98,96	Paket	50	50	100
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	546.627.000	422.475.000	77,29	Satdik	120	120	100
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	9.234.730.000	9.233.374.400	99,99	Satdik	104	104	100
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	553.393.900	553.393.900	100,00	Orang	120	120	100
	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	221.474.969	219.957.930	99,32	Ruang	10	2	20,00
	Pembinaan penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	295.285.100	295.285.100	100,00	Orang	1	1	100
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	60.000.000	60.000.000	100,00	Dokumen	10	10	100
	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00	Komunitas	30	30	100
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	5.530.739.372	5.333.684.000	96,44	Ruang	10	10	100
	Rehabilitasi Sedang/berat Sarana Prasarana dan utilitas Sekolah	-	-	0,00	Unit	0	0	0
	Peningkatan teknis, pelatihan dan/atau magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	531.524.200	531.524.200	100,00	Orang	100	100	100
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.858.733.121	2.379.293.900	83,23	Ruang	30	30	100
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	44.111.377.726	44.039.676.810	99,84				
	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					100%	99,82%	99,82%
	Persentase Anak Mendapatkan Hak Pengembangan Potensi di Sekolah Menengah Pertama				Persen	74,3	74,3	100
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah TU	1.102.231.080	1.095.832.500	99,42	Ruang	5	5	100
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	483.892.435	481.215.000	99,45	RUang	10	10	100

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM		TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
			APBD PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp)	CAPAAN		TARGET	KINERJA	CAPAAN
		Pembangunan Laboratorium	418.350.898	413.070.000	98,74	Ruang	11	11	100
		Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	-	-	0,00	Ruang	0	0	0
		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	213.824.969	212.192.000	99,24	Unit	1	1	100
		Pembangunan Kantin Sekolah	-	-	0,00	Unit	5	0	0
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.585.436.958	1.575.009.000	99,34	Unit	5	5	100
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	591.582.415	588.042.000	99,40	Ruang	5	5	100
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	-	-	0,00	Ruang	5	0	0
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	25.851.659.590	25.825.107.000	1,00	Unit	10	10	100
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	216.717.200	216.717.200	100,00	Satdik	5	5	100
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	4.442.845.000	4.439.203.600	99,92	Satdik	35	35	100
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	398.987.900	398.987.900	100,00	Orang	1	1	100
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1.010.144.100	1.010.144.100	100,00	Orang	1	1	100
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan bidang Pendidikan	58.400.000	58.400.000	100,00	Kegiatan	1	1	100
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	-	-	0,00	Ruang	1	0	0
		Bimbingan Teknis, Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas bidang Pendidikan	337.209.800	337.209.000	100,00	Orang	1	0	0
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	600.175.381	589.956.700	98,30	Ruang	10	0	0
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	6.799.920.000	6.798.590.810	99,98	Paket	10	0	0
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	2.925.117.884	2.805.376.559	95,91				
		Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini					100	95,89	95,89
		Persentase Anak Mendapatkan Hak Pengembangan Potensi Sejak Dini					71,78	65	90,55
		<i>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD</i>	0	0	0,00	Satdik	119	0	0
		<i>Pengelolaan Dana BOP PAUD</i>	1.722.585.584	1648519559	96,00	Satdik	119	121	100

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	688.603.500	688.603.500	100,00	Orang	1	1	100
	Bimbingan Teknis, Pelatihan dan atau/Magang untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	0	0	0	Oeang	1	0	0
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	513.928.800	468.253.500	91	Paket	1	1	100
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	0	0	0	Satdik	119	0	0
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0	0	0	Ruang	10	0	0
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0	0	0	Ruang	10	0	0
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.186.525.894	2.186.525.894	100,00				
	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							
	Jumlah dokumen pengelolaan pendidikan kesetaraan				Dokumen	1	1	100
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.186.525.894	2.186.525.894	100,00	Satdik	13	13	100%
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	4.348.935.600	4.316.115.600	99,25				
	Meningkatnya Cakupan Pengembangan Kebudayaan							
	Indeks Peran Masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan				Persen	10		
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dari Daerah Kabupaten/Kota	4.348.935.600	4.316.115.600	99,25				
	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							
	Persentase penduduk putus sekolah terhadap akses pendidikan							
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	4.348.935.600	4.316.115.600	99,25	Satdik	114	114	100
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	0	0	0,00				
	Meningkatnya Kesenian Tradisional							
	Persentase lembaga adat daerah yang dibina				Persen	100	0	0
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	0	0	0,00				
	Meningkatnya Pembinaan Sejarah							

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	Persentase peningkatan kegiatan pelestarian dan diseminasi sejarah lokal yang diakses atau diikuti oleh masyarakat				Persen	5,7	0	0
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	0	0	0,00				
	Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya							
	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan				Persen	68,15	0	0
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	0	0	0,00				
	Meningkatnya Pembinaan Perpustakaan							
	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat					68,33%	0	0
	PROGRAM PELESTARIAN DAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	0	0	0,00				
	Meningkatnya Pelestarian dan Koleksi Nasional dan Naskah Kuno							
	Persentase koleksi naskah kuno dan artefak yang dipelihara dan didokumentasikan dengan baik				Persen	5,35%	0	0
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	0	0	0,00				
	Meningkatnya Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip							
	Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip				Persen	100	0	0
	PROGRAM PENGELOAAN ARSIP	0	0	0,00				
	Meningkatnya pengelolaan arsip							
	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan dan Pengelolaan Arsip Elektronik di lingkup Pemerintahan Daerah					Kategori D		
	SASARAN I.4 MENINGKATNYA DAYA SAING DAN PRESTASI PEMUDA							
	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) \	22.435.529.794	21.223.104.000	94,59	Indeks	56,98	56,23	98,68
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.911.120.526	1.872.644.000	97,99				
	Berkembangnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan							
	Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri					5	6,38	127,6
	Penyadaran, pemberdayaan dan penyadaran pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kab/kota, wirausaha pemuda	522.179.326	520.130.000	99,61				

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	Terwujudnya peningkatan Penyadaran, pemberdayaan dan penyadaran pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor				Persen	100	100	100
	Terlaksananya kegiatan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kab/Kota				Persen	100	100	100
	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	738.700	0	0			0	0
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat	738.700	0	0	Orang	50	0	0
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepemudaan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat	520.701.926	520.130.000	99,89	Orang	2	0	0
	Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kab/kota	1.388.941.200	1.352.514.000	97,38				
	Terwujudnya peningkatan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kab/kota				Persen	100	97,3	97,3
	Persentase pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan				Persen	100	50	50
	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Penyelenggaraan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat	1.388.941.200	1.352.514.000	97,38	Organisasi	2	1	50
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	20.524.409.268	19.350.460.000	94,28				
	Berkembangnya Kapasitas Daya Saing Keolahragaan					2	8	25
	Jumlah Cabang Olahraga yang berprestasi				Cabor	8	8	100
	Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	18.363.597.368	17.189.648.100	93,61				
	Terwujudnya peningkatan Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah							
	Persentase pembinaan dan pengembangan pada jenjang sekolah				Persen	100	93	93
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana Olahraga Melalui Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan Dan Pengawasan Prasarana Olahraga Di Tingkat	18.362.858.668	17.188.909.400	94	Unit	10	8	80
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan	738.700	738.700	100	Dokumen	2	2	100
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	258.940.000	258.940.000	100				
	Meningkatnya kejuaraan Olahraga tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
	Persentase pelaksanaan kejuaraan olahraga tingkat daerah				Persen	100	85	85
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	255.985.200	255.985.200	100	Kegiatan	3	1	33,33

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan	2.954.800	2.954.800	100	Orang	50	0	0
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	394.500	394.500	100				
	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi							
	Persentase Terlaksannya kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah				Persen	100	85	85
	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	394.500	394.500		Orang	5	0	0
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1.901.477.400	1.901.477.400	100				
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				Persen	100	85	85
	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga				Persen	100	85	85
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1.901.477.400	1.901.477.400		Persen	100	85	85
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	0	0	0				
	Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Kepramukaan							
	Jumlah kegiatan kepramukaan tingkat daerah yang dilaksanakan per tahun					1	3	300
	SASARAN I.5 MENURUNNYA ANGKA PENGANGGURAN	2.133.241.200	2.132.623.900	99,97	Persen	2,21	3,99	55,33
	Tingkat Pengangguran Terbuka							
	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja							
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja				Persen	78,56	72,93	92,83
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan				Persen	55,15	59,75	108,34
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	0	0	0				
	Meningkatnya kualitas perencanaan tenaga kerja							
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu rencana tenaga kerja				Persen	63,37	100	157,80
	PROGRAM PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	101.508.000	100.959.700	99,46				
	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja							

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan peningkatan produktivitas pelatihan berbasis kompetensi				Orang	80	0	0,00
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja				Persen	74,5	64,17	86,13
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	61.540.000	61.033.000	99,18				
	Terlaksananya Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja							
	Jumlah Peserta Pelatihan				Orang	32	48	150,00
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penediaan Instruktur serta Sarana dan	61.540.000	61.033.000	99,18				
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	39.968.000	39.926.700	99,90	Lembaga	2	2	100
	Terlaksananya Proses Pembinaan dan Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja							
	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Dibina				Lembaga	2	2	100
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	39.968.000	39.926.700	99,90	Lembaga	2	2	100
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	559.664.000	559.664.000	100				
	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja							
	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan				Persen	61,12	57,14	93,49
	Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	309.264.000	309.264.000	100				
	Terfasilitasinya Penempatan Kerja bagi Pencari Kerja							
	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dan Terfasilitasi Penempatan				Orang	350	200	57.14
	Pelayanan Antar Kerja	309.264.000	309.264.000	100	Orang	10	20	200
	Penyuluhan dan bimbingan abatan bagi pencari kerja				Orang	30	50	166
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	250.400.000	250.400.000	100				
	Terwujudnya Perlindungan Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Sejak Tahap Pra Penempatan Hingga Kembali Kedaerah							
	Persentase terlaksananya perlindungan PMI kabupaten				Persen	100	100	100
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	250.400.000	250.400.000	100	Orang	5	4	80,00
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.472.069.200	1.472.000.200	100,00				

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	Meningkatnya Hubungan Industrial							
	Persentase Perusahaan yang Menerapkan tata kelola yang layak				Persen	58,79	43,84	74,57
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1	850.739.200	850.670.200	99,99				
	Meningkatnya kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perundang-undangan							
	Jumlah perusahaan yang patuh terhadap aturan ketenagakerjaan				Perusahaan	10	14	93,33
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	5.369.600	5.369.600	100	Perusahaan	2	4	133
	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	400.000.000	400.000.000	100	Perusahaan	3	0	0
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengawasan	445.369.600	445.300.600	99,98	Laporan	2	2	100
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	621.330.000	621.330.000	100	Kasus	10	6	60
	Menurunnya Frekuensi dan intensitas konflik ketenagakerjaan di wilayah kabupaten/kota							
	Persentase kasus perselisihan yang di selesaikan				Persen	100	100	100
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat Berdampak pada	200.000.000	200.000.000	100	Perkara	10	6	60
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	15.960.400	15.960.400	100	Lembaga	1	1 Lembaga	100
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	405.369.600	405.369.600	100	Asosiasi	3	2	67
	SASARAN 1.6. TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN KELUARGA BERKUALITAS DAN KESETARAAN GENDER	10.144.660.119	9.853.055.199	97,13	Indeks	31,13	0,52	98,9
	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga				Indeks	61,75	61	98,79
	Indeks ketimpangan Gender				Indeks	0,51	0,52	99,02
	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Beanja Langsung APBD							
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	748.090.199	748.090.199	100				
	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan							
	Perentase ARG pada belanja langsung APBD				Persen	7,5	3,93	52,40
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	648.053.599	648.053.599	100				

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	Terlaksananya penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender							
	Persentase Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				Persen	100	100	100
	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	65.905.599	65.905.599	100	Dokumen	1	3	100
	<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota</i>	582.148.000	582.148.000	100	Orang	100	200	200
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100.036.600	100.036.600	100				
	Meningkatnya Kapasitas Pengurus Lembaga PATBM							
	Persentase Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan				Persen	100	100	100
	<i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan</i>	100.036.600	100.036.600	100	Orang	25	50	200
	POGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	866.724.100	866.724.100	100,00				
	Tercapainya upaya perlindungan perempuan							
	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPD yang Mendapatkan Layanan Komprehensif				Persen	100	100	100
	<i>Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>	454.104.800	454.104.800	100,00				
	Meningkatkan kesadaran dan kepedulian lintas sektor dalam pencegahan dan penanganan kasus Kekerasan terhadap Perempuan							
	Persentase Meningkatnya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				Persen	100	100	100
	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan</i>	247.316.500	206.788.300	83,61282001	Dokumen	4	4	100
	<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	247.316.500	247.316.500	100	PD	15	14	286
	<i>Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan</i>	342.871.800	342.871.800	100				
	Peningkatan kualitas perlindungan bagi perempuan korban kekerasan.							
	Persentase Meningkatnya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi				Persen	100	100	100
	<i>Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	241.470.000	241.470.000	100	Orang	25	13	52
	<i>Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	101.401.800	101.401.800	100	Laporan	5	7	140

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.747.500	69.747.500	100				
	Meningkatkan Kapasitas Lembaga Dalam Rangka Mengurangi Kekerasan Terhadap Perempuan							
	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				Persen	100	100	100
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan	69.747.500	69.747.500	100	Orang	12	15	125
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	65.905.500	65.905.500	100				
	Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga							
	Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga				Persen	100	100	100
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	65.905.500	65.905.500	100				
	Meningkatkan Kualitas Keluarga dan Perlindungan Anak							
	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak				Persen	100	100	100
	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah	65.905.500	65.905.500	100	Orang	12	15	125
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	0	0	0				
	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak							
	Persentase pengelolaan data gender dan anak (%)				Persen	100,00	0	0
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (Pha)	241.470.000	241.470.000	100				
	Meningkatnya kualitas Pemenuhan Hak Anak							
	Persentase Perlindungan Hak Anak				Persen	80	57,94	72,43
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	144.462.000	144.462.000	100				
	Terlaksananya pendampingan PHA pada lembaga pemerintah dan non pemerintah							
	Persentase pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota				Persen	75	100	133
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia	144.462.000	144.462.000	100	Organisasi	5	7	140
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	97.008.000	97.008.000	100				

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	Tersusnya lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak							
	Persentase Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	97.008.000	97.008.000	100	Persen	100	100	100
					Dokumen	1	2	200
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	0	0	0				
	Meningkatnya Keluarga Berencana							
	Angka Prevalensi kontrasepsi modern/modern contraceptive (MCPR) (%)					56,4	44,18	78,33
	Persentase Kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)					11,5	10,35	90,00
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	533.614.000	533.614.000	100				
	Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak							
	Jumlah kekerasan anak yang ditindaklanjuti				Orang	1	1	100
	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Kabupaten/Kota	191.916.000	191.916.000	100				
	Terlaksananya kapsitas layanan pencegahan kekerasan terhadap anak							
	Persentase meningkatnya pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota				Dokumen	1	1	100
	Penguatan kerjasama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak kecamatan layak	191.916.000	191.916.000	100	Kegiatan	2	4	200
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah	341.698.000	341.698.000	100				
	Terlaksananya penguatan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus							
	Persentase Meningkatnya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus				Persen	100	100	100
	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	341.698.000	341.698.000	100	Dokumen	1	1	100
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	478.072.250	478.045.000	99,99				
	Meningkatnya Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk							
	Persentase pertumbuhan penduduk				Persen	8,11		

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka	290.028.950	290.025.000	100,00				
	Terlaksananya Pengendalian laju pertumbuhan penduduk							
	Persentase dukungan kebijakan pemerintah dalam pengendalian kualitas penduduk				Persen	100	100	100
	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	168.802.950	168.800.000	100,00	Dokumen	250	250	100
	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	121.226.000	121.225.000	100,00	Dokumen	9	9	100
	Penataan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	188.043.300	188.020.000	99,99				
	Terlaksananya Perkiraan Pengendalian Penduduk							
	Perentase pengendalian penduduk yang terpetakan				Persen	92,5	90	97,30
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	172.565.900	172.550.000	99,99	Dokumen	10	10	100
	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	15.477.400	15.470.000	99,95	Laporan	7	7	100
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.786.177.370	3.496.988.100	92,36				
	Meningkatnya Cakupan dan kualitas Keluarga Berencana (KB)							
	Angka prevalensi Kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) (%)				Persen	56,4	44,18	78,33
	Jumlah Peserta KB Aktif				Persen	11973	6848	57,20
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.973.561.200	1.688.285.000	85,55				
	Terlaksannya capaian Advokasi dan KIE							
	Perentase capaian kepesertaan KB melalui advokasi dan KIE				Persen	100	100	100
	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	1.535.363.400	1.250.200.000	81,43	Unit	10	25	100
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	259.360.000	259.360.000	100,00	Laporan	13	13	100
	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	178.837.800	178.725.000	99,94	Organisasi	4	4	100
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	849.261.470	848.458.900	99,91				
	Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)							

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	Persentase peran PKB/PLKB dan IMP dalam pencapaian kinerja Program KKBPK lini lapangan				Persen	58	50	86,2
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	359.932.800	359.550.000	99,89	Orang	400	400	100
	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	318.791.600	318.676.900	99,96	Organisasi	10	10	100
	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah	170.537.070	170.232.000	99,82	Laporan	13	13	100
	Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Alkon	963.354.700	960.244.200	99,68				
	Persentase penyauran Alkon				Persen	100	100	100
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Lanjutan (MKIP)	330.989.200	330.989.200	100	Orang	180	180	100
	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	210.870.000	210.800.000	99,97	Orang	3999	3999	100
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan	148.635.000	148.500.000	99,91	Laporan	100	100	100
	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	118.635.000	118.500.000	99,89	Orang	120	120	100
	Peningkatan Kesertaan KB Pria	154.225.500	151.455.000	98,20	Orang	120	120	100
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.464.141.600	2.462.414.000	100				
	Meningkatnya Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)							
	Persentase Keluarga Sejahtera				Persen	82,18	61,1	74,35
	Cakupan PUS Unmetneed				Persen	0,03		
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.006.100.800	2.004.756.000	99,93				
	terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							
	Persentase Peran serta Poktan dalam Pembangunan Keluarga				Persen	50	50	100
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga)	124.908.000	124.800.000	99,91	Laporan	300	300	100
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan	92.100.000	92.100.000	100	Keluarga	3811	3811	100
		220.770.800	220.554.000	99,90	Laporan	110	110	100

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Terlaksananya Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Persentase Peran serta Ormas dalam Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.568.322.000	1.567.302.000	99,93	Orang	15	15	100
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	458.040.800	457.658.000	99,92				
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk							
	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk				Persen	60	59,5	99,17
	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	142.362.000	142.200.000	99,89	Laporan	17	17	100
		94.908.000	94.800.000	99,89	Organisasi	19	19	100
		220.770.800	220.658.000	99,95	Laporan	560	548	97,86
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	209.769.800	209.109.000	99,68				
	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan berbasis elektronik					100	100	100
	Perekaman KTP Elektronik (%)				Persen	97	98	101
	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan berbasis elektronik				Persen	100	77	77
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	118.934.000	118.934.000	100				
	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk							
	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk				Persen	93	98	105
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	118.934.000	118.934.000	100	Laporan	13388	13388	100
	Penataan Pendaftaran Penduduk	75.055.800	74.395.000	99,12				
	Meningkatnya Penataan Pendaftaran Penduduk							
	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk				Persen	100	100	100
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Bangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	75.055.800	74.395.000	99,12	Dokumen	100000	99900	100
	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	15.780.000	15.780.000	100				
	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				Persen	91	91	100

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	<i>Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk</i>	15.780.000	15.780.000	100	Laporan	1	1	100
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	126.847.000	126.847.000	100				
	Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil berbasis elektronik							
	Persentase Kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil Berbasis Elektronik				Persen	100	100	100
	<i>Pelayanan Pencatatan Sipil</i>	103.108.000	103.108.000	100				
	Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil							
	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil				Persen	100	100	100
	<i>Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil</i>	103.108.000	103.108.000	100	Layanan	7760	7760	100
	<i>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</i>	23.739.000	23.739.000	100				
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil							
	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				Persen	100	100	100
	<i>Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil</i>	23.739.000	23.739.000	100	Laporan	13	13	100
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	160.836.200	160.836.200	100				
	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							
	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan				Persen	42	42	100
	<i>Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	28.776.200	28.776.200	100				
	Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							
	Persentase Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				Persen	100	100	100
	<i>Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan</i>	28.776.200	28.776.200	100	Dokumen	205	204	100
	<i>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	31.789.500	31.789.500	100				
	Meningkatnya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							
	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				Persen	85	85	100

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM		TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
			APBD PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
		Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan	31.789.500	31.789.500	100	Laporan	1	1	100
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100.270.500	100.270.500	100				
		Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Pendudu				Persen	95	95	100
		Meningkatnya pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan	100.270.500	100.270.500	100	Orang	8	8	100
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	50.392.800	50.392.800	100				
		Terselenggaranya Pengelolaan Profil Kependudukan							
		Jumlah Data Base kependudukan terupdate				Database	1	1	100
		Penyusunan Profil Kependudukan	50.392.800	50.392.800	100				
		Meningkatnya Persentase Profil Kependudukan							
		Persentase Profil Kependudukan				Persen	100	100	100
		Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	15.519.000	15.519.000	100	Dokumen	170	170	100
		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	34.873.800	34.873.800	100	Dokumen	170	170	100
		SS 2.1 MENINGKATNYA KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR PEMBANGUNAN	78.082.248.062	68.110.510.467	87,23	Indeks	2,63	2,57	97,04
		Indeks Konektivitas Wilayah				Indeks	0,05	0,048	96
		Indeks Infrastruktur Dasar				Indeks	5,2	5,1	98,07
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	2.339.020.000	2.318.781.650	99,13				
		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)							
		Persentase Drainase Yang Terbangun				Persen	47,23	45	95
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.339.020.000	2.318.781.650	99,13				
		Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah Kabupaten/Kota							
		Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				Persen	100		

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM		TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
			APBD PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	2.339.020.000	2.318.781.650	99,13	Meter	1000	0	0
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	0	0	0		2		
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	32.148.397.700	30.107.102.470	93,65				
		Terselenggaranya Penataan Bangunan Gedung							
		Persentase Isian Aplikasi SI BPB				Persen	85	100	118
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan	32.148.397.700	30.107.102.470	93,65				
		Jumlah IMB dan sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				Persen	100	100	100
		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kenentinaan Strategis Daerah	31.931.397.700	29.990.102.470	93,92	Dokumen	10	9	10
		Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan	217.000.000	117.000.000	53,92	Dokumen	100	100	100
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	0	0	0				
		Meningkatnya Penataan Bangunan dan Lingkungannya							
		Persentase kawasan prioritas yang telah ditata melalui penataan bangunan, ruang terbuka, dan elemen pendukung kawasan sesuai fungsi ruang dan					1		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	14.482.855.560	7.144.924.640	49,33				
		Meningkatnya Kemantapan Jalan							
		Panjang jalan dalam kondisi mantap				KM	615,31	615,31	100
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	14.482.855.560	7.144.924.640	49,33				
		Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota							
		Persentase Panjang Jalan dalam kondisi mantap				Persen	89	89	100
		Pembangunan Jalan	12.476.833.560	6.373.364.310	51,08	Km	5	5	100
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	250.000.000	249.700.000	99,88	Km	1089,44	1089,44	100
		Rehabilitasi Jalan	1.756.022.000	521.860.330	29,72	Km	25	25	100
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	0	0	0				

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	Meningkatnya Pengembangan Jasa Konstruksi							
	Rasio tenaga Operator/teknik/an alisis yang memiliki sertifikat kompetensi					13,36	0	0
	Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi					2,37	0	0
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	0	0	0				
	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang							
	Persentase Ketaatan terhadap				Persen	82,45	0	0
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota							
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota							
	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah				Peren	100	0	0
	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	0	0	0	Orang	20	0	0
	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	0	0	0				
	Meningkatnya Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum							
	Persentase penyelesaian pengadaan tanah untuk kepentingan umum				Persen	100	100	100
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	15.294.925.800	15.154.679.844	99,08				
	Terseleenggaranya Penyelesaian Ganti kerugian dan santunan tnh untuk pembangunan							
	Persentase penyelesaian ganti kerugian tanah untuk pembangunan				Persen	100	100	100
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	15.294.925.800	15.154.679.844	99,08				
	Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							
	Jumlah Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Jumlah dokumen penyelesaian masalah ganti				Dokumen	10	10	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh	15.294.925.800	15.154.679.844	99,08	Dokumen	10	10	100
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.100.000.000	1.099.390.000	99,94				

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)							
	Luas Daerah Irigasi Dalam Kondisi Baik				Ha	2.759.88	2.759.88	100
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	800.000.000	799.390.000	99,92				
	Terkelolanya SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
	Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				Persen	55	55	100
	Normalisasi/Restorasi Sungai	600.000.000	599.590.000	99,93	Km	10000	10000	100
	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	0	0	0	Km	400		
	Pembangunan Tanggul Sungai	200.000.000	199.800.000		Km	2000	2000	100
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha- 3000 Ha dan Daerah	300.000.000	300.000.000	100				
	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1.000 Ha							
	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam				Persen	50	50	100
	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	300.000.000	300.000.000	100	Km	1500	2000	133
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	400.000.000	394.272.000	98,57				
	Meningkatnya Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum							
	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Perpipaan				KK	19017	19017	100
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000	394.272.000	98,57				
	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota							
	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				Persen	75	75	100
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan	0	0	0	Unit	2		
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	0	0	0	Liter/ Detik	0		
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	0	0	0	Liter/ Detik	25		

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	400.000.000	394.272.000	98,57	Dokumen	3	3	100
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	0	0	0	Unit	10		
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perumahan	0	0	0	SR	500		
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	7.151.000	7.151.000	100				
	Meningkatnya Pengembangan Perumahan							
	Persentase pembangunan perumahan untuk korban bencana alam				Persen	5	5	100
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	7.151.000	7.151.000	100				
	Persentase Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang direlokasi dan direhabilitasi				Persen	80	80	100
	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	7.151.000	7.151.000	100	Dokumen	1	1	100
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	53.736.800	53.736.800	100				
	Meningkatnya Kawasan Permukiman yang layak huni							
	Jumlah Rumah Rumah Layak Huni				Unit	13196	13196	100
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	53.736.800	53.736.800	100				
	Persentase Laporan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman				Persen	100	100	100
	Jumlah dokumen penerbitan izin pembangunan kawasan permukiman				Dokumen	1	1	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	53.736.800	53.736.800	100	Laporan	20	20	100
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	349.567.420	349.567.200	100,00				
	Menurunnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh							
	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Yang ditangani				Persen	76,83	76,83	100
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	349.567.420	349.567.200	100,00				
	Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota							
	Jumlah dokumen pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh				Dokumen	2	2	100

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman	349.567.420	349.567.200	100,00	Unit	14	9	64,29
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	7.619.469.060	7.324.460.663	96,13				
	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)							
	Persentase pembangunan sarana. dan prasarana dan utilitas umum				Persen	100	87	87,00
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				Persen	100	100	100
	Terlaksananya urusan penyelenggaraan PSU Perumahan							
	Persentase penyelenggaraan PSU				Persen	100	100	100
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	7.619.469.060	7.324.460.663	96,13	Lokasi	20	20	100
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN	0	0	0,00				
	Meningkatnya Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman							
	Persentase pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis dalam proses sertifikasi dan registrasi							
	Meningkatnya Layanan Transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau							
	Persentase Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka, APIL, Guardrail, Delinator, dll) yang berfungsi baik				Persen	40,97		
	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas				Persen	89,57		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS JALAN (LLAJ)	69.479.975	39.799.100	57,28				
	Menurunnya Kecelakaan Lalu Lintas							
	Persentase Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, Marka, APIL, Guardrail, Delinator, dll) yang berfungsi baik							
	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan lalu lintas				Persen	89,57		
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	18.945.975	18.869.600	99,60				
	Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor							
	Persentase kendaraan layak jalan				Persen	80	79	98,75
	Persentase kendaraan layak jalan	12.249.600	12.249.600		Laporan	1	1	100

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Waib Uli	6.696.375	6.620.000		Laporan	1	1	100
	Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Bermotor	8.175.000	0	0,00				
	Peningkatan Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Bermotor							
	Penurunan Persentase pelanggaran lalu lintas				Persen	55		
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	8.175.000	0	0,00	Laporan	4	0	0
	Prosedur Penemuan Berkala Kendaraan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				Laporan	4	0	0
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota Bermotor	21.429.500	0	0,00				
	Jumlah Dokumen Andalin yang di Setujui				Dokumen	2	2	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalin Prosedur Penemuan Berkala Kendaraan Bermotor	14.529.500	0	0,00	Laporan	2	2	100
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalin Jumlah Kendaraan Bermotor Waib Uli	6.900.000	0	0,00	Laporan	2	2	100
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.418.500	9.418.500	100				
	Jumlah dokumen yang dihasilkan				Dokumen	5	5	100
	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.418.500	9.418.500	100	Dokumen	2	2	100
	Prosedur Penetapan Tarif penumpang Kelas Ekonomi Untuk Angkutan Orang Yang Melayani Trayek Serta Angkutan Perkotaan Dan Perdesaan	11.511.000	11.511.000	100				
	Jumlah Dokumen Kelas Tarif Ekonomi dalam Trayek yang ditetapkan				Dokumen	2	2	100
	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1	11.511.000	11.511.000		Laporan	1	1	100
	PROGRAM PENGLOLAAN PELAYARAN	4.217.644.747	4.116.645.100	97,61				
	Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Pelayaran yang berfungsi Baik							
	Persentase Pelabuhan Rakyat/Dermaga Rakyat Yang Berfungsi Baik				Persen	100	100	100
	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan Dan Perbaikan Kapal	7.649.900	7.649.900	100,00				
	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan Dan Perbaikan Kapal							
	Persentase Izin Pengelolaan Tersus dan TUKS di dalam DLKR/DLKP							
	Pelabuhan Penempatan Lokal yang diterbitkan				Persen	100	100	100

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	7.649.900	7.649.900	100	Laporan	1	1	100
	Penetapan Rencana Induk Dan Daerah Lingkungan Kerja (Dlkr) Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal Terlakananya Penetapan Rencana Induk Dan Daerah Lingkungan Kerja (Dlkr) Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan	86.522.800	86.522.800	100				
	Jumlah Peraturan Daerah Yang diTetapkan ditetapkan				Dokumen	1	1	100
	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	7.642.800	7.642.800	100	Dokumen	1	1	100
	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	78.880.000	78.880.000	100	Laporan	1	1	100
	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	4.116.287.647	4.015.288.000	97,55				
	Terlaksananya Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal							
	Presentase Sarana dan Prasarana Pelabuhan Pengumpan Lokal				Persen	100	100	100
	fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	2.896.614.700	2.800.000.000	96,66	Dokumen	1	1	100
	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	1.219.672.947	1.215.288.000	99,64	Unit	2	2	100
	Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (Tuks) Di Dalam Dlkr/Dlko Pelabuhan Pengumpan Lokal	7.184.400	7.184.400	100				
	Terlaksananya penerbitan Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (Tuks) Di Dalam Dlkr/Dlko							
	Persentase Izin Pengelolaan Tersus dan TUKS di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal yang diterbitkan				Persen	100	100	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di	7.184.400	7.184.400		Laporan	1	1	100
	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	0	0	0,00				
	Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Penerbangan							
	Persentase sarana dan prasarana pendukung operasional penerbangan yang dibangun, diperbaiki, atau ditingkatkan (unit/tahun)					20	0	0
	SS.3.1 MENINGKATNYA DAYA SAING PRODUKTIVITAS EKONOMI	408.177.000	407.001.000	99,71	Indeks	68206,91	6169,62	70,17
	Laju Pertumbuhan Ekonomi					6,25	4,34	69,44

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	PDRB Perkapita					68.200	6164,67	90,39
	Rasio Gini					0,285	0,414	68,84
	Rasio PDRB Industri Pengolahan					1,5	0,78	52,00
	Mewujudkan Transformasi Perekonomian Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi					5,20		
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	10.380.000	10.200.000	98,27				
	Meningkatnya perencanaan dan pembangunan industri							
	Jumlah Omzet yang dihasilkan dari Sektor Usaha Perindustrian				Persen	52,54	43,26	82,34
	<i>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</i>	10.380.000	10.200.000	98,27				
	Meningkatnya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota							
	Jumlah dokumen rencana pembangunan industri kabupaten				Dokumen	20	19	95
	<i>Penyusunan rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota</i>	5.190.000	5.100.000		Dokumen	20	19	95
	<i>Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri</i>	5.190.000	5.100.000		Dokumen	12	12	100
	<i>Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat</i>	16.375.200	16.248.000		Dokumen	12	12	100
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	24.510.000	24.450.000	99,76				
	Meningkatnya Cakupan Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota							
	Persentase IUI dan IUKI efektif				Persen	55	55	100
	Persentase Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri				Persen	20	20	100
	<i>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri</i>	24.510.000	24.450.000	99,76				
	Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin							
	Terlaksananya penerbitan dokumen IUI dan IUKI kabupaten				Persen	50	45	90
	<i>Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup</i>	24.510.000	24.450.000	99,76	Dokumen	20	18	90
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	0	0	0,00				

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional							
	Jumlah aplikasi atau fitur pendukung sistem informasi industri yang dikembangkan atau dioptimalkan					0	0	0
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	9.515.000	9.400.000	98,79				
	Meningkatnya Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan							
	Persentase Pengajuan SKA yang Diproses dan Ditindaklanjuti				Persen	2,1 Persen	0	0
	Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung	4.325.000	4.300.000	99,42				
	Meningkatnya Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung							
	Persentase Rekomendasi Izin Minuman Beralkohol Golongan B dan C Pengecer Langsung Minum ditempat yang dikeluarkan				Persen			
	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	4.325.000	4.300.000	99,42				
	Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	5.190.000	5.100.000	98,27				
	Meningkatnya Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan							
	Jumlah Rekomendasi Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang dikeluarkan					20 Dok	10 Dok	50
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem	5.190.000	5.100.000					
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	26.199.800	26.041.000	99,39				
	Meningkatnya Sarana Distribusi Perdagangan							
	Persentase pasar sehat				Persen	88,24	87,13	98,74
	Persentase peningkatan pelaku usaha perdagangan				Persen	94,12	93,18	99,00
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	26.199.800	26.041.000	99,39				
	Meningkatnya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan							
	Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				Pasar	5	5	100
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	8.100.000	8.100.000	100,00	Unit	3	2	67
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	18.099.800	17.941.000	99,12	Unit	2	2	100

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	PROGRAM STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	205.151.600	204.756.000	99,81				
	Meningkatnya Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting							
	Persentase stabilisasi jenis barang penting				Persen	50	49	98
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	103.345.000	103.126.000	99,79				
	Meningkatnya Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
	Persentase Ketersediaan Kebutuhan Pokok dan Barang Penting				Dokumen	3	3	100
	Koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah dan pasar rakyat	103.345.000	103.126.000	99,79	Laporan	8	8	100
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	101.806.600	101.630.000	99,83				
	Meningkatnya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota							
	Jumlah Dokumen Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				Laporan	6	5	100
	Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada masyarakat yang terdampak dalam pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang terdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	95.192.600	95.130.000	99,93	Laporan	6	6	100
		6.614.000	6.500.000	98,28	Laporan	13	10	77
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	0	0	0,00				
	Meningkatnya Pengembangan Ekspor							
	Persentase pengembangan ekspor kabupaten					2%	0	0
	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	61.033.600	60.888.000	99,76				
	Meningkatnya Standarisasi dan Perlindungan Konsumen							
	Jumlah Omset yang dihasilkan dari Usaha Sektor Perdagangan				Persen	51,7	51,7	100
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	61.033.600	60.888.000	99,76				
	Meningkatnya Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan				Kecamatan	5	5	100
	Jumlah laporan yang dihasilkan				Laporan	3	5	166,67
	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera-tera ulang	39.992.600	39.859.000	99,67	Unit	30	29	97

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	Pengawasan/penyuluhan metobgy legal	21.041.000	21.029.000	99,94	Orang	30	30	100
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	71.387.000	71.266.000	99,83				
	Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri							
	Kontribusi Sektor Perdagangan				Persen	15,88	14,75	92,88
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri	71.387.000	71.266.000	99,83	UMKM	10	8	80
	Meningkatnya pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri							
	Jumlah Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				Kegiatan	1	1	100
	Pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten/Kota	53.923.000	53.866.000	99,89	UMKM	14	12	86
	Pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten/Kota	17.464.000	17.400.000	99,63	UMKM	10	10	100
	SS 3. 2 TERWUJUDNYA PENERAPAN EKONOMI BIRU DAERAH							
	Indeks Ekonomi Biru Daerah	12.462.969.158	12.330.579.488	98,94	Indes	49,72	49,5	99,55
	Nilai Tukar Nelayan					77	-	-
	Nilai Tukar Pembudidayaan					8,75	-	-
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.898.056.150	2.857.416.120	98,60				
	Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Tangkap							
	Pesentase Kelompok Nelayan yang di lakukan pembinaan				Persen	90	90	100
	Pesentase Kelompok Nelayan yang di lakukan pembinaan Produktivitas perikanan tangkap				Persen	15,509	15,592	100,54
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Disahakan dalam 1	2.848.107.850	2.807.467.820	98,57				
	Meningkatnya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat							
	Jumlah Sarana dan Prasaran Pengelolaan Penangkapan Ikan yang diserahkan kemasayarakat				Unit	50	49	98
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	13.403.400	13.403.400	100,00	Dokumen	2	2	100
	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	2.834.704.450	2.794.064.420	98,57	Unit	2	2	100

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	49.948.300	49.948.300	100,00				
	Meningkatnya Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota							
	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang dilaksanakan pemberdayaan				Kelompok	30	30	100
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	49.948.300	49.948.300	100,00	Orang	100	100	100
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	9.089.169.208	8.998.263.368	99,00				
	Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Budidaya							
	Persentase Kelompok Pembudidaya yang dibina				Persen	85	87	102,4
	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)				Ton	9121,43	9543,96	104,63
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	563.351.700	560.455.700	99,49				
	Meningkatnya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil							
	Jumlah Pembudi Daya Ikan Kecil yang Diberdayakan				Kelompok	10	10	100
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	549.948.300	547.052.300	99,47	Kelompok	10	10	100
	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan	13.403.400	13.403.400	100,00	Kelompok	10	10	100
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	8.525.817.508	8.437.807.668	98,97				
	Meningkatnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan							
	Jumlah Paket Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya yg di serahkan Kemasarakat				Paket	35	34	97,14
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu)	108.597.000	108.547.620	99,95	Dokumen	2	2	100
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu)	4.008.817.508	3.934.606.000	98,15	Unit	25	25	100
	Daerah Kabupaten/Kota							
	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	31.292.400	31.292.400	100,00	Dokumen	2	2	100
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.377.110.600	4.363.361.648	99,69	Unit	35	35	100
	PROGRAM PENGASAWAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	99.090.000	99.090.000	100,00				
	Meningkatnya Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan							

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	Persentase Kelompok Masyarakat Pengawasan Perikanan yang dibina				Persen	70	60	85,71
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam	99.090.000	99.090.000	100,00				
	Meningkatnya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat							
	Jumlah Dokumen Pengawasan Sumber Daya Perikanan				Dokumen	2	2	100
	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha	99.090.000	99.090.000	100,00	Dokumen	2	2	100
	pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota							
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	376.653.800	375.810.000	99,78				
	Meningkatnya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan							
	Persentase kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan yang dibina				Persen	72	72,09	100,13
	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	25.050.000	25.050.000	100,00				
	Meningkatnya Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha							
	Jumlah Dokumen Pendataan Unit Usaha Pengolahan hasil Perikanan				Dokumen	2	2	100
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan	25.050.000	25.050.000	100,00	Dokumen	2	2	100
	Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah							
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	351.603.800	350.760.000	99,76				
	Meningkatnya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota							
	Jumlah Unit pengolahan ikan Skala Mikro yang operasional				Unit	5	5	100
	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan	149.361.600	149.361.600	100,00	Dokumen	2	2	100
	Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah							
	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	202.242.200	201.398.400	99,58	Pelaku Usaha	25	25	100
	SS. 3.3 TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN PANGAN	79.328.226.394	78.076.214.088	98,42	Indes	77	66,83	86,79
	Mewujudkan Indeks Ketahanan Pangan							
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	398.940.000	398.586.000	99,91				
	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan							
	Persentase Desa Mandiri Pangan (%)				Persen	15,72	15,5	98,60

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	398.940.000	398.586.000	99,91				
	Terwujudnya ketersediaan infrastruktur pangan							
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya				Unit	5	5	100
	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	398.940.000	398.586.000	99,91	Unit	13	12	92,31
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.761.915.400	1.760.912.620	99,94				
	Meningkatnya Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat							
	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas				Persen	12,58	12	95,39
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka	415.957.700	415.483.140	99,89				
	Menjamin ketersediaan, stabilitas pasokan, dan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat							
	Persentase Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				Persen	100	100	100
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	400.000.000	399.525.440	99,88	Laporan	1	1	100
	Pemantauan Stok Pangan	15.957.700	15.957.700	100,00	Unit	1	1	100
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	650.000.000	649.775.120	99,97				
	Menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pangan bagi masyarakat							
	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam				Persen	100	100	100
	Penyusunan Rencana kebutuhan pangan lokal				Dokumen	13	0	0
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	650.000.000	649.775.120	99,97	Ton	13	13	100
	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				Ton	1		
	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota				Ton	1		
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	695.957.700	695.654.360	99,96				
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan masyarakat melalui skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
	Persentase pencapaian target, diukur melalui Skor Pola Pangan Harapan (PPH)				Persen	100	100	100
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	680.000.000	679.696.660	99,96	Laporan	13	12	92,31

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun</i>	15.957.700	15.957.700	100	Laporan	1	1	100
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	227.700.700	227.700.700	100				
	Tingkat penguatan Penanganan Kerawanan Pangan				Persen	100	100	100
	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan Persentase Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota				Persen	100	100	100
	<i>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</i>	<i>29.700.700</i>	<i>29.700.700</i>	<i>100</i>				
	Memberikan visualisasi geografis wilayah rentan pangan							
	Dokumen Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan				Dokumen	1	1	100
	<i>Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan</i>	<i>29.700.700</i>	<i>29.700.700</i>	<i>100</i>	Dokumen	1	1	100
	<i>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>198.000.000</i>	<i>198.000.000</i>	<i>100</i>				
	Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pangan bagi masyarakat							
	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota				Persen	100	100	100
	<i>Pelaksanaan Pengadaan, Pengelblaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mengakibatkan</i>	<i>198.000.000</i>	<i>198.000.000</i>	<i>100</i>	Peren	1	1	100
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	15.957.700	15.957.700	100				
	Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan							
	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan				Dokumen	1	1	100
	<i>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>15.957.700</i>	<i>15.957.700</i>	<i>100</i>				
	Melindungi masyarakat dari pangan berbahaya, dengan target meningkatkan pengetahuan produsen dan konsumen							
	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				Laporan	1	1	100
	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				Persen	13	0	0
	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan				Persen	13	0	0
	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				Laporan	3	0	0
	<i>Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan</i>	<i>15.957.700</i>	<i>15.957.700</i>	<i>100</i>	Dokumen	13	13	100
	<i>Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan</i>				Dokumen	13	0	0

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	16.521.442.760	16.486.181.225	99,79				
	Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertania							
	Produktivitas Tanaman Pangan				KW/Ha	553,87	553,8	99,99
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	14.349.045.200	14.316.916.411	99,78				
	Meningkatnya Pengawasan terhadap Penggunaan prasarana Pertanian							
	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				Persen	100	100	100
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian <i>Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokal</i>	14.349.045.200	14.316.916.411	99,78	Laporan	12	12	100
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1.648.420.000	1.646.457.814	99,88				
	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota							
	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				Persen	100	100	100
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1.648.420.000	1.646.457.814	99,88	Dokumen	6	6	100
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	523.977.560	522.807.000	99,78				
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain							
	Persentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain				Persen	100	100	100
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	523.977.560	522.807.000	99,78	Ekor	60	60	100
Distrik	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	47.997.908.685	47.693.446.654	99,37				
	Meningkatnya ketersediaan Prasarana Pertanian							
	Jumlah produksi peternakan (Daging dan Telur)				Kg	305.881		
	Jumlah Produksi tanaman pangan				Ton	108.530		
	Pembangunan Prasarana Pertanian	29.125.874.809	28.871.969.771	99,13				
	Meningkatnya Pembangunan Prasarana Pertanian							
	Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian				Persen	100	100	100
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi <i>Usaha Tani</i>	1.196.940.000	1.008.858.000	84,29	Unit	5	5	100

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM		TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
			APBD PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	27.928.934.809	27.863.111.771	99,76	Unit	35	34	99,13
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	17.888.128.876	17.856.971.883	99,83	Unit	5	5	100
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	983.905.000	964.505.000	98,03	Unit	35	35	100
Perkebunan		Pembangunan Prasarana Pertanian	18.872.033.876	18.821.476.883	99,73				
		Terlaksana Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian							
		Jumlah kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian							
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	17.888.128.876	17.856.971.883	99,83	5 Unit	5 Unit	100,00	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	983.905.000	964.505.000	98,03	35 Unit	35 Unit	100,00	
Perkebunan		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENAGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	11.021.347.948	10.110.421.258	91,73				
		Meningkatnya Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian							
		penurunan kerugian hasil produksi perkebunan akibat bencana dan gangguan OPT/OPH							
		Persentase pengendalian penyakit hewan ternak				Persen	77	76	99
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	11.021.347.948	10.110.421.258	91,73				
		Terlaksana Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian							
		Jumlah Pengeluaran Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota				Laporan	36,00	35,00	97
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	9.752.251.248	8.845.381.258	90,70	Ha	150	150	100
		Penanganan Dampak Perubahan Iklim DPI Tanaman	644.405.800	640.789.000	99,44	Ha	200	150	75,00
		Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	624.690.900	624.251.000	99,93	Ha	13	13	100
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	3.735.173.240	3.734.696.747	99,99				
		Meningkatnya luasan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota							
		Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Pertanian Kabupaten/Kota				Persen	100	84	84
		Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	3.720.143.240	3.719.737.650	99,99	Ha	1600	1350	84

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (UPTD)	15.030.000	14.959.097	99,53	Ha	50	0	
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.342.513.201	1.342.512.439	99,99994323	Kegiatan	1	1	100
	Meningkatnya Penyuluhan Pertanian	14.018.676.268						
	Persentase peningkatan SDM kelembagaan kelompok tani				Persen	100	100	100
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	321.795.939	321.795.939	100				
	Terlaksana Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian							
	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				Persen	100	100	100
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	51.798.321	51.798.321	100	Unit	13	13	100
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	16.989.000	16.989.000	100	Unit	387	204	52,71
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	198.608.618	198.608.618	100	Unit	13	13	100
	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	54.400.000	54.400.000	100	Unit	3	3	100
Distansi	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.020.717.262	1.020.716.500	100,00				
	Meningkatnya pelaksanaan Penyuluhan Pertanian							
	Jumlah Penyuluhan Pertanian yang dilaksanakan							
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa							
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	990.723.220,00	990.722.500,00	100,00	204 Unit	204 Unit	100,00	
	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	29.994.042,20	29.994.000,00	100,00	3 Unit	3 Unit	100,00	
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	40.500.000	40.495.492	99,99				
	Meningkatnya pelaksanaan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner							
	Persentase pengendalian penyakit hewan ternak				Persen	77	85	110,39
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	40.500.000	40.495.492	99,99				
	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan hewan guna mendukung kesehatan ternak serta kemandirian							

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota				Laporan	36	36	100
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	40.500.000	40.495.492	99,99	Laporan	12	12	100
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	0	0	0				
	Meningkatnya Cakupan Perizinan Usaha Pertanian							
	Persentase peningkatan pelaku usaha pertanian yang memperoleh perizinan berusaha secara legal dan sesuai ketentuan							
	SS 3.4 MENINGKATNYA KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH							
	Rasio PDB Pariwisata	8.427.783.698	8.404.428.495	99,72	Indeks	8,75	8,60	98,28
	Meningkatnya daya Saing Pariwisata							
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.085.699.812	1.069.958.000	98,55				
	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata							
	Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)				Orang	39.910	39.872	99,90
	Lama Menginap (hari)				Hari	3	3	100,0
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	299.900.488	284.313.000	94,80				
	Meningkatnya Pengelolaan Daya Tarik Wisata yang menunjang urusan destinasi pariwisata							
	Persentase Pengelolaan Daya Tarik Wisata yang menunjang urusan destinasi pariwisata				Persen	100	100	100
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata dan Unggulan Kabupaten/Kota	299.900.488	284.313.000	94,80	Lokasi	10	10	100
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	785.799.324	785.645.000	99,98				
	Berkembangnya Destinasi Pariwisata dalam menunjang urusan pariwisata							
	Persentase Pengembangan Destinasi Pariwisata dalam menunjang urusan pariwisata				Persen	100	100	100
	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	157.633.124	157.630.000	100,00	Dokumen	4	4	100
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	486.184.500	486.149.000	99,99	Destinasi	6		
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	141.981.700	141.866.000	99,92	Unt	10		
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	6.818.569.100	6.811.839.295	99,90				
	Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata							

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	Jumlah event yang dilaksanakan dalam menunjang promosi pariwisata				Event	7	7	100
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tari, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	6.818.569.100	6.811.839.295	99,90	Event	3	3	100
	Terlaksananya event yang dilaksanakan dalam menunjang promosi pariwisata							
	Persentase pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri				Persen	100	100	100
	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	30.000.000	30.000.000	100,00	Dokumen	1	1	100
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	6.648.569.100	6.641.839.295	99,90	Kegiatan	2	2	100
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	140.000.000	140.000.000	100,00	Promosi	1	1	100
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	327.641.586	326.758.000	99,73				
	Meningkatnya kualitas Ekonomi Kreatif							
	Persentase Pengembangan Prasarana Ekonomi Kreatif				Persen	55	54	98
	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	327.641.586	326.758.000	99,73				
	Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif							
	Persentase pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				Persen	100	97	97
	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	299.997.286	299.113.700	99,71	Laporan	5	5	100
	Perlindungan Hasil Kreativitas	27.644.300	27.644.300	100,00	Dokumen	4	4	100
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	195.873.200	195.873.200	100,00				
	Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif							
	Persentase pembinaan ekonomi kreatif dan SDM kepariwisataan (persen)				Persen	100	64	64
	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	195.873.200	195.873.200	100,00				
	Tersedianya Pelaku Ekonomi Kreatif							
	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif				Pelaku Ekraf	10	18	180
	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	195.873.200	195.873.200	100,00	Orang	30	30	100
	SS.3.5 TERWUJUDNYA PERDESAAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI	14.573.387.363	14.469.758.882	99,29	Indeks	0,6986	0,694	99,34

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	Indeks Desa Membangun	14.373.367.303	14.403.736.802	99,23	Indeks	0,0580	0,054	99,34
	Persentase status desa Membangun					0,68		
	PROGRAM PENATAAN DESA	598.288.680	596.700.000	99,73				
	Meningkatnya Penataan Desa							
	Persentase BPD, LPM, dan PKK aktif				Persen	100	100	100
	Penyelenggaraan Penataan Desa	598.288.680	596.700.000	99,73				
	Terlaksananya pelaksanaan Penataan Desa							
	Persentase tercapainya pelaksanaan penataan desa				Persen	65	64,75	99,62
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	598.288.680	596.700.000	99,73	Unit	4	4	100
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	0	0	0,00				
	Meningkatnya Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat							
	Persentase Desa Berkembang				Persen	80	0	0
	PROGRAM PEMEBERDAYAAN LEMBAGA MASYARAKAT LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.802.430.560	1.795.749.900	99,63				
	Meningkatnya Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat							
	Persentase 1(satu) BUMDes dalam 1(satu) Desa Yang Aktif				Persen	100	100	100
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Tingkat Daerah	1.802.430.560	1.795.749.900	99,63				
	Terfasilitasinya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat							
	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kotaserta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				Persentase	100	100	100
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK)	353.642.300	353.642.300	100,00	Laporan	2	2	100
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK)	452.129.300	452.128.800	100,00	Laporan	32	32	100
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	191.843.300	191.083.200	99,60	Dokumen	1	1	100

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAAN		TARGET	KINERJA	CAPAAN
	<i>Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga</i>	804.815.660	798.895.600	99,26	Dokumen	2	2	100
	PROGRAM ADMINSTRASI PEMERINTAHAN DESA	3.193.348.932	3.148.768.182	98,60				
	Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik							
	Persentase Penyampaian RKPDes, APBDes, dan Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Bupati				Persen	84,57	84,57	100
	<i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</i>	<i>1.466.111.750</i>	<i>1.444.006.050</i>	<i>98,49</i>				
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa							
	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				Persen	91	100	110
	<i>Fasilitasi Penyelenggaraan Adm. Pemerintahan Desa</i>	42.744.150	42.744.150	100,00	Dokumen	39	39	100
	<i>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</i>	41.298.800	41.298.800	100,00	Dokumen	32	31	96,875
	<i>Pembinaan Peningkatan Kapasita Aparatur Pemerintah Desa</i>	1.032.067.900	1.015.112.200	98,36	Orang	32	32	100
	<i>Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan</i>	350.000.900	344.850.900	98,53	Dokumen	1	1	98,53
	<i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</i>	<i>1.727.237.182</i>	<i>1.704.762.132</i>	<i>98,70</i>				
	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa							
	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa							
	<i>Fasilitasi Penyelenggaraan Adm. Pemerintahan Desa</i>	42.744.150	42.744.150	100,00	Dokumen	1	1	100
	<i>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</i>	41.298.800	41.298.800	100,00	Dokumen	30	30	100
	<i>Pembinaan Peningkatan Kapasita Aparatur Pemerintah Desa</i>	1.032.067.900	1.015.112.200	98,36	Orang	120	120	100
	<i>Fasilitasi Evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan</i>	350.000.900	344.850.900	98,53	Dokumen	1	1	100
	<i>Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja S</i>	261.125.432	260.756.082	99,86	Dokumen	32	32	100
	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	1.567.418.000	1.565.191.400	99,86				
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kawasan Transmigrasi							
	Persentase Ketersediaan Perencanaan di Daerah Kawasan Transmigrasi (persen)				Persen	100,00	100,00	100

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1.567.418.000	1.565.191.400	99,86				
	Tersedianya lahan pada kawasan transmigrasi yang layak huni, layak usaha dan berkelanjutan				Ha	300	250	83,33
	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang disusun				Dokumen	2	2	83,33
	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	40.216.000	40.189.400	99,93	Kawasan	1	1	100
	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	27.202.000	27.202.000	100,00	Hektar	300	250	83,33
	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1.500.000.000	1.497.800.000	99,85	Dokumen	3	3	150
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	350.000.000	350.000.000	100,00				
	Meningkatnya Pembangunan Kawasan Transmigrasi							
	Persentase warga transmigrasi yang mandiri (%)				Persen	80	80	99,61
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	350.000.000	350.000.000	100,00				
	Terwujudnya Persebaran Penduduk antar wilayah kabupaten/kota dalam satu Provinsi				Persen	100	100	100
	Jumlah Peserta Pelatihan				Orang	50	50	100
	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	200.000.000	200.000.000	100,00	Dokumen	1	1	100
	Penyuluhan Transmigrasi	150.000.000	150.000.000	100,00	KK	100	100	100
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	7.061.901.191	7.013.349.400	99,31		100	66,67	66,67
	Berkembangnya Kawasan Traansmigrasi Mandiri				Satuan	3	2	66,67
	Besaran Pencari Kerja yang ditempatkan				Orang	397,00	274	69,02
	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	7.061.901.191	7.013.349.400	99,31				
	Terwujudnya satuan pemukiman transmigrasi yang mandiri				Persen	100	100	100
	Persentase Pencari Kerja yang terserap				Persen	100	100	66,67
	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	67.478.000	67.332.400	99,78	KK	30	30	100
	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	6.994.423.191	6.946.017.000	99,31	Satuan	3	3	100

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	SS.3.6 TERWUJUDNYA STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH	3.355.270.500	3.350.432.940	99,86	Persen	1,09	1,57	99,04
	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB					0,05	0,04	80
	Inklusi Keuangan					2,13	3,09	98,12
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	383.737.000	383.392.000	99,91				
	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah							
	Persentase kenaikan pendapatan daerah				Persen	37	37	100
	<i>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</i>	383.737.000	383.392.000	99,91				
	Meningkatnya Presentase Pendapatan daerah				Persen	100	99	99
	jumlah dokumen yang dihasilkan				Dokumen	3	3	100
	<i>Perencanaan Pengelblaan Pajak daerah</i>	0	0	0				
	<i>Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Daerah</i>	0	0	0				
	<i>Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah</i>	0	0	0				
	<i>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelblaan Pajak Daerah</i>	383.737.000	383.392.000	99,91	Unit	1	1	100
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-	0				
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah							
	Penetapan APBD/APBDP Tepat Waktu				Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
	<i>Koordinasi dan penyusunan Rencana Anggaran</i>	-	-	0				
	Tersusunnya rencana anggaran tepat waktu							
	Persentase pelaksanaan koordinasi dan rencana anggaran daerah				Persen	100	100	100
	<i>Rekonsiliasi dan verifikasi Aset, Kewajiban, ekuitas, pendapatan belanja pembiayaan, pendapatan LO dan Beban</i>	-	-	0	Dokumen	2	2	100
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	0	0	0				
	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam							
	Persentase permohonan izin usaha simpan pinjam yang diproses sesuai standar waktu dan prosedur (%)					100	0	0

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	299.200.000	299.200.000	100				
	Meningkatnya Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi							
	Persentase Koperasi Aktif yang dibina				Persen	40,18	40	99,55
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah	299.200.000	299.200.000	100				
	Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah							
	Jumlah Pemeriksaan Koperasi				Unit	65	30	46
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	299.200.000	299.200.000	100	Unit	30	30	100
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	88.890.000	88.890.000	100				
	Meningkatnya Koperasi Sehat							
	Persentase koperasi sehat (%)				Persen	20	18	90,00
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah	88.890.000	88.890.000	100				
	Terlaksana Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah							
	Jumlah KSP/USP Sehat				Unit	45	43	95,56
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	72.990.000	72.990.000	100	Unit	60	58	96,67
	Penilaian Kesehatan Koperasi Melalui Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	15.900.000	15.900.000	100	Unit	60	59	98,33
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	1.914.141.300	1.910.188.200	99,79				
	Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian							
	Persentase Peningkatan Koperasi yang Mengikuti Pelatihan (%)				Persen	84,46	78,29	92,69
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.914.141.300	1.910.188.200	99,79				
	Terseleenggaranya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota							
	Jumlah Koperasi yang Mengikuti Pelatihan				Unit	80	78	97,5
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	1.914.141.300	1.910.188.200	99,79	Orang	100	100	100
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	344.971.000	344.971.000	100				

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	Meningkatnya Volume Usaha Koperasi							
	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (%)				Persen	2,18	1,9	87,16
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	344.971.000	344.971.000	100				
	Terlaksana Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota							
	Jumlah data koperasi yang terinput dalam sistem ODS				-	-	-	-
	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	10.892.800	10.892.800	100	Unit	20	20	100
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	165.069.200	165.069.200	100	Unit	20	20	100
		169.009.000	169.009.000	100	Unit	297	297	100
	PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI	0	0	0				
	Meningkatnya Pertumbuhan usaha mikro yang menjadi wirausaha							
	Persentase koperasi yang memperoleh status badan hukum dan aktif secara operasional (%)				Persen	65	0	0
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	324.331.200	323.791.740	99,83				
	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)							
	Persentase Peningkatan UMKM				Persen	79,39	78,57	98,97
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan	324.331.200	323.791.740	99,83				
	Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan							
	Jumlah UMKM yang di bina				Unit	287	276	96,17
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	111.828.400	111.288.940	99,52	Unit	100	100	100
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	212.502.800	212.502.800	100	Persen	100	100	100
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	0	0	0				
	Meningkatnya Pertumbuhan usaha mikro yang menjadi wirausaha							
	Pertumbuhan usaha mikro yang menjadi wirausaha					0,5	0	0

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	SS.3.7 MENINGKATNYA REALISASI INVESTASI DAERAH							
	Persentase Realisasi Investasi terhadap PDRB	269.795.810	251.242.010	93,12	Persen	23,14	22,92	99,04
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	15.136.750	15.136.750	100				
	Meningkatnya Iklim yang mendukung Penanaman Modal							
	Jumlah Perbup yang mendukung iklim investasi				Perbup	5	3	60
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	15.136.750	15.136.750	100		7 Potensi	7 Potensi	100
	Terdatanya Potensi Investasi Daerah							
	Persentase Pembuatan Peta Potensi Investasi				Persen	100	100	100
	<i>Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)</i>	15.136.750	15.136.750	100	Kecamatan	13	13	100
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	86.917.060	68.432.660	78,73				
	Meningkatnya Promosi Penanaman Modal							
	Jumlah nilai investasi PMA/PMDN				Milyar	249,43		0,00
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	86.917.060	68.432.660	78,73				
	Berjalannya Kegiatan Promosi Potensi Investasi Daerah				Persen	100	100	100
	Persentase Promosi Penanaman Modal				Persen	100	100	100
	<i>Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</i>	86.917.060	68.432.660	78,73	Dokumen	2	2	100
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	0	0	0				
	Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal							
	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan				Persen	100	0	0
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	84.942.400	84.933.400	99,99				
	Peningkatan Realisasi Investasi							
	Persentase pengawasan investasi				Persen	100	100	100

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	84.942.400	84.933.400	99,99				
	Berjalannya Pengawasan Investasi							
	Persentase pelaksanaan pengendalian penanaman modal				Persen	100	100	100
	Pengawasan Penanaman Modal (Pelaku Usaha)	84.942.400	84.933.400	99,99	Kegiatan Usaha	17	17	100
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	82.799.600	82.739.200	99,93				
	Meningkatnya Pengelolaan data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal							
	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Yang Terintegrasi				Persen	100	100	100
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	82.799.600	82.739.200	99,92705279		4 Triwulan	4 Triwulan	100,00
	Berjalannya Kegiatan Klinik LKPM							
	Jumlah data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan Perizinan Berusaha Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Dibah, Ditai dan Dimanfaatkan				Dokumen	4	4	100
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	82.799.600	82.739.200	99,93	Dokumen	5	5	100
	SS.4 MENINGKATNYA TATA KELOLA BIROKRASI YANG PROFESIONAL	316.706.011.562	156.423.525.501	49,39	Indeks	65,65	64,15	97,63
	Indeks Reformasi Birokrasi				Indeks	68,95	68,5	98,41
	Indeks RB General				Indeks	62,35	59,8	95,91
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	243.923.147.376	87.336.839.269	35,81				
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah							
	Meningkatnya tata Kelola Perbendaharaan							
	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan yang dialokasikan melalui TKD				Opni BPK	WTP	WTP	100
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik				Persen	37,50	51,2	136,53
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar				Persen	47,50	78,13	164
	Persentase Penurunan SILPA				Persen	8,50	5,06	60
	Persentase Keuangan tepat waktu				Tepat Waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	100

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	8.555.680.750	6.662.932.250	77,88				
	Meningkatnya tata kelola anggaran							
	Persentase pelaksanaan koordinasi dan rencana anggaran daerah				Persen	100	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	288.427.100	284.187.100	98,53	Dokumen	2	2	100
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	277.627.100	277.627.100	100,00	Dokumen	2	2	100
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	202.279.500	149.950.000	74,13	Dokumen	72	72	100
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	103.943.700	103.901.500	99,96	Dokumen	72	72	100
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	129.285.900	129.040.000	99,81	Dokumen	72	72	100
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	138.265.500	138.264.000	100,00	Dokumen	72	72	100
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	1.860.076.500	1.379.886.500	74,18	Dokumen	2	2	100
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	922.782.200	681.338.600	73,84	Dokumen	2	2	100
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2.434.390.000	1.869.737.000	76,81	Dokumen	2	2	100
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	291.413.050	237.731.450	81,58	Dokumen	1	1	100
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	729.834.200	494.495.300	67,75	Dokumen	1	1	100
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	124.192.000	123.815.000	99,70	Dokumen	1	1	100
	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1.053.164.000	792.958.700	75,29	Orang	72	72	100
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	2.859.985.350	2.661.845.397	93,07				
	Meningkatnya tata kelola perbendaharaan							
	Persentase koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah				Persen	100	100	100
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	583.244.200	582.425.055	99,86	Dokumen	1	1	100
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	193.843.500	193.843.500	100,00	Dokumen	360	360	100
	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana	946.434.400	912.770.902	96,44	Dokumen	1	1	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan	236.381.200	208.487.520	88,20	Laporan	1	1	100

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemantauan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi	143.478.000	120.470.000	83,96	Dokumen	1	1	100
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	267.487.000	174.983.200	65,42	Dokumen	12	12	100
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	172.883.000	172.400.000	99,72	Dokumen	1	1	100
	Meningkatnya tata kelola akuntansi pelaporan	316.234.050	296.465.220	93,75	Orang	72	72	100
	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	4.010.785.100	3.867.304.850	96,42				
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				Persen	100	100	100
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LQ dan Beban	361.002.000	360.764.000	99,93	Laporan	1	1	100
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	546.574.800	545.050.000	99,72	Dokumen	72	72	100
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	360.524.100	360.415.600	99,97	Laporan	1	1	100
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	432.566.000	397.360.000	91,86	Laporan	1	1	100
	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	672.850.500	671.500.000	99,80	Dokumen	2	2	100
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	202.368.000	198.879.400	98,28	Dokumen	1	1	100
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kot	786.548.000	686.522.850	87,28	Dokumen	1	1	100
	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	464.279.200	462.780.000	99,68	Lembaga	1	1	100
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	184.072.500	184.033.000	99,98	Laporan	1	1	100
	Meningkatnya Penunjang Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	228.496.696.176	74.144.756.772	32,45				
	Presentase Penunangan Kewenang Pengelolaan Daerah				Persen	100	100	100
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	208.496.696.176,00	69.823.702.300	33,49	Laporan	1	1	100
	Pelaksanaan Dana Darurat dan Mendesak	20.000.000.000,00	4.321.054.472	21,61	Laporan	1	1	100
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	4.184.820.400	3.763.378.040	89,93				
	Meningkatnya pengelolaan barang milik daerah							

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	Persentase aset pemda yang terinventarisir				Persen	90	92	102,22
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.184.820.400	3.763.378.040	89,93				
	Meningkatnya pengelolaan barang milik daerah							
	Persentase aset pemda terinventarisir %							
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	449.362.600	438.202.600	97,52	Laporan	1	1	100
	Pengamanan Barang Milik Daerah	609.710.200	586.605.360	96,21	Laporan	1	1	100
	Penilaian Barang Milik Daerah	337.805.700	335.701.260	99,38	Laporan	1	1	100
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	555.008.000	552.716.120	99,59	Laporan	1	1	100
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penjualan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1.391.492.000	1.008.887.500	72,50	Laporan	1	1	100
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	386.905.100	386.904.900	100,00	Laporan	72	72	100
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	227.065.500	227.065.500	100,00	Laporan	1	1	100
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	227.471.300	227.294.800	99,92	Orang	72	72	100
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.052.378.200	2.048.260.200	99,80				
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan							
	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK				Persen	100	82,09	82,09
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.591.193.900	1.587.568.900	99,77				
	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal				Persen	100	82,09	82,09
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	147.088.600	147.088.600	100	Laporan	5	5	100
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	313.201.700	313.201.700	100	Laporan	9	9	100
	Reviu Laporan Kinerja	194.213.100	194.213.100	100	Laporan	10	10	100
	Reviu Laporan Keuangan	473.605.100	469.980.100	99,23	Laporan	12	11	92
	Pengawasan Desa	184.734.400	184.734.400	100	Laporan	26	26	100
	Kerjasama Pengawasan Internal	45.429.400	45.429.400	100	Kesepakatan	3	3	100
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	232.921.600	232.921.600	100	Dokumen Hasil	3	3	100

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	461.184.300	460.691.300	99,89				
	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan				Persen			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan							
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	102.209.100	101.716.100	99,52	Laporan Peneyelesaian	35	30	85,71
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	358.975.200	358.975.200	100,00	Laporan	1	30	3000
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	858.214.000	854.255.895	99,54				
	Meningkatnya Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi							
	Tingkat leveling kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)				Level	3	3	100
	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah ditetapkan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Menuju Predikat WBK/WBBM				Persen	38,89%	0	0
	Perumusan Kebijakan Teknis Dibidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	85.453.600	85.370.095	99,9022803				
	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis Dibidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan							
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan				Rekomendasi kebijakan	2	2	100
	Perumusan Kebijakan Teknis Dibidang Fasilitas Pengawasan	85.453.600	85.370.095	99,90	Rekomendasi kebijakan	2	2	100
	Pendampingan dan Asistensi	772.760.400	768.885.800	99,50				
	Persentase Hasil Pendampingan dan Asistensi				Persen			
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	247.708.200	244.713.600	98,79	Perangkat Daerah	46	46	100
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	104.160.600	104.160.600	100,00	Perangkat Daerah	46	46	100
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	420.891.600	420.011.600	99,79	Kegiatan	6	6	100
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	9.382.712.500	9.381.264.500	99,98				
	Meningkatnya eDukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD							
	Persentase peningkatan dukungan pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD				Persen	75	75	100
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	636.814.800	636.814.800	100				
	Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD							
	Jumlah Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				Kegiatan	10	10	100

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	<i>Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah</i>	186.814.800	186.814.800	100	Dokumen	5	5	100
	<i>Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik</i>	450.000.000	450.000.000	100	Dokumen	3	3	100
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	272.406.100	272.406.100	100				
	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran							
	Jumlah kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran				Kegiatan	2	2	100
	<i>Pembahasan KUA dan PPAS</i>	11.238.700	11.238.700	100	Dokumen	2	2	100
	<i>Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS</i>	11.238.700	11.238.700	100	Dokumen	2	2	100
	<i>Pembahasan APBD</i>	119.387.000	119.387.000	100	Dokumen	1	1	100
	<i>Pembahasan APBD Perubahan</i>	74.432.200	74.432.200	100	Dokumen	1	1	100
	<i>Pembahasan Laporan Semester</i>	56.109.500	56.109.500	100	Dokumen	2	2	100
	Peningkatan Kapasitas DPRD	1.485.252.800	1.485.252.800	100				
	Terlaksananya Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD							
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD				Kegiatan	15	15	100
	<i>Pendalaman Tugas DPRD</i>	498.298.000	498.298.000	100	Dokumen	3	3	100
	<i>Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi</i>	420.000.000	420.000.000	100	Orang/bulan	10	10	100
	<i>Penyusunan Program Kerja DPRD</i>	16.954.800	16.954.800	100	Dokumen	1	1	100
	<i>Publikasi dan Dokumentasi DPRD</i>	550.000.000	550.000.000	100	Dokumen	20	20	100
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.257.977.800	2.256.529.800	99,94				
	Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat							
	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				Persen	100	100	100
	<i>Kunjungan Kerja dalam Daerah</i>	146.575.000	146.575.000	100	Laporan	60	60	100
	<i>Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD</i>	9.954.800	9.954.800	100	Dokumen	1	1	100
	<i>Pelaksanaan Reses</i>	2.101.448.000	2.100.000.000	99,93	Dokumen	60	60	100
	Pembahasan Kerja Sama Daerah	5.677.400	5.677.400	100				
	Terlaksananya Pembahasan Kerja Sama Daerah							

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp)	CAPAAN		TARGET	KINERJA	CAPAAN
	Jumlah Dokumen Kerja Sama yang dihasilkan				Dokumen	6	6	100
	<i>Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi</i>	5.677.400	5.677.400	100	Dokumen	2	2	100
	Fasilitasi Tugas DPRD	4.724.583.600	4.724.583.600	100				
	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Terkait Tugas dan Fungsi DPRD							
	Jumlah Fasilitasi yang dilakukan yang terkait dengan tugas dan Fungsi DPRD				Kegiatan	10	10	100
	<i>Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD</i>	4.486.593.000	4.486.593.000	100	Dokumen	11	11	100
	<i>Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah</i>	17.032.200	17.032.200	100	Dokumen	4	4	100
	<i>Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD</i>	154.126.400	154.126.400	100	Dokumen	1	1	100
	<i>Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus</i>	66.832.000	66.832.000	100	Dokumen	1	1	100
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.519.274.708	4.519.178.608	100,00				
	Meningkatnya perekonomian dan pembangunan							
	Persentase penyerapan anggaran pembangunan dan realisasinya				Persen	95,5	33,33	34,90
	Pelaksanaan Administarsi Pembangunan	200.327.100	200.231.000	99,95				
	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan							
	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				Dokumen	5	5	100
	<i>Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan</i>	12.229.100	12.152.000	99,37	Dokumen	30	30	100
	<i>Pengendalian Evaluasi Pembangunan</i>	78.748.000	78.729.000	99,98	Laporan	30	30	100
	<i>Pengelolaan Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan</i>	109.350.000	109.350.000	100	Laporan	30	30	100
	Pelaksanaan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	319.326.400	319.326.400	100				
	Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam							
	Persentase tindak lanjut atas rekomendasi pemantauan (%)				Persen	90	90	100
	<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan</i>	194.362.600	194.362.600	100	Dokumen	30	25	83,33
	<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup</i>	66.871.700	66.871.700	100	Dokumen	30	25	83,33
	<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air</i>	58.092.100	58.092.100	100	Dokumen	30	10	33,33
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	946.983.308	946.983.308	100				

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa							
	Persentase terseleenggaranya pengelolaan barang dan jasa				Persen	100	100	100
	<i>Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik</i>	946.983.308	946.983.308	100	Dokumen	30	27	90
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	1.786.116.300	1.786.116.300	100				
	Terlaksananya Kebijakan Perekonomiann							
	Persentase terseleenggaranya pelaksanaan kebijakan bidang perekonor				Persen	100	100	100
	<i>Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD</i>	14.495.600	14.495.600	100	Dokumen	30	33	110
	<i>Pengendalian dan Distribusi Perekonomian</i>	144.933.500	144.933.500	100	Laporan	30	33	110
	<i>Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil</i>	40.839.200	40.839.200	100	Dokumen	30	33	110
	Pelaksanaan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	319.326.400	319.326.400	100				
	Meningkatnya koordinasi antar-OPD dalam pengelolaan SDA							
	Persentase penyampaian laporan tepat waktu.				Persen	90	99	110
	<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan</i>	194.362.600	194.362.600	100	Dokumen	30	30	100
	<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup</i>	66.871.700	66.871.700	100	Dokumen	30	30	100
	<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air</i>	58.092.100	58.092.100	100	Dokumen	30	30	100
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa							
	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan pengadaan							
	Persentase proses pengadaan yang selesai sesuai jadwal.				Persentase	90	90	100
	<i>Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik</i>	947.195.200	947.195.200	100	Dokumen	30	25	83,33
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	31.313.133.250	28.638.714.916	91,46				
	Meningkatnya pperumusan kebijakan pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat							
	Jumlah Sarana dan Prasarana Keagamaan Yang Dibangun/Rehabilitasi Nilai EKPPD				Baik	64	68	106,25
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	23.369.963.200	20.711.116.065	88,62				
	Meningkatkan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat							

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				Persen	100	100	100
	<i>Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual</i>	1.371.459.200	1.100.897.200	80,27	Dokumen	30	28	93,33
	<i>Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial</i>	21.948.454.000	19.560.168.865	89,12	Dokumen	30	26	86,67
	<i>Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat</i>	50.050.000	50.050.000	100	Dokumen	30	25	83,33
	<i>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</i>	755.842.550	755.842.550	100				
	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai Regulasi							
	Persentase terselenggaranya koordinasi bidang hukum				Persen	85	83,75	99
	<i>Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah</i>	148.300.000	148.300.000		Dokumen	30	30	100
	<i>Fasilitasi Bantuan Hukum</i>	329.042.550	329.042.550		Kasus	50	50	100
	<i>Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum</i>	278.500.000	278.500.000		Dokumen	30	30	100
	<i>Administrasi Tata Pemerintahan</i>	6.986.970.100	6.971.398.901	99,78				
	Terlaksananya Administrasi Pemerintahan							
	Persentase Administrasi Tata Pemerintahan				Persen	100	100	100
	<i>Penataan Administrasi Pemerintahan</i>	3.812.146.600	3.797.796.501	99,62	Dokumen	30	30	100
	<i>Pengelolaan Administrasi Kewilayahan</i>	1.608.207.300	1.607.907.300	99,98	Dokumen	30	30	100
	<i>Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah</i>	1.375.986.700	1.375.245.100	99,95	Dokumen	30	30	100
	<i>Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</i>	190.629.500	190.450.000	99,91	Perangkat Daerah	49	49	100
	<i>Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</i>	0	0	0	Perangkat Daerah			
	<i>Fasilitasi Kerjasama Daerah</i>	200.357.400	200.357.400	100				
	Nilai kontribusi kerja sama terhadap pembangunan daerah							
	Persentase terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama antar Daerah				Persen	100	100	100
	<i>Fasilitasi kerjasama dalam negeri</i>	79.134.400	79.134.400	100	Dokumen	30	30	100
	<i>Fasilitasi kerjasam luar daerah</i>	54.448.600	54.448.600	100	Dokumen	30	30	100
	<i>Evaluasi pelaksanaan kerjasama</i>	66.774.400	66.774.400	100	Laporan	50	50	100

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	0				
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							
	Persentase pelimpahan wewenang administrasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh camat					100	100	100
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.199.626.127	2.199.626.127	100				
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							
	Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				Persen	100	100	100
	Pemberdayaan Kelurahan	2.199.626.127	2.199.626.127	100				
	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							
	Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan				Persen	100	100	100
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.196.417.687,09	2.196.417.687,09	100	Unit	1	1	100
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.208.440	3.208.440	100	Pokmas/Ormas	2	2	100
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.750.793.780	2.519.407.300	91,59				
	Meningkatnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah							
	Persentase sinergitas perencanaan				Persen	98,35	98,4	100,05
	Persentase tingkat partisipatif perencanaan				Persen	24,45	23,95	97,96
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.971.271.380	1.863.323.300	94,52				
	Tersusunnya dokumen perencanaan daerah							
	Persentase konsistensi pelaksanaan pembangunan				Persen	100	100	100
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	256.439.980	227.098.000	88,56	Berita Acara	2	2	100
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	116.213.300	116.090.000	99,89	Berita Acara	48	48	100
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	673.071.700	628.784.100	93,42	Berita Acara	1	1	100
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	269.225.600	269.130.000	99,96	Usulan	510	683	134
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	656.320.800	622.221.200	94,80	Dokumen	3	3	100

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	98.107.600	98.004.000	99,89				
	Meningkatnya kualitas dan pemanfaatan data serta informasi pembangunan daerah yang terintegrasi, akurat, dan berbasis analisis							
	Jumlah dokumen yang dihasilkan bidang perencanaan pembangunan daerah dan analisis				Dokumen	3	3	100
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	98.107.600	98.004.000	99,89	Buku	1	1	100
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	681.414.800	558.080.000	81,90				
	Meningkatnya efektivitas pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah yang tepat waktu, akurat, dan							
	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah				Dokumen	2	2	100
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	291.512.400	223.000.000	76,50	Laporan	1	1	100
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	389.902.400	335.080.000	85,94	Laporan	1	1	100
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.209.315.100	4.968.952.000	95,39				
	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah							
	Persentase Keterukuran Indikator Perencanaan				Persen	100	100	100
	Persentase konsistensi Pelaksanaan Pembangunan				Persen	100	100	100
	Ineks Pembangunan Statistik				Indeks	2,60	2,51	96,54
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.100.226.100	998.158.000	90,72				
	Meningkatnya efektivitas koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang terintegrasi dan selaras dengan							
	Jumlah laporan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang dilaksanakan				Laporan	4	5	125
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPIPD, RPIMD dan	1.100.226.100	998.158.000	90,72	Dokumen	1	2	200
	Koordinasi Perencanaan Bidang (SDA) Sumber Daya Alam	738.721.700	667.524.000	90,36				
	Meningkatnya efektivitas koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam yang terintegrasi							
	Jumlah laporan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam yang dilaksanakan				Laporan	1	1	100
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	738.721.700	667.524.000	90,36	Laporan	1	1	100

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	3.370.367.300	3.303.270.000	98,01				
	Meningkatnya efektivitas koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan selaras dengan Persentase keterpaduan program dan kegiatan bidang infrastruktur dan kewilayahan dalam dokumen perencanaan daerah				Persen	75	70	93
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPIPD, RPIMD dan RKPD)	1.281.209.800	1.252.245.000	97,74	Dokumen	1	1	100
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	90.435.800	90.430.000	99,99	Laporan	1	1	100
		1.998.721.700	1.960.595.000	98,09	Laporan	1	1	100
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	620.052.700	552.882.000	89,17				
	Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral							
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah				Persen	100	100	100
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah				Persen	100	100	100
	Indeks Inovasi Daerah				Indeks	81,32	47,6	59
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	620.052.700	552.882.000	89,17				
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral daerah yang terstandar, terintegrasi, dan dimanfaatkan dalam perencanaan							
	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan statistik sektoral sesuai standar Satu Data Indonesia				Persen	75	72,91	97
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	184.466.400	136.414.000	73,95	Dokumen	1	1	100
	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	126.090.900	125.890.000	99,84	Persen	100	100	100
	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	309.495.400	290.578.000	93,89	Persen	100	100	100
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.739.822.200	1.697.544.000	97,57				
	Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Daerah							
	Persentase implementasi rencana kelitbangan				Persen	85	89	105
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	445.087.500	433.590.000	97,42				
	Meningkatnya kualitas penelitian, pengembangan, dan pengkajian kebijakan serta peraturan daerah dalam mendukung							

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan kebijakan daerah yang disusun dan dimanfaatkan				Laporan	1	1	100
	<i>Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi</i>	316.281.400	314.210.000	99,35	Laporan	1	1	100
	<i>Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan</i>	128.806.100	119.380.000	92,68	Laporan	1	1	100
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1.294.734.700	1.263.954.000	97,62				
	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan inovasi serta teknologi dalam mendukung kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah							
	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan				Persen	73	92,91	127,43
	<i>Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi</i>	1.042.477.400	1.011.987.000	97,08	Dokumen	1	1	100
	<i>Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan</i>	252.257.300	251.967.000	99,88	Laporan	1	1	100
	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH							
	Rasio perangkat daerah yang menghasilkan inovasi daerah layak (rasio)					21	22,91	109,10
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian							
	Indeks Merit sistem (angka)					135	120	88,89
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.764.838.205	2.763.027.830	99,93				
	Meningkatnya Kesesuaian Penempatan Kepegawaian Daerah							
	Persentase Penempatan Pegawai Sesuai Kompetensi				Persen	78,65	85,56	108,79
	Persentase layanan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi (%)				Persen	91,58	100	109,19
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	2.611.951.405	2.610.540.930	99,95				
	Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN							
	Persentase Pelaksanaan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				Persen	100	100	100
	<i>Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN</i>	1.767.872.720	1.766.642.669	99,93	Dokumen	1	1	100
	<i>Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK</i>	782.861.585	782.788.161	99,99	Dokumen	2	2	100
	<i>Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian</i>	38.037.800	38.010.800	99,93	Dokumen	1	1	100
	<i>Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	22.540.700	22.461.300	99,65	Dokumen	1	1	100
	<i>Pengelolaan Data Kepegawaian</i>	638.600	638.000	99,91	Dokumen	1	1	100

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	Mutasi dan Promosi ASN	98.480.400	98.162.200	99,68				
	Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN							
	Persentase Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN				Peren	100	100	100
	Pengelolaan Mutasi ASN	61.784.700	61.698.000	99,86	Dokumen	2	2	100
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	36.695.700	36.464.200	99,37	Dokumen	1	1	100
	Pengembangan Kompetensi Teknis	-	-	0,00				
	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis							
	Jumlah laporan yang dihasilkan				Laporan	1	1	100
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN							
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	54.406.400	54.324.700	99,85				
	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur							
	Persentase Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				Persen	100	100	100
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	1.719.500	1.719.000	99,97	Orang	50	30	60
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	668.300	667.000	99,81	Dokumen	1	1	100
	Pembinaan Disiplin ASN	50.083.200	50.082.000	100,00	Orang	1	4	400
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1.935.400	1.856.700	95,93	Laporan	5	5	100
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	18.000.000	10.520.000	58,44				
	Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Manusia							
	Persentase Penempatan Pegawai Sesuai Kompetensi				Persen	78,65	79	100
	Pengembangan Kompetensi Teknis	18.000.000	10.520.000	58,44				
	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis							
	Jumlah laporan yang dihasilkan				Laporan	1	1	100
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	18.000.000	10.520.000	58,44	Orang	219	200	91,32
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.465.497.600	2.465.425.600	100,00				
	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik							

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	Persentase Pengelolaan Layanan Pengaduan Berbasis Online Yang didistribusikan ke OPD				Persen	75,65	75,65	100
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.406.360.800	2.406.360.800	100				
	Meningkatnya Penyebaran Informasi Publik							
	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas Pemerintah Daerah				Laporan	12	12	100
	Relasi Media	2.370.000.000	2.370.000.000	100	Laporan	34	34	100
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	9.870.000	9.870.000	100	Laporan	4	4	100
	Penyusunan Konten	26.490.800	26.490.800	100	Laporan	4	4	100
	Meningkatnya Implementasi Keterbukaan Informasi Publik	59.136.800	59.064.800	99,88				
	Persentase Meningkatnya Ketersediaan/Monitoring Informasi Publik Yang Mutakhir Oleh PPID							
	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	6.212.000	6.212.000	100	Laporan	1	1	100
	Pelayanan Informasi Publik	12.836.000	12.836.000	100	Laporan	1	1	100
	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	15.412.000	15.412.000	100	Laporan	1	1	100
	Diseminasi Informasi	11.884.800	11.884.800	100	Laporan	1	1	100
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	12.792.000	12.720.000	99,44	Laporan	1	1	100
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.877.666.100	1.877.666.100	100				
	Meningkatnya Pengelolaan Aplikasi Informatika							
	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi				Persen	96,5	96,5	100
	Persentase perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo				Persen	91,5	91,5	100
	Pengelolaan E-Government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.877.666.100	1.877.666.100	100				
	Meningkatnya Penyelenggaraan E-Government Lingkup Pemerintah Daerah							
	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	15.086.000	15.086.000	100	Laporan	1	1	100
	Koordinasi penyusunan proses bisnis	4.597.600	4.597.600	100	Laporan	1	1	100
	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	19.984.000	19.984.000	100	Laporan	1	1	100

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	12.772.000	12.772.000	100	Laporan	1	1	100
	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	5.640.000	5.640.000	100	Laporan	1	1	100
	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	9.992.000	9.992.000	100	Laporan	1	1	100
	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	37.850.200	37.850.200	100	Laporan	1	1	100
	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	1.771.744.300	1.771.744.300	100	Laporan	1	1	100
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP							
	Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip (%)					100	0	0
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	725.769.200	725.633.000	99,98				
	Nilai Tingkat Kegemaran Masyarakat %							
	Pertumbuhan Pengunjung Perpustakaan Daerah				Persen	65,67	68,23	103,90
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	678.315.200	678.179.000	99,98				
	Meningkatnya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
	Persentase Pengelolaan Perpustakaan Daerah				Persen	100	100	100
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.730.300	22.729.000	99,99	Perpustakaan	210	210	100
	Meningkatnya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	56.496.300	56.496.000	100,00	Layanan	14	14	100
	Persentase Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	599.088.600	598.954.000	99,98	Perpustakaan	1	1	100
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	47.454.000	47.454.000	100				
	Meningkatnya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							
	Persentase peningkatan pembudaya gemar membaca				Eksemplar	1000		
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	47.454.000	47.454.000	100,00	Lokus	1	1	100
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	100.950.116	100.950.116	100				
	Meningkatnya Pengelolaan Arsip							
	Persentase Penyelamatan Arsip Yang Telah Direservasi				Persen	33,05	35	106

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	100.950.116	100.950.116	100				
	Meningkatnya Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota							
	Persentase pengelolaan arsip dinamis daerah				Persen	100	100	100
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	26.518.300	26.518.300	100	Persen	100	100	100
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	74.431.816	74.431.816	100	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%
	SS. 5.1 TERWUJUDNYA RESILENSI TERHADAP BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM	37.908.397.458	36.586.718.668	96,51	Indeks	86,39	45,20	45,19
	Presentase Penurunan Emisi GRK					32,88	0	0
	Indeks Resiko Bencana (IRB)					156,16	172,77	90,39
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	36.033.920.318	34.731.759.918	96,39				
	Meningkatnya Penanggulangan Bencana							
	Jumlah Desa Tangguh Bencana				Persen	100,00	99,02	99,02
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	16.082.000	16.040.000	99,74				
	Tersedianya Dokumen Dan Kegiatan Sosialisasi Kajian Resiko Bencana							
	Persentase Informasi Penanggulangan Bencana				Persen	100	100	100
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	16.082.000	16.040.000		Dokumen	1	1	100
	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	30.307.880.318	29.059.718.168	95,88				
	Tersedianya Dokumen Dalam Rangka Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana							
	Persentase Pencegahan dan Kesiap-siagaan Bencana				Persen	100	100	100
	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	30.307.880.318	29.059.718.168		Kawasan	10	10	100
	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	184.380.000	184.375.000	100,00				
	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana							
	Persentase terlaksananya penyelamatan dan evakuasi korban bencana				Persen	100	100	100
	Pencarian, Pertolongan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	167.775.000	167.775.000		Orang	400	400	100

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	11.605.000	11.600.000		Orang	400	400	100
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	5.000.000	5.000.000		Laporan	1	1	100
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	5.525.578.000	5.471.626.750	99,02				
	Tersedianya Dokumen Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana							
	Persentase penataan sistem dasar penanggulangan bencana di kabupaten				Persen	100	98,02	98,02
	Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten / Kota	5.525.578.000	5.471.626.750		Kegiatan	1	1	100
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	694.731.450	679.192.450	97,76				
	Meningkatnya Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran							
	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran				Persen	100	95,75	95,75
	Waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran				Persen	72,50	80	110,34
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Tercapainya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam	317.860.600	306.675.600	96,48				
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	11.250.000	10.275.000	91,33	Dokumen	1	1	100
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	11.250.000	10.575.000	94	Laporan	1	1	100
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	14.875.000	5.400.000	36,30	Dokumen	1	1	100
	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	47.454.000	47.454.000	100	Dokumen	1	1	100
	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	118.635.000	118.635.000	100	Dokumen	1	1	100
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	48.968.300	48.968.300	100	Orang	10	10	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	16.460.000	16.400.000	99,64	Unit	12	12	100
	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	48.968.300	48.968.300	100	Keluarga	50	50	100
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	74.617.500	74.617.500	100				

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	Tercapainya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran							
	Jumlah dokumen yang dihasilkan				Dokumen	2	2	100
	<i>Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran</i>	15.300.000	15.300.000	100	Dokumen	1	1	100
	<i>Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran</i>	59.317.500	59.317.500	100	Dokumen	1	1	100
	Investigasi Kejadian Kebakaran	10.710.000	7.875.000	73,53				
	Tercapainya Investigasi Kejadian Kebakaran							
	Persentase Investigasi Kejadian Kebakaran yang terlaksana				Persen	100	100	100
	<i>Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan penguji</i>	10.710.000	7.875.000	73,53	Dokumen	1	1	100
	<i>penyelesaian kejadian kebakaran</i>							
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	166.989.300	166.989.300	100				
	Tercapainya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran							
	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran yang terlaksana				Persen	100	100	100
	<i>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan</i>	21.354.300	21.354.300	100	Orang	15	15	100
	<i>Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi</i>							
	<i>Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran</i>	27.000.000	27.000.000	100	Des/Kel	13	13	100
	<i>Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam</i>	118.635.000	118.635.000	100	Dokumen	1	1	100
	<i>Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana</i>							
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	124.554.050	123.035.050	98,78				
	Tercapainya Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia							
	Persentase Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Sasaran Kondisi Membahayakan Manusia yang terlaksana				Persen	100	100	100
	<i>Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada</i>	22.200.000	20.681.000		Laporan	1	1	100
	<i>Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam</i>							
	<i>Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan</i>	53.385.750	53.385.750		Dokumen	1	1	100
	<i>Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan</i>							
	<i>Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap</i>	48.968.300	48.968.300		Laporan	1	1	100
	<i>Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi</i>							
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (Bidang Linmas)	1.179.745.690	1.175.766.300	99,66				
	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum							
	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan				Persen	100	100	100

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Bidang Linmas)	51.454.900	51.442.200	99,98				
	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							
	Persentase Anggota yang mengikuti Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	22.238.900	22.235.000	99,98	Persen	100	100	100
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	738.800	730.000	98,81	Dokumen	1	1	100
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat. Termasuk dalam Pelaksanaan	27.738.400	27.738.400	100,00	Dokumen	13	13	100
	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	738.800	738.800	100,00	Orang	14	14	100
					Dokumen	20	20	100
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Bidang Trantibum)	591.792.340	591.278.600	99,91				
	Meningkatnya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban				Persen	100	100	100
	Persentase Anggota yang mengikuti Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik	15.258.000	15.253.000	99,97	Dokumen	20	20	100
	Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlumas melalui Pelatihan Teknis Satuan PP dan Satlumas	41.899.950	41.760.000	99,67	Dokumen	1	1	100
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban	328.345.100	328.320.600	99,99	Laporan	9	9	100
	Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	620.000	600.000	96,77	Laporan	12	12	100
	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	205.669.290	205.345.000	99,84	Laporan	2	2	100
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	534.282.350	533.045.500	99,77				
	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							
	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati				Persen	100	100	100
	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	738.700	738.000	99,91	Laporan	1	1	100
	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	738.700	738.700	100,00	Dokumen	3	3	100
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah/Ruang Pemeriksaan, Gehr	250.590.700	249.362.000	99,51	Unit	1	1	100

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM		TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
			APBD PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	262.868.150	262.861.800	100,00	Laporan	1	1	100
		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	738.700	738.000	99,91	Laporan	1	1	100
		Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	18.607.400	18.607.000	100,00	Laporan	13	12	92,31
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	2.216.100	-	0				
		Meningkatnya Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS							
		Persentase Pembinaan PPNS				Persen	100	0	0
		Pembentukan Sekretariat PPNS	738.700	0	0	Laporan	0	0	0
		Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	738.700	0	0	Laporan	0	0	0
		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	738.700	0	0	Laporan	3	0	0
		5.2 TERWUJUDNYA LINGKUNGAN HIDUP BERKUALITAS							
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	15.818.651.158	15.253.254.400	96,43	Persen	62,72	63,09	100,59
		Indeks Kualitas Air				Persen	57,69	55	95,34
		Indeks Kualitas Udara				Persen	94,79		
		Indeks Tutupa Lahan				Persen	95,00	85,00	89,47
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	27.460.700	27.460.700	100				
		Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)				Persen	100	100	100
		Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan serta pengelolaan LH (PPLH)				Persen	100	100	100
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah	27.460.700	27.460.700	100				
		Memastikan kepatuhan pelaku usaha Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh				Dokumen	2	2	100
		Persentase pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan				Persen	100	100	100
		Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh	27.460.700	27.460.700	100	Laporan	5	5	100
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	10.368.700	10.368.000	99,99				

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	Meningkatnya Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPL							
	Persentase Kelompok MHA yang terakui				Persen	100	100	100
	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	10.368.700	10.368.000	99,99				
	Jumlah Kelompok MHA yang diakui				Kelompok	1	1	100
	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau	10.368.700	10.368.000	99,99	Dokumen	2	2	100
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	10.702.400	10.702.000	100,00				
	Meningkatnya Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat							
	Persentase ASN bersertifikat AMDAL yang profesional				Persen	100	100	100
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah	10.702.400	10.702.000	100,00				
	Terjaminnya perlindungan hukum, pelestarian fungsi lingkungan dan pengakuan hak hak tradisional MHA				Dokumen	1	1	100
	Jumlah ASN yang mengikuti Sertifikasi Penilaian AMDAL				ASN	7	5	71,43
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	10.702.400	10.702.000	100,00	ASN	5	5	100
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	0	0	0				
	Meluasnya Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat							
	Persentase kelompok masyarakat yang mendapat penghargaan LH				Persen	35	0	0
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	25.929.800	25.929.400	100,00				
	Persentase aduan LH yang diselesaikan				Persen	100	100	100
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	25.929.800	25.929.400	100,00	Persen	100	100	100
	Persentase aduan LH yang diselesaikan				Persen	100	100	100
	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	7.137.400	7.137.000	99,99	Pengaduan	5	5	100
	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	8.742.400	8.742.400	100	Pengaduan	2	2	100
	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	10.050.000	10.050.000	100	Perkara	5	4	80

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	13.206.700	13.206.000	99,99				
	Meningkatnya perencanaan lingkungan hidup							
	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan yang berkualitas				Persen	100	100	100
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	13.206.700	13.206.000	99,99	Persen	100	100	100
	Terlaksananya perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota				Persen	100	100	100
	Persentase Dokumen RPPLH yang ditetapkan				Persen	100	100	100
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	13.206.700	13.206.000	99,99	Dokumen	1	1	100
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	888.467.400	888.092.200	99,96				
	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup							
	Indeks Kualitas Air				Persen	57,69	55	100
	Indeks Kualitas Udara				Persen	91,76		
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	822.886.500	822.885.800	100,00	Kegiatan	5	5	100
	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				Persen	100	98	98
	Jumlah Kegiatan Pencegahan Pencemaran				Kegiatan	2	2	100
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media	708.070.700	708.070.700	100	Dokumen	30	29	97
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	8.138.700	8.138.000	99,99	Dokumen	1	1	100
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	106.677.100	106.677.100	100	Dokumen	10	10	100
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	29.799.800	29.425.400	98,74				
	Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				Persen	100	100	100
	Persentase Penanggulangan Pencemaran/Kerusakan lingkungan				Persen	92	100	100
	Pemberian Informasi/Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	6.292.400	6.291.000	99,98	Laporan	5	5	100
	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	8.877.400	8.877.400	100,00	Lokasi	3	3	100

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	14.630.000	14.257.000	97,45	Titik	4	4	100
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	35.781.100	35.781.000	100,00				
	Terlaksananya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				Kegiatan	10	10	100
	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				Persen	85	85	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	35.781.100	35.781.000	99,99972052	Dokumen	2	2	100
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (Kehati)	9.448.233.858	8.901.503.400	94,21				
	Tersedianya pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)				Kegiatan	2	2	100
	Indeks Tutupan Lahan				Persen	95	85	100
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	9.448.233.858	8.901.503.400	94,21				
	Peningkatan efektivitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				Kegiatan	2	2	100
	Jumlah Lokasi Taman Hayati				Lokasi	2	2	100
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	31.922.700	31.918.000	99,99	Dokumen	1	1	100
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	9.406.453.758	8.859.728.000	94,19	Lokasi	10	10	100
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	9.857.400	9.857.400	100	Orang	2	2	100
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	18.689.100	14.933.400	79,90				
	Tersedianya usaha yang memilah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)				Kegiatan	5	5	100
	Persentase Usaha yang memilah B3 & Limbah B3				Persen	65	65	100
	Penyimpanan sementara Limbah B3	18.689.100	14.933.400	79,90				
	Mencegah lepasnya limbah ke lingkungan yang mengurangi kesehatan manusia dan memastikan pengelolaan yang aman sebelum				Kegiatan	2	1	100
	Persentase sarana penyimpanan sementara limbah B3				Persen	100	100	100
	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelaporan Perizinan	11.665.400	8.721.700	74,77	Dokumen	5	3	60
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	7.023.700	6.211.700	88,44	Dokumen	5	4	80

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	788.900.500	776.820.800	98,47				
	Meningkatnya pengelolaan persampahan							
	Indeks kinerja pengelolaan sampah				Persen	1,5	1,4	93,33
	Pengelolaan Sampah	753.355.700	743.096.000	98,64				
	Melindungi kesehatan lingkungan dan keaneka ragaman hayati, menjaga kesehatan masyarakat, mendorong ekonomi sirkular dan				Kegiatan	5	5	100
	Jumlah Timbunan sampah yang terkelola							
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	30.395.900	22.834.900		Kelompok	5	3	60
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	4.948.700	4.948.700		Dokumen	4	4	100
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	200.000.000	200.000.000		Unit	10	10	100
	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	5.687.400	3.898.700		Dokumen	2	1	50
	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	512.323.700	511.413.700		Ton	19300	19270	100
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	17.772.400	16.862.400	94,88				
	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi lingkungan, memastikan efektivitas pengurangan sampah, serta menertibkan				Kegiatan	2	2	100
	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan dan pengawasan pihak swasta				Peren	100	100	100
	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	9.448.700	8.538.700		Unit	2	2	100
	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	8.323.700	8.323.700		Laporan	3	3	100
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	0	0	0				
	Meningkatnya Pengembangan Sistem dan pengelolaan persampahan regional							
	Persentase peningkatan sampah yng dikelola di TPA/TPST regional				Persen	85,5	0	0
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4.586.692.000	4.584.238.500	99,95				
	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah							
	Penduduk Berakses Sanitasi Yang Layak				KK	9813	9800	99,87

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.586.692.000	4.584.238.500	99,95				
	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				Persen	100	100	100
	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				Persen	100	100	100
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	4.186.692.000	4.186.692.000	100,00	M/Hari	10	9	90
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	400.000.000	397.546.500	99,39	Dokumen	1	1	100

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	SS.6.1 TERWUJUDNYA KETAHANAN BUDAYA DAERAH	6.971.076.522	6.960.837.322	99,85	Persen	51,69	50,50	97,72
	Indeks Pembangunan Kebudayaan				Persen	53,37	52	97,43
	Indeks Ketahanan Budaya Daerah				Persen	50	49	98
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	4.381.917.400	4.381.917.400	100				
	Meningkatnya Cakupan Pengembangan Kebudayaan							
	Persentase budaya lokal daerah yang dikembangkan				Persen	65	65	100
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.381.917.400	4.381.917.400	100	Laporan	2	2	100
	Meningkatnya Objek Pemajuan Tradisi Budaya							
	Jumlah laporan pelestarian kesenian tradisional kabupaten				Laporan	2	2	100
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	4.381.917.400	4.381.917.400	100	Objek	1	2	100
	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	0	0	0				
	Meningkatnya Kesenian Tradisional							
	Persentase lembaga adat daerah yang dibina				Persen	100	0	0
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	0	0	0				
	Meningkatnya Pembinaan Sejarah							
	Persentase peningkatan kegiatan pelestarian dan diseminasi sejarah lokal yang diakses atau diikuti oleh masyarakat				Persen	5,70	0	0
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	0	0	0				
	Meningkatnya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya							
	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan				Persen	68,15	0	0
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS	777.701.500	768.701.500	98,84				
	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial							
	Persentase konflik sosial yang diselesaikan				Persen	100	98,8	98,8

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
		APBD PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	777.701.500	768.701.500	98,84				
	Terlaksanannya kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kewaspadaan konflik sosial				Persen	100	99	99
	Jumlah dokumen yang dihasilkan				Dokumen	8	7	87,5
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	601.521.500	597.021.500	99,25	Dokumen	2	2	100
		5.400.000	5.400.000	100,00	Orang	50	49	98
		170.780.000	166.280.000	97,37	Laporan	10	10	100
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	0	0	0				
	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial							
	Persentase konflik sosial yang diselesaikan					100		
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	961.083.700	960.054.000	99,89				
	Menguatnya Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan							
	Persentase Penduduk/Etnis/Suku/Agama/Ormas Yang Memahami Nilai-Nilai Kehidupan Politik dan Berbangsa				Persen	79,55	80	100
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan	961.083.700	960.054.000	99,89				
	Terlaksanannya Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi pancasila dan Karakter							
	Jumlah dokumen yang dihasilkan				Dokumen	7	6	85,71
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	22.684.000	22.684.000	100	Dokumen	25	20	80
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	27.630.000	27.630.000	100	Orang	100	75	75
	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakan dan Purnapaskibraka	910.769.700	909.740.000	99,89	Dokumen	1	1	100
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	193.502.000	193.292.500	99,89				
	Meningkatnya Cakupan Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya							
	Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan kabupaten				Persen	100	99,8	99,8
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	193.502.000	193.292.500	99,89				

NO	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM		TAHUN ANGGARAN 2025			Satuan	REALISASI KINERJA		
			APBD PERUBAHAN (RP)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN		TARGET	KINERJA	CAPAIAN
		Terlaksananya Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan jumlah dokumen yang dihasilkan				Dokumen	3	3	100
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	142.952.000	142.742.500	99,85	Laporan	3	3	100
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan	50.550.000	50.550.000	100	Laporn	10	10	100
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	0	0	0				
		Meningkatnya Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan							
		Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif				Persen	25		
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	656.871.922	656.871.922	100				
		Meningkatnya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik							
		Persentase Penanganan Potensi Konflik Tidak menjadi Konflik				Persen	100	100	100
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan	656.871.922	656.871.922	100				
		Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Politik, Peningkatan Demokrasi							
		Jumlah dokumen yang dihasilkan				Dokumen	3	3	100
		Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan	5.358.000	5.358.000	100	Orang	100	97	97
		Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan	595.025.922	595.025.922	100	Orang	20	18	90
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi	56.488.000	56.488.000	100	Laporan	10	9	90